PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BIAK NUMFOR

TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 2024

BUPATI BIAK NUMFOR

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan pasal 263 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun yang disusun dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor wajib menyusun RKPD Tahun 2025 yang digunakan sebagai pedoman untuk evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Biak Numfor tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang.....

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

22. Peraturan Presiden.....

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

24. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);

25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

29. Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekinis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/ 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 197);

32. Peraturan Menteri.....

32. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
33. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 302);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 Nomor 6);
36. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 Nomor 45).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Biak Numfor.
3. Bupati adalah Bupati Biak Numfor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Biak Numfor, yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Biak Numfor.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.

6. Rencana Pembangunan.....

6. Rencana Pembangunan Daerah, selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten periode 3 Tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah, selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan Pemerintah Nasional periode 1 (satu) Tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) Tahun.
9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batasan maksimal Anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran OPD.

BAB II

KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1). RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD/RPD.

(2). RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
   a. evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah;
   b. rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
   c. prioritas pembangunan daerah; dan
   d. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

(3). RKPD Kabupaten Biak Numfor berpedoman pada RKPD Provinsi Papua, RKP dan Program Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

(4). Evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat hasil kinerja pembangunan daerah dalam satu (1) Tahun Anggaran.

(5). Rancagan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pemerintah daerah.

(6). Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar dan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.

(7). Rencana Kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, memuat kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3.....

Pasal 3

(1). Rancangan akhir RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025.

(2). Rancangan Perkada tentang RKPD Kabupaten Biak Numfor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur Papua untuk difasilitasi.

(3). Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara lengkap dengan melampirkan dokumen terdiri atas :

a. surat permohonan fasilitasi dari Bupati kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi Papua;
b. rancangan akhir RKPD;
c. berita acara kesepakatan musyawarah perencanaan dan pembangunan RKPD;
d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
e. gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPD dan RKPD;
f. hasil reviu aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah; dan
g. daftar isian fasilitasi RKPD Tahun 2025.

Pasal 4

(1). Penjabaran dari RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja dan program yang dituangkan dalam RKPD.

(2). Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , RKPD memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh Renja OPD yang berpedoman pada Renstra OPD dan RPD.

(3). Penyusunan Nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RKPD 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

(4). Penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan target kinerja Pemerintah Daerah dan target kinerja OPD sebagaimana tercantum pada RPD dan Renstra OPD.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 5

(1). Ruang lingkup RKPD dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I Pendahuluan
b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

c. BAB III.....

c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
g. BAB VII Penutup

(2). Penjabaran program RPJMD/RPD ke dalam RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan Format Daftar Isian Fasilitasi RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 6

(1). Penetapan RKPD dimaksudkan sebagai pedoman untuk penyusunan:

a. RKPD, KUA dan PPAS serta APBD Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2025; dan

(2). Penyusunan RKPD Kabupaten Biak Numfor sebagai penjabaran dari RPD 2024-2026, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

a. persiapan penyusunan RKPD, KUA dan PPAS serta APBD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025;

b. penyusunan rancangan awal RKPD, KUA dan PPAS serta APBD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025;

c. penyusunan rancangan RKPD, KUA dan PPAS serta APBD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025;

d. pelaksanaan musyawarah RKPD;

e. perumusan rancangan akhir RKPD, KUA dan PPAS serta APBD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025; dan

f. penetapan RKPD, KUA dan PPAS serta APBD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025.

(3). Penyusunan RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

(4). Penyusunan RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan kewenangan dan hasil inventarisasi personil, pendanaan sarana dan prasarana serta dokumen.

(5). Penyusunan RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pencapaian Nasional dan arah kebijakan Pemerintah.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 7

Penetapan RKPD bertujuan untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Biak Numfor

BAB IV

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak
pada tanggal, 18 Juli 2024

Pj. BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
SOFIA BONSAPIA

Diundangkan di Biak
Pada tanggal, 18 Juli 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
ZACHARIAS LEORNALD MAILOA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2024 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DJAMIATI, SH
NIP. 19720106 200502 2 005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia-Nya Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dapat merampungkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 ini. Sebagaimana peraturan yang berlaku, dokumen RKPD Tahun 2025 ini tetap memedomani Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 Tahun 2023 tentang RPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024- 2026, dokumen RKP, program-program prioritas dan strategis nasional serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Dokumen RKPD Tahun 2025 merupakan tahun kedua RPD Tahun 2024-2026 yang penyusunannya didasari oleh isu-isu strategis yang mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat. Dengan telah selesainya penyusunan RKPD Tahun 2025 ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, baik unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor, dan para pemangku kepentingan lainnya yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen RKPD ini.

Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa dapat memberikan kekuatan bagi kita semua dalam membangun Kabupaten Biak Numfor demi mewujudkan tema pembangunan Biak Numfor tahun 2025 yaitu **"Memperkuat Daya Saing Daerah Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Demi Terwujudnya Biak Numfor yang Mandiri dan Sejahtera"**.

Biak, 18 Juli 2024

Pj. BUPATI BIAK NUMFOR

SOFIA BONSAPIA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 5
1.3 Hubungan Antar Dokumen 9
1.4 Maksud dan Tujuan 10
1.5 Sitematika Penulisan 11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **13**
2.1 Kondisi Umum Daerah 13
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 121
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 162
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH **177**
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 177
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 196
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNGAN DAERAH **210**
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 211
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 216
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAN **231**
5.1 Rencan Kerja Perangkat Daerah 231
5.2 Penganggaran Dana Otonomi Khusus 233
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH **236**
BAB VII PENUTUP **255**

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Distrik di Kabupaten Biak Numfor 15
Tabel 2. 2 Sumber Air di Kab. Biak Numfor 20
Tabel 2. 3 Luas Kedalaman Tanah di Kab. Biak Numfor 26
Tabel 2. 4 Karakteristik Skala Intensitas Mercalli (MMI) 29
Tabel 2. 5 Potensi Bahaya di Kab. Biak Numfor 31
Tabel 2. 6 Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh Perkotaan di Kab. Biak Numfor 34
Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023 35
Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin menurut Distrik di Kab. Biak Numfor Tahun 2023 37
Tabel 2. 9 Sistem Satuan Pengembangan Wilayah 44
Tabel 2. 10 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2019-2023 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kab. Biak Numfor 49
Tabel 2. 11 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2019-2023 Atas Dasar Harga Berlaku di Kab. Biak Numfor 50
Tabel 2. 12 Perkembangan kontribusi sektor dalam PDRB Tahun 2019-2023 atas dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kab. Biak Numfor 51
Tabel 2. 13 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2019-2023 atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) di Kab. Biak Numfor 52
Tabel 2. 14 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 ... 55
Tabel 2. 15 PDRB atas Harga Konstant 2010 menurut Kabupaten Biak Numfor (Juta Rupiah) 56
Tabel 2. 16 Pengeluaran Perkapita Penduduk Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 57
Tabel 2. 17 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT) Kab. Biak Numfor 65
Tabel 2. 18 Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita Kab. Biak Numfor .. 66

Tabel 2. 19 Rasio Penduduk yang mendapatkan Air Bersih yang disalurkan oleh PT. WAR Bersendi Tahun 2019-2023 68
Tabel 2. 20 Rasio Penduduk yang mendaptkan Akses Listrik oleh PT. PLN di Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 68
Tabel 2. 21 Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan di Kab. Biak Numfor (km) Tahun 2019-2023 70
Tabel 2. 22 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkandan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 73
Tabel 2. 23 Angka Partisipasi Kasar (APK) per Jenjang Pendidikan di Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 75
Tabel 2. 24 Angka Partisipasi Murni (APM) per Jenjang Pendidikan di Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 76
Tabel 2. 25 Jumlah dan Rasio Guru dan Murid per Jenjang Pendidikan Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 77
Tabel 2. 26 Jumlah Siswa/ Murid Putus Sekolah Tahun 2021-2023 78
Tabel 2. 27 Dukungan Pemerintah bagi OAP dalam Bidang Pendidikan Kab. Biak Numfor 79
Tabel 2. 28 Angka Kejadian Malaria Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 81
Tabel 2. 29 Prevalensi HIV Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 83
Tabel 2. 30 Jumlah Prasarana Kesehatan (unit) di Kabupaten Biak Numfor 83
Tabel 2. 31 Capaian Pelayanan SPAM Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 87
Tabel 2. 32 Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 90
Tabel 2. 33 Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab. Biak Numfor Tahun 2020-2023 91
Tabel 2. 34 Capaian SPM Bidang TRANTIBUMLINMAS Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 94
Tabel 2. 35 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 98
Tabel 2. 36 Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 102

Tabel 2. 37 Capaian Indikator Bidang Urusan Perhubungan Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 107
Tabel 2. 38 Indikator Capaian Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kab. Biak Numfor Tahun 2020-2022 110
Tabel 2. 39 Capaian Indikator Urusan Statistik 111
Tabel 2. 40 Capaian Indikator Urusan Kebudayaan Kab. Biak Numfor Tahun 2020-2022 112
Tabel 2. 41 Angka Konsumsi Ikan Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 117
Tabel 2. 42 PAD Sektor Pariwisata Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 118
Tabel 2. 43 Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Biak Numfor 122
Tabel 2. 44 Identifikasi dan Pemetaan Masalah 164
Tabel 3. 1 Proyeksi Ekonomi Global 179
Tabel 3. 2 Realisasi Investasi 181
Tabel 3. 3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 184
Tabel 3. 4 PDRB Atas Dasar Harga Konstant 2010 menurut Pengeluaran Kab. Biak Numfor 185
Tabel 3. 5 Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut Pengeluaran Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 185
Tabel 3. 6 Perkembangan PRDB Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 186
Tabel 3. 7 Garis Kemiskinan Kab. Biak Numfor per Maret 2021-Maret 2023 (Rp/ Kapita/ Bulan) 192
Tabel 3. 8 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kab. Biak Numfor (Maret 2021-Maret 2023) 193
Tabel 3. 9 Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Kab. Biak Numfor Tahun 2022- 2026 199
Tabel 3. 10 Realisasi dan Proyeksi/ Target Belanja Daerah Kab. Biak Numfor Tahun 2022-2026 203
Tabel 3. 11 Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiyaan Daerah Kab. Biak Numfor Tahun 2022-2026 206
Tabel 3. 12 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2025 207

Tabel 3. 13 Kerangka Pengalokasian Sumber Dana OTSUS Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 208
Tabel 4. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2025 214
Tabel 4. 2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kab. Biak Numfor Tahun 2025 220
Tabel 4. 3 Keterkaiatan Tema dan Prioritan Pembangunan Nasional, Provinsi Papua, dan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 222
Tabel 4. 4 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 224
Tabel 5. 1 Rekapitulasi Anggaran Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kab. Biak Numfor Tahun 2025 231
Tabel 5. 2 Alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Kab. Biak Numfor Tahun 2025 234
Tabel 6. 1 Indikator Makro Pembangunan/ Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 236
Tabel 6. 2 Penetapan Indikator Kinerja Kunci 237
Tabel 6. 3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kab. Biak Numfor 238

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Alur Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/ Kota 4
Gambar 1. 2 Hubungan RKPD Kab. Biak Numfor dengan Dokumen Lainnya....10
Gambar 1. 3 Peta Administrasi Kab. Biak Numfor 14
Gambar 2. 1 Peta Morfologi Wilayah Kab. Biak Numfor 17
Gambar 2. 2 Peta Kelerengan Wilayah Kabupaten Biak Numfor 18
Gambar 2. 3 Peta Kontur Pulau Biak dan Sekitarnya 18
Gambar 2. 4 Peta Klimatologi Kabupaten Biak Numfor dan Sekitarnya 19
Gambar 2. 5 Peta Wilayah Air 20
Gambar 2. 6 Peta Hidrologi Kab. Biak Numfor 21
Gambar 2. 7 Peta Geologi Pulau Biak dan Sekitarnya 25
Gambar 2. 8 Peta Jenis Tanah di Kab. Biak Numfor.....27
Gambar 2. 9 Peta Zona Gempa Kab. Biak Numfor dan Sekitarnya.....29
Gambar 2. 10 Indeks Risiko Bencana Kabupaten/ Kota Provinsi Papua dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2023 32
Gambar 2. 11 Peta Sumber Daya Mineral 33
Gambar 2. 12 Jumlah OAP dan Non OAP Kab. Biak Numfor Tahun 2020-2023 36
Gambar 2. 13 Peta Pembagian SSWP.....44
Gambar 2. 14 Peta Struktur Ruang Wilayah Kab. Biak Numfor.....47
Gambar 2. 15 Tingkat Inflasi Provinsi Papua April 2023-April 2024.....53
Gambar 2. 16 Andil Inflasi Kelompok Pengeluaran (y-on-y) 53
Gambar 2. 17 Indeks Perkembangan Harga pada Kab. Biak Numfor 54
Gambar 2. 18 Komoditas Penyumbang Utama Perkembangan Harga 54
Gambar 2. 19 Rasio Gini Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 58
Gambar 2. 20 Persentase Penduduk Miskin Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023.....59
Gambar 2. 21 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023.....59
Gambar 2. 22 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023.....60
Gambar 2. 23 IPM Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023.....61
Gambar 2. 24 Usia Harapan Hidup Tahun 2019-2023 Kab. Biak Numfor.....62
Gambar 2. 25 Angka Melek Huruf Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023.....63

Gambar 2. 26 Rata-Rata Lama Sekolah Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023...63
Gambar 2. 27 Harapan Lama Sekolah Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 64
Gambar 2. 28 Kontribusi Net Ekspor (Ekspor-Impor) terhadap PDB Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 berdasarkan ADHB dan ADHK (persen).....67
Gambar 2. 29 Indeks Kemahalan Konstruksi Kab. Biak Numfor Tahun 2021-2023.....69
Gambar 2. 30 Rekapitulasi Kedatangan dan Keberangkatan Kapal di Pelabuhan Biak Tahun 2023 71
Gambar 2. 31 Lama Proses Pengurusan Perizinan Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023.....72
Gambar 2. 32 Data Jumlah Investor Berskala Nasional Kab. Biak Numfor Tahun 2021-2023.....73
Gambar 2. 33 Perbandingan APK dan APM per Jenjang Pendidikan di Kab.Biak Numfor Tahun 2019-2023 77
Gambar 2. 34 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup tahun 2019-2023 di Kab. Biak Numfor 80
Gambar 2. 35 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 81
Gambar 2. 36 Prevalensi Stunting Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 82
Gambar 2. 37 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023.....84
Gambar 2. 38 Cakupan Puskesmas/ Distrik Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 84
Gambar 2. 39 Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu)/ Kampung di Kab. Biak Numfor 85
Gambar 2. 40 Rasio Dokter/ Satuan Penduduk Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023.....85
Gambar 2. 41 Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023.....86
Gambar 2. 42 Capaian Pengelolaan SPALD-S Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023.....88
Gambar 2. 43 Rasio Jumlah Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 89

Gambar 2. 44 Jumlah IMB yang berkau Tahun 2019-2023 di Kab. Biak Numfor 89
Gambar 2. 45 Cakupan Rumah Layak Huni Terbangun Tahun 2019-2023 Kab. Biak Numfor 92
Gambar 2. 46 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 93
Gambar 2. 47 Indikator Pelayanan PPKS Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 . 95
Gambar 2. 48 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lansia Terlantar di Luar Panti skala Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 96
Gambar 2. 49 Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan di Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2022 97
Gambar 2. 50 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 100
Gambar 2. 51 Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang Selesai Tepat Waktu Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 100
Gambar 2. 52 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 101
Gambar 2. 53 Rasio Penduduk Ber-KTP, Rasio Bayi Berkate Kelahiran, dan Rasio Pasangan Berakte Nikah Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 103
Gambar 2. 54 Kampung yang memiliki BUMDes/ BUMkam Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 105
Gambar 2. 55 Total Fertility Rate (TFR) Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 .. 106
Gambar 2. 56 Cakupan Layanan Telekomunikasi Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 107
Gambar 2. 57 Jumlah Koperasi Aktif Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 108
Gambar 2. 58 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 109
Gambar 2. 59 Data Jumlah Investor Berskala Nasional Kab. Biak Numfor Tahun 2021-2023 109
Gambar 2. 60 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 115

Gambar 2. 61 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 115
Gambar 2. 62 Rata-Rata Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 116
Gambar 2. 63 Total Kunjungan Wisatawan Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2022 117
Gambar 2. 64 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 119
Gambar 2. 65 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 119
Gambar 2. 66 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kab. Biak Numfor Tahun 2020-2023 120
Gambar 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II 180
Gambar 3. 2 Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran Triwulan II Tahun 2023 181
Gambar 3. 3 Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha (y-o-y) 187
Gambar 3. 4 Distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha 188
Gambar 3. 5 Distribusi PDRB menurt Pengeluaran 189
Gambar 3. 6 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran 190
Gambar 3. 7 Persentase Penduduk Miskin Kab. Biak Numfor Tahun 2014-2023 191
Gambar 3. 8 IPM Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 193
Gambar 3. 9 Distribusi Tenaga Kerja di Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 195
Gambar 4. 1 Sasaran Pembangunan Nasional 211

BAB I
PENDAHULUAN

"Menggambarkan Latar Belakang, Dasar Hukum, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penyusunan RKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025."

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Pada masa transisi dalam rangka menerapkan agenda Nasional yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD, dan DPD serta penyelenggaraan Pilkada yang dilaksanakan secara serentak, maka penyusunan dokumen perencanaan secara nasional diatur dengan Permendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonomi Baru. Amanat undang-undang tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Arah pembangunan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, dimana pembangunan daerah di arahkan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian dan keunggulan daerah. Tahun 2025 merupakan tahapan kedua dari proses pelaksanaan RPD dimana ditujukan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kontribusi Kabupaten Biak Numfor terhadap pencapaian pembangunan Nasional. Pada tahapan ini, fokus pembangunan lebih diorientasikan bagaimana mewujudkan Kabupaten Biak Numfor sebagai kota yang mandiri.

RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain dari pada itu, RKPD Tahun 2025 juga merupakan acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025.

Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari tahapan sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dimana RKPD merupakan penjabaran dari dokumen RPD serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat, penyusunan RKPD ini didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Biak Numfor adalah merupakan dokumen operasional dari dokumen RPD yang di jabarkan dalam perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah (PD), yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2025 sesuai dengan arah kebijakan Nasional dalam menentukan anggaran, kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan *money follow function*, tetapi *money follow program prioritas*. Tidak perlu semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata. Anggaran harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Tahap selanjutnya adalah verifikasi dan integrasi program dan kegiatan prioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap Perangkat Daerah, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja Perangkat Daerah terkait.

Tersusunnya RKPD Kabupaten Biak Numfor ini diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pencapaian target-target pembangunan pada Tahun 2025 melalui pendekatan *Common Goals* serta kewilayahan dengan melakukan evaluasi tahun sebelum serta penetapan anggaran untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Proses perumusan RKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana gambar berikut.

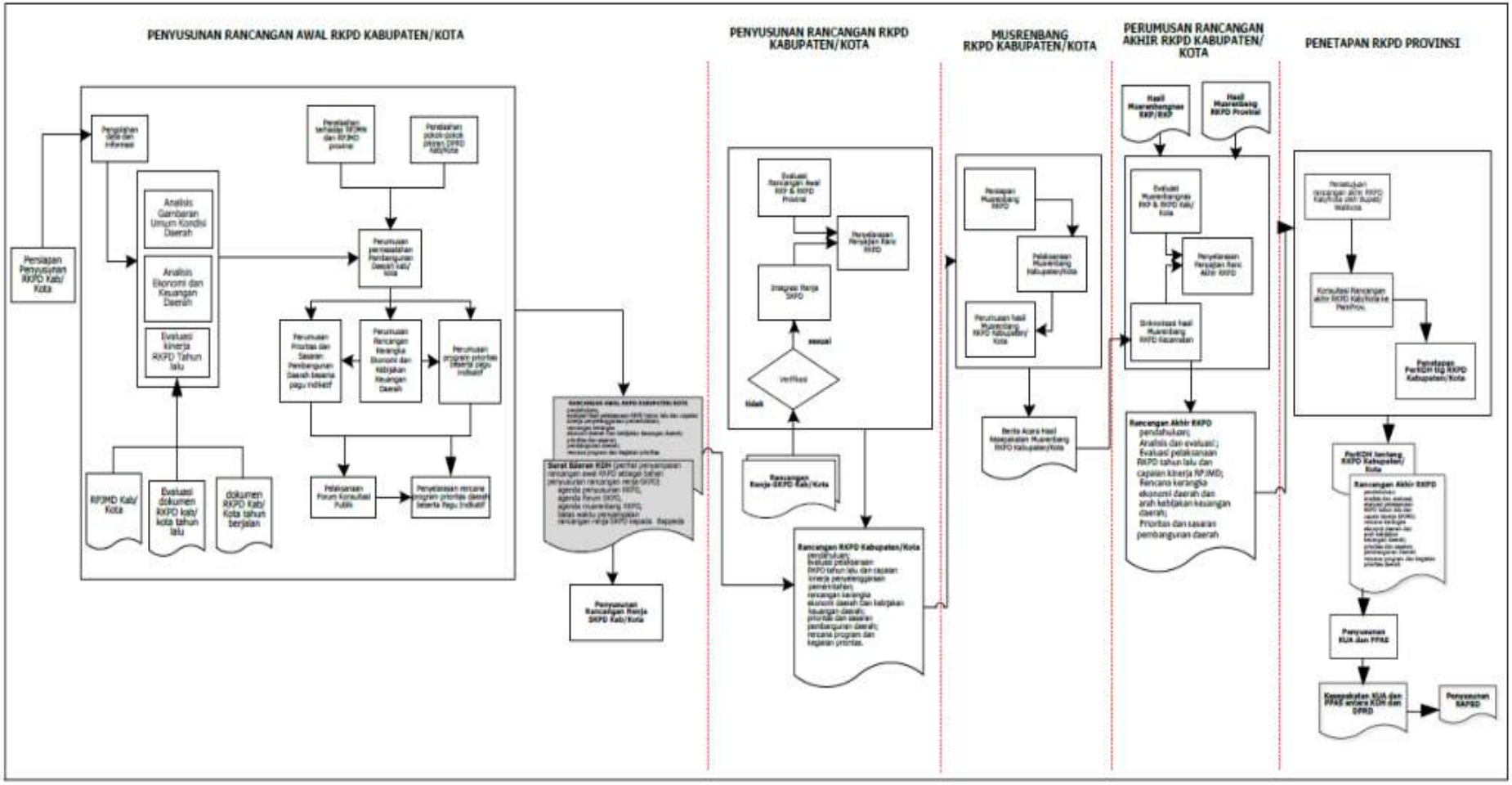

Gambar 1. 1
Bagan Alur Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/ Kota

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6042);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1540);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6730);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6731);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6883);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
22. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekinis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penemrimaan dalam Rangka Otonomi Khusus;
29. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
32. Instruksi Menteri Dalan Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

33. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sebagaimana amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional maka dokumen perencanaan terdiri atas:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) berdimensi panjang 20 tahunan;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berdimensi menengah 5 tahunan;
3. Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga;
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berdimensi pendek 1 tahunan; dan
5. Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga.

Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Biak Numfor meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua;
3. Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua;
4. Rencana Pembangunan Daerah (RPD);
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

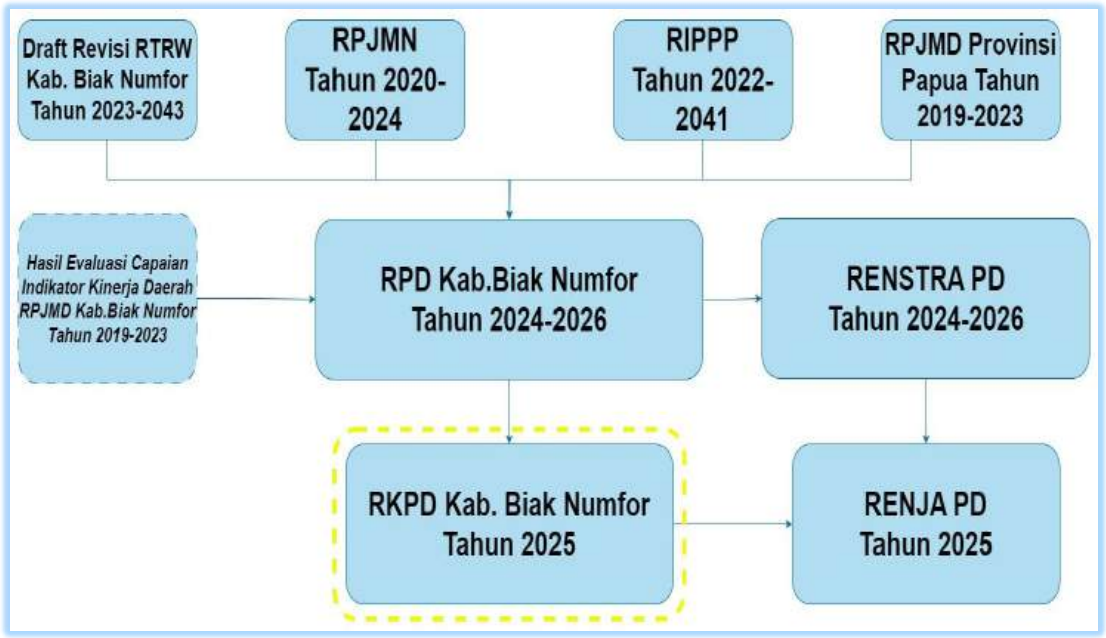

Gambar 1. 2

Hubungan RKPD Kab. Biak Numfor dengan Dokumen Lainnya

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Biak Numfor tahun 2025 adalah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 dan untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2025. Tujuan dari penyusunan RKPD ini adalah:

1) Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025;
2) Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2025;
3) Menjadi landasan untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
4) Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2025.

1.5 Sitematika Penulisan

RKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

   Bab ini menggambarkan Latar Belakang, Dasar Hukum, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penyusunan RKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025;

2. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

   Bab ini berisi gambaran Umum Kondisi Daerah yang mengemukakan tentang Kondisi Umum Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan permasalahan pembangunan daerah;

3. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

   Bab ini membahas Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang mengemukakan tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah;

4. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

   Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan rencana program prioritas pembangunan daerah, terdiri dari program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan prioritas pembangunan lainnya sebagai penjabaran dari RKPD Kabupaten Biak Numfor;

5. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

   Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD;

6. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

   Bab ini memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian

kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir perencanaan;

7. BAB VII Penutup

   Bab ini menjelaskan bagaimana RKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan tematik yang selaras terhadap tema nasional maupun Provinsi Papua yaitu Memperkuat Daya Saing Daerah Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Demi Terwujudnya Biak Numfor Yang Mandiri dan Sejahtera.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

"Berisi Gambaran Umum Kondisi Daerah yang mengemukakan tentang Kondisi Umum Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Permasalahan Pembangunan Daerah."

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

Gambaran umum kondisi daerah memberikan gambaran kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan bagi pembangunan di Kabupaten Biak Numfor. Indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daerah memberikan basis atau pijakan dalam proses perumusan perencanaan pembangunan daerah. Analisis lebih lanjut masing-masing aspek dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi

Analisis aspek geografi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakterisitik lokasi dan wilayah, potensi dan pengembangan wilayah, serta kerentanan wilayah terhadap bencana. Sementara itu, aspek demografi meliputi perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu.

2.1.1.1 Karakteristik dan Kondisi Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Biak Numfor dapat ditinjau dari beberapa aspek yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Biak Numfor terletak di sebelah utara daratan Papua, tepatnya di Teluk Cendrawasih. Secara geografis terletak pada 0° 55’–1° 27’ Lintang Selatan dan 134° 47’–136° Bujur Timur. Kabupaten ini terdiri dari dua pulau besar, yaitu Pulau Biak dan Pulau Numfor, dan memiliki 42 pulau-pulau kecil di Kepulauan Padaido. Batas-batas wilayah Kabupaten Biak Numfor secara administratif adalah:

- *Sebelah Utara : Kabupaten Supiori, Samudera Pasifik*
- *Sebelah Timur : Samudera Pasifik*

- *Sebelah Selatan : Selat Yapen*
- *Sebelah Barat : Kabupaten Manokwari*

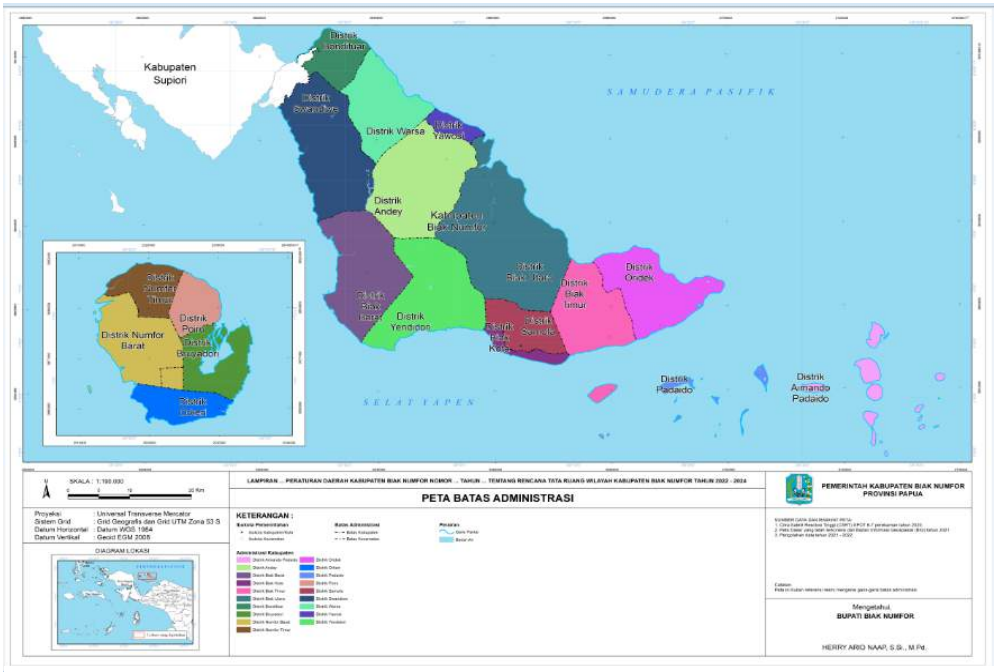

Gambar 1. 3
Peta Administrasi Kab. Biak Numfor
(Sumber: Draft Revisi RTRW Kab. Biak Numfor 2023-2043)

Kabupaten Biak Numfor secara administrasi berada di wilayah administrasi Provinsi Papua dan ber ibu kota di Biak. Luas Kabupaten Biak Numfor menurut hasil perhitungan peta GIS adalah 225,772.35 ha. Peta GIS yang digunakan telah mendapat persetujuan dari BIG, dengan menggunakan batas administrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah.

Sementara jika dilihat berdasarkan luasan, Distrik Biak Utara memiliki wilayah paling luas sekitar 277,77 km^2, sedangkan Distrik Padaido merupakan distrik dengan wilayah paling kecil, yaitu 30,72 km^2. Untuk jarak tempuh, distrik dengan jarak tempuh dari ibu kota kecamatan ke ibu kota kabupaten paling jauh adalah Distrik Swandiwe, yaitu sekitar 80 km, sedangkan jarak yang paling dekat adalah Distrik Samofa dengan jarak sekitar 2 km.

Tabel 2. 1
Luas Distrik di Kabupaten Biak Numfor

No.	Distrik	Luas (Ha)	Ibu Kota	Jumlah Kampung/ Kelurahan
1.	Numfor Barat	10,214.97	Kameri	12
2.	Numfor Timur	5,195.05	Yenburwo	9
3.	Orkeri	6,162.90	Pakreki	9
4.	Poiru	4,519.26	Andei	9
5.	Bruyadori	6,958.58	Duai	10
6.	Padaido	1,473.23	Pai	11
7.	Aimando	4,065.16	Pasi	13
8.	Oridek	16,339.43	Wadibu	14
9.	Biak Timur	15,407.98	Bosnik	26
10.	Biak Kota	2,441.79	Biak	15/7
11.	Samofa	7,809.75	Darfuar	10/7
12.	Yendidori	21,211.30	Yendidori	19
13.	Biak Utara	34,407.88	Korem	16
14.	Yawosi	2,564.16	Wasori	8
15.	Andey	23,409.30	Roidifu	11
16.	Bondifuar	6,812.02	Sansundi	5
17.	Warsa	14,250.29	Ammoy	20
18.	Biak Barat	19,710.81	Yomdori	22
19.	Swandiwe	22,818.49	Wombrisauw	15
Jumlah		***225,772.35***		***254/14***

(Sumber: PP no.43/2021; luas distrik menurut hasil hitungan peta GIS)

B. Letak dan Kondisi Geografis

Letak geografis Kabupaten Biak Numfor berada di sebelah utara daratan Papua, tepatnya pada titik 0o 55’ – 1o 27’ Lintang Selatan dan 134o 47’ – 136o Bujur Timur. Kabupaten ini memiliki dua pulau besar (Pulau Biak dan Pulau Numfor) dan sekitar 42 pulau-pulau kecil. Kabupaten Biak Numfor terdiri atas 19 distrik, tersebar di 3 pulau dan kepulauan, yakni:

1. Pulau Biak: Distrik Biak Kota, Distrik Samofa, Distrik Yendidori, Distrik Biak Barat, Distrik Swandiwe, Distrik Bondifuar, Distrik Warsa, Distrik Andey, Distrik Yawosi, Distrik Biak Utara, Distrik Biak Timur, Distrik Oridek;
2. Pulau Numfor: Distrik Numfor Barat, Distrik Numfor Timur, Distrik Poiru, Distrik Bruyadori, Distrik Orkeri;
3. Kepulauan Padaido: Distrik Aimando, Distrik Padaido.

Terpisahnya distrik dalam 3 pulau/ kepulauan menjadikan jarak fisik antar distrik sangat beragam.

1. Topografi dan Kelerengan

Kabupaten Biak Numfor memiliki keadaan topografis yang sangat bervariasi. Secara morfologi Pulau Biak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) satuan morfologi, yaitu satuan morfologi daerah dataran, daerah bergelombang, satuan morfologi bergelombang rendah sampai dengan sedang, satuan morfologi bergelombang tinggi dan satuan morfologi perbukitan kapur, untuk lebih jelasnya satuan morfologi sebagaimana pada gambar berikut.

Satuan morfologi dataran berkemiringan rata-rata sebanyak 2 persen yang menempati 5 persen dari luas pulau Biak. Kondisi morfologi tersebut banyak berada di tepi pantai, dimana sebagian besarnya merupakan hutan laut di bagian selatan, yaitu di sekitar Biak Kota, Bosnik, Marauw. Daratan yang agak luas, yang lebarnya hanya 40-60 m selain itu juga daerah ini terdapat di sepanjang pantai utara Pulau Biak (Korem dan ke bagian timurnya).

Satuan morfologi bergelombang sedang memiliki kriteria kemiringan antara 3-15 persen. Luas daerah yang memiliki kriteria ini, mencapai 20 persen dari luas Pulau Biak, dimana terbentang di bagian tengah, sebagian kecil berada di Kampung Wardo, Biak Kota, bagian timur pulau biak dan sebagian besar di bagian utara pulau biak. Pada satuan morfologi ini merupakan daerah permukiman dan perkebunan.

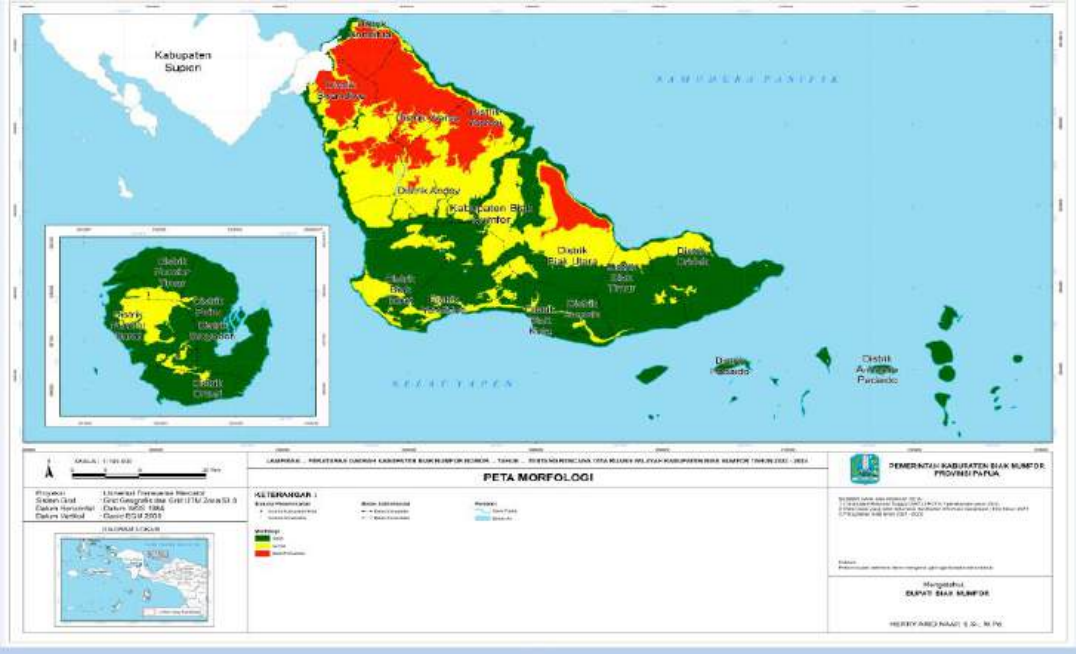

Gambar 2. 1
Peta Morfologi Wilayah Kab. Biak Numfor
(Sumber: Draft Revisi RTRW Kab. Biak Numfor 2023-2043)

Satuan morfologi bergelombang tinggi mempunyai kemiringan antara 16-25 persen. Daerah ini tidak cukup luas, lebih kurang 15 persen dari luas pulau, dimana menempati bagian timur dari Kampung Wardo bagian Utara, Kampung Yenggarbun bagian selatan, Kampung Korem bagian selatan dan bagian tengah dan barat Pulau Numfor. Daerah ini sangat jarang penduduknya dan hanya pada musim hujan saja dimanfaatkan untuk bercocok tanam.

Satuan morfologi perbukitan dapat dibedakan dengan bagian yang berlereng landai dan yang berlereng terjal. Medan bagian yang berlereng landai kemiringannya antara 26-45 persen. Bagian ini ada dibagian tengah, barat laut, bagian timur dan mengelilingi Pulau Biak.

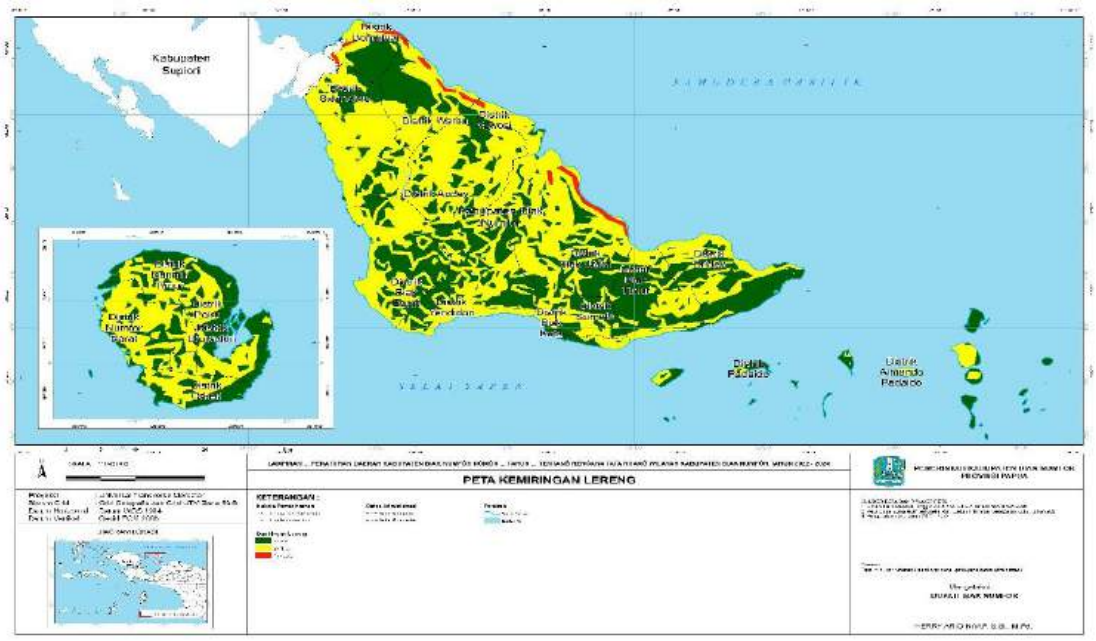

Gambar 2. 2
Peta Kelerengan Wilayah Kabupaten Biak Numfor
(Sumber: Draft Revisi RTRW Kabupaten Biak Numfor 2023-2043)

Gambar 2. 3
Peta Kontur Pulau Biak dan Sekitarnya
(Sumber: Draft Revisi RTRW Kabupaten Biak Numfor 2023-2043)

2. Iklim

Dari hasil pencatatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, suhu udara rata-rata di wilayah Kabupaten Biak Numfor selama tahun 2022 adalah 27,2^{o}C. Suhu minimum rata-rata adalah 21,7^{o} C, sedangkan suhu maksimum rata-rata adalah 33,3^{o} C. Sementara itu, rata-rata kelembaban udara adalah 90%.

Rata-rata curah hujan tahun 2022 tercatat sebesar 239,04 mm dengan curah hujan terbesar terjadi pada bulan Juli (386,5 mm) dan terendah pada bulan November (111.8 mm). Rata-rata jumlah hari hujan dalam satu bulan adalah 23 hari. Rata-rata harian penyinaran matahari setiap bulan pada tahun 2022 adalah 41%.

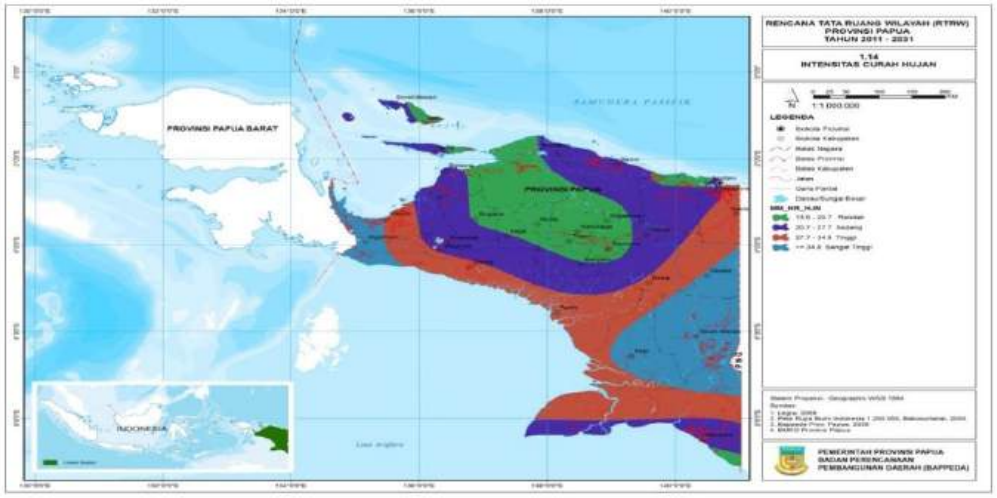

Gambar 2. 4
Peta Klimatologi Kabupaten Biak Numfor dan Sekitarnya
(Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2011-2031)

3. Hidrologi

Kabupaten Biak Numfor tersusun oleh material batu gamping memiliki pola aliran air permukaan trelis (pola aliran yang menyirip seperti daun) dan sub dendritik (pola aliran yang tidak teratur seperti pohon). Alirannya ada yang intermitent dan permanen mengalir sepanjang tahun, namun umumnya aliran sungainya pendek.

Di Pulau Biak aliran permukaan terdapat di bagian Barat Laut. Sedangkan di Pulau Numfor tidak terdapat aliran permukaan yang cukup berarti. Aliran sungai yang terdapat di Pulau Biak di antaranya Sungai Orek, Danosrim, Marah, Wardo, Mardori, Wapurdori (Napi), dan Sungai Busdori. Sungai-sungai ini bermuara di pantai barat. Sedangkan sungai-sungai yang mengalir ke pantai utara adalah Sungai Sorendi, Wandos, Wari, Kiam, dan Sungai Korem. Di Pulau Biak bagian timur dan selatan tidak terdapat aliran sungai yang berarti, namun demikian banyak dijumpai aliran yang masuk ke dalam celah dan rongga batuan yang akhirnya muncul di permukaan pada dataran pantai dan membentuk sederetan mata air. Mata air yang cukup potensial di

antaranya keluar di Teluk Urfu dan dekat Kampung Rim yang berada di Pantai Selatan. Sedangkan di Pantai Utara keluar di Teluk Korem bagian timur.

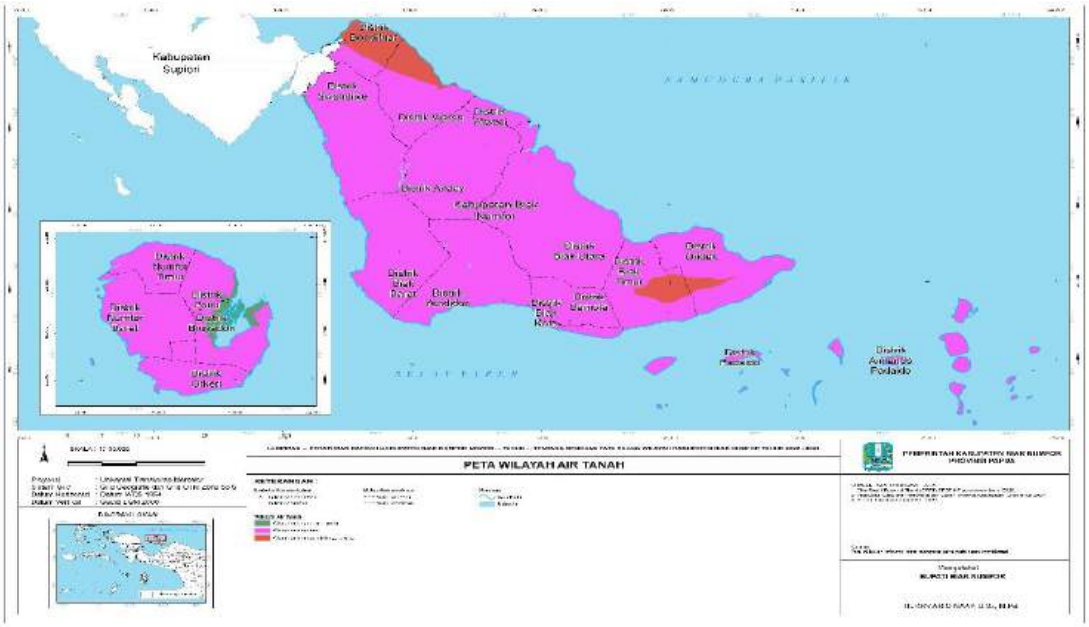

Gambar 2. 5
Peta Wilayah Air
(Sumber: Draft Revisi RTRW Kabupaten Biak Numfor 2023-2043)

Tabel 2. 2
Sumber Air di Kab. Biak Numfor

No.	Nama Sumber Air	Distrik	Jenis Sumber	Debit (l/dtk)
1	Arismun/Amiandam	Yendidori	Air terjun	50
2	Air Terjun Wardo	Biak Barat	Air permukaan	500
3	Besren dan Ramin Kampung Syabes	Yendidori	Air permukaan	700
4	Kali Parai	Samofa	Air permukaan	300
5	Manupu	Biak Timur	Air permukaan	300
6	Kali Korem	Biak Utara	Air permukaan	400
7	Kali Son, Kampung Son	Biak Utara	Air permukaan	300
8	Kali Wir Sapap, Kampung Andibay	Biak Timur	Air permukaan	300
9	Kali Rampin Pantai, Kampung Urfu	Yendidori	Air permukaan	400
10	Sumur Gali Snerbow	Samofa	Sumur Gali	300

(Sumber: Draft Revisi RTRW Kabupaten Biak Numfor 2023-2043)

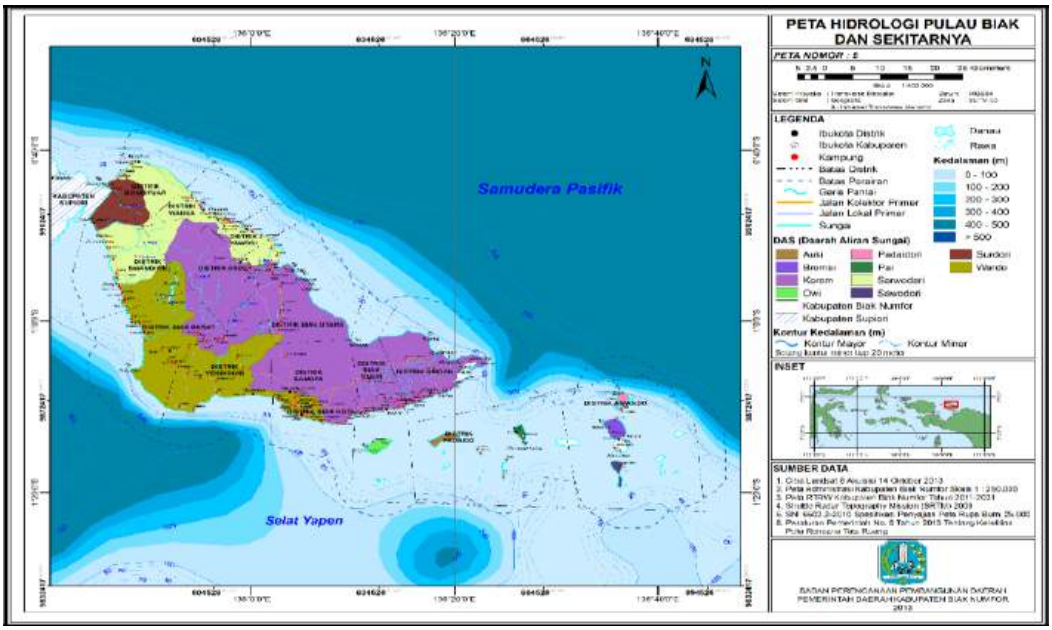

Gambar 2. 6
Peta Hidrologi Kab. Biak Numfor
(Sumber: Draft Revisi RTRW Kabupaten Biak Numfor 2023-2043)

a) Sungai Wardo

Hulu Sungai Wardo berada pada ketinggian 300 m di atas permukaan laut. Mata airnya keluar dari formasi Korem yang tersusun dari batuan napal, napal kapuran, sisipan batu gamping. Beberapa mata air mengalir ke arah selatan dan membentuk aliran sungai Desandok dan Sungai Simandok. Kedua sungai mengalir sejajar kemudian pada fomasi Wardo yang tersusun oleh batu gamping napalan dan pasiran bergabung menjadi satu, kemudian membelok arah timur disebut Sungai Wardo. Sungai bermuara di Teluk Wardo dan membentuk air terjun.

b) Sungai Wapurdori

Pada hulu sungai ini terdapat sejumlah anak sungai yang mengalir pada perbukitan yang membentuk pola aliran dendristik. Mata airnya keluar dari lapisan batuan napal, napal kapuran. Sebelum menjadi satu aliran pada lapisan batuan batu gamping napalan dan pasiran, hulunya mempunyai anak sungai yang mengalir sejajar arah Barat-Timur, dimana masing-masing anak sungai tersebut yang bagian utara berasal dari anak-anak sungai dan arah utara yang kemudian membentuk arah barat. Sungai Wapurdi bermuara di Pantai Barat.

c) Sungai Korem

Sungai Korem terbentuk oleh anakan sungai yang hulunya berada pada perbukitan dekat Pantai Utara dan mengalir ke arah selatan secara sejajar. Mata airnya muncul dari lapisan batuan napal, napal kapuran. Anakan sungai ini kemudian bergabung menjadi satu dan membelok ke arah timur, kemudian di wilayah Measido sungai ini membelok ke arah utara membentuk sungai cukup besar dan bermuara di Teluk Korem Pantai Utara. Di sekitar wilayah Measido aliran ini sebagian menembus masuk ke celah dan rongga batuan kemudian muncul lagi di sekitar Manubepium membentuk aliran sungai mengalir ke arah selatan pada lapisan batuan batu gamping napalan dan pasiran (Rakempium). Di sekitar Kampung Rim sungai ini masuk ke bawah tanah pada batu gamping koral dan kapur kemudian muncul di Teluk Urfu Pantai Selatan.

4. Geologi

Pulau Biak dan sekitarnya yang berada pada deretan pulau kecil-kecil di utara Pulau Papua terletak pada cekungan pengendapan Pratersier, yang lebih dikenal dengan nama Cekungan Irian Utara. Penyebabnya karena runtutan stratigrafi batuan di pulau ini sama dengan runtutan stratigrafi di cekungan Irian Besar. Batuan yang terdapat di Pulau Biak terdiri dari batuan Malihan dan batuan Sedimen. Untuk batuan sedimen terdiri dari batu gamping, batu lempung gampingan, batu pasir lempungan serta pasir dan lempung.

Stratigrafi bagian barat berbeda dengan di bagian timur disebabkan oleh perubahan tektonik dan fasies pada beberapa satuan batuan. Laporan tentang geologi Pulau Biak sampai saat ini hanya berupa hasil peta geologi dan keterangan singkat yang disusun oleh Masria, dkk (P3G, 1981). Karena itu, batuan yang dikelompokkan atas dasar tata nama satuan tidak resmi dengan berdasar pada letak geografi dan perubahan fasies, maka dibagi atas 9 satuan batuan endapan batuan, yaitu dari tua ke muda: batuan malihan, batu gamping lensa, basal konglomerate, basal alkali andesit, lava, batu gamping, napal, batu lempung gampingan, dan endapan rawa serta endapan pantai.

Pada umumnya jenis perlapisan batuan sesuai dengan arah memanjang pulau ini, yaitu di bagian barat sampai dengan timur. Batuan tertua terdiri dari batuan

malihan berderajat rendah, dan berdasarkan letak dan kedudukannya batuan ini berumur Pratersier. Batuan tersebut bersama dengan batuan Auwewa terdiri dari lava basalit, tufa dan breksi yang di beberapa tempat mengandung pecahan batuan malihan dan rijang. Satuan batuan ini ditumpangi secara tidak selaras oleh batuan yang lebih muda. Batuan yang lebih muda diatasnya terdiri dari Korem, Wardo, dan Mokmer dimana Singkapan batuan ini terdapat di sebelah utara Bosnik di sebelah utara Korido dan di Gunung Mahekisi. Umurnya diperkirakan Oligosen awal sampai dengan Eosen.

Satuan Wainukendi terdiri dari batu gamping hablur yang tidak mengandung fosil, pada daerah tertentu dijumpai lensa konglomerat, lapisan tipis napal dan batuan berfosil yang umurnya berkisar dari oligosen akhir sampai miosen awal. Satuan batuan ini membentuk deretan pegunungan di bagian barat laut Pulau Biak. Satuan batuan ini tersusun secara tidak selaras dengan satuan Aumewa dan ditumpangi secara selaras atau mungkin menjari dengan satuan Wafordori.

Satuan Wafordori sebagian besar terdiri dari napal tufaan dengan sisipan batu pasir dan lensa batu gamping hablur berfosil. Fosil-fosilnya menunjukkan berumur Miosen awal. Satuan ini ditumpangi selaras dengan satuan Napisendi di bagian selatan dan barat.

Satuan Napisendi ditumpangi secara selaras oleh satuan Korem. Korem terdiri dari napal kapuran, pasiran serta batu gamping napalan yang mengandung foraminifera kecil dan menunjukkan umur miosen akhir. Satuan ini tersingkap di bagian tengah Pulau Biak. Satuan Wardo yang mempunyai pelamparan di bagian baratdaya Pulau Biak mempunyai hubungan menjemari dengan satuan Korem yang terdiri dari batu gamping napalan dan pasiran.

Berdasarkan dari kandungan fosil foram kecil umur datuan batuan ini adalah miosen akhir hingga pliosen. Kedua satuan ini menindih secara tidak selaras formasi yang lebih tua. Satuan batuan Wardo ditumpangi secara tidak selaras dengan satuan Mokmer yang terdiri dari batu gamping koral dan kapur yang mengandung foram kecil.

Umur satuan batuan batu gamping Mokmer berkisar pada masa Pleistosen sampai Holosen, di Pulau Biak satuan ini menumpangi secara tidak selaras satuan

Owewa dan satuan Wainukendi. Endapan pantai terdapat di sekeliling Pulau Biak dan Selat Sorendiweri dan terdiri dari kerikil, pasir dan lumpur.

a) Geologi Tata Lingkungan

Disamping potensi fisik sangat perlu adanya informasi tentang keadaan fisik dan kendala akibat proses alam sendiri maupun eksternal, yaitu keadaan fisik oleh kegiatan pembangunan yang dapat menyebabkan rusaknya tata lingkungan sekitarnya. Bagi wilayah Kabupaten Biak Numfor, faktor eksternal belum begitu berperan atau kompleks. Namun demikian gambaran mengenai masalah fisik daerah harus diinventarisasi untuk mengetahui dan mencegah kendala fisik yang mungkin timbul pada masa yang akan datang. Struktur geologi yang ada berupa “Sesar Mendatar Mengiri Sorong” yang memotong dari daerah kepala burung Papua hingga perairan di sekitar bagian barat Kabupaten Biak Numfor dan ini merupakan sesar aktif yang sewaktu-waktu dapat bergerak dan menimbulkan goncangan (gempa bumi). Aspek bencana yang penting mungkin muncul adalah aspek gempa bumi dan gerakan tanah (longsor) pada daerah perbukitan. Bencana longsor diperkirakan terjadi pada daerah pedalaman Pulau Biak dan di daerah Ridge/Pematang sepanjang pantai Pulau Biak selatan bagian timur.

b) Erosi dan Sedimentasi

Pada daerah sepanjang pantai Biak Selatan terdapat pegunungan dengan kelerengan yang cukup terjal maka bila daerah ini tidak dijaga kelestarian vegetasinya maka berpotensi terjadi erosi yang cukup tinggi. Sedangkan pada daerah yang lebih rendah dibawahnya mempunyai sedimentasi yang cukup tinggi.

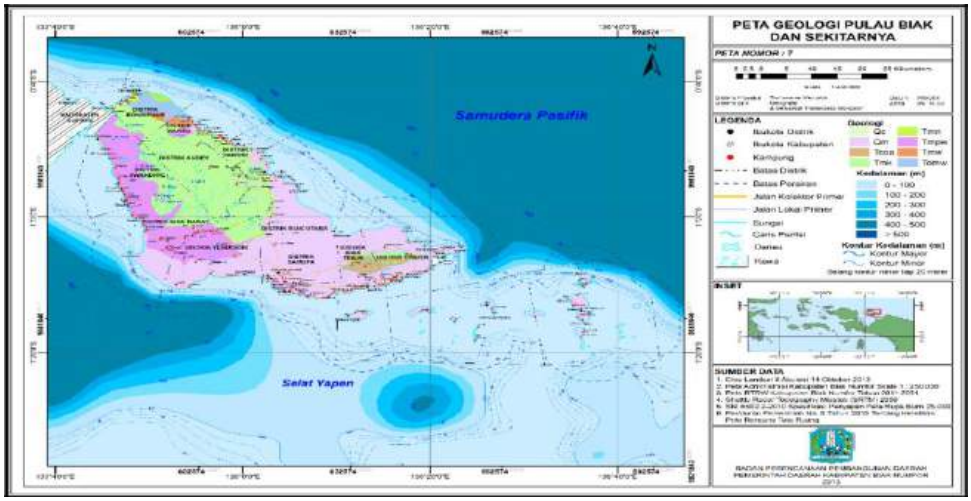

Gambar 2. 7
Peta Geologi Pulau Biak dan Sekitarnya
(Sumber: Draft Revisi RTRW Kabupaten Biak Numfor 2023-2043)

2.1.1.2 Jenis Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Biak Numfor adalah jenis Resina dan Mediteran merah kekuning-kuningan. Tanah resina, merupakan tanah yang mempunyai sedikit perkembangan profil berwarna hitam sampai kelabu dan dangkal. Di dalam massa tanah terdapat fragment batu kapur. Bahan induk terdiri dari batu kapur kristalin atau batu kapur karang. Sifat fisik tanah kurang baik terutama karena dangkalnya sakum tanah, reaksi agak alkalis. Kandungan Hara dan kejenuhan basa umumnya tinggi. Bercirikan *mollic epipedru* dan *cembis horizon* lemah. Bentuk wilayah berombak sampai bergunungdengan lereng curam. Tanah peka terhadap erosi. Penyebarannya berasosiasi dengan tanah mediteran merah kuning.

Sedangkan untuk tanah mediteran merah kekuning-kuningan adalah tanah yang mempunyai perkembangan profil berwarna merah coklat sampai kuning. Profil tanah sedang sampai agak dalam. Lapisan bagian atasnya mengandung sedikit bahan organik, struktur remah sampai gumpal sampai teguh. Sifat fisik dan kimia tanah tergantung dari batuan induknya. Reaksi tanah agak asam sampai netral, kejenuhan basa umumnya tinggi. Bahan induk batu kapur dan tuffa kapur. Bentuk wilayah berombak sampai berbukit. Tanah peka terhadap erosi. Penyebarannya

berasosiasi dan berkomplek dengan tanah rensina. Terdapat pada ketinggian kurang dari 450 mdpl, sampai berupa perbukitan rendah.

Selain itu terdapat jenis tanah posol. Jenis tanah ini merupakan tanah hasil pelapukan dari batuan vulkanik dan terdapat secara insitu/tidak jauh dari batuan induknya sehingga fragmen batuan induk masih dapat dikenali seperti tufa, breksi, dan lava andesit. Tanah jenis ini dijumpai pada bagian selatan dan penyebarannya tidak terlalu luas.

Tabel 2. 3
Luas Kedalaman Tanah di Kab. Biak Numfor

No.	Distrik	Kedalaman Tanah mm(ha)					Jumlah
		<24	26-50	50-100	100-150	> 151	
1	*Numfor Barat*	*439,75*	*-*	*-*	*1.718,75*	*437,5*	*2.650,00*
2	*Numfor Timur*	*3.725,00*	*1.193,75*	*-*	*5.468,75*	*3.287,50*	*12.481,25*
3	*Biak Barat*	*681,25*	*12.706,25*	*-*	*9.750,00*	*300*	*23.437,50*
4	*Biak Utara*	*562,5*	*19.875,00*	*-*	*4.693,75*	*-*	*25.131,25*
5	*Biak Timur*	*8.350,00*	*25.331,25*	*-*	*6.293,75*	*2.143,75*	*46.000,00*
6	*Biak Kota*	*-*	*15.618,75*	*-*	*-*	*-*	*44.600,00*
JUMLAH		**13.758,50**	**74.725,00**	**-**	**27.925,00**	**6.168,75**	**154.300,00**

(Sumber: Draft Revisi RTRW Kabupaten Biak Numfor 2023-2043)

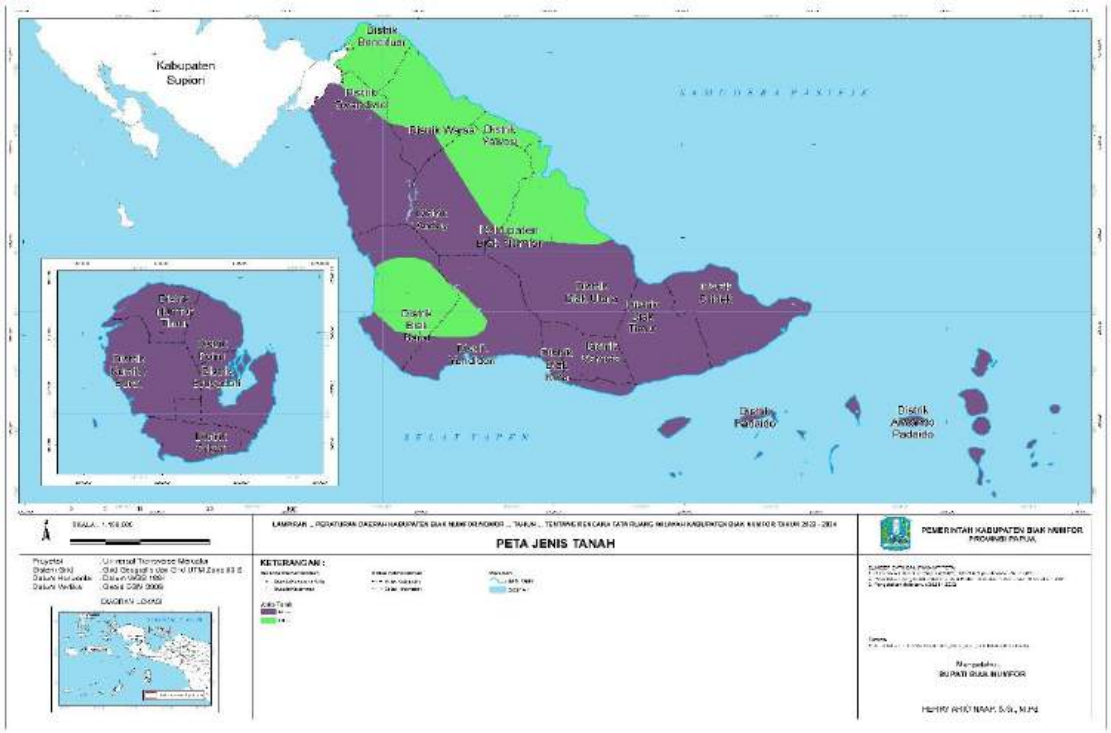

Gambar 2. 8
Peta Jenis Tanah di Kab. Biak Numfor
(Sumber: Draft Revisi RTRW Kabupaten Biak Numfor 2023-2043)

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Bahaya geologi yang berpotensi tinggi terjadi di Kabupaten Biak Numfor adalah gempa bumi dan tsunami, sedangkan tanah longsor hanya memiliki kemungkinan kecil terjadi di Biak Numfor. Bahaya iklim yang kemungkinan dapat terjadi di Kabupaten Biak Numfor adalah badai tropis dan banjir. Kabupaten Biak Numfor ditetapkan sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan gempa bumi merusak (gempa kuat) dan gempa bumi merusak sedang (gempa sedang).

A. Kawasan Rawan Bencanan Alam

Merupakan kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana, badai tropis, longsor, gelombang pasang, dan bencana rawan terhadap perubahan iklim, sehingga dapat berakibat rusaknya lingkungan secara menyeluruh. Dengan demikian harus melakukan antisipasi terhadap bencana yang setiap saat dapat terjadi:

1. Gelombang Pasang

Bencana gelombang pasang yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor yaitu pada tanggal 11 Juli 2007 dengan terjadinya hantaman gelombang besar yang mengakibatkan rusaknya terumbu karang sebanyak 80 persen. Tutupan terumbu karang sepanjang Pantai Biak Timur sampai dengan Wardo termasuk terumbu karang yang dilindungi.

2. Rawan Perubahan Iklim

Untuk rawan bencana perubahan iklim yang berdampak pada kerusakan terumbu karang, diperkirakan mempengaruhi kawasan yang memiliki tutupan terumbu karang seperti di wilayah perairan Kabupaten Biak Numfor. Naiknya suhu permukaan laut akan menyebabkan kerusakan bahwa dalam jangka waktu tertentu akan menyebabkan kematian massal pada koloni terumbu karang tersebut. Ini tentunya lebih jauh berdampak pula pada ketersediaan ikan-ikan hias dan ikan-ikan menengah pada wilayah yang terkena dampak tersebut.

B. Kawasan Rawan Bencana Geologi

Bentuk antisipasi terhadap bencana alam geologi di Kabupaten Biak Numfor perlu dilakukan melalui upaya deteksi gempa, melestarikan kawasan lindung dan kegiatan penanggulangan bencana secara dini diantaranya adalah dengan memanfaatkan dan mempertahankan fungsi hutan bakau sebagai penahan gelombang dan abrasi pantai.

1. Gempa Bumi

Secara umum seluruh wilayah Kabupaten Biak Numfor merupakan wilayah potensi gempa tektonik, akibat aktifnya Sesar Sorong yang terdapat di sebelah barat. Kegempaan suatu daerah dapat dinilai berdasarkan intensitas tertinggi atau kerusakan terparah akibat gempa bumi. Pada tahun 1996, gempa bumi terjadi di Kabupaten Biak Numfor dengan kekuatan 7,4 SR (Skala Rithcer). Beberapa daerah yang terkena dampak gempa bumi adalah Korem (Distrik Biak Utara), Bosnik (Distrik Biak Timur), dan Sopen (Distrik Biak Barat), dimana Korem menjadi salah satu daerah terparah akibat gempa bumi tersebut.

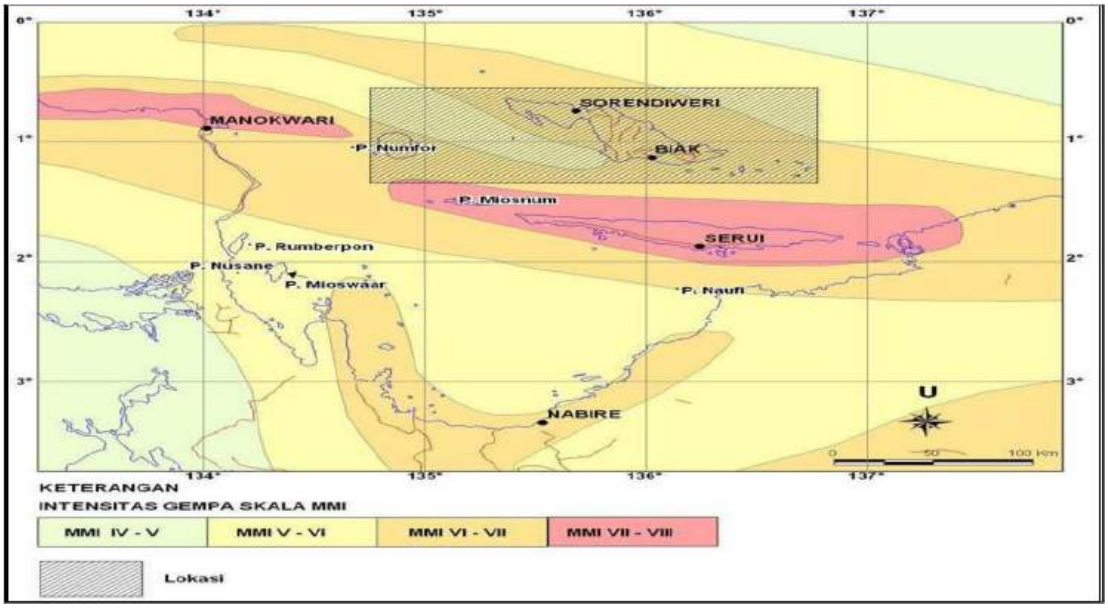

Gambar 2. 9
Peta Zona Gempa Kab. Biak Numfor dan Sekitarnya
(Sumber: Draft Revisi RTRW Kabupaten Biak Numfor 2023-2043)

Tabel 2. 4
Karakteristik Skala Intensitas Mercalli (MMI)

No	Skala Intensitas Mercalli (MMI)	Karakteristik
1.	IV	Didalam rumah akan terasa oleh banyak orang.Sedangkan diluar hanya terasa sedikit oleh orang saja. Barang yang tergantung akan terayun. Getarannya setara dengan truk besar yang lewat. Mobil yang diparkir bergoyang, jendela atau pintu bergetar. Dinding kayu bisa retak.
2.	V	Orang yang sedang tidur bisa terbangun benda-benda kecil bias bergeser atau terbalik dan beberapa barang pecah belah akan pecah. Pendulum jam akan berhenti atau kecepatan ayunannya akan berubah. Pepohonan dan tiang-tiang yang tinggi terkadang terlihat terayun.
3.	VI	Dirasakan oleh semua orang, namun kerusakannya ringan. Banyak orang ketakutan dan lari keluar rumah. Orang yang berjalan terhuyung-huyung, barang-barang pecah, kaca termasuk pada jendela pecah. Perabotan rumah tergeser dan

No	Skala Intensitas Mercalli (MMI)	Karakteristik
		terbalik, dan plasteran dinding yang kurang kuat akan retak.
4.	VII	Orang akan kesulitan berdiri. Kerusakan pada bangunan yang dirancang dan dibangun dengan baik tidak berarti. Namun pada bangunan yang jelek rancangan maupun konstruksinya, kerusakannya cukup besar. Plesteran dinding dan genteng dapat lepas, juga bata yang tidak tersemen.
(Sumber: Geologi Lingkungan Kabupaten Biak Numfor, ESDM, 2010)		

2. Tsunami

Secara empiris tsunami dapat terjadi oleh gempa tektonik dengan kekuatan lebih dari 6,5 Skala Richter dan pusat gempa berada pada kedalaman kurang 60 km dari dasar laut, menghasilkan perubahan dasar laut secara vertikal lebih dari 2 meter. Salah satu bencana alam geologi yang pernah terjadi di Kabupaten Biak Numfor adalah tsunami, tepatnya pada tahun 1996 tsunami terjadi di Distrik Oridek, Tanjung Barari (Mnurwar), Teluk Korem Distrik Biak Utara.

3. Gerak Tanah

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya erosi tanah dipengaruhi oleh : tingkat erosivitas tanah, erosibilitas tanah, topografi, vegetasi penutup tanah dan aktifitas manusia. Potensi rawan bencana erosi tanah terdapat di seluruh daerah wilayah Kabupaten Biak Numfor terutama pada daerah tinggian.

4. Abrasi (Erosi Pantai)

Kawasan yang memiliki potensi erosi pantai adalah daerah bagian barat dan selatan Pulau Biak. Potensi pengurangan garis pantai terjadi di bagian barat khususnya Pantai Wardo dan sebagian daerah barat daya Pulau Numfor serta gugusan Kepulauan Padaido. Abrasi di pantai Biak Utara dan Biak Timur dipicu oleh adanya gempa bumi tahun 1996, diikuti oleh turunnya tanah sepanjang pantai sekitar 2m yang disebabkan oleh gelombang pasang kuat menuju ke arah pantai dan menggerusnya sehingga menyebabkan terjadinya pengikisan pasir di daerah pantai tersebut.

C. Potensi Kebencanaan

Kajian bahaya disusun berdasarkan parameter yang berbeda untuk setiap bencana dan disesuaikan dengan pedoman umum pengkajian risiko bencana dan pedoman dan kementerian terkait di tingkat nasional pengkajian bahaya berdasarkan parameter setiap bahaya di Kabupaten Biak Numfor.

Penjabaran kajian bahaya setiap potensi bencana memperhatikan hasil yang berbeda beda secara umum rekapitulasi hasil pengkajian bahaya setiap distrik menentukan hasil kajian tingkat kabupaten Biak Numfor. Rangkuman hasil potensi luas bahaya dan kelas bahaya di Kabupaten Biak Numfor. Rangkuman hasil potensi luas bahaya dan kelas bahaya di Kabupaten Biak Numfor untuk setiap bencana di atas adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 5
Potensi Bahaya di Kab. Biak Numfor

No	Jenis Bencana	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Gempa Bumi	270.544	Tinggi
2	Tanah Logsor	79.827	Tinggi
3	Cuaca Ekstrim	33.856	Sedang
4	Tsunami	5.747	Tinggi
5	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	15.369	Tinggi
6	Banjir	209.912	Tinggi
7	Banjir Bandang	9.569	Tinggi
8	Kekeringan	267.829	Tinggi
9	Kebakaran Hutan dan Lahan	265.55	Tinggi

(Sumber: Dokumen Kajian Risiko bancana (KRB) Kab. Biak Numfor 2018-2023)

Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya *(hazard)*, kerentanan *(vulnerability)*, dan kapasitas *(capacity)* di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempabumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan

kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logisitik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pe nanganan darurat; dan kapasitas pemulihan.

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	KELAS RISIKO 2023
1	JAYAPURA	203.20	203.20	203.20	203.20	203.20	203.20	203.20	203.20	203.20	TINGGI
2	SARMI	171.60	171.60	171.60	166.98	166.98	166.98	166.98	169.63	172.50	TINGGI
3	MAMBERAMO RAYA	165.60	165.60	165.60	165.60	165.60	165.60	165.60	165.60	165.60	TINGGI
4	WAROPEN	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	SEDANG
5	BIAK NUMFOR	138.40	138.40	138.40	138.40	138.40	138.40	138.40	138.40	138.40	SEDANG
6	KEEROM	127.20	127.20	127.20	127.20	127.20	127.20	127.20	127.20	127.20	SEDANG
7	KOTA JAYAPURA	156.80	155.59	155.59	143.94	143.94	143.94	128.86	114.40	114.40	SEDANG
8	KEPULAUAN YAPEN	117.20	85.00	85.00	83.48	83.48	83.48	83.48	93.60	93.60	SEDANG
9	SUPIORI	92.40	92.40	92.40	92.40	92.40	92.40	92.40	92.40	92.40	SEDANG

*Catatan : nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan

Gambar 2. 10
Indeks Risiko Bencana Kabupaten/ Kota Provinsi Papua dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2023
(Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023)

Data pada gambar diatas menunjukan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Biak Numfor sampai tahun 2023 mendapat skor 138,40 dengan kelas risiko SEDANG.

2.1.1.4 Potensi Sumber Daya

Kabupaten Biak Numfor yang terdiri dari Pulau Biak dan Pulau Numfor sebagai daratan utamanya, dan pulau-pulau kecil di Distrik Padaido merupakan wilayah yang terbentuk pada cekungan pengendapan Pratersier yang dikenal dengan nama cekungan Irian Utara.

Batuan penyusun Kabupaten Biak Numfor terdiri dari batuan malihan, batugamping, lensa, basal konglomerat, basal alkali andesit, lava, batugamping, napal, batulempung gampingan dan endapan rawa serta pantai. Potensi sumberdaya mineral utama yang dapat dijumpai di Kabupaten Biak Numfor terdiri dari Bahan Galian berupa:

1) Batu gamping, tersebar di Pulau Biak. dengan ketebalan yang beragam hingga mencapai 300m. Penyebaran ketersediaan batu gamping cukup melimpah terdapat di bagian Distrik Biak Barat dan Distrik Warsa Batuan ini dapat digunakan sebagai batuan keras yang dapat dimanfaatkan untuk pondasi, bahan urugan atau bahan bangunan lainnya. Hingga saat ini potensi batu

gamping belum dilakukan pemanfaatan baik untuk penambangan rakyat maupun industri.

2) Pasir gampingan : banyak dijumpai di daerah perbukitan landai dan sepanjang pantai Pulau Biak. terbentuk karena pelapukan dan endapan dari batu gamping yang banyak dijumpai di Pulau Biak. Pasir gampingan pada umumnya telah dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat menjadi bahan bangunan batako namun berkualitas kurang baik untuk beton. Kualitas batako di sekitar biak cukup baik dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut mengingat cadangan pasir gampingan cukup melimpah.
3) Batuan beku : batuan beku merupakan batuan keras yang sangat baik digunakan untukbahan urugan dan pondasi bangunan hanya dijumpai di Distrik Biak Timur. Penyebaran batuan beku saat ini tidak disarankan untuk dieksploitasi karena tutupan permukaan merupakan hutan lindung.
4) Bahan semen : berupa batugamping atau napal gampingan terdapat secara meimpah di bagian Timur dan selatan Pulau Biak.

Gambar 2. 11
Peta Sumber Daya Mineral
(Sumber: Draft Revisi RTRW Kabupaten Biak Numfor 2023-2043)

2.1.1.5 Kawasan Kumuh

Salah satu permasalahan di perkotaan adalah munculnya arus urbanisasi yang semakin deras diakibatkan ketimpangan laju pembangunan di kota dibandingkan dengan di Kampung. Hal ini ditunjukan dengan kondisi sosial demografi di kawasan kumuh (Slum) seperti kepadatan penduduk yang tinggi, kondisi lingkungan yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat serta minimnya fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa fasilitas pendidikan, kesehatan danprasarana sosial budaya. Secara sosiologi permukiman kumuh adalah suatu permukiman tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis dengan gambaran dan kesan secara umum tentang masyarakat yang hidup dengan sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah ke bawah. Hal tersebut menjadi interpretasi umum bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh adalah permukiman yang tinggal atau berada di dalam suatu lingkungan yang rendah kualitasnya dengan belum terpenuhinya standar pelayanan minimal manusia untuk hidup dengan layak.

Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh menurut peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 2 tahun 2006 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah: bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, air limbah, persampahan, proteksi kebakaran. Untuk Kabupaten Biak Numfor yang memiliki criteria dimaksud serta merujuk pada Surat Keputusan Bupati Nomor 214/188.4.5/Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh Perkotaan di Kabupaten Biak Numfor adalah seperti tabel berikut.

Tabel 2. 6
Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh Perkotaan di Kab. Biak Numfor

No.	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Lingkup Administrasi	Tingkat Kekumuhan
1	Belakang Bempo–Yenures	29.69	Distrik Biak Kota	Kumuh Berat
2	Belakang Hadi/Patina	13.57	Distrik Biak Kota	Kumuh Berat
3	Kampung Baru–Snerbo	21.03	Distrik Samofa	Kumuh Sedang
4	Belakang pasar Inpres-Waupnor	10.46	Distrik Biak Kota	Kumuh Sedang
Total		**74.75**		

(Sumber: RP2KPKP Kabupaten Biak Numfor, 2016)

2.1.1.6 Demografi

Komposisi penduduk di Biak Numfor termasuk kategori penduduk muda (expansive) yaitu angka kelahiran lebih besar dari angka kematian sehingga menyebabkan penduduk yang berumur muda banyak. WHO mengelompokkan usia menjadi 5 kelompok yaitu 0-17 tahun adalah kelompok usia di bawah umur, 18–65 tahun kelompok usia pemuda, 66-79 tahun usia setengah baya, 80-99 tahun usia orang tua dan 100 tahun keatas tergolong orang tua berusia panjang.

Tabel 2. 7
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	*3792*	*3542*	*7334*
5-9	*7469*	*6703*	*14172*
10-14	*8283*	*7809*	*16092*
15-19	*8978*	*8103*	*17081*
20-24	*7834*	*7462*	*15296*
25-29	*6214*	*5983*	*12197*
30-34	*5634*	*5715*	*11349*
35-39	*5418*	*5158*	*10576*
40-44	*4680*	*4846*	*9526*
45-49	*3771*	*3951*	*7722*
50-54	*3497*	*3584*	*7081*
55-59	*3133*	*3001*	*6134*
60-64	*2528*	*2596*	*5124*
65-69	*1882*	*1927*	*3809*
70-74	*987*	*1060*	*2047*
75+	*877*	*986*	*1863*
Total	**74977**	**72426**	**147403**

(Sumber: Kabupaten Biak Numfor Dalam Angka Tahun 2024)

Berdasarkan kategori tersebut penduduk Biak Numfor yang masuk kategori usia anak-anak dibawah umur diperkirakan sebanyak 41,05% dan terbesar adalah kategori pemuda yaitu 52,58%. Sedangkan kategori setengah baya atau kelompok umur 66-79 tahun hanya 6,37% dan tidak ada yang masuk kategori usia orang tua

serta yang berusia panjang. Dari tabel 2.8 juga terlihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Biak Numfor tahun 2023 adalah 147.403 jiwa yang terdiri dari 74.977 jiwa penduduk laki-laki dan 72.426 jiwa penduduk perempuan. Jumlah ini menunjukkan penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan.

Selain jumlah penduduk secara umum menurut kelompok dan jenis kelamin, dapat pula dijabarkan jumlah Orang Asli Papua (OAP) dan Non OAP/ Bukan Orang Asli Papua sebagaimana gambar berikut.

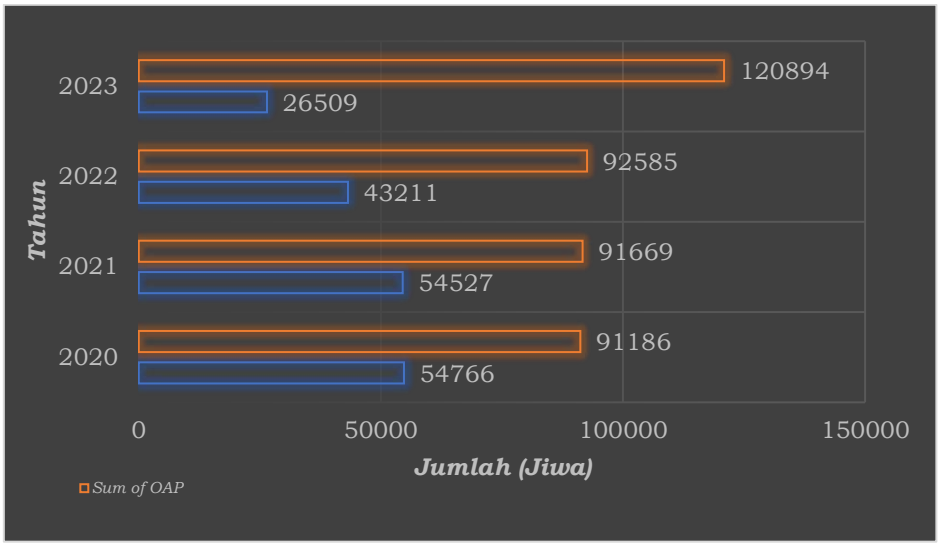

Gambar 2. 12
Jumlah OAP dan Non OAP Kab. Biak Numfor Tahun 2020-2023
(Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Biak Numfor Tahun 2024)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah Orang Asli Papua (OAP) Kabupaten Biak Numfor dari tahun 2020 sampai tahun 2023 mengalami kenaikan jumlah jiwa setiap tahunnya, dimana pada tahun 2020 jumlah OAP adalah 91.186 jiwa, kemudian mengalami peningkatan 483 jiwa pada tahun 2021 sehingga jumlah OAP pada tahun 2021 berjumlah 91.669 jiwa. Pada tahun 2023 penduduk OAP berjumlah 120.894 jiwa atau bertambah 28.309 jiwa dari tahun sebelumnya (2022) yang berjumlah 92.585 jiwa. Sementara jumlah Non OAP/ Bukan Orang Asli Papua mengalami penurunan setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat pada grafik bahwa tahun 2020 2023 sebesar 26.509 jiwa yang tersebar pada 19 Distrik di Kabupaten Biak Numfor.

Jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2023 berada pada dua distrik yakni Distrik Biak Kota sebesar 48.650 jiwa dan Distrik Samofa sebesar 32.252 jiwa. Hal ini karena kedua distrik tersebut merupakan distrik perkotaan dimana semua pusat perkantoran, perdagangan dan perekonomian.

Tabel 2. 8
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin menurut Distrik di Kab. Biak Numfor Tahun 2023

No.	Distrik	Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per 2020-2023 (%)
1.	Numfor Barat	2.413	3,24
2.	Numfor Timur	1.932	-0,55
3.	Orkeri	1.831	1,44
4.	Poiru	1.891	1,10
5.	Bruyadori	2.233	1,25
6.	Padaido	2.343	2,95
7.	Aimando	2.527	1,29
8.	Oridek	5.625	2,38
9.	Biak Timur	8.384	0,90
10.	Biak Kota	43.230	-0,82
11.	Samofa	35.503	-0,19
12.	Yendidori	9.149	1,11
13.	Biak Utara	7.867	1,45
14.	Yawosi	2.295	0,59
15.	Andey	2.812	2,95
16.	Bondifuar	0.555	1,36
17.	Warsa	5.798	1,76
18.	Biak Barat	6.639	-0,34
19.	Swandiwe	4.376	2,25
Total (Biak Numfor)		**147.403**	**0,33**

(Sumber: Kabupaten Biak Numfor Dalam Angka Tahun 2024)

Laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Distrik Numfor Barat sebesar 3.24%. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh Kelahiran atau fertilitas dan Mobilitas penduduk.Sedangkan data migrasi penduduk baik yang keluar dan masuk kabupaten Biak Numfor serta jumlah kematian belum diketahui secara pasti.

2.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

A. Kawasan Hutan Produksi

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, baik hasil hutan kayu maupun non kayu. Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas kawasan peruntukan Hutan Produksi Terbatas (HPT), kawasan peruntukan hutan produksi tetap (HP), dan kawasan peruntukan

hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK). Kabupaten Biak Numfor memiliki HPT dan HP. Penentuan HPT dan HP di Kabupaten Biak Numfor pada prinsipnya tidak mengubah ketentuan dalam Kawasan Hutan dan Perairan.

1. Hutan Produksi Terbatas

Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman burung. HPT di Kabupaten Biak Numfor mencakup lahan seluas 45.926,13 ha, berada di Distrik Swandiwe, Biak Barat, Yendidori, Andey Dalam, Biak Utara, Samofa, Biak Timur dan Oridek.

2. Hutan Produksi Tetap

Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru. Hutan Produksi di Kabupaten Biak Numfor mencakup lahan seluas 28.924,55 Ha, berada di Distrik Samofa, Biak Timur, Oridek dan di Kepulauan Padaido Distrik Padaido dan Aimando.

B. Kawasan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas kawasan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

1. Kawasan Budidaya Tanaman Pangan

Kawasan budidaya tanaman pangan secara umum dibedakan menjadi kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering. Namun untuk Kabupaten Biak Numfor hanya ada kawasan pertanian lahan kering. Wilayah yang memiliki potensi untuk pengembangan pertanian lahan kering adalah Distrik Oridek, Samofa, Biak Kota, Biak Utara, Biak Timur, Biak Barat, Warsa, dan Swandiwe. Sebagian besar wilayah potensial budidaya tanaman pangan adalah kawasan hutan. Untuk pengembangan jangka panjang, kawasan budidaya tanaman pangan diarahkan di Distrik Biak Timur, Biak Kota, Samofa, Biak Utara, dan Yendidori.

Kegiatan pertanian saat ini di Kabupaten Biak Numfor menyatu dengan kebun dan hutan, di mana sagu, pandanus, umbi-umbian, kacang-kacangan tumbuh di tengah kawasan hutan. Kawasan budidaya tanaman pangan ditetapkan sebagai lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

2. Kawasan Budidaya Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.

Tanaman hortikultura di Kabupaten Biak Numfor saat ini lebih banyak berupa hasil pekarangan atau tumbuh di kawasan hutan. Dilihat dari potensi lahannya, tanaman hortikultura diarahkan untuk berkembang menjadi tanaman pekarangan. Pada umumnya berupa pohon nangka, jambu biji, pisang, jeruk, mangga, pepaya, rambutan.

3. Kawasan Budidaya Perkebunan

Sebagaimana halnya dengan tanaman hortikultura, budidaya perkebunan saat ini juga belum terlihat secara signifikan di Kabupaten Biak Numfor. Jika dilihat potensi lahannya, beberapa daerah layak bagi pengembangan budidaya perkebunan, di antaranya di Distrik Oridek, Biak Timur, Samofa, Biak Kota, Biak Utara, Biak Timur, Biak Barat, Warsa, Yendidori, Swandiwe, Bondifuar, dan Poiru. Namun karena sebagian besar wilayah potensial perkebunan berada di kawasan hutan lindung dan hutan produksi, maka arahan pengembangan budidaya perkebunan hanya untuk Distrik Samofa dan Yendidori saja.

4. Peternakan

Kegiatan peternakan berpotensi untuk dikembangkan di Distrik Numfor Timur, Poiru, Bruyadori, Orkeri, dan Numfor Barat.

C. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya, dan industri pengolahan hasil perikanan mencakup pula pelabuhan perikanan yang pengembangannya dilakukan dengan mempertimbangkan skala ekonomi wilayah yang dilayaninya.

1. Kawasan Perikanan Tangkap

Kabupaten Biak Numfor yang wilayahnya merupakan kawasan pesisir dan kepulauan, maka seluruh distrik di kabupaten tersebut memiliki kawasan perikanan tangkap, terkecuali di Distrik Samofa. Potensi komoditi perikanan tangkap yaitu ikan tuna dan cakalang, ikan kerapu dan berbagai jenis kakap, serta ikan pelagis kecil (layang, tongkol dan kembung).

2. Kawasan Peruntukan Budidaya Perikanan

Kawasan peruntukan budidaya perikanan berada di Distrik Oridek (Pulau Biak); Distrik Aimando dan Distrik Padaido (Kepuluan Padaido); serta Distrik Bruyadori (Pulau Numfor). Potensi komoditi dari perikanan budidaya antara lain ikan kerapu, teripang, budidaya rumput laut, dan terumbu karang.

3. Kawasan Industri Pengolahan Hasil Perikanan

Kawasan industri pengolahan hasil perikanan diarahkan di pusat-pusat SSWP, yaitu Distrik Biak Kota, Yendidori, Andei, Pasi, dan Orkeri yang memiliki sentra-sentra komoditas perikanan.

Selain itu, pengembangan kawasan pelelangan ikan terdapat di Bosnik, Distrik Biak Timur; dan pelabuhan ekspor-impor untuk komoditas perikanan melayani skala kabupaten dan regional (KAPET BIAK).

D. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kegiatan pertambangan di Kabupaten Biak Numfor termasuk sektor yang belum berkembang. Sejauh ini kegiatan usaha pertambangan terbatas sebagai usaha pemenuhan bahan bangunan berskala kecil, berupa usaha pertambangan batuan seperti bahan batu gamping dan sirtu (pasir dan batu).

Kawasan pertambangan batu gamping tersebar di beberapa distrik di antaranya: Distrik Yendidori, Andey Dalam, Biak Utara, Biak Barat, Numfor Barat, dan Numfor Timur.

E. Kawasan Peruntukan Industri

1. Jumlah industri yang berada pada Kabupaten Biak Numfor adalah 653 industri dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 4.009 orang. Industri yang

ada umumnya merupakan industri kecil dan mikro (home industri) dan yang terbanyak merupakan industri pangan.

2. Kawasan industri besar direncanakan di Kawasan Urfu (17 km dari kota, seluas 1.500 Ha), di Distrik Biak Kota, Yendidori dan Kawasan Oridek seluas (500 Ha), akan dikembangkan pada masa mendatang dengan aktivitas pelabuhan (menempati lahan 300 ha) dan kawasan industri (1.200 ha). Kawasan ini direncanakan sebagai pengganti kawasan pelabuhan Biak bilamana kapasitasnya dan kenyamanannya sudah tidak dapat dipenuhi lagi dengan baik.
3. Termasuk di dalamnya adalah Kawasan Industri Export Processing Zone/EPZ. Kawasan EPZ (383 Ha), meliputi wilayah barat Distrik Biak Kota sampai ke Distrik Yendidori, saat ini telah berjalan aktivitas pengalengan ikan, pembuatan fishmill/pakan ternak ikan (dengan bahan baku kedelai dari Nabire, Yapen dan Waropen), maupun penangkapan ikan (pada perairan dangkal dekat pantai oleh rakyat dan perairan dalam oleh pengusaha swasta besar). Kawasan EPZ ini akan dikembangkan lebih lanjut, seperti pengolahan CPO yang ada di hinterland terutama dari Manokwari, Yapen, Waropen, Supiori, Jayapura dan Nabire. Di samping itu juga perlu dikembangkan industri pengolahan ikan tuna ataupun daging yang didatangkan dari hinterland.

F. Kawasan peruntukan Pariwisata

Pengembangan pariwisata dilakukan melalui penataan kawasan wisata terdiri atas: penetapan obyek/atraksi unggulan, kota pusat pelayanan pariwisata, dan jalur wisata. Upaya pengembangan wisata Kabupaten Biak Numfor ini juga tetap dikaitkan dengan pusat pariwisata regional dan nasional yakni: Papua, Jakarta, dan Bali sebagai satu kesatuan tujuan wisata nasional sekaligus untuk menarik minat pengunjung. Pengembangan pariwisata ini dilakukan dengan pengembangan koridor wisata dan peningkatan daya tarik obyek wisata. Pengembangan pariwisata ini ditujukan untuk wisatawan nusantara maupun mancanegara. Jenis wisata yang diunggulkan antara lain:

1. Wisata alam Wisata bahari

Wisata bahari merupakan bentuk kegiatan pariwisata potensial, yang termasuk clean industri. Pengembangan wisata bahari akan berhasil apabila memenuhi komponen: a) terkait dengan kelestarian lingkungan alami; b) kesejahteraan penduduk yang mendiami wilayah tersebut; c) kepuasan pengunjung yang menikmati; dan d) keterpaduan komunitas dengan area pengembangan.

2. Wisata Konvensi

Wisata konvensi MICE (*meeting, incentive, conference, exhibition*) merupakan kegiatan bisnis dan pariwisata yangdilakukan secara bersama. Pengembangan wisata konvensi perlu dipertimbangkan untuk menjadi salah satu fokus pariwisata Kabupaten Biak Numfor, mengingat wilayah ini berpotensi besar dalam wisata alam, dan mampu memenuhi 2 aspek utama terselenggaranya wisata konvensi, yakni jaminan keamanan dan ketersediaan teknologi komunikasi.

MICE perlu dipertimbangkan sebagai salah satu fokus pengembangan pariwisata Kabupaten Biak Numfor, mengingat dampak ekonomi yang dibangkitkannya sangat besar. Secara umum dapat digambarkan bahwa pengeluaran rata-rata wisatawan asing adalah 400 dollar Amerika Serikat selama 7-12 hari kunjungan di Indonesia. Sedangkan peserta wisata konvensi mengeluarkan biaya sebesar 210 dollar Amerika Serikat per hari, dengan waktu lama tinggal rata-rata 4 hari. Perbandingan ini memberikan gambaran besarnya dampak ekonomi yang dipicu wisata konvensi. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan daya Tarik wisata adalah ditetapkannya Kabupaten Biak Numfor sebagai tuan rumah Sail Teluk Cenderawasih (STC) Tahun 2023 bersama 4 Kabupaten lainnya di Wilayah Teluk Cenderawasih.

3. Target Wisatawan

Target wisatawan adalah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara/ domestik.

4. Peran Pemerintah

Dari berbagai uraian di atas, maka pemerintah perlu mengambil beberapa peran dalam pengembangan potensi wilayah,antara lain:

a) Sebagai *planner*: Pemerintah daerah perlu melihat Rencana Induk Pariwisata yang akan mengatur seluruh aktivitas pemanfaatan sumber daya wisata secara maksimal, baik yang berkaitan dengan sektor swasta maupun pemerintah.
b) Sebagai koordinator: Pemerintah daerah bekerjasama dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik antar sektor maupun lintas sektor, antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau instansi pemerintah dengan pelaku bisnis pariwisata, perusahaan penyedia sarana dan prasarana pariwisata, serta masyarakat. Pemerintah daerah perlu mensinergikan semua sehingga tercapai tujuan pengembangan pariwisata.
c) Pemerintah daerah harus memonitor setiap pergerakan kemajuan dan atau kemunduran yang telah dicapai, sebagai evaluasi perbaikan dalam mensukseskan pencapaian tujuan pengembangan pariwisata.

2.1.1.8 Struktur Ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perkampungan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi.

Gambar 2. 13
Peta Pembagian SSWP
(Sumber: Draft Revisi RTRW Kab. Biak Numfor 2023-2043)

Tabel 2. 9
Sistem Satuan Pengembangan Wilayah

Pusat	Wilayah Pengaruh	Kegiatan Utama	Pengembangan Wilayah
SSWP I			
PKW BIAK	Distrik Samofa, Biak kota, Biak Utara, Biak Timur, Oridek, Padaido dan Aimando	Permukiman, perdagangan dan jasa, industrl, transportasi, konservasi, pariwisata, kehutanan, kelautan dan perikanan	
SSWP II			
PKL SWANDIWE	Distrik Biak Barat, Yendidori dan Swandiwe	Transportasi, kehutanan, pertanian, kelautan, dan Perikanan dan Permukiman	Pengembangan sumber daya ekonomi skala kecil dan menengah melalui penguatan potensi sumber daya alam
SSWP III			
PKL WARSA	Distrik Biak Barat, Yendidori dan Swandiwe	Transportasi, kehutanan, pertanian, kelautan, dan	Penguatan mutu SDM yang berkualitas dan berdaya saing

Pusat	Wilayah Pengaruh	Kegiatan Utama	Pengembangan Wilayah
		Perikanan dan Permukiman	Percepatan peningkatan dan pemerataan infrastruktur strategis, pembangunan kepaariwisataan dan perikanan melalui ien wisata daerah dan nasional
			Pengembangan Sumber daya ekonomi skala kecil dan menengah melalui penguatan potensial sumber daya alam
SSWP IV			
PKL NUMFOR	Distrik Numfor Timur, Numfor Barat, Poiru, Orkeri dan Bruyadori	Permukiman, Kehutanan, kalautan, Perikanan dan transportasi	

2.1.1.9 Rencana Sistem Pusat Kegiatan Perkotaan

Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang secara umum terdiri atas:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di wilayah kabupaten;
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di wilayah kabupaten;
3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di wilayah kabupaten;
4. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang berada di wilayah kabupaten;

Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu: Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala distrik atau beberapa Kampung; dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar Kampung.

Rencana sistem pusat kegiatan Kabupaten Biak Numfor, terdiri atas: PKNp/PKW: Biak (Distrik Biak Kota), Samofa (Distrik Samofa). PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Dalam PP No. 27/2008 tentang RTRWN, Biak ditentukan sebagai PKW. Karena potensi serta prospek perkembangannya, dalam draft RTRW Provinsi Papua, perkotaan Biak diusulkan menjadi PKNp. PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

Biak sebagai PKW merupakan pusat dari SWP III Provinsi Papua dengan wilayah pengembangan Kabupaten Supiori, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Waropen.

PKLp: Yemburwo (Distrik Numfor Timur), Orkhdori (Distrik Swandiwe), Andei (Distrik Biak Utara), Yomdori (Distrik Biak Barat), Pasi (Distrik Aimando).

PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa distrik. Beberapa distrik di Kabupaten Biak Numfor diusulkan menjadi PKL, sesuai potensi dan prospek pengembangan masing-masing:

Yemburwo: memiliki bandara, yang merupakan prasarana transportasi utama penghubung Pulau Numfor dengan Pulau Biak.

Orkhdori: merupakan distrik perbatasan dengan Kabupaten Supiori, sehingga pertumbuhannya perlu didorong agar mengimbangi perkembangan yang berlangsung di Kabupaten Supiori.

Andei, Yomdori, dan Pasi: memiliki pelabuhan sebagai prasarana transportasi angkutan orang dan barang, penghubung Kepulauan Padaido dengan Pulau Biak.

PPK: Sandauw (Distrik Bruyadori), Yereboy (Distrik Warsa), Yendidori (Distrik Yendidori), Wadibo (Distrik Oridek)

PPK merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala distrik atau beberapa kampung.

Sebagai PPK, perkotaan Sandauw, Yereboy, Yendidori, dan Wadibo tidak memiliki fasilitas prasarana transportasi penting (kecuali Sandauw yang memiliki pelabuhan, yaitu Pelabuhan Manggari) dan sarana perdagangan dalam skala kabupaten. Namun

perkotaan tersebut memiliki fasilitas permukiman yang dapat melayani kegiatan skala distrik atau beberapa kampung, seperti fasilitas pendidikan serta fasilitas kesehatan. PPL: Kansai (Distrik Numfor Barat), Rawar (Distrik Orkeri), Andei (Distrik Poiru), Bosnik (Distrik Biak Timur), Roidifu (Distrik Andey Dalam), Soor (Distrik Yawosi), Sansudi (Distrik Bondifuar), Pai (Distrik Padaido)

Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar kampung. Pusat-pusat pelayanan di PPL memiliki fasilitas permukiman dasar (sarana pendidikan dan kesehatan) yang dapat melayani kegiatan skala antar kampung. Pusat pelayanan di Distrik Yawosi dari Yawosi dipindahkan ke Soor, dikarenakan faktor fisik dasar dan pencegahan terhadap terjadinya bencana.

Gambar 2. 14
Peta Struktur Ruang Wilayah Kab. Biak Numfor
(Sumber: Draft Revisi RTRW Kabupaten Biak Numfor 2023-2043)

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

A. Pertumbuhan PDRB

Selama tahun 2019-2023 atau data lima tahun terakhir ada 17 (tujuh belas) sumber kontribusi sektor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Biak Numfor. Sumber kontribusi sektor PDRB Kabupaten Biak Numfor tersebut antara lain:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
2. Pertambangan dan Penggalian;
3. Industri Pengolahan;
4. Listrik dan Gas;
5. Pengadaan AIR; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang;
6. Konstruksi;
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
8. Transportasi dan Pergudangan;
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
10. Informasi dan Komunikasi;
11. Jasa Keuangan dan Asuransi;
12. Real Estat;
13. Jasa Perusahaan;
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib;
15. Jasa Pendidikan;
16. Jasa Kesehatan dan Kegaitan Sosial;
17. Jasa Lainnya.

Hasil analisis terhadap nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Tahun 2019-2023 atas dasar harga konstan tahun 2010 di Kabupaten Biak Numfor dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 10
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2019-2023 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kab. Biak Numfor

No.	Sektor	Tahun									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	754.33	1.16	758.61	0.57	798.42	5.25	870.20	8.99	900.33	3.46
2	Pertambangan dan Penggalian	32.53	6.72	30.9	-5.00	31.65	2.43	32.03	1.21	34.48	7.65
3	Industri Pengolahan	123.95	0.6	129.56	4.52	132.49	2.26	132.73	0.18	128.23	-3.39
4	Listrik dan Gas	8.24	2.07	7.93	-3.70	8.01	0.95	8.65	7.97	9.23	6.71
5	Pengadaan AIR; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5.24	0.01	5.24	0.10	5.38	2.62	5.49	2.11	5.59	1.69
6	Konstruksi	219.02	2.18	203.02	-7.30	204.81	0.88	214.91	4.93	221.19	2.92
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	549.18	4.66	523.93	-4.60	541.16	3.29	572.74	5.84	593.42	3.61
8	Transportasi dan Pergudangan	315.91	-8.09	207.97	-34.17	209.98	0.97	223.05	6.22	241.4	8.23
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	26.99	1.75	23.74	-12.02	26.9	13.3	28.17	4.71	29.85	5.98
10	Informasi dan Komunikasi	126.59	0.28	134.58	6.32	132.01	-1.91	133.53	1.15	131.55	-1.48
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	168.54	0.08	164.93	-2.14	161.33	-2.18	172.4	6.87	178.47	3.52
12	Real Estat	154.84	1.22	149.6	-3.38	147.87	-1.16	144.92	-1.99	146.33	0.97
13	Jasa Perusahaan	85.63	2.97	83.24	-2.79	82.00	-1.48	81.34	-0.81	84.03	3.31
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	660.54	8.62	634.66	-3.92	655.18	3.23	675.57	3.11	701.03	3.77
15	Jasa Pendidikan	98.8	2.45	90.09	-8.82	90.17	0.08	92.18	2.24	94.27	2.26
16	Jasa Kesehatan dan Kegaitan Sosial	62.65	1.23	72.05	15.00	72.10	0.08	72.28	0.25	71.85	-0.60
17	Jasa Lainnya	36.62	0.96	35.85	-2.10	36.83	2.71	39.32	6.79	40.83	3.84
(PDRB)		***3429.6***	***2.21***	***3255.91***	***-5.06***	***3336.29***	***2.47***	***3499.54***	***4.89***	***3612.07***	***3.22***

(Sumber: Biak Numfor Dalam Angka Tahun 2020-2024, data diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang PDRB terbesar setiap tahunnya, dan data pada tahun terakhir (tahun 2023) sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang nilai dan kontribusi sebesar 900,33 miliar rupiah atau 3,46% dalam PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 di Kabupaten Biak Numfor.

Analisis juga dilakukan terhadap nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Tahun 2019-2023 atas dasar Harga Berlaku di Kabupaten Biak Numfor. Berdasarkan hasil analisis pada 17 (tujuh belas) sektor dalam PDRB Tahun 2019-2023 atas dasar Harga Berlaku.

Data tahun terakhir atau pada tahun 2023 sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah sektor yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDRB Kabupaten Biak Numfor yaitu sebesar 21,38%. Di tahun yang sama kontributor tertinggi kedua adalah sektor Adminstrasi Pemerintahan, Pethahanan, dan Jaminan Sosial Wajib yaitu sebesar 19,68%, kemudian diikuti oleh sektro Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 18,39%. Secara rinci nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB tahun 2019-2023 atas dasar Harga Berlaku di Kabupaten Biak Numfor dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 11
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2019-2023 Atas Dasar Harga Berlaku di Kab. Biak Numfor

No.	Sektor	Tahun									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1030.35	18.78	1038.23	19.88	1119.11	20.36	1235.14	21,06	1342.96	21.38
2	Pertambangan dan Penggalian	55.51	1.01	53.25	1.02	56.39	1.03	58.25	0.99	66.45	1.06
3	Industri Pengolahan	201.94	3.68	216.74	4.15	228.49	4.16	236.85	4.04	238.94	3.80
4	Listrik dan Gas	13.26	0.24	12.68	0.24	13.11	0.24	14.32	0.24	15.61	0.25
5	Pengadaan AIR; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	7.76	0.14	7.48	0.14	7.76	0.14	8.03	0.14	8.54	0.14
6	Konstruksi	364.21	6.64	340.81	6.52	349.42	6.36	374.22	6.38	403.77	6.43
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1006.68	18.35	967.66	18.52	1003.63	18.26	1083.49	18.47	1155.23	18.39
8	Transportasi dan Pergudangan	570.77	10.40	389.92	7.46	404.22	7.35	445.10	7.59	510.86	8.13
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	45.84	0.84	41.31	0.79	48.40	0.88	52.26	0.89	56.67	0.90
10	Informasi dan Komunikasi	200.01	3.65	209.01	4.00	210.02	3.82	220.02	3.75	229.28	3.65
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	243.15	4.43	229.82	4.40	231.74	4.22	254.19	4.33	273.64	4.36
12	Real Estat	264.97	4.83	256.87	4.92	255.78	4.62	260.82	4.45	274.43	4.37
13	Jasa Perusahaan	124.02	2.26	121.00	2.32	122.28	2.22	123.82	2.11	128.91	2.05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1068.50	19.48	1040.18	19.91	1141.86	20.77	1177.83	20.08	1236.51	19.68
15	Jasa Pendidikan	144.58	2.64	132.71	2.54	133.20	2.42	138.92	2.37	152.42	2.43
16	Jasa Kesehatan dan Kegaitan Sosial	89.66	1.63	112.16	2.15	116.34	2.12	120.84	2.06	122.23	1.95
17	Jasa Lainnya	54.89	1.00	53.83	1.03	61.02	1.02	61.02	1.04	65.18	1.04
(PDRB)		***5486.11***	***100.00***	***5223.67***	***100.00***	***5865.16***	***100.00***	***5865.16***	***100.00***	***6281.62***	***100.00***

(Sumber: Biak Numfor Dalam Angka Tahun 2020-2024, data diolah)

Perkembangan dan Pertumbuhan kontribusi sektor dalam PDRB Tahun 2019-2023 atas dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Biak Numfor disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 12
Perkembangan kontribusi sektor dalam PDRB Tahun 2019-2023 atas dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kab. Biak Numfor

No.	Sektor	Tahun									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18.78	1.16	19.88	0.57	20.36	5.25	21.06	8.99	21.38	3.46
2	Pertambangan dan Penggalian	1.01	6.72	1.02	-5.00	1.03	2.43	0.99	1.21	1.06	7.65
3	Industri Pengolahan	3.68	0.6	4.15	4.52	4.16	2.26	4.04	0.18	3.80	-3.39
4	Listrik dan Gas	0.24	2.07	0.24	-3.70	0.24	0.95	0.24	7.97	0.25	6.71
5	Pengadaan AIR; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.14	0.01	0.14	0.10	0.14	2.62	0.14	2.11	0.14	1.69
6	Konstruksi	6.64	2.18	6.52	-7.30	6.36	0.88	6.38	4.93	6.43	2.92
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18.35	4.66	18.52	-4.60	18.26	3.29	18.47	5.84	18.39	3.61
8	Transportasi dan Pergudangan	10.40	-8.09	7.46	-34.17	7.35	0.97	7.59	6.22	8.13	8.23
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.84	1.75	0.79	-12.02	0.88	13.3	0.89	4.71	0.90	5.98
10	Informasi dan Komunikasi	3.65	0.28	4.00	6.32	3.82	-1.91	3.75	1.15	3.65	-1.48
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.43	0.08	4.40	-2.14	4.22	-2.18	4.33	6.87	4.36	3.52
12	Real Estat	4.83	1.22	4.92	-3.38	4.62	-1.16	4.45	-1.99	4.37	0.97
13	Jasa Perusahaan	2.26	2.97	2.32	-2.79	2.22	-1.48	2.11	-0.81	2.05	3.31
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	19.48	8.62	19.91	-3.92	20.77	3.23	20.08	3.11	19.68	3.77
15	Jasa Pendidikan	2.64	2.45	2.54	-8.82	2.42	0.08	2.37	2.24	2.43	2.26
16	Jasa Kesehatan dan Kegaitan Sosial	1.63	1.23	2.15	15.00	2.12	0.08	2.06	0.25	1.95	-0.60
17	Jasa Lainnya	1.00	0.96	1.03	-2.10	1.02	2.71	1.04	6.79	1.04	3.84
(PDRB)		***100.00***	***2.21***	***100.00***	***-5.06***	***100.00***	***2.47***	***100.00***	***4.89***	***100.00***	***3.22***

(Sumber: Kabupaten Biak Numfor Dalam Angka Tahun 2020-2024, data diolah)

Tabel 2. 13
Pertumbuhan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2019-2023 atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) di Kab. Biak Numfor

No.	Sektor	Pertumbuhan	
		Hb (%)	Hk (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-10.83	-226.30
2	Pertambangan dan Penggalian	2.02	72.03
3	Industri Pengolahan	-8.91	-12.39
4	Listrik dan Gas	0.00	-87.93
5	Pengadaan AIR; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.00	-124.26
6	Konstruksi	4.08	-94.18
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0.65	-32.69
8	Transportasi dan Pergudangan	37.02	-173.88
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-5.62	-49.50
10	Informasi dan Komunikasi	-2.67	58.78
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.31	-192.90
12	Real Estat	8.54	330.93
13	Jasa Perusahaan	7.11	114.20
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-2.99	146.15
15	Jasa Pendidikan	11.39	9.29
16	Jasa Kesehatan dan Kegaitan Sosial	-20.87	-163.33
17	Jasa Lainnya	-3.85	-151.82
(PDRB)		***16.09***	***-83.23***

(Sumber: Kabupaten Biak Numfor Dalam Angka Tahun 2020-2024, data diolah)

B. Laju Inflasi

Laju inflasi adalah persentase kenaikan harga yang pengukurannya dilakukan berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan harga barang atau jasa tersebut bisa menurunkan daya beli masyarakat karena nilai mata uang yang rendah tidak seimbang dengan kenaikan harga barang yang tajam.

Adapun faktor penyebab inflasi diantaranya yaitu (a) meningkatnya biaya produksi, (b) kenaikan permintaan barang, (c) terlalu banyak uang yang beredar.

Peningkatan laju inflasi tentunya dapat membuat masyarakat yang berpenghasilan tetap merugi. Biaya untuk belanja tetap, sedangkan barang atau jasa yang diperoleh semakin sedikit. Pada kasus tertentu, inflasi bisa berdampak positif bagi perekonomian. Kondisi ini dapat mendorong perusahaan untuk membuka lapangan kerja baru guna memastikan kelancaran proses produksi.

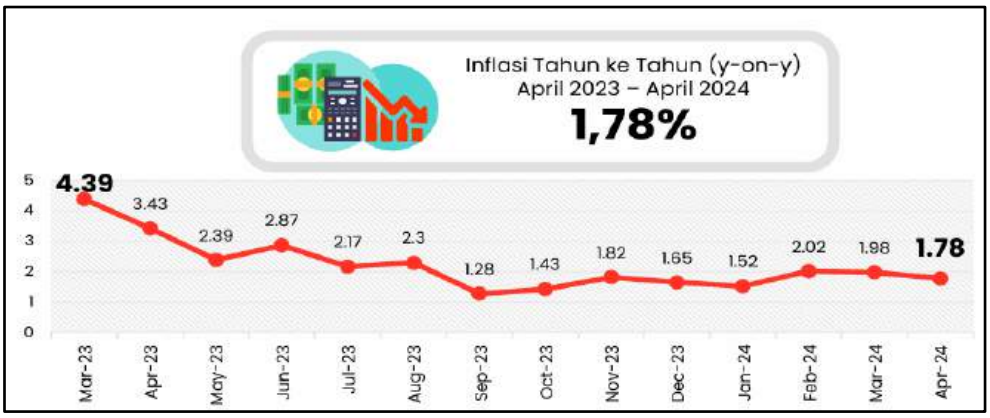

Gambar 2. 15
Tingkat Inflasi Provinsi Papua April 2023-April 2024
(Sumber: BPS Provinsi Papua Tahun 2024)

Inflasi di Provinsi Papua pada April 2023 ke April 2024 (y-on-y) mengalami penurunan dari 4,39% menjadi 1,78%. Hal ini mengindikasikan perkembangan harga barang dan jasa di Papua sudah bisa dikendalikan. Andil inflasi kelompok pengeluaran yaitu Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil 0,96%. Komoditas pangan penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah cabai rawit, cabai merah ddn bawang merah.

Andil Inflasi Kelompok Pengeluaran (y-on-y)			
	Rincian	**Inflasi**	**Andil Inflasi**
	INFLASI UMUM	**1,78**	**1,78**
1	Makanan, minuman dan tembakau	2,88	0,96
2	Pakaian dan alas kaki	1,12	0,05
3	Perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga	**-0,64**	**-0,11**
4	Perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga	0,79	0,03
5	Kesehatan	1,98	0,05
6	Transportasi	1,71	0,24
7	Informasi, komunikasi dan jasa keuangan	**-0,18**	**-0,01**
8	Rekreasi, olahraga dan budaya	**-0,40**	**-0,01**
9	Pendidikan	7,49	0,27
10	Penyediaan makanan dan minuman/restoran	1,26	0,09
11	Perawatan pribadi dan jasa lainnya	3,15	0,22

Gambar 2. 16
Andil Inflasi Kelompok Pengeluaran (y-on-y)
(Sumber: BPS Provinsi Papua Tahun 2024)

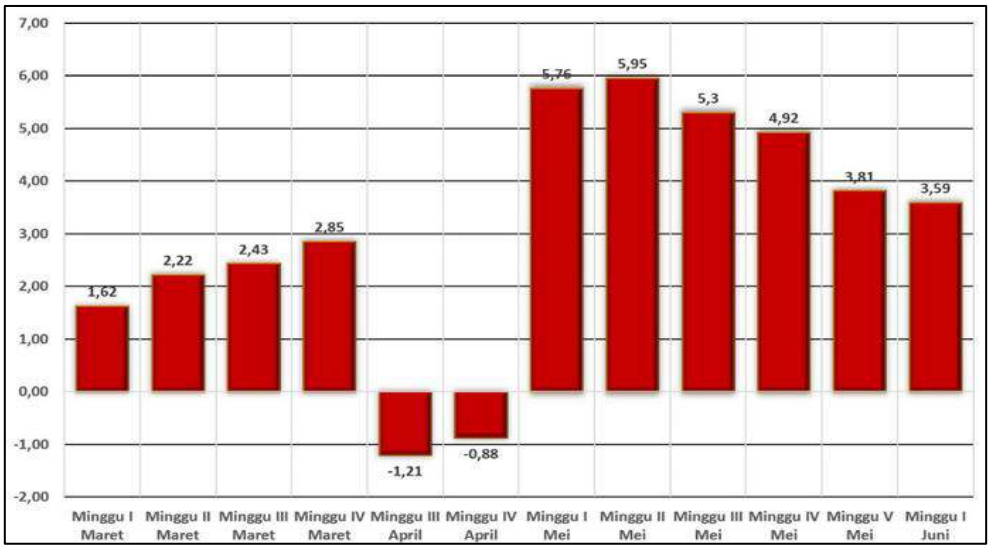

Gambar 2. 17
Indeks Perkembangan Harga pada Kab. Biak Numfor
(Sumber: BPS Provinsi Papua Tahun 2024)

Gambar 2. 18
Komoditas Penyumbang Utama Perkembangan Harga
(Sumber: BPS Provinsi Papua Tahun 2024)

C. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Biak Numfor akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2019-2023, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan antar

kabupaten. Data yang ada menunjukan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Biak Numfor digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

Selama lebih dari 10 tahun terakhir kondisi perekonomian Kabupaten Biak Numfor menunjukkan data yang berfluktuasi yang menggambarkan kondisi kesejahteraan ekonomi Biak Numfor yang mengalami pasang surut. Perkembangan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB. Nilai PDRB Kabupaten Biak Numfor (harga Berlaku) selama periode tahun 2013 s.d 2016 menunjukkan peningkatan. Pada tahun, 2017 nilai PDRB Kabupaten Biak Numfor menurun menjadi sebesar 4,99 Triliun rupiah. Penurunan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya resesi yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor. Dan pada tahun 2018 dan 2019 data menunjukkan ekonomi daerah mengalami pemulihan/ *recovery*. Namun di tahun 2020 ekonomi Biak Numfor mengalami kontraksi yang cukup berat akibat adanya Pandemi *COVID-19* yang melemahkan seluruh sektor usaha di masyarakat. Dan di tahun 2022 dan 2023 ekonomi kembali pulih dengan pertumbuhan positif.

Tabel 2. 14
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023

No.	Sektor	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Konsumsi Rumah Tangga	4,298.87	4,199.76	4,185.52	4,442.78	4,672.76
2	Konsumsi LNPRT	315.78	231.76	242.99	245.99	260.61
3	Konsumsi Pemerintah	1,331.16	1,368.91	1,450.68	1,572.40	1,776.02
4	PMTB	1,015.30	933.60	1,026.32	1,090.94	1,195.83
5	Perubahan Inventori	6.28	(57.14)	19.63	18.57	234.22
6	Net Ekspor (Ekspor-Impor)	(1,581.82)	(1,453.24)	(1,427.44)	1,468.38	(1,857.81)
Total PDRB		***5,486.11***	***5,223.67***	***5,865.16***	***5,865.16***	***6,281.62***

(Sumber: PDRB Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023)

D. Pendapatan Perkapita Penduduk

Pendapatan Perkapita adalah total penghasilan negara dibagi jumlah seluruh penduduknya. Sedangkan pada wilayah Provinsi dan atau Kabupaten/Kota, untuk mengetahui tingkat kemakmurannya menggunakan PDRB Perkapita. PDRB perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka wilayah tersebut semakin makmur.

Peningkatan pendapatan perkapita Kabupaten Biak Numfor dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk pertumbuhan ekonomi, investasi infrastruktur, dan kebijakan pemerintah. Investasi dalam infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas publik, dan informasi teknologi dapat meningkatkan efisiensi, ekonomi dan produktivitas. Infrastruktur yang baik memungkinkan distribusi barang dan jasa yang lebih efisien, (Aschauer, 1989).

Tabel 2. 15
PDRB atas Harga Konstant 2010 menurut Kabupaten Biak Numfor (Juta Rupiah)

Tahun	Harga
2019	3.429.603,63
2020	3.255.905,79
2021	3.336.293,57
2022	3.499.540,43
2023	3.612.072,24

(Sumber: BPS Prov Papua PDRB 2019-2023, data diolah)

PDRB Perkapita Kabupaten Biak Numfor Dapat dilihat pada tabel diatas dengan trent pendapatan perkapita mengalami peningkatan pada 3 tahun terakhir sedangankan pada tahun 2020 mengalami penurunan setelah adanya peningkatan di tahun 2019. PDRB Perkapita Kabupaten Biak Numfor tahun 2023 adalah Rp.3.612.072,24. Nilai ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

E. Pengeluaran Perkapita Penduduk

Pengeluaran perkapita adalah rata-rata pengeluaran untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama setahun baik berasal dari pembelian, pemberian, maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumha tangga dalam

rumah tangga tersebut. Pengeluaran perkapita penduduk di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 16
Pengeluaran Perkapita Penduduk Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023

Tahun	Pengeluaran Perkapita *(Rp./Jiwa/Tahun)*
2019	10.211
2020	9.705
2021	9.607
2022	9.788
2023	10.229

(Sumber: BPS Kab. Biak Numfor 2024, data diolah)

Pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2019 mecapai 10.211 rupiah, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 9.705 rupiah dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 9.607 rupiah. Pada tahun 2022 pengeluaran perkapita penduduk meningkat menjadi 9.788 rupiah dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 10.229 rupiah.

F. Indeks Gini Rasio

Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Rasio Gini berguna untuk melihat ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk di suatu wilayah. Nilai gini ratio berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu).

Nilai gini ratio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini Kabupaten Biak Numfor tahun sepanjang tahun 2019-2023 cukup fluktuatif, yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

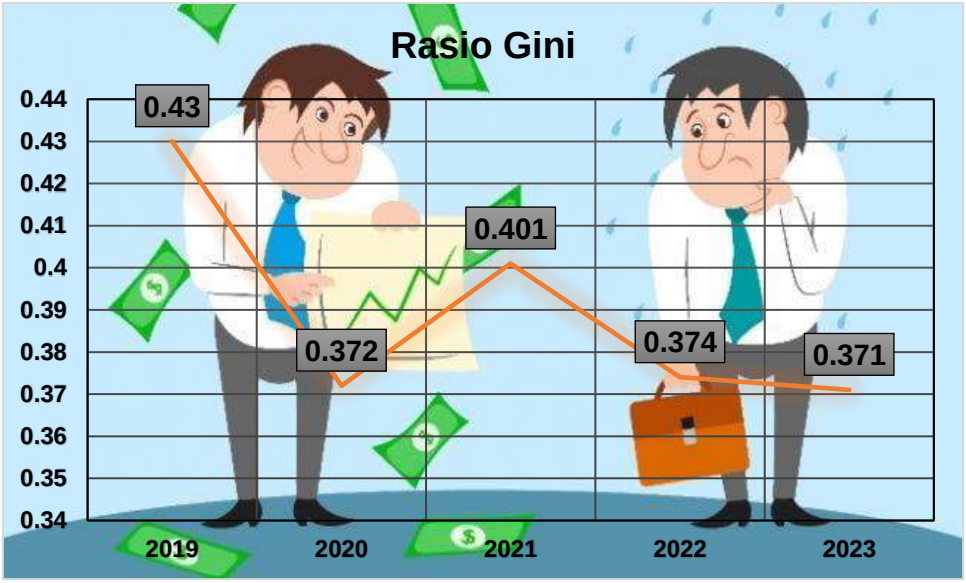

Gambar 2. 19
Rasio Gini Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023
(Sumber: BPS Provinsi Papua, Data Diolah)

Grafik di atas menunjukkan bahwa, pada tahun 2020 tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Biak Numfor, yang diukur dengan Gini Rasio adalah sebesar 0,372. Angka ini menurun sebesar 0,058 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2019 yang sebesar 0,430, namun meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 0,401. Walaupun mengalami peningkatan yang berarti meningkatnya ketimpangan, namun nilai 0,401 tersebut masih termasuk kategori ketimpangan sedang. Kemudian dua tahun selanjutnya mengalami penurunan berturut-turut menjadi 0,374 pada tahun 2022 dan 0,371 pada tahun 2023.

G. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin secara umum adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK). Pada Kabupaten Biak Numfor data tahun 2023 menunjukan persentase penduduk miskin berasa pada angka 23,53 persen atau sekitar 34.684 jiwa dari total keseluruhan penduduk pada tahun 2023. Persntase penduduk miskin Kabupaten Biak Numfor tahun 2019-2023 dapat digambarkan sebagai berikut.

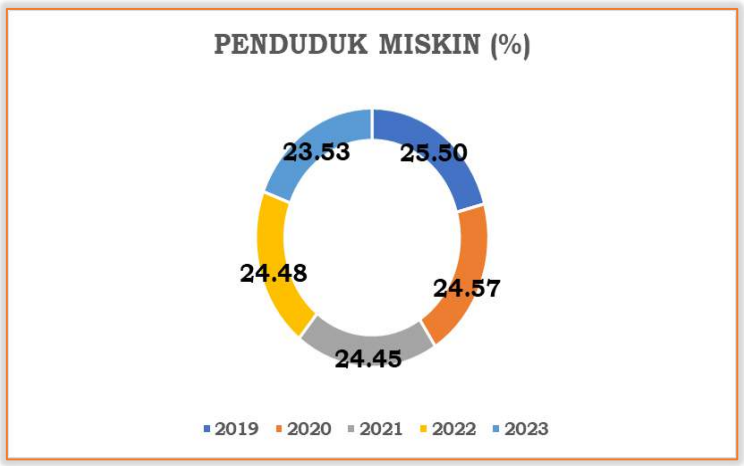

Gambar 2. 20
Persentase Penduduk Miskin Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023
(Sumber: Kabupaten Biak Numfor Dalam Angka Tahun 2020-2024)

H. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Penganggur terbuka adalah mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Data BPS Biak menunjukan pada tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Biak Numfor mencapai angka 5,72 persen, atau turun sekitar 1,68 persen dari tahun sebelumnya (2022), dimana data menunjukan tingkat pengangguran terbuka pada tahun tersebut mencapai angka 7,40 persen. Data tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Biak Numfor dapat dilihat pada grafik berikut.

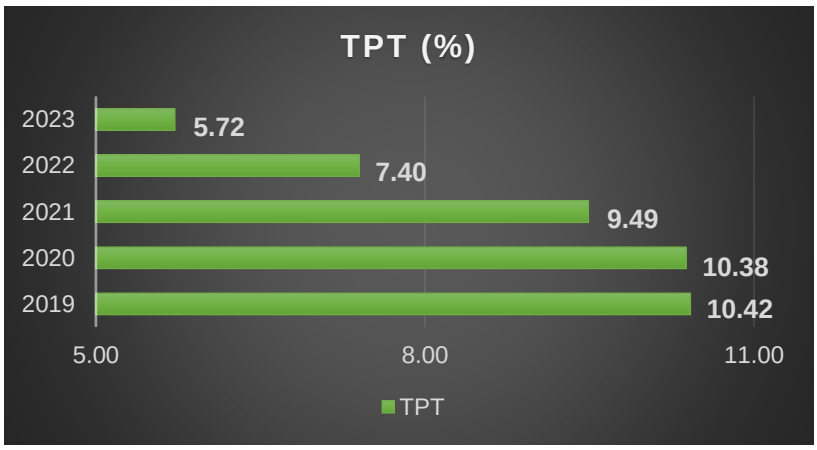

Gambar 2. 21
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023
(Sumber:BPS, Biak Numfor Dalam Angka Tahun 2020-2024)

I. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas.

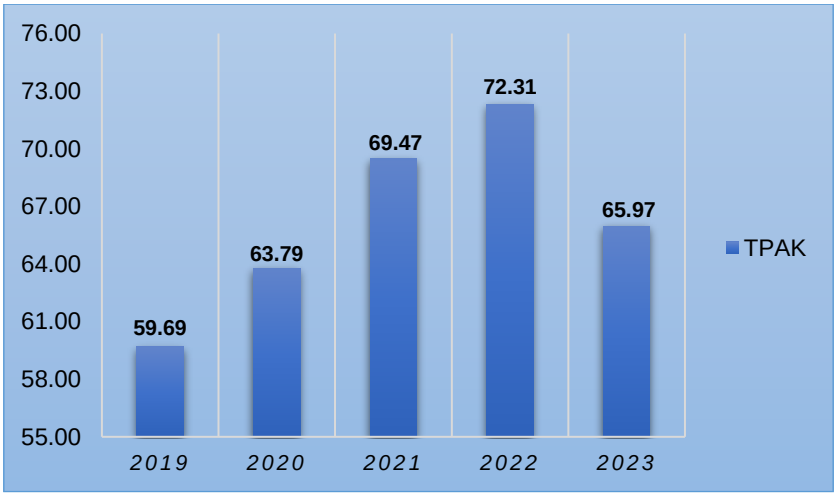

Gambar 2. 22
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023
(Sumber:BPS, Biak Numfor Dalam Angka Tahun 2020-2024)

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Biak yang tersaji pada grafik diatas menunjukan angka 65,97 persen untuk TPAK Kabupaten Biak Numfor tahun 2023. Angka ini mengalami penurunan dari 2 tahun sebelumnya (2021 dan 2022), pada dua tahun tersebut persentase TPAK Kabupaten Biak Numfor berada pada angka 69,47 persen padan 2021 dan 72,31 persen pada tahun 2022.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja.

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah, sebagai

dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. Perkembangan angka IPM, memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada suatu daerah. Perkembangan IPM Kabupaten Biak Numfor tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

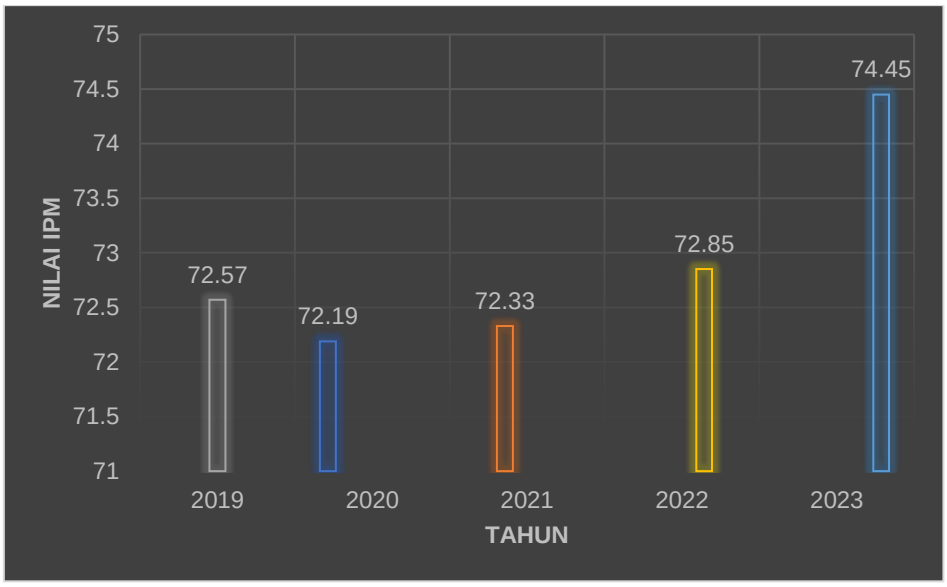

Gambar 2. 23
IPM Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023
(Sumber: Kabupaten Biak Numfor Dalam Angka Tahun 2020-2024, data diolah)

Pada grafik diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan IPM di Kabupaten Biak Numfor pada awal perencanaan jangka menengah di tahun 2019 adalah 72,57, nilai ini menurun pada tahun 2020 menjadi 72,19. Pencapaian angka IPM di tahun 2021 kembali meningkat menjadi 72,33 dan mengalami peningkatan berturut-turut menjadi 72,85 di tahun 2022 dan 74,45 pada tahun 2023. Dengan pencapaian IPM 74,23, maka menurut Konsep Pembangunan Manusia IPM Biak Numfor masih masuk dalam kategori kinerja pembangunan manusia ”tinggi” dengan angka pencapaian IPM antara 70,0 sampai 79,9.

B. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup adalah angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka usia harapan hidup Kabupaten Biak Numfor dari tahun 2019-2023 terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 usia harapan hidup berada di angka 68,20 tahun, berturut-turut mengalami kenaikan pada angka 68,25 tahun pada 2020, 70,39 tahun pada 2021, meingkat lagi menjadi 70,56 tahun pada 2022, dan pada

tahun 2023 angka usia harapan hidup di Kabupaten Biak Numfor berada diangka 70,75 tahun. Data terkait angka usia harapan hidup di Kabupaten Biak Numfor dapat dilihat pada gambar berikut.

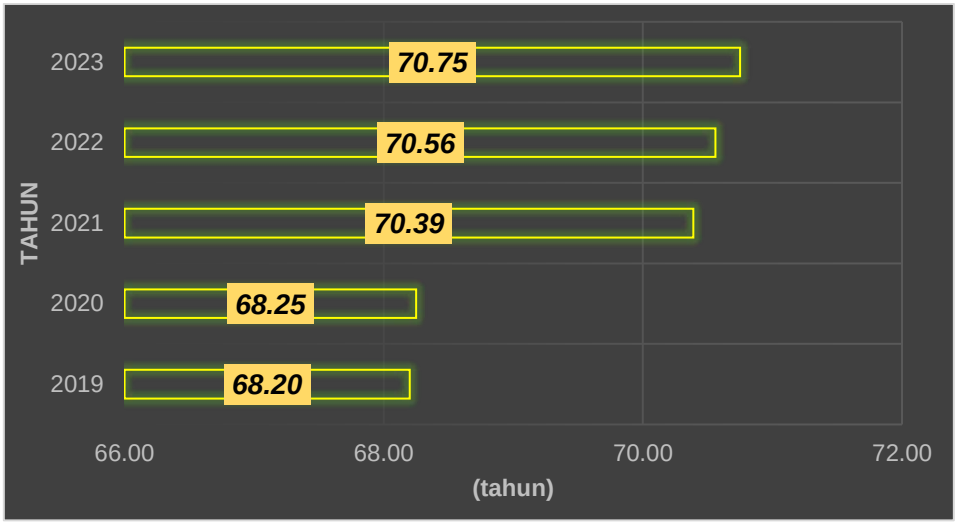

Gambar 2. 24
Usia Harapan Hidup Tahun 2019-2023 Kab. Biak Numfor
(Sumber: Kabupaten Biak Numfor Dalam Angka Tahun 2020-2024, data diolah)

C. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf untuk usia 15 tahun keatas di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2019 mencapai 95,70 persen, yang kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2020 yang mencapai 98,56 persen usia 15 tahun keatas yang melek huruf di Kabupaten Biak Numfor. Angka ini kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021-2023 dimana pada tahun 2021 angka melek huruf usia 15 tahun keatas mencapai 98,99 persen dan berturut-turut mengalami penurunan pada tahun 2022 dan tahun 2023 dengan angka yang sama yaitu 97,99 persen.

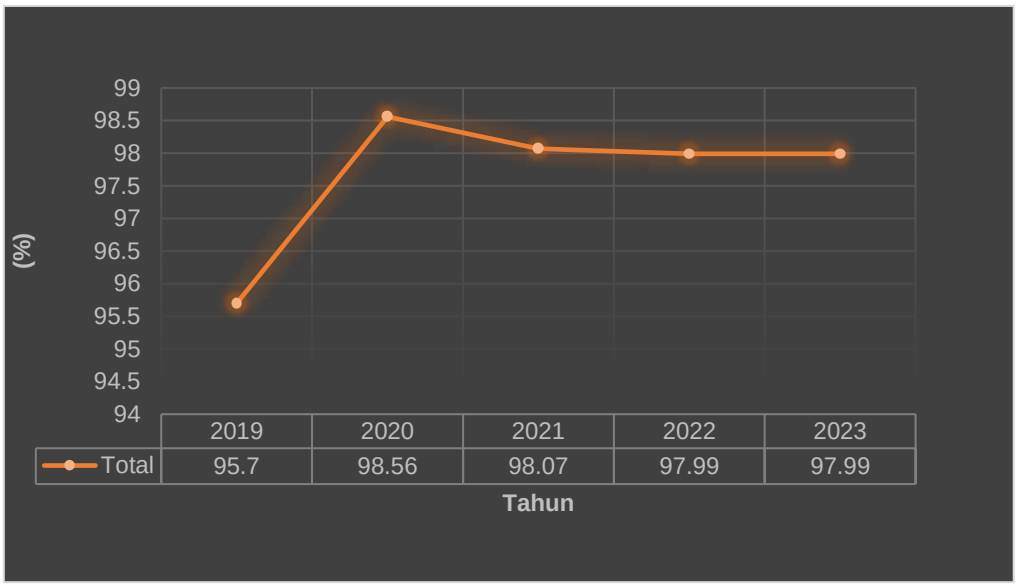

Gambar 2. 25
Angka Melek Huruf Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023
(Sumber: Kabupaten Biak Numfor Dalam Angka Tahun 2020-2024, data diolah)

D. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah secara umum didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang ditempuoleh penduduk berumur 15 tahun keatas untuk menempuh jenjang pendidikan. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2019-2023 mengalami kenaikan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2019 rata-rata lama sekolah mencapai 10,22 tahun, kemudian mengalami kenaikan pada tahuh-tahun selanjutnya yaitu 10,33 tahun pada tahun 2020, 10,34 tahun pada tahun 2021, 10,53 tahun pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Biak Numfor yaitu 10,54 tahun.

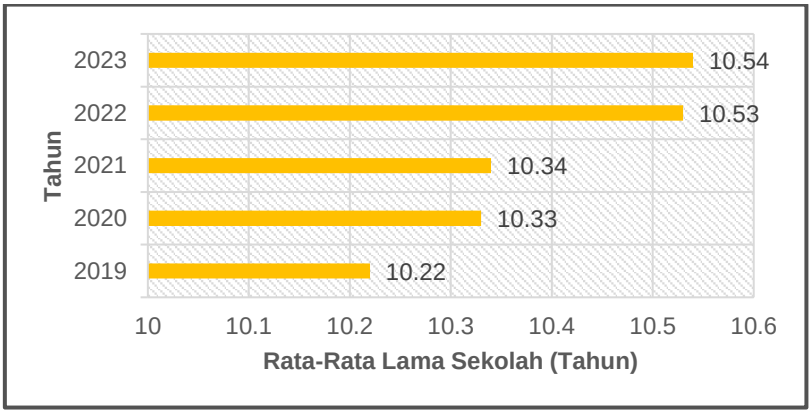

Gambar 2. 26
Rata-Rata Lama Sekolah Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023
(Sumber: Kabupaten Biak Numfor Dalam Angka Tahun 2020-2024, data diolah)

E. Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (tahaun) yang diharapkan atau dirasakan oleh anak pada usia tertentu. Harapan lama sekolah di Kabupaten Biak Numfor dapat dilihat pada gambar berikut.

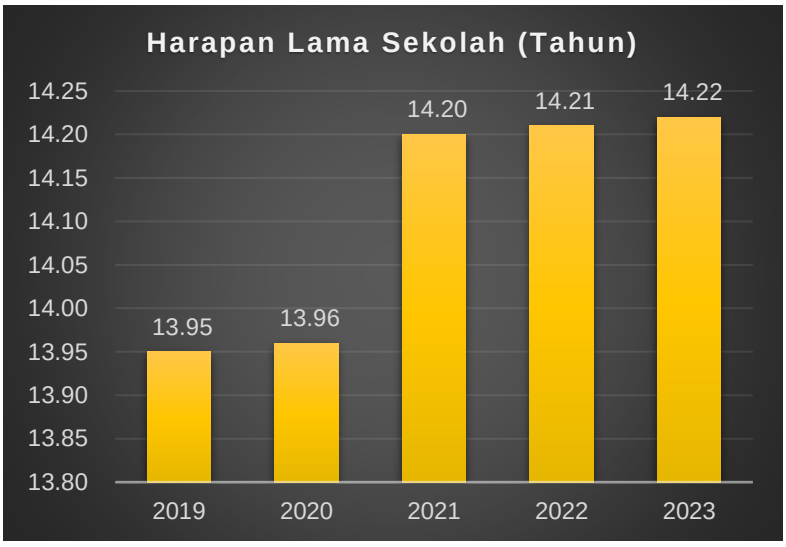

Gambar 2. 27
Harapan Lama Sekolah Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023
(Sumber: Kabupaten Biak Numfor Dalam Angka Tahun 2020-2024, data diolah)

Data pada gambar diatas menunjukan bahwa pada tahun 2019-2023 harapan lama sekolah di Kabupaten Biak Numfor mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 harapan lama sekolah pada angka 13,95 tahun, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 13,96 tahun. Trend kenaikan ini juga terus berlanjut pada tahun 2021 dimana pada tahun tersebut angka harapan lama sekolah menjadi 14,20 tahun, kemudian mengalami kenaikan lagi pada tahun 2022 menjadi 14,21 tahun dan pada tahun 2023 angka harapan lama sekolah di Kabupaten Biak Numfor menjadi 14,23 tahun.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklime berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja pada aspek kemampuan ekonomi daerah yang dilakukan terhadap beberap indikator sebagai berikut.

A. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT)

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal.

Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan. PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region.

Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*).

Tabel 2. 17
Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT) Kab. Biak Numfor

No.	Tahun	(Miliar Rp)
1	2019	4.398,87
2	2020	4.199,76
3	2021	4.185,52
4	2022	4.442,78
5	2023	4.672,76

(Sumber: PDRB Kab. Biak Numfor menurut Pengeluaran tahun 2019-2023, data diolah)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengeuaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) Kabupaten Biak Numfor tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi, hal ini dilihat pada tahun 2019 nilai PKRT berada pada angka 4.398,87 miliar, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 di angka 4.199,76 dan 4.185,52 miliar. Pada tahun 2022 PKRT meningkat mencapai 4.442,78 miliar dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 di angka 4.672,76 milirar rupiah.

B. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita

Secara umum pengeluaran konsumsi non pangan adalah banyaknya uang yang dikeluarkan untuk konsumsi non pangan yang meliputi pemenuhan kebutuhan sandang, rumah, rekreasi, dan lain-lain yang diukur dalam Rp/bulan. Data BPS menunjukan tahun 2022 pengeluaran per kapita per bulan adalah 458.146 rupiah, sedangkan pada tahun 2023 pengeluaran konsumsi non pangan perkapita per bulan mencapai 549.090 rupiah atau 63,66 persen.

Tabel 2. 18
Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita Kab. Biak Numfor

Kelompok Komoditas	Tahun	
	2022	2023
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	249.257	349.566
Aneka Barang dan Jasa	90.54	107.553
Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	11.934	14.706
Barang Tahan Lama	11.163	15.99
Pajak, Pungutan dan Asuransi	40.799	56.192
Keperluan Pesta dan Upacara/ Kenduri	9.453	5.083
Total	**458.146**	**549.090**

(Sumber: BPS, Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Kab. Biak Numfor Tahun 2023)

C. Rasio Ekpor-Impor terhadap PDB

Nilai selisih ekspor dan impor atau disebut Net Ekspor, terlihat bahwa dari tahun 2019 hingga 2023 Biak Numfor lebih banyak mengimpor barang masuk ke dalam daerah ketimbang melakukan ekspor barang ke luar daerah. Hal ini bisa dilihat dari nilai kontribusi net ekspor yang negatif dari tahun 2019–2023. Defisit perdagangan Biak Numfor di tahun 2023 memberikan kontribusi negatif terhadap PDRB Biak yakni sebesar -29,58 persen. Secara rinci kontribusi net ekspor terhadap PDRB Biak tahun 2019-2023 dapat diliat pada gambar berikut.

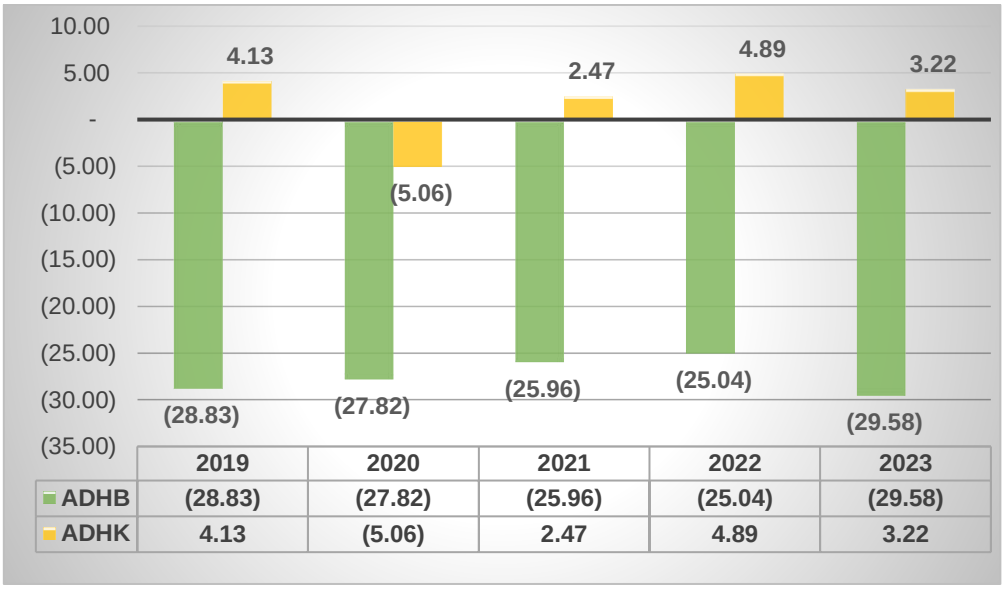

	2019	2020	2021	2022	2023
ADHB	(28.83)	(27.82)	(25.96)	(25.04)	(29.58)
ADHK	4.13	(5.06)	2.47	4.89	3.22

Gambar 2. 28
Kontribusi Net Ekspor (Ekspor-Impor) terhadap PDB Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 berdasarkan ADHB dan ADHK (persen)
(Sumber: PDRB Kab. Biak Numfor menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023, data diolah)

2.1.3.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/ infrastruktur di Kabupaten Biak Numfor dilakukan terhadap indikator-indikator berikut.

A. Ketersediaan Air Bersih

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Biak Numfor tahun 2019- 2023 menunjukan bahwa untuk memenuhi kebutuhan sarana air bersih, PT. WAR Besrendi (Badan Pengelola Air Minum Daerah) telah menjual air bersih pada tahun 2019 sebanyak 2.860.665 m^3 kepada 8.068 pelanggan aktif, pada 2020 air terjual sebanyak 2.512.565,99 m^3 kepada 8.344 pelanggan aktif. Pada tahun 2021 mengalami penurunan di angka 2.225.208 m^3 air terjual kepada 8.283 pelanggan aktif, dan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 185.759 m^3 air terjual pada 9.094 pelanggan aktif. Data akhir pada tahun 2023 menunjukan sebanyak 1.971.094 m3 terjual kepada 7.516 pelanggan aktif. Pelanggan aktif tersebar pada dua Distrik yaitu Distrik Biak Kota dengan jumlah pelanggan sebesar 1.771 pelanggan dengan jumlah air disalurkan 571.567 m^3 dan Distrik Samofa dengan jumlah pelanggan 5.745 pelanggan dengan jumlah air disalurkan 1.399.527 m^3.

Tabel 2. 19
Rasio Penduduk yang mendapatkan Air Bersih yang disalurkan oleh PT. WAR Bersendi Tahun 2019-2023

Tahun	Air Bersih Disalurkan (m3)	Jumlah Pelanggan Aktif	Rasio Penduduk yang Menggunakan Air Bersih (%)
2019	2.860.665	8.068	5,29
2020	2.512.565,99	8.344	5,72
2021	2.225.208	8.283	5,67
2022	185.759	9.094	6,70
2023	1.971.094	7.516	5,10

(Sumber: Kabupaten Biak Numfor dalam Angka Tahun 2020-2024, data diolah)

B. Ketersediaan Listrik

Listrik merupakan kebutuhan utama bagi wilayah yang perekonomiannya sedang tumbuh, meningkatnya kebutuhan pasokan energi listrik bagi masyarakat akan terus diupayakan pemerintah dapat tersedia. Peningkatan kebutuhan energi listrik tidak saja dipengaruhi oleh banyaknya penduduk di suatu wilayah tetapi juga faktor aktifitas ekonomi penduduk yang terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin tinggi aktifitas ekonomi maka akan semakin besar kebutuhan akan energi listriknya. Rasio penduduk di Kabupaten Biak Numfor yang mendapatkan akses listrik PT. PLN dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 20
Rasio Penduduk yang mendaptkan Akses Listrik oleh PT. PLN di Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023

Tahun	Nilai Penjualan Listrik (kWh)	Jumlah Pelanggan PLN Aktif	Rasio Penduduk yang mendapatkan akses Listrik (%)
2019	70.009,74	36.620	24,03
2020	77.201.046	38.450	26,34
2021	85.141.273	39.984	27,35
2022	7.762.792,22	40.391	29,74
2023	85.306.484	42.344	28,73

(Sumber: Kabupaten Biak Numfor dalam Angka Tahun 2020-2024, data diolah)

Data pada tabel diatas menunjukan bahwa rasio penduduk di Kabupaten Biak Numfor yang mendapatkan akses listrik dari PT. PLN Biak pada tahun 2019 mencapai 24,03 persen atau 36.620 pelanggan aktif, pada tahun 2020 penduduk yang mendapatkan akses listrik meningkat menjadi 38.450 pelanggan atau 26,34 persen. Pada tahun 2021 sampai tahun 2023 jumlah penduduk yang medapatkan akses listrik terus meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 27,35 persen pada tahun 2021, 29,74 persen pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 rasio penduduk yang mendaptkan akses listrik mencapai 28,73 persen atau 42.344 pelanggan aktif.

C. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah indeks yang menggambarkan tingkat perbandingan harga barang/ jasa konstruksi antar wilayah dibandingkan dengan harga barang/ jasa konstruksi suatu kota acuan. Data BPS Kabupaten Biak Numfor menunjukan Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Biak Numfor (dibandingkan dengan harga barang/ jasa Kota Makassar) tahun 2021 berada pada nilai 125,74. pada tahun 2022 nilai meningkat menjadi 130,13, dan menurun pada tahun 2023 menjadi 128,76.

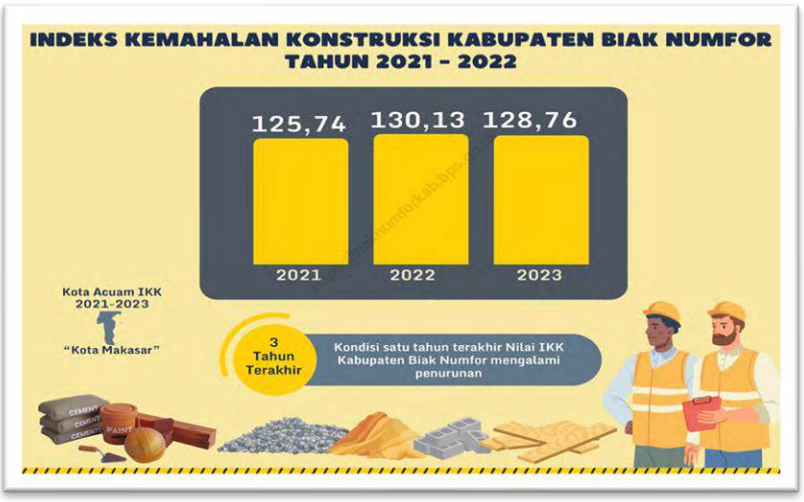

Gambar 2. 29
Indeks Kemahalan Konstruksi Kab. Biak Numfor Tahun 2021-2023
(Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Kab. Biak Numfor, BPS-2023)

D. Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan

Jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau

air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Jalan mempunyai peranan penting terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar wilayah yang seimbang, pemerataan hasil pembangunan serta pemantapan pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Panjang jalan dengan kondisi yang baik sangat dibutuhkan dalam meningkatkan mobilitas manusia dan barang, memberikan akses ke layanan publik, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan berbagai fungsi lainnya.

Pada tahun 2019-2023 panjang jalan dalm kondisi baik terus mengalami peningkatan. Tahun 2019 panjang jalan dalam kondisi baik adalah 198,075 km, kemudian mengalami peningkatan menjadi 215,977 km pada tahun 2020. pada tahun 2021 panjang jalan dalam kondisi baik mencapai 230,090 km artinya mengalami penigkatan 14,133 km dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 panjang jalan dalam kondisi baik adalah 230,090 km, sama dengan panjang jalan pada tahun 2022. Data terakhir menunjukan pajang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Biak Numfor mencapai 237,314 km pada tahun 2023. Data terkait panjang jalan dengan kondisi masing-masing tertera pada tabel berikut.

Tabel 2. 21
Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan di Kab. Biak Numfor (km) Tahun 2019-2023

Kondisi Jalan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Baik	198,075	215,977	230,09	230,09	237,314
Sedang	164,491	167,839	114,09	114,09	77,212
Rusak	230,890	206,240	121,85	121,85	159,074
Rusak Berat	194,250	197,650	246,10	246,10	23,178

(Sumber: BPS, Kabupaten Biak Numfor Dalam Angka Tahun 2020-2024, data diolah)

E. Jumlah Orang/ Barang melalui Dermaga

Jumlah penumpang (Orang) dan bongkaran (barang) di Pelabuhan Laut Biak yang terdata dalam sistem INAPORETNET tahun 2023 digambarkan pada

rekapitulasi realisasi kedatangan dan keberangkatan kapal di pelabuhan Biak sebagaimana gambar berikut.

REKAPITULASI REALISASI KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL
DI PELABUHAN BIAK
YANG MASUK DALAM SISTEM INAPORTNET
PERIODE BULAN : JANUARI S/D DESEMBER 2023

NO	JENIS PELAYARAN	JML. CALL KAPAL	UKURAN			JML PNP NAIK (ORANG)	JML PNP TURUN (ORANG)	JML. PNP TURUN + NAIK (ORANG)	JUMLAH BONGKARAN (T/M3)	JUMLAH MUATAN (T/M3)	TOTAL B / M (T/M3)	JML. CONTAINER		JML. HEWAN		KET.
			DWT	GT	LOA							TURUN	NAIK	TURUN	NAIK	
I.	ANGKUTAN LUAR NEGERI															
1.	KAPAL LANDING															
2.	KAPAL PENUMPANG (WISATA)	6	4.090	22.447	476	253	300	553								
3.	TUG BOAT (TB)															
4.	BARGE (BG)															
II.	ANGKUTAN DALAM NEGERI															
1.	KAPAL PENUMPANG	92	285.903	1.338.240	13.038	38.403	15.034	53.437	732.281	2.906.573	2.628.854	169	244			
2.	KAPAL PERINTIS	410	146.007	442.369	58.252	18.237	33.834	52.071	2.644	14.429	17.073					
3.	KAPAL CONTAINER	93	892.451	813.162	12.595	-	-	-	48.249.813	27.993.978	76.243.791	9.068	6.682			
4.	KAPAL PNP LAINNYA	140	16.779	40.608	5.792	4.871	5.100	9.971	138	143	281					
5.	KAPAL BARANG (CARGO)	33	33.317	29.801	1.907	66	95	161	40.256	129	40.385					
6.	TUG BOAT	36	1.763	5.840	837	-	-	-	-	-	-					
7.	BARGE	38	59.251	70.620	2.364	-	-	-	109.934	108.803	218.737					
8.	BARGE CRANE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
9.	KAPAL SUPLAY/SURVEY	3	20.903	21.235	335	-	-	-	225.501	207.500	433.001					
10.	KAPAL PENUMPANG (WISATA)	3	325	543	109	36	20	56	-	-	-					
11.	OIL TANGKER	197	1.085.559	888.347	19.876	-	-	-	443.420	420.290	863.710					
12.	CARFT TANK	12	6.145	6.751	650	-	-	-	3.492	20.674	24.166					
13.	KAPAL PELRA	48	2.657	2.356	1.075	-	-	-	-	1.412	2.535					
TOTAL		1.111	2.555.150	3.683.319	117.306	61.876	54.383	116.259	49.807.479	31.673.931	80.472.533	9.237	6.926	-	-	-

Gambar 2. 30
Rekapitulasi Kedatangan dan Keberangkatan Kapal di Pelabuhan Biak Tahun 2023
(Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Biak Numfor Tahun 2024)

Gambar diatas menunjukan bahwa pada tahun 2023 jumlah penumpang (orang) yang melalui dermaga/ pelabuhan Biak berjumlah 116.259 orang. Sementara untuk jumlah bongkaran dan muatan (barang) pada tahun 2023 berjumlah 80.472.533 Ton/ M^3 .

2.1.3.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator/ variabel berikut.

A. Lama Proses Perizinan

Dalam menunjang kelancaran pelayanan pemerintahan, tentunya perlu didukung dengan efektifitas, ketelitian, ketetpatan dan kecepatan dalam pemberian pelayanan terutama dalam pelayanan yang bersentuahn langsung dengan masyarakat dan atau penerima manfaat lainnya.

Salah satau indikator yang penting diukur dalam pelayanan langsung ini adalah lamanya proses dalam pengurusan perizinan yang pada Kabupaten Biak Numfor pelayanan ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Data menunjukan bahwa pada tahun 2023 lama proses perizininan mulai dari tahap awal registrasi sampai kepada penerbitan izin

membutuhkan waktu 3 (tiga) hari. Waktu ini lebih cepat 4 (hari) dari pelayanan tahun 2019 dimana proses perizinan dari awal sampai penerbitan izin bisa berlangsung 7 (tujuh) hari kerja. Artinya ada peningkatan yang baik dalam pelayanan sehingga diharapkan pada tahun selanjutnya proses perizinan dapat menempuh waktu yang lebih singkat guna kelancaran pelayanan di Kabupaten Biak Numfor.

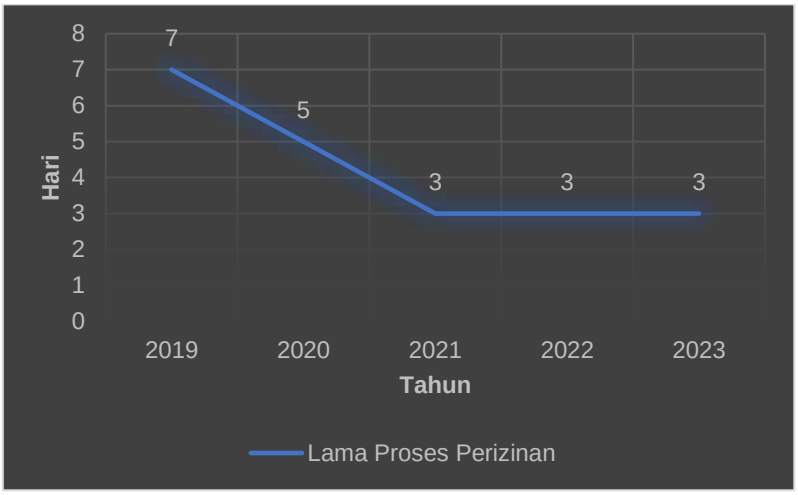

Gambar 2. 31
Lama Proses Pengurusan Perizinan Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023
(Sumber: DPMPTSP Kab. Biak Numfor Tahun 2024)

B. Penanaman Modal

Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak ganda (*mulitiplier effect*) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinan perekonomian menghasilkan output yang banyak, pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.

Jumlah investor berskala nasional baik PMDN maupun PMA di Kabupaten Biak Numfor tahun 2023 berjumlah 18 investor, yang terdiri dari 17 PMDN dan 1 PMA. Angka ini meningkat dari tahun 2022 yang hanya berjumlah 11 investor yang terdiri dari 1 PMA dan 10 PMDN. Sedangkan pada tahun 2021 data menunjukan jumkah investor berskala nasional di Kabupaten Biak Numfor berjumlah 13 investor yang terdiri dari 12 PMDN dan 1 PMA. Data jumlah investor berskalan nasional dapat dilihat pada gambar berikut.

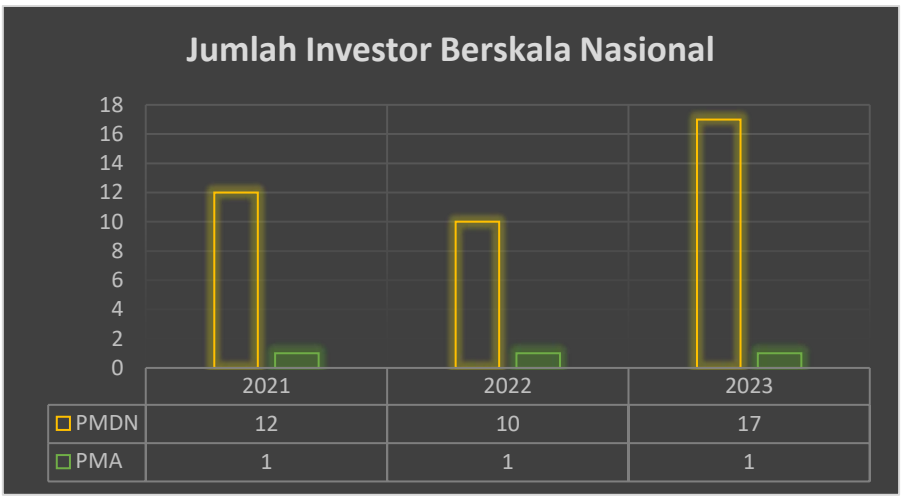

Gambar 2. 32
Data Jumlah Investor Berskala Nasional Kab. Biak Numfor Tahun 2021-2023
(Sumber: DPMPTSP Kab. Biak Numfor Tahun 2023)

2.1.3.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator berikut.

- **Kualitas Tenaga Kerja**

Hasil analisis terhadap kualitas tenaga kerja di Kabupaten Biak Numfor tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 22
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkandan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023

Tahun	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			% Bekerja terhadap Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) *(%)*
		Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja				
2019	SD	15625	963	16588	94,19	10711	27299	60,76
	SMP	10072	546	10618	94,85	14836	25454	41,71
	SMA	21686	3742	25428	85,28	15987	41415	61,39
	Perguruan Tinggi	10807	1518	12325	87,68	2340	14665	84,04
	Total	***58190***	***6769***	***64959***	***89,57***	***43874***	***108833***	***59,68***
2020	SD	18736	1066	19802	94,62	10631	30433	65,07
	SMP	10952	844	11796	92,85	12085	23881	49,39
	SMA	24039	4398	28437	84,53	14679	43116	65,95
	Perguruan Tinggi	8876	946	9822	90,37	2263	12085	81,27
	Total	***62603***	***7254***	***69857***	***89,62***	***39658***	***109515***	***63,79***
2021	SD	20342	1116	21458	94,80	8398	29856	71,87
	SMP	12834	1024	13858	92,61	10216	24074	57,56
	SMA	26322	4455	30777	85,52	12856	43633	70,54

Tahun	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			% Bekerja terhadap Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) *(%)*
		Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja				
	Perguruan Tinggi	10538	749	11287	93,36	2538	13825	81,64
	Total	***70036***	***7344***	***77380***	***90,51***	***34008***	***111388***	***69,47***
2022	SD	24535	1042	25577	95,93	8998	34575	73,98
	SMP	13117	732	13849	94,71	7772	21621	64,05
	SMA	27791	3898	31689	87,70	12009	43698	72,52
	Perguruan Tinggi	10405	389	10794	96,40	2594	13388	80,62
	Total	***75848***	***6061***	***81909***	***92,60***	***31373***	***113282***	***72,31***
2023	SD	16261	222	16483	98.65	7790	24273	67,91
	SMP	9137	242	9379	97.42	10080	19459	48,20
	SMA	22770	2101	24871	91.55	11383	36254	68,20
	Perguruan Tinggi	9751	952	10703	91.11	2443	13146	81,42
	Total	***57919***	***3517***	***61436***	***94.28***	***31696***	***93132***	***65,97***

(Sumber: Kabupaten Biak Numfor Dalam Angka Tahun 2020-2024, data diolah)

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam betuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.4.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelengaraan urusan wajib pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang urusan yaitu urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat dan urusan sosial.

A. Bidang Urusan Pendidikan

Urusan bidang pendidikan fokus mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. Beberapa indikator yang digunakan untuk menganalisis kinerja urusan bidang pendidikan yang merupakan urusan wajib diuraikan sebagai berikut.

1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. APK suatu jenjang pendidikan bisa mempunyai nilai lebih dari 100. Hal ini disebabkan oleh adanya siswa yang berusia di luar batasan usia sekolah (baik lebih muda ataupun lebih tua). Pada jenjang SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Biak Numfor, persentase APK dari tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan.

Tabel 2. 23
Angka Partisipasi Kasar (APK) per Jenjang Pendidikan di Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023

Jenjang Pendidikan	APK Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
SD	103,06	103,79	107,98	108,44	109,05
SMP	97,54	95,88	93,64	89,24	95,65
SMA	96,42	96,42	101,60	107,54	102,05

(Sumber: BPS, Kabupaten Biak Numfor Dalam Angka Tahun 2020-2024, data diolah)

Berdasarkan data BPS di atas, diketahui pada tahun 2019, nilai APK pada jenjang SD sebesar 103,06 persen, pada jenjang SMP sebesar 97,54 persen dan padan jenjang SMA sebesar 96,42 persen. Nilai ini mengalami trend peningkatan yang positif setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2023 nilai APK SD sebesar 109,05 dan SMP sebesar 95,65 persen serta pada jenjang SMA sebesar 102,05 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua dari anak usia sekolah sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang semestinya dan kemungkinan sisanya sedang sekolah pada jenjang pendidikan di bawahnya/di atasnya atau bahkan mereka tidak sekolah lagi. Oleh karena itu, untuk memperjelas lagi arti APK diperlukan indikator Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS).

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang

seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

APM membatasi usia siswa sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikan sehingga angkanya lebih kecil. APM SD di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2019 adalah sebesar 90,20 persen, artinya 90 persen siswa usia sekolah SD bersekolah tepat waktu, sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya, yakni 7-12 tahun. Sementara itu pada jenjang SMP/sederajat, APM-nya sebesar 71,31 persen yang berarti bahwa 71 dari 100 murid penduduk usia 13-15 tahun yang terserap sebagai murid SMP/sederajat dan sisanya bisa terserap di jenjang pendidikan SD, SMU, atau bahkan tidak sekolah lagi. Begitu pula untuk jenjang SMU/sederajat, nilai APM-nya sebesar 61,95 persen, sehingga dapat dikatakan bahwa 38,05 persen penduduk usia 16-18 tahun tidak terserap ke bangku sekolah jenjang SMA.

Tabel 2. 24
Angka Partisipasi Murni (APM) per Jenjang Pendidikan di Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023

Jenjang Pendidikan	APM Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
SD	90,20	90,41	90,45	94,83	94,98
SMP	71,31	71,46	71,37	65,59	69,17
SMA	61,95	61,97	64,58	64,21	65,10

(Sumber: BPS, Kabupaten Biak Numfor Dalam Angka Tahun 2020-2024, data diolah)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa masih terdapat murid yang mengikuti jenjang pendidikan tertentu yang tidak sesuai dengan kelompok umur pendidikannya. Hal ini dapat dilihat dari selisih antara APK dan APM.

Pada jenjang pendidikan SD misalnya, capaian APK SD di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2019 sebesar 103,06 persen, masih relatif cukup besar disparitasnya dengan capaian APM SD yang sebesar 90,2 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 12,86 persen murid yang bersekolah di SD tidak sesuai dengan kelompok umur pendidikannya (7-12 tahun). Pada jenjang pendidikan SMP terdapat sebanyak 26 dari 100 murid yang bersekolah di SMP tidak sesuai dengan kelompok umur pendidikannya (13-15 tahun). Besarnya disparitas/kesenjangan tersebut utamanya disebabkan karena kecenderungan orang

tua yang ingin menyekolahkan anaknya lebih awal, baik pada tataran pendidikan prasekolah maupun pendidikan sekolah dasar serta adanya siswa yang berusia 12 tahun keatas masih bersekolah.

Perbandingan APM dan APK menurut jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

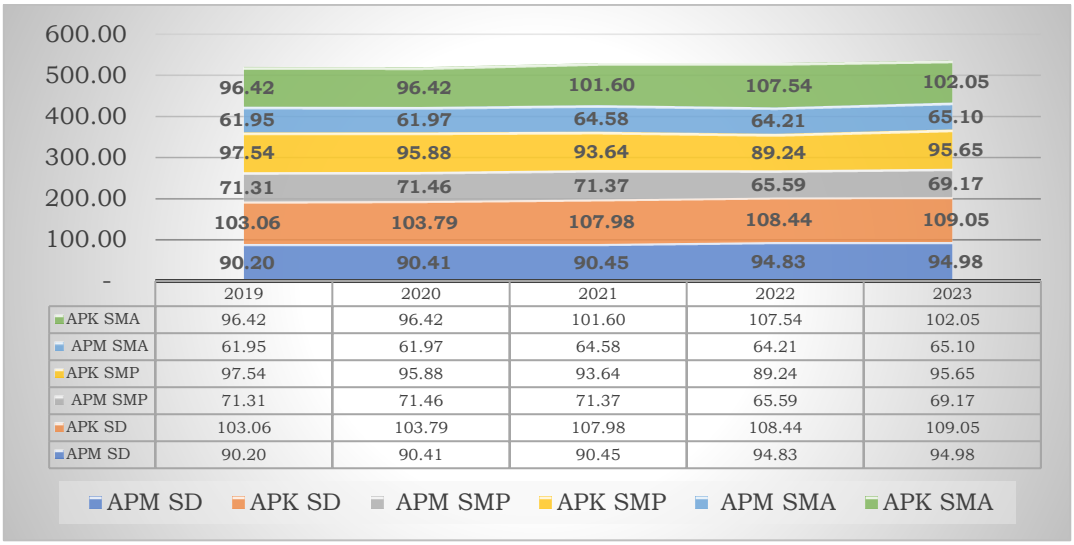

	2019	2020	2021	2022	2023
APK SMA	96.42	96.42	101.60	107.54	102.05
APM SMA	61.95	61.97	64.58	64.21	65.10
APK SMP	97.54	95.88	93.64	89.24	95.65
APM SMP	71.31	71.46	71.37	65.59	69.17
APK SD	103.06	103.79	107.98	108.44	109.05
APM SD	90.20	90.41	90.45	94.83	94.98

Gambar 2. 33
Perbandingan APK dan APM per Jenjang Pendidikan di Kab.Biak Numfor Tahun 2019-2023
(Sumber: BPS Kab. Biak Numfor Tahun 2024, data diolah)

3. Rasio Guru dan Murid

Rasio guru dan murid merupakan indikator untuk mengetahui beberapa banyak murid/ siswa yang berada dalam tanggung jawab satu guru. Makin tinggi angka rasio berarti seorang guru harus bertanggung jawab terhadap murid dengan jumlah yang mekain banyak begitun sebaliknya. Rasio guru dan murid di Kabupaten Biak Numfor per jenjang pendidikan digambarkan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 25
Jumlah dan Rasio Guru dan Murid per Jenjang Pendidikan Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	SD					
1.1	*Jumlah Guru*	*1184*	*1293*	*1302*	*1339*	*1392*
1.2	*Jumlah Murid*	*22256*	*20864*	*20877*	*20604*	*20387*
1.3	*Rasio*	*1:19*	*1:16*	*1:16*	*1:15*	*1:15*

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
2	**MI**					
2.1	*Jumlah Guru*	*12*	*10*	*10*	*10*	*9*
2.2	*Jumlah Murid*	*59*	*69*	*68*	*68*	*80*
2.3	*Rasio*	*1:5*	*1:7*	*1:7*	*1:7*	*1:9*
3	**SMP**					
3.1	*Jumlah Guru*	*585*	*628*	*644*	*662*	*729*
3.2	*Jumlah Murid*	*9707*	*9467*	*9675*	*9711*	*9718*
3.3	*Rasio*	*1:17*	*1:15*	*1:15*	*1:15*	*1:13*
4	**MTS**					
4.1	*Jumlah Guru*	*11*	*11*	*12*	*12*	*7*
4.2	*Jumlah Murid*	*66*	*84*	*75*	*75*	*126*
4.3	*Rasio*	*1:6*	*1:8*	*1:6*	*1:6*	*1:18*
5	**SMA**					
5.1	*Jumlah Guru*	*388*	*402*	*375*	*394*	*398*
5.2	*Jumlah Murid*	*6208*	*6180*	*6126*	*5990*	*6127*
5.3	*Rasio*	*1:16*	*1:15*	*1:16*	*1:15*	*1:15*
6	**SMK**					
6.1	*Jumlah Guru*	*181*	*193*	*183*	*178*	*195*
6.2	*Jumlah Murid*	*2401*	*2208*	*2240*	*2183*	*2242*
6.3	*Rasio*	*1:13*	*1:11*	*1:12*	*1:12*	*1:11*

(Sumber: BPS, Kabupaten Biak Numfor Dalam Angka Tahun 2024, data diolah)

4. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah mengacu pada persentase subjek yang tidak menyelesaikan studi atau program setelah pengacakan atau intervensi . Angka ini merupakan ukuran putus sekolah dan dapat bervariasi secara signifikan di antara berbagai studi dan intervensi.

Jumlah siswa per jenjang pendidikan di Kabupaten Biak Numfor yang tidak menyelesaikan studi tahun 2021-2023 tersaji sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 26
Jumlah Siswa/ Murid Putus Sekolah Tahun 2021-2023

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun		
		2021	2022	2023
1	SD	550	541	538
2	SMP	339	326	301
3	SMA	280	284	262
4	SMK	259	242	231
Total		**1428**	**1393**	**1332**

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Biak Numfor Tahun 2024)

Data distas menunjukan tahun 2021 jumlah siswa putus sekolah berjumlah 1428 siswa. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 1393 siswa yang putus sekolah, kemudian jumlah tersebut menurun kembali pada tahun 2023 menjadi 1332 siswa putus sekolah.

5. Dukungan Pendidikan bagi OAP

Pemerintah daerah memberikan dukungan di bidang pendidikan bagi OAP melalui beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khusunya pada program pendidikan tinggi yang capaian keberhasilannya diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut.

Tabel 2. 27
Dukungan Pemerintah bagi OAP dalam Bidang Pendidikan Kab. Biak Numfor

Indiaktor	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Cakupan OAP Penerima Beasiswa Dalam/Luar Negeri *(orang)*	128	168	209	238
Cakupan OAP yang lulus tes Perguruan Tinggi Kedinasan/ Akademi Militer/ Akademi Kepolisian *(orang)*	18	23	25	NA
Jumlah Penerima Kartu Biak Pintar *(orang)*	-	550	7500	7650

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Biak Numfor Tahun 2023)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 OAP yang menerima beasiswa dalam/ luar negeri berjumlah 238 orang. Angka ini meningkat dari tahun 2022 yang berjumlah 209 orang. Pada tahun 2020 jumlah OAP yang menerima beasiswa dalam/ luar negeri berjumlah 128 orang. Sementara untuk OAP yang lulus lulus tes perguruan tinggi kedinasan tahun 2020 berjumlah 18 orang, dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 23 orang, dan kembali meningkat menjadi 25 orang pada tahun 2022.

Dari capaian inidkator diatas dapat disimpulkan bahwa pelakasanaan program kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dalam memeberikan dukungan kepada OAP pada program pendidikan tinggi terlaksana dengan cukup baik karena memiliki capaian *trend* positif (meningkat) setiap tahunnya.

B. Bidang Urusan Kesehatan

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan penduduk, karena kesehatan merupakan investasi untuk meningkatkan SDM. Dalam rangka menuju sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif salah satu faktor pendukung adalah manusia yang sehat sesuai siklus kehidupan mulai dari ibu hamil sampai dengan lanjut usia.

1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2019 mencapai 149, angka ini meningkat di tahun 2020 yang mencapai 189 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2021 angka kematian ibu meningkat menjadi 359 kematian, angka ini kemudian menurun pada data dua tahun terahkir yaitu 170 kematian ibu di tahun 2022 dan 160 kematian ibu di tahun 2023.

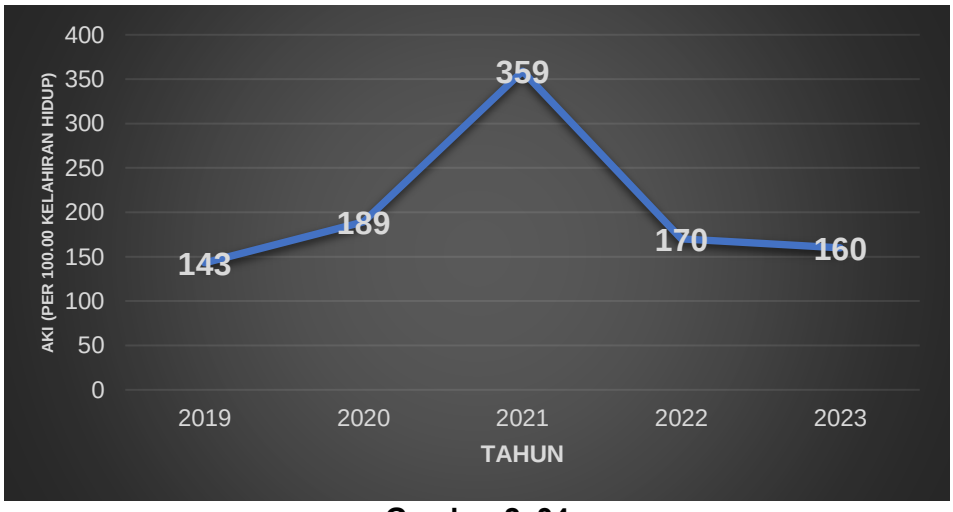

Gambar 2. 34
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup tahun 2019-2023 di Kab. Biak Numfor
(Sumber: Dinas Kesehtan Kab. Biak Numfor, data diolah)

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu tertentu.

Angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2019 mecapai 2,1 persen, angka ini meningkat di tahun 2020 yang mencapai 2.3 persen. Pada tahun 2021 angka kematian bayi meningkat menjadi 3,23 persen, angka ini kemudian menurun pada tahun 2022 menjadi 2,3 persen dan meningkat kembali menjadi 3 persen di tahun 2023. Angka kematian bayi di Kabupaten Biak Numfor dari tahn 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

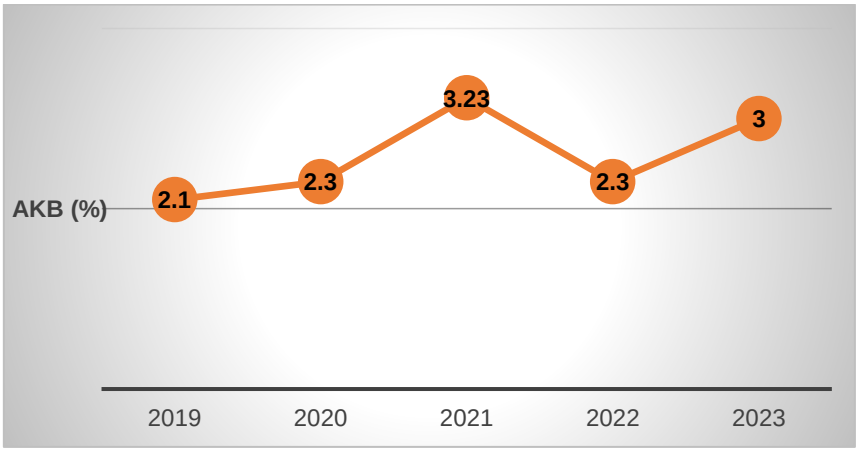

Gambar 2. 35
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023
(Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Biak Numfor, data diolah)

3. Angka Kejadian Malaria

Angka kejadian malaria di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2019 mecapai 5,57 persen, angka ini mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 4,45 persen. Pada tahun 2021 angka kejadian malaria meningkat menjadi 9,95 persen, angka ini kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 20,35 persen dan kemudian menurun menjadi 7,93 persen di tahun 2023. Angka kejadian malaria di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 28
Angka Kejadian Malaria Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023

No.	Tahun	(%)
1	*2019*	*5.57*
2	*2020*	*4.45*
3	*2021*	*9.95*

No.	Tahun	(%)
4	*2022*	*20.35*
5	*2023*	*7.93*

(Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Biak Numfor, data diolah)

4. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting secara umum adalah jumlah keseluruhan permasalahan stunting yang terjadi pada waktu tertentu di sebuah daerah. Prevalensi stunting di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2019 mencapai 18,74 persen, angka ini menurun pada tahun 2020 menjadi 9,37 persen dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 9,43 persen. Pada tahun 2022 anga prevalensi stunting menurun menjadi 8,11 persen dan kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 7,00 persen.

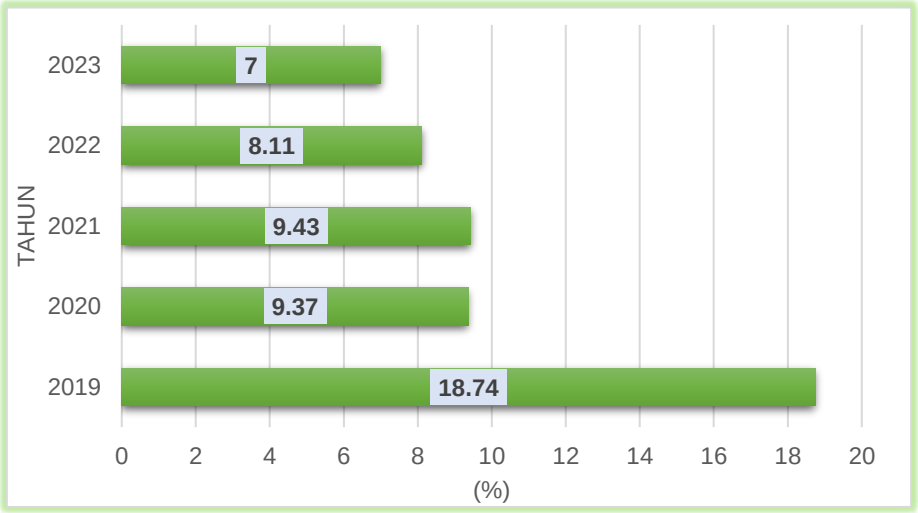

Gambar 2. 36
Prevalensi Stunting Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023
(Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Biak Numfor, data diolah)

5. Prevalensi HIV

Prevalensi HIV adalah perbandingan jumlah penduduk laki–laki dan perempuan umur 15-49 tahun yang positif HIV dibagi dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada umur yang sama (yaitu 15-49 tahun).

Data prevalensi HIV Kabupaten Biak Numfor tahun 2021-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 29
Prevalensi HIV Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023

Tahun	Prevalensi HIV (%)
2019	0,14
2020	0,08
2021	0,08
2022	0,05
2023	0,22

(Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Biak Numfor Tahun 2024, data diolah)

Data diatas menunjukan pada tahun 2019 angka pervalensi HIV 0,14 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 dan tahun 2021 di angka prevalensi HIV 0,08 persen, kemudian kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 di angka 0,05 persen. Pada tahun 2023, angka prevalensi HIV di Kab Biak Numfor naik cukup signifikan mencapai angka 0,22 persen.

6. Ketersediaan Prasarana Kesehatan

Prasarana kesehatan teridiri dari aset tidak bergerak dinas kesehatan yang teridri dari ketersediaan bangunan Rumah Sakit, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu yang tersedia di Kabupaten Biak Numfor. Data terkait dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 30
Jumlah Prasarana Kesehatan (unit) di Kabupaten Biak Numfor

Jenis Prasarana	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rumah Sakit	3	3	4	4	4
Puskesmas	21	20	20	20	20
Puskesmas Pembantu	65	54	51	51	51

(Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Biak Numfor Tahun 2023)

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah rumah sakit di tahun 2019 berjumlah 3 unit dan pada akhir tahun 2023 unit rumah sakit di Kabupaten Biak Numfor bertambah menjadi 4 unit.

Fasilitas Puskesmas di tahun 2019 benjumlah 21 unit dan pada akhir tahun 2023 data puskesmas berjumlah 20 unit. Sementara untuk Puskesmas Pembantu/

Pustu di tahun 2019 berjumlah 65 unit, dan pada tahun 2023 jumlah Pustu menjadi 51 unit. Rasio dan/atau cakupan masing-masing prasrana kesehatan tergambar sebagai berikut.

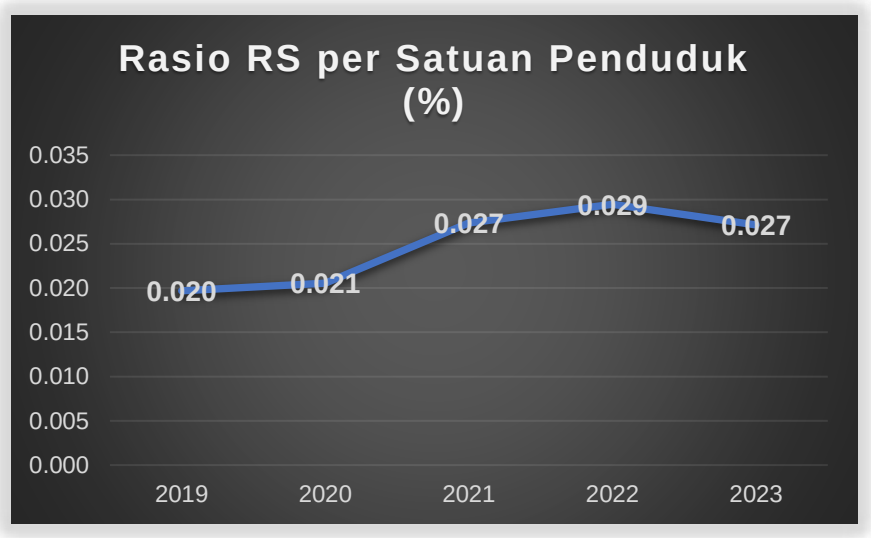

Gambar 2. 37
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023
(Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Biak Numfor Tahun 2023, data diolah)

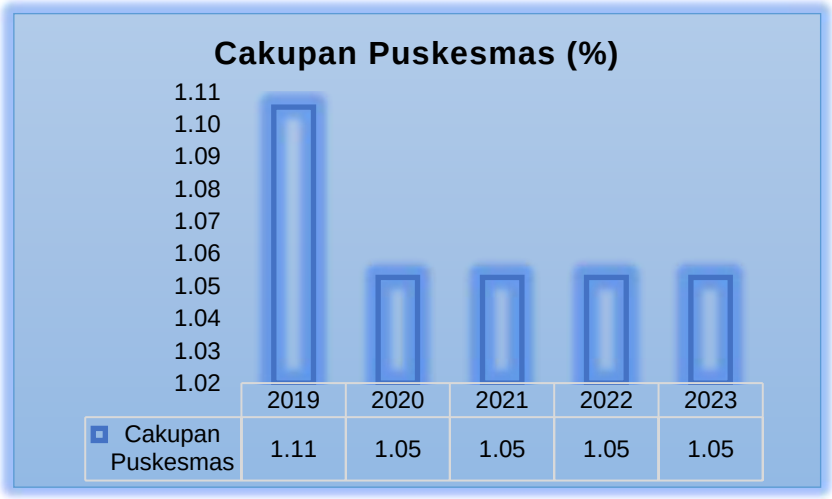

Gambar 2. 38
Cakupan Puskesmas/ Distrik Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023
(Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Biak Numfor Tahun 2023, data diolah)

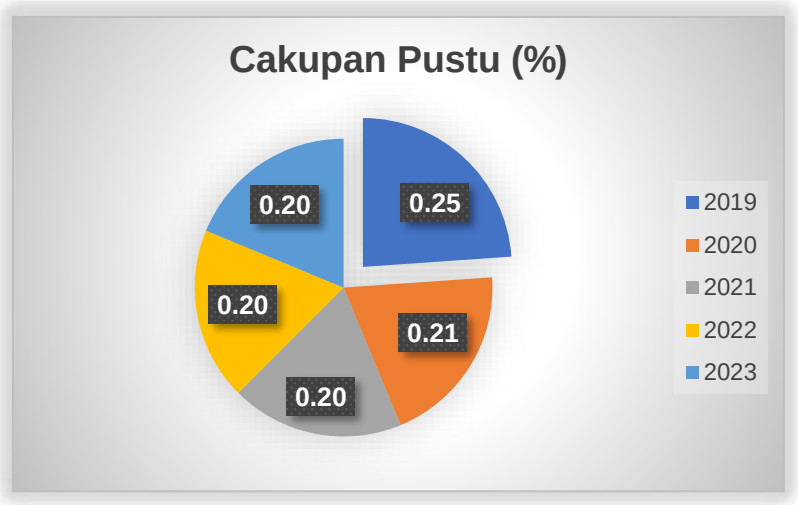

Gambar 2. 39
Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu)/ Kampung di Kab. Biak Numfor
(Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Biak Numfor Tahun 2023, data diolah)

7. Ketersediaan Dokter dan Tenaga Kesehatan

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan umumnya dikelompokkan menjadi berbagai profesi, misalnya dokter, dokter gigi, apoteker, perawat, fisioterapis, bidan, tenaga vokasi farmasi, psikolog klinis, dan sebagainya. Seorang tenaga kesehatan juga bisa merupakan seorang ahli kesehatan masyarakat. Berikut kami sajikan data ketersediaan tenaga kesehatan sebagai berikut.

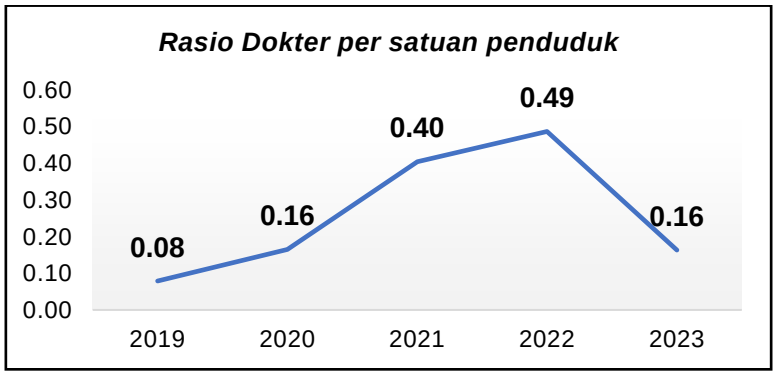

Gambar 2. 40
Rasio Dokter/ Satuan Penduduk Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023
(Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Biak Numfor Tahun 2023, data diolah)

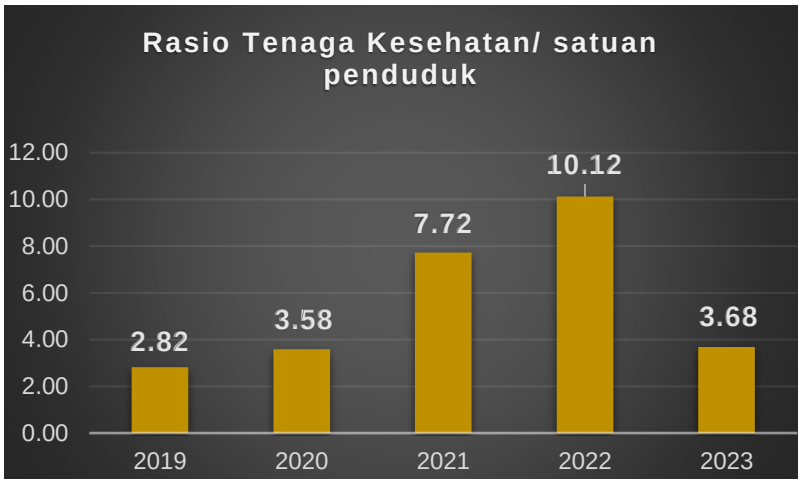

Gambar 2. 41
Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023
(Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Biak Numfor Tahun 2023, data diolah)

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang

Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan bidang Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Pada urusan pekerjaan umum terdapat 2 jenis pelayanan dasar dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, yaitu Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari dan Penyediaan Layanan Pengolahan Air Limbah.

1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran air baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air minum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air

Minum. Jenis SPAM dibagi menjadi 2 jenis yaitu SPAM jaringan perpiaan dan SPAM jaringan bukan perpipaan.

Pelayanan penyelenggranaan SPAM yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dari tahun 2019-2023 dilaksakanan secara bertahap dan berkelanjutan. Data capaian pelayanan penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Biak Numfor sdapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 31
Capaian Pelayanan SPAM Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023

No	Jenis Pelayanan	Capaian Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan yang terlayani (%)	47,60	48,27	49,62	51,91	60,42
2	Pelayanan SPAM buka Jaringan Perpipaan yang terlayani (%)	30	33	35	37	40

(Sumber: Dinas PUPR Kab. Biak Numfor Tahun 2023, data diolah)

Tabel diatas menjelaskan capaian SPAM jaringan perpipaan yang terlayani di Kabupaten Biak Numfor tahun 2023 mencapai 60,42 persen, angka ini meningkat dari tahun 2022 yang berada pada angka 51,91 persen. Sementara pada tahun 2019-2021 capaian pelayanan SPAM jaringan perpipaan rata-rata masih berada di bawah 50 persen. Dari tabel diatas juga dapai dijabarkan bahwa capaian tahun 2023 untuk layanan SPAM bukan jaringan perpipaan mecapai 40 persen atau naik sekitar 10 persen dari tahun 2019.

2. Penyediaan Pengelolaan Air Limbah

SPALD (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik) adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Sistem pengelolaan air limbah domestik diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Penataan Ruang Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. Air limbah domestik terdiri dari air limbah kakus (black water) dan air limbah non kakus (grey water). SPALD dibedakan menjadi SPALD Setempat dan SPALD Terpusat.

Pelayanan pengelolaan air limbah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor adalah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik).

Capaian pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S pada tahun 2019 mencapai 2,69 persen, meningkat pada tahun 2020 yang mencapai 3,29 persen. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan pada angka 5,57 persen. Pengkatan kembali terjadi pada tahun 2022, dimana angka capaian pengelolaan SPALD-S Biak mencapai 6,12 persen. Angka 6,12 persen kemudian masih menjadi capaian yang sama di tahun 2023. data terkait capaian SPALD-S Kabupaten Biak Numfor dapat dilihat pada gambar berikut.

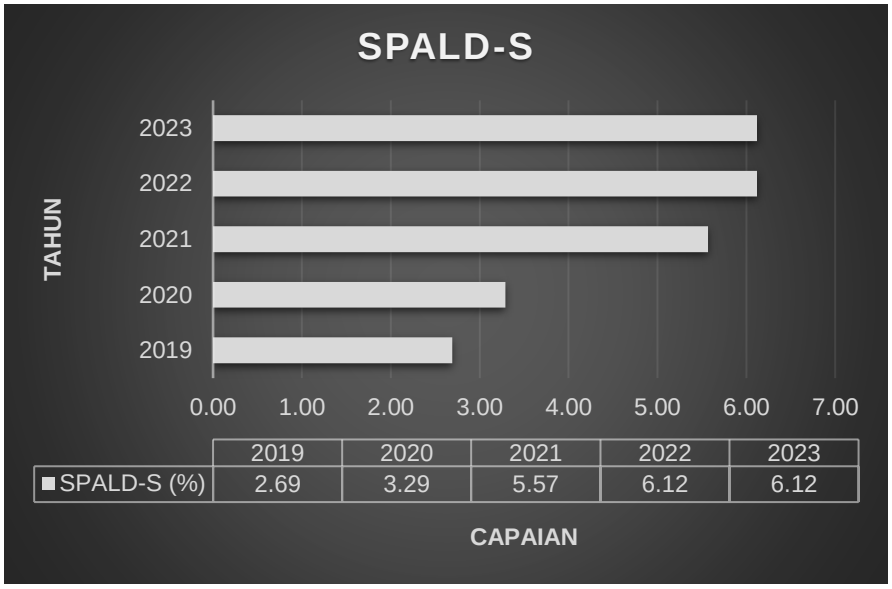

Gambar 2. 42
Capaian Pengelolaan SPALD-S Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023
(Sumber: Dinas PUPR Kab. Biak Numfor Tahun 2023, data diolah)

3. Rasio Pajang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diukur melalui dengan rumus jumlah panjang jalan dibagi jumlah penduduk sehingga bisa mendapatkan rasio atau perbandingan panjang jalan dengan jumlah penduduk. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk pada akhir tahun 2023 berada pada angka 4,79 (jiwa/km), angka ini menurun dari tahun 2022 yang berada pada angka 5,24 (jiwa/km). Pada tahun 2019-

2021 secara berturut-turt rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk berada pada angka 5,17 (jiwa/km), 5,40 (jiwa/km) dan 4,87 (jiwa/km). Data series terkait rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2. 43
Rasio Jumlah Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023
(Sumber: Biak Numfor Dalam Angka 2020-2024, Dinas PUPR Kab. Biak Numfor 2023, data diolah)

6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Persetujuan bangunan gedung, juga disebut sebagai izin mendirikan bangunan, adalah persetujuan yang dikeluarkan oleh otoritas nasional atau daerah bahwa sebuah bangunan rumah/gedung diizinkan untuk dibangun, atau dibongkar. Pembangunan gedung atau struktur harus memenuhi peraturan bangunan.

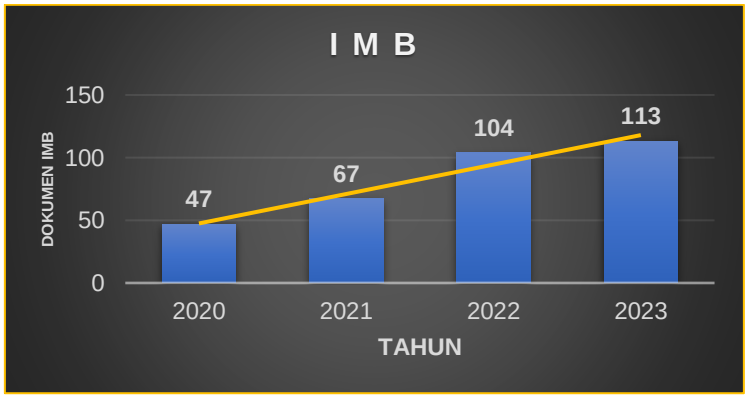

Gambar 2. 44
Jumlah IMB yang berkau Tahun 2019-2023 di Kab. Biak Numfor
(Sumber: Dinas PUPR Kab. Biak Numfor Tahun 2023, data diolah)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas PUPR telah memberlakukan IMB pada 113 bangunan/ izin bangunan pada tahun 2023. Angka ini meningkat dari tahun 2022 yang berjumlah 104 dokumen IMB yang dikeluarkan. Data series lain dari tahun 2020-2023 menunjukan trend positif yang setiap tahunnya angka jumlah IMB yang dikeluarkan atau diberlakukan menagalami peningkatan setiap tahunnya.

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana

Capaian Indikator SPM Perumahan Rakyat terkait Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana di Kabupaten Biak Numfor tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 32
Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023

No	Jenis Pelayanan	Capaian Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana (Unit)	202	184	75	168	123

(Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Biak Numfor Tahun 2023)

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 jumlah rumah layak huni bagi korban bencana yang disediakan atau direhabilitasi berjumlah 202 unit. Jumlah tersebut menjadi 123 unit rumah layak huni bagi korban bencana yang disediakan atau direhabilitasi pada akhir tahun 2023.

2. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

Capaian Indikator SPM Perumahan Rakyat terkait Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Biak Numfor tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 33
Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab. Biak Numfor Tahun 2020-2023

No	Jenis Pelayanan	Capaian Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah (%)	23	22	30	14

(Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Biak Numfor Tahun 2023)

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 persentase rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerahadalah 23 persen, angka tersebut menurun menjadi 14 persen pada akhir tahun 2023.

3. Rumah Layak Huni yang Terbangun

Pada tahun 2019 cakupan rumah layak huni yang terbangun di Kabupaten Biak Numfor mecapai 20,2 persen, kemudian menurun pada tahun 2020 dengan persentase 10,6 persen. Pada tahun 2021 cakupan rumah layak huni terbangun kembali menurun hingga mencapai angka 9,5 persen.

Pada tahun 2022 dan 2023 capaian kembali meingkat menjadi 18,0 persen di tahun 2022 dan meningkat lagi menjadi 19,6 persen di tahun 2023. Data cakupan rumah layak huni yang terbangun di Kabupaten Biak Numfor tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 45
Cakupan Rumah Layak Huni Terbangun Tahun 2019-2023 Kab. Biak Numfor
(Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Biak Numfor Tahun 2024)

E. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Stabilitas sosial dan politik adalah prasyarat terhadap tumbuh kembang investasi, infrastruktur, teknologi maupun tenaga kerja. Tantangan utama stabilitas sosial dan politik adalah memelihara kebhinekaan Indonesia agar tetap menjadi faktor yang menginspirasi, memperkaya dan menguatkan Indonesia dalam mencapai visi pembangunan.

Konsolidasi demokrasi diharapkan dapat menguatkan lembaga-lembaga demokrasi yang mampu memelihara keanekaragaman menjadi berkah yang besar untuk Indonesia juga untuk Kabupaten Biak Numfor dimana masyarakatnya merupakan masyarakat multikultur dengan banyaknya perguruan tinggi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Konflik berbau SARA, aksi terorisme dan separatisme berpotensi menjadi komoditas politik. Deteksi dini atas potensi kerawanan harus dilakukan.

Iklim daerah yang kondusif diciptakan salah satunya melalui pembinaan politik daerah dan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan Organisasi Kepemudaan. Fungsi deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat perlu dibangun tidak hanya di

komunitas intelejen tetapi juga tiap individu masyarakat. Sehingga kepercayaan publik terhadap jaminan keamanan pemerintah meningkat.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten Biak Numfor tahun 2019 mencapai 15 persen, pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan ke angka 10 persen. Pada tahun 2021 tingkat penyelesaian pelanggaran k3 kembali meningkat menjadi 15 persen, sedangkan pada tahun 2022 mecapai 20 persen sama dengan tahun 2023 yang juga mencapai 20 persen.

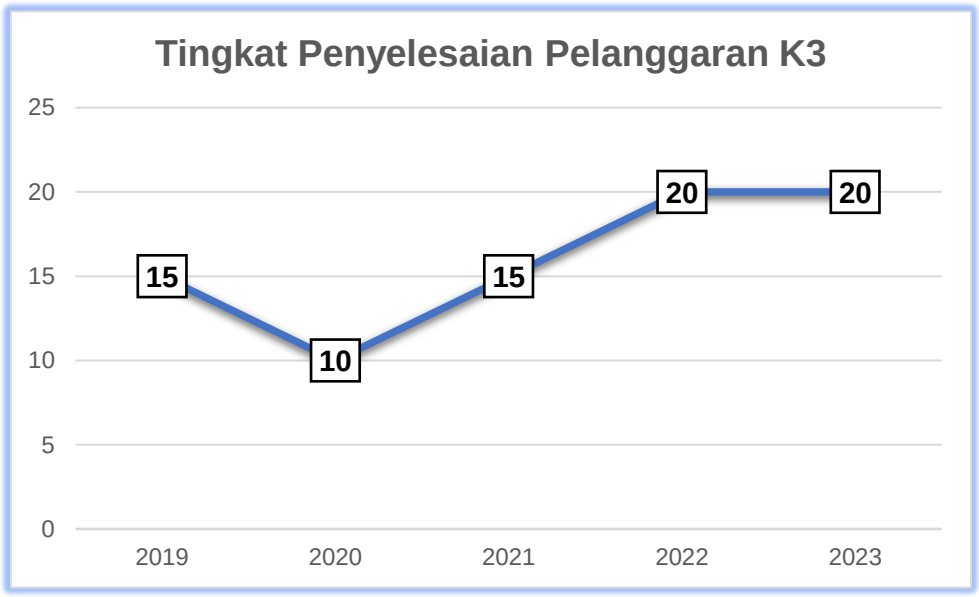

Gambar 2. 46
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023
(Sumber: Satpol-PP Kab. Biak Numfor Tahun 2024)

Pada bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdapat 5 indikator capaian SPM yang wajib dipenuhi antara lain:

a) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM);
b) Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
c) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
d) Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
e) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR).

Terkait SPM khusus urusan pada point a diatas (pelayanan ketentraman dan ketertiban umum) di Kabupaten Biak Numfor dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sementara untuk 4 SPM yang lain atau point b sampai dengan point e berada dibawah pengelolaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Biak Numfor.

Tabel 2. 34
Capaian SPM Bidang TRANTIBUMLINMAS Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM);	%	15	10	15	15	20
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	47	50	50	50	50
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	%	45	50	50	50	50
4	Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	45	50	50	50	50
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	%	37	40	40	40	40

(Sumber: Satpol-PP Kab. Biak Numfor Tahun 2024, BPBD Kab. Biak Numfor Tahun 2024, data diolah)

Dapat dilihat bahwa capaian SPM Pelayanan TRANTIBUM masih di bawah 30 persen, data 2023 menunjukan capaian pelayanan TRANTIBUM mencapai 20 persen. Sementara capaian tahun 2023 untuk indikator pelayanan informasi rawan bencana, pelayana pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, dan indikator pelayanan peyelamatan dan evakuasi korban bencana mencapai 50 persen. Sedangkan untuk indikator pelayanan DAMKAR capaian masih dibawah 50 persen atau berada di angka 40 persen pada tahun 2023.

F. Bidang Urusan Sosial

Secara prinsip urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial melakukan beberapa pelayanan yang kemudian diukur capaiannya melalui beberapa indikator sebagaimana gambar berikut.

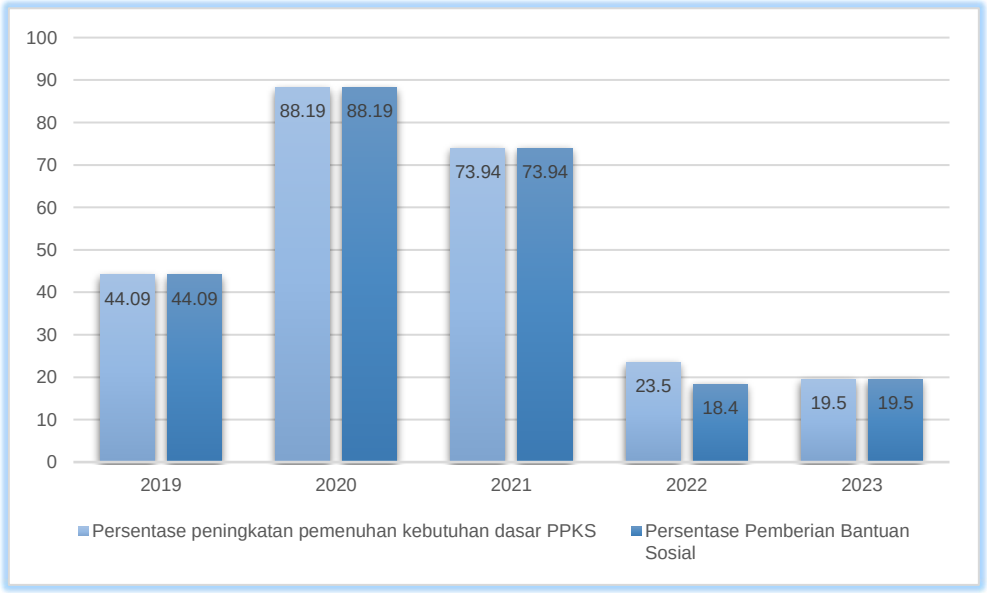

Gambar 2. 47
Indikator Pelayanan PPKS Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023
(Sumber: Dinas Sosial Kab. Biak Numfor Tahun 2023)

Grafik pada gambar di atas menunjukan bahwa persentase peningkatan kebutuhan dasar PPKS tahun 2020 sudah cukup baik, dengan capaian diatas 85 persen atau 88,19 persen. Capaian ini seiring dan diikuti oleh indikator pemberiaan bantuan sosial yang memiliki capaian yang sama dengan 88,19 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2021 Capaian kedua indikator ini mengalami penurunan yang kembali sama di angka 73,94 persen. Sedangkan pada tahun 2022 capain indikator peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar PPKS menurun mencapai angka 23,5 persen dan capaian indikator pemberiaan bantuan sosial berada di angka 18,4 persen.

2. Rehabilitasi Sosial di Luar Panti

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

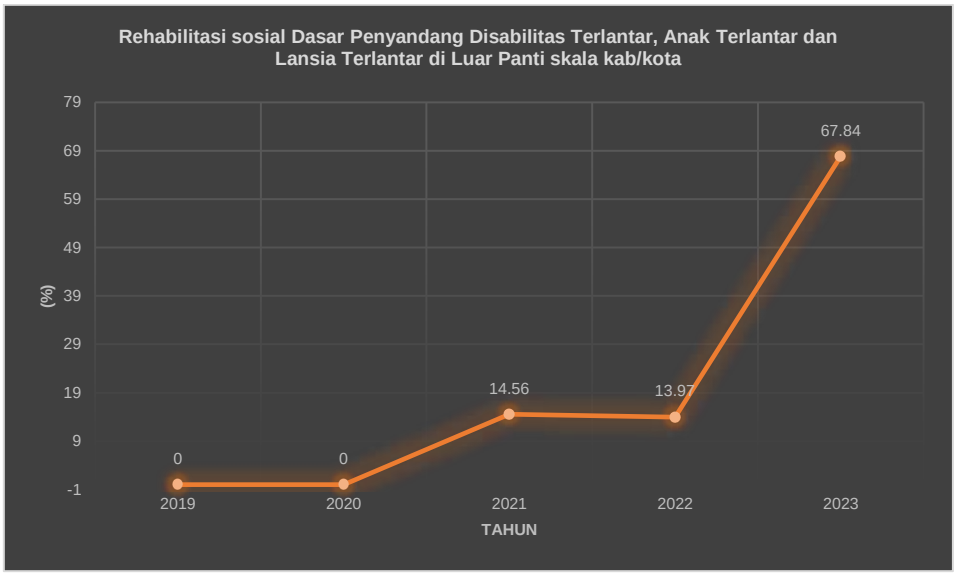

Gambar 2. 48
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lansia Terlantar di Luar Panti skala Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023
(Sumber: Dinas Sosial Kab. Biak Numfor Tahun 2023)

Data Dinas Sosial menunjukan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas, anak terlantar dan lansia terlantar di luar panti di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2023 adalah 67,84 persen, persentase ini meningkat sangat signifikan sekitar 53,87 persen dari tahun 2022 yang capaiannya berada di angka 13,97 persen. Sementara untuk tahun 2019-2020 capaian pelaksanaan indikator ini masih belum ada atau berada di angka nol persen.

2.1.4.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib (Bukan Pelayanan Dasar)

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib bukan pelayanan dasar dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelengaraan urusan wajib bukan pelayanan dasar pada pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar meliputi 18 urusan yaitu tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kepndudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan kampung, pengendalian penduduk dan KB, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi

UKM, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistic, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.

A. Bidang Urusan Tenaga Kerja

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dewasa ini masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain tingginya pencari kerja (penganggur), terbatasnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, serta rendahnya produktivitas kerja. Upaya-upaya yang terus dilakukan pemerintah daerah adalah melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan kerja secara gratis siap kerja serta membuka akses terhadap dunia kerja secara lebih luas.

Salah satu pelatihan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor adalah pelatihan kewirausahaan yang rutin dilakukan setiap tahunnya. Data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor menunjukan bahwa pada tahun 2019 jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan ini berjumlah 240 orang, kemudian menurun menjadi 48 orang pada tahun 2020. Jumlah peserta pelatihan meingkat di tahun 2021 hingga berjumlah 80 orang, namun pada tahun 2022 jumlah peserta pelatihan kewirausahaan ini menurun hingga hanya 6 orang tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan. Data terkait jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan tahun 2019-2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

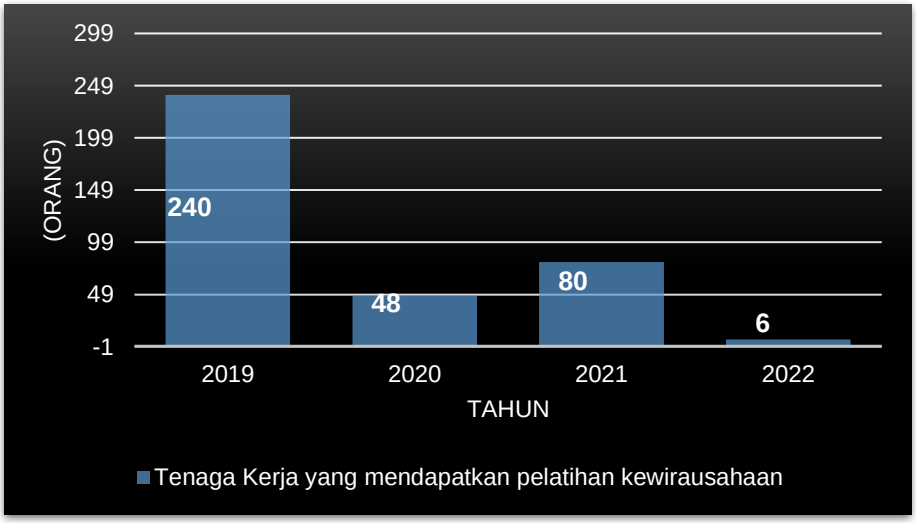

Gambar 2. 49
Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan di Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2022
(Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Biak Numfor Tahun 2023)

B. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak melalui pembangunan yang menjadikan kesetaraan *gender* menjadi arus utama. Namun demikian, kesenjangan *gender* masih terjadi di berbagai sektor pembangunan. Salah satu penyebabnya adalah aspek psikososio-kultural di masyarakat yang masih menganggap derajat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, saat ini Pemerintah Kabupaten Biak Numfor terus mengoptimalkan kinerja terutama pada peningkatan layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam menangani kasus-kasus KDRT dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Berikut capian indikator urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020-2022.

Tabel 2. 35
Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintahan	%	47,73	37,45	37,45	37,45	51,67
2	Porsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR	%	35	35	35	35	35
3	Rasio KDRT	%	1,12	2,00	2,00	2,02	2,02
4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	12,1	13,10	13,10	15,00	15,00
5	Indeks Pembanguan Gender (IPG)	%	90,01	90,15	90,25	90,79	90,96

(Sumber: BPS Provinsi Papua Tahun 2024; DP3AKB Kab. Biak Numfor Tahun 2023, data diolah)

Berdasarakan data pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa persentase perempuan di lembaga pemerintah tahun 2023 mencapai angka 51,67 persen,

sementara untuk prosi kursi/ keterwakilan Perempuan di DPR persentasenya mencapai 35 persen.

Rasio KDRT di Biak Numfor tahun 2023 mencapai angka 2,02 persen atau naik sekitar 0,02 persen dari tahun 2022. Sedangkan untuk cakupan layanan bantuan hukum yang diberikan untuk perempuan dan anak korban kekerasan tahun 2023 mencapai 15,00 persen, angka ini naik sekitar 19 dari tahun 2021 yang berada pada angka 13,10 persen. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2023 berada pada angka 90,96 persen, angka ini meningkat 0,17 persen dari tahun 2022 yang berada pada angka 90,79 persen.

C. Bidang Urusan Pangan

Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman beragam, bergizi dan imbang, serta meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan.

Kabupaten Biak Numfor masih di kategorikan sebagai daerah yang cenderung tahan pangan sampai dengan daerah yang agak tahan rentan rawan pangan, untuk tahun 2023 Kabupaten Biak Numfor menganalisis 19 Distrik dan 268 Kampung dengan hasil analisis adalah Jumlah Kampung dan Persentase Kampung di masing-masing Prioritas Komposit adalah Prioritas 1 jumlah 1 Kampung dengan presentase Kampung 0,37 persen; Prioritas 2 jumlah 10 Kampung dengan presentase Kampung 4,27persen; Prioritas 3 jumlah 39 Kampung dengan presentase Kampung 14,55persen, Prioritas 4 jumlah 123 Kampung dengan presentase Kampung 45,90persen; Prioritas 5 jumlah 81 Kampung dengan presentase Kampung 30,22persen; dan Prioritas 6 jumlah 14 Kampung dengan presentase Kampung 5,22persen.

Skor pola pangan harapan (PPH) Biak Numfor tahun 2023 berada pada skor 69,4 persen, angka tahun 2023 menurun 4,2 persen dari persentase pada tahun 2022 yang capaian skor PPH mencapai 73,6 persen. Capaian Skor PPH Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

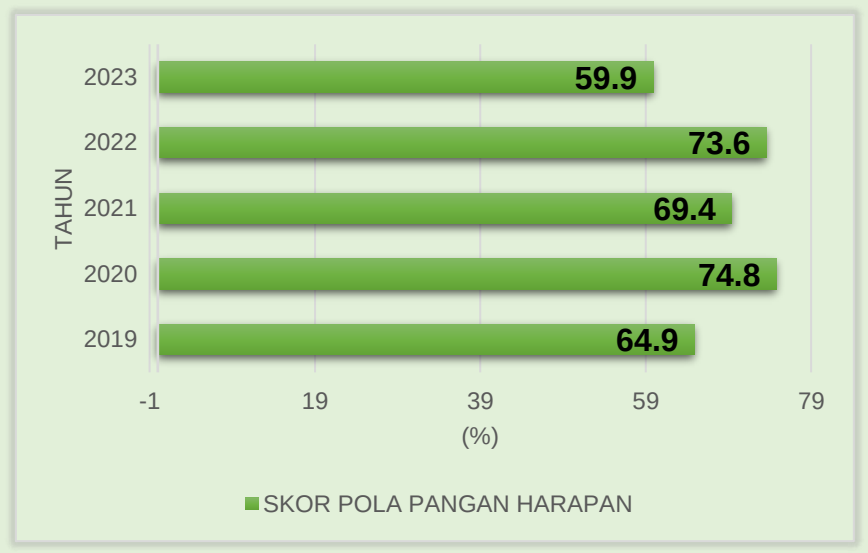

Gambar 2. 50
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023
(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Biak Numfor Tahun 2023)

D. Bidang Urusan Pertanahan

Bidang urusan pertanahan merupakan mengatur kegiatan suatu organisasi dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertanahan dengan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

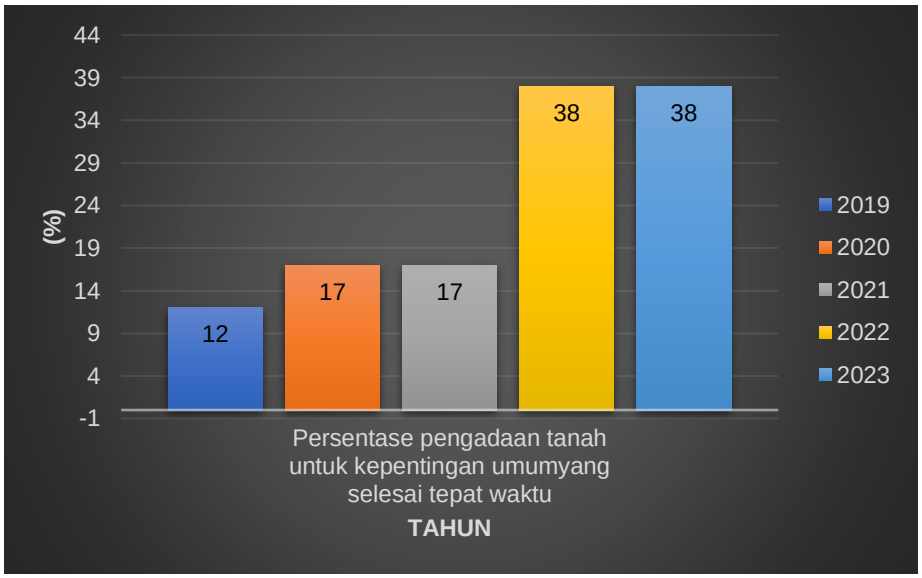

Gambar 2. 51
Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang Selesai Tepat Waktu Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023
(Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Biak Numfor Tahun 2024)

Grafik diatas menunjukan capaian pengadanaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu di Kabupaten Biak Numfor dari tahun 2019-2023. Grafik menunjukan capian pada tahun 2019 dengan persentase 12 persen, pada tahun 2020 dan tahun 2021 mencapai angka 17 persen dan pada tahun 2022dan tahun 2023 mencapai angka 38 persen.

E. Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memiliki tujuan meningkatkan pengelolaan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan, dengan sasaran meningkatkan kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan yang meningkat dapat dilihat dari meningkatnya beberapa indikator, diantaranya: 1) indeks kualitas lingkungan hidup; 2) indeks kualitas tutupan lahan; 3) indeks kualitas udara; 3) indeks kualitas udara; 4) indeks kualitas air; dan 5) indeks risiko bencana. Perkembangan nilai Indeks kualitas lingkungan hidup, indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan tahun 2019-2023, dapat dilihat pada gambar berikut.

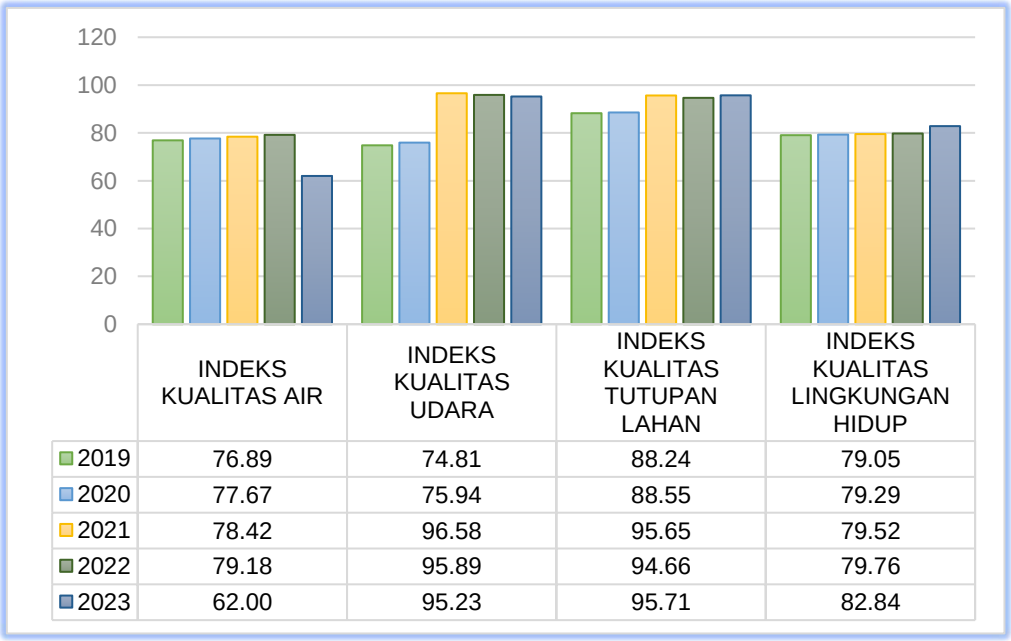

	INDEKS KUALITAS AIR	INDEKS KUALITAS UDARA	INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
2019	76.89	74.81	88.24	79.05
2020	77.67	75.94	88.55	79.29
2021	78.42	96.58	95.65	79.52
2022	79.18	95.89	94.66	79.76
2023	62.00	95.23	95.71	82.84

Gambar 2. 52
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023
(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Biak Numfor Tahun 2024)

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa indeks kualitas lingkungan hidup dan indeks kompositnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walaupun nilainya kecil. IKLH tahun 2019 adalah 79,05 naik 0,71 persen menjadi 79,76 pada tahun 2022. IKA tahun 2019 adalah 76,89 naik 2,29 persen menjadi 79,18 pada tahun 2022. IKU tahun 2019 adalah 74,81 naik 21,08 persen menjadi 95,89 pada tahun 2022. IKTL tahun 2019 adalah 88,24 naik 6,42 persen menjadi 94,66 pada tahun 2022. Sementara untuk data tahun 2023 IKA berada di angka 62.00, IKU 95,23, IKTL 95,71, dan IKLH berada pada angka 82,84. Meningkatnya nilai indeks di atas menunjukkan bahwa kinerja program-program perbaikan kualitas lingkungan hidup semakin baik hingga tahun 2023.

Realisasi kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berkaitan dengan pengelolaan pelayanan persampahan tahun 2019 - 2023 dapat dilihat berikut ini.

Tabel 2. 36
Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023

Indikator/ Uraian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Timbunan Sampah Tahunan	Ton/ Tahun	21.232.,05	21.308,99	21.323,59	21.434,55	21,434.55
Pengurangan Sampah Tahunan	Ton/ Tahun	3.806,53	4.687,22	4.341,88	3.954,15	3,494.30
Persentase Pengurangan Sampah	%	18,18	22,00	20,36	18,45	16.30
Penanganan Sampah Tahunan	Ton/ Tahun	16.986,66	15.982,62	15.074,50	14.800,75	15,092.75
Persentase Penanganan Sampah	%	80,00	75,00	70,69	69,05	70.41
Sampah Terkelola Tahunan	Ton/ Tahun	20.847,19	20.669,84	19.416,38	18.754,90	18,587.05
Pesentase Sampah Terkelola	%	98,19	97,00	91,06	87,50	86.72

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Biak Numfor Tahun 2024)

F. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Perarturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil.

Adapun yang termasuk dalam Dokumen kependudukan, meliputi: 1) Biodata penduduk; 2) Kartu keluarga; 3) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Identitas Anak (KIA); 4) Surat keterangan kependudukan; 5) Akta pencatatan sipil.

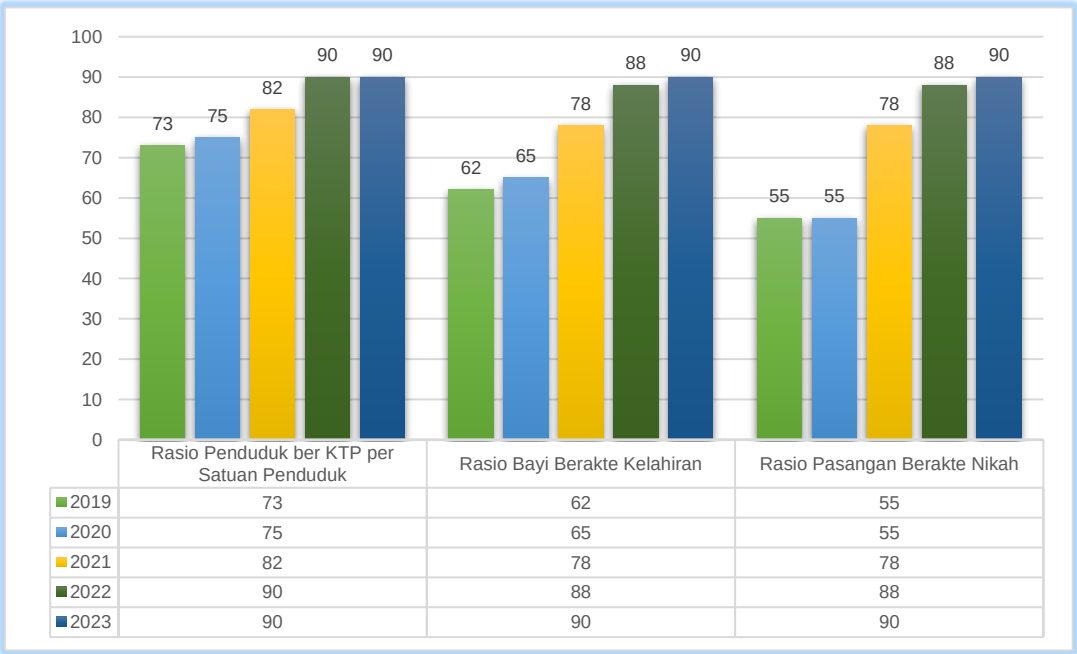

	Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	Rasio Pasangan Berakte Nikah
2019	73	62	55
2020	75	65	55
2021	82	78	78
2022	90	88	88
2023	90	90	90

Gambar 2. 53
Rasio Penduduk Ber-KTP, Rasio Bayi Berkate Kelahiran, dan Rasio Pasangan Berakte Nikah Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023
(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Biak Numfor Tahun 2023)

Grafik diatas menunjukan rasio penduduk ber KTP di Kabupaten Biak Numfor tahun 2020 adalah 75 persen, angka ini kemudian meningkat di tahun 2021 menjadi 82 persen, dan pada tahun 2022 rasio penduduk ber KTP di Kabupaten Biak Numfor mencapai 90 persen.

Pada grafik juga dapat dilihat bahwa rasio bayi berakte kelahiran di tahun 2020 adalah 65 persen, angka ini meningkat di tahun 2021 menjadi 78 persen, dan rasio ini kembali meningkat di tahun 2022 hingga mencapai angka 88 persen. Sedangkan untuk rasio pasangan berakte nikah di Kabupaten Biak Numfor, tahun

2020 mencapai angka 55 persen, kemudian semakin meningkat di tahun 2021 menjadi 78 persen, dan mencapai anhgka 88 persen di akhir tahun 2022. Data terakhir menunjukan rasio penduduk ber-KTP, rasio bayi berkate kelahiran dan rasio pasangan berkate nikah pada tahun 2023 berada pada angka 90 persen.

G. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kewenangan Kabupaten dalam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi Penyelenggaraan penataan Desa, fasilitasi Kerja sama, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan administrasi Desa dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pasal 126 ayat 1 merumuskan tujuan pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan yang yang lebih luas kepada pemerintah desa untuk memberdayakan diri dan masyarakat dengan memberikan dana yang tidak sedikit kepada pemerintah Desa. Pemerintah Kabupaten perlu mengarahkan dan mendampingi agar dana yang diterima kalurahan dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakatnya.

Kabupaten Biak Numfor memiliki target untuk meningkatkan jumlah kampung yang memiliki BUMDes/ BUMKam (Badan Usaha Milik Kampung), terget ini menjadi salah satu syarat untuk mewujudkan kampung mandiri demi kesejahteraan masayarat.

Jumlah Kampung yang memiliki BUMKam di Kabupaten Biak Numfor sesuai data tertera pada gambar diatas, menunjukan bahwa pada akhir tahun 2022 tercatat kampung yang memiliki BUMKam sebanyak 53 kampung, jumlah ini menurun drastis jika dibandingkan dengan jumlah kampung yang memiliki BUMKam pada tahun 2019 yang berjumlah 100 kampung.

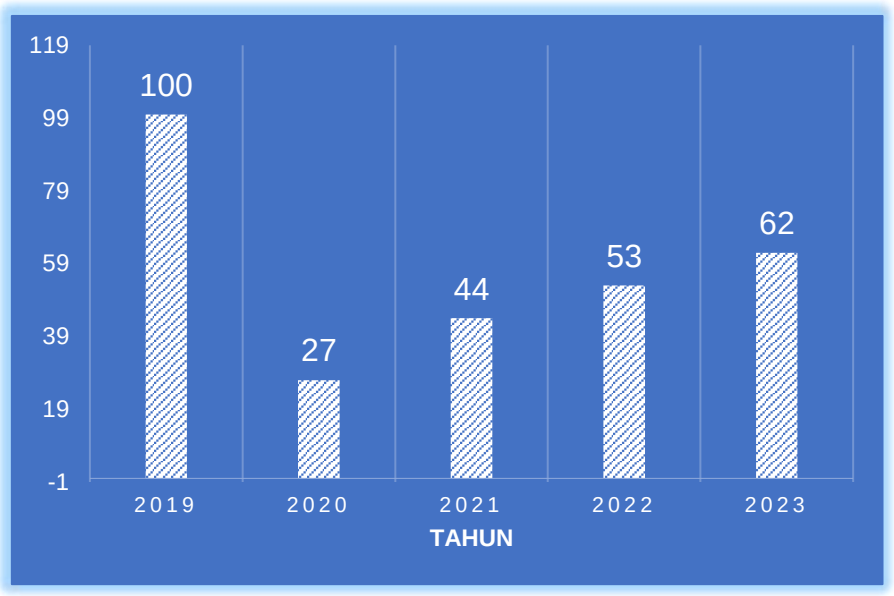

Gambar 2. 54
Kampung yang memiliki BUMDes/ BUMkam Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023
(Sumber: DPMK Kab. Biak Numfor Tahun 2023)

H. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penduduk adalah subyek dan obyek pembangunan. Jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menghambat proses-proses pembangunan menuju tujuan yang ingin dicapai karena sumberdaya pembangunan terserap untuk pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan manusia yang selalu bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya pengendalian jumlah penduduk dan penggiatan program Keluarga Berencana. Indikator utama keberhasilan pengendalian penduduk adalah turunnya angka kesuburan (Total Fertility Rate/TFR). Selain itu terdapat pula indikator lain untuk mendukung terwujudnya penurunan TFR.

Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Biak Numfor dihitung dengan mengungankan satuan per 1000 perempuan pada satu periode. TFR pada tahun 2019 sebesar 30 berarti bahwa pada tahun 2019, ada 30 kelahiran anak dari per 1000 perempuan usia reproduktif (usia 15-49 tahun). Jumlah ini mengalami penurunan pada akhir tahun 2023 menjadi 28 kelahiran per 1000 perempuan. Maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pemerintah dalam mengintervensi angka keahiran

lewat berbagai program kegiatan baik program keluarga berencana maupun program edukasi kesehatan lainnya telah berhasil mencapai target yang diharapakan.

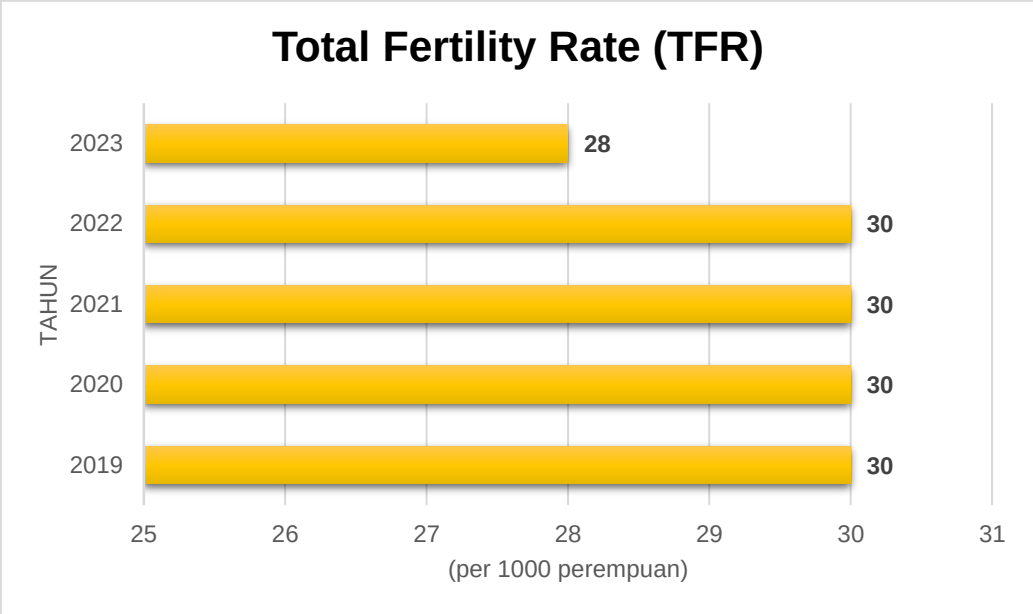

Gambar 2. 55
Total Fertility Rate (TFR) Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023
(Sumber: DP3AKB Kab. Biak Numfor Tahun 2024)

I. Bidang Urusan Perhubungan

Jumlah pelabuhan laut/ udara/ terminal bis di Kabupaten Biak Numfor berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor adalah 15 unit pada tahun 2023, angka ini tidak berubah sejak tahun 2019 dimana pada tahun tersebut jumlah sarana pelabuhan laut/ udara/ terminal bis adalah 15 unit.

Berbeda dengan jumlah pebuhan laut/ udara/ terminal bis, untuk rasio panjang jalan per jumlah kendaraan justrru mengalami penurunan dari tahun 2019-2023. Data Dinas Perhubungan menunjukan bahwa pada tahun 2019 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah 0,027 persen, kemudian menurun 0,003 persen pada tahun 2023 menjadi 0,024 persen.

Sedangkan untuk jumlah uji KIR angkutan Umum di Kabupaten Biak Numfor pada akhir tahun 2023 mencapai 491 unit, angka ini menurun dari tahun sebelumnya atau tahun 2022 yang mencapai angka 712 unit. Capaian indikator bidang urusan

perhubungan Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2019-2023 sebagaiman uraian diatas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 37
Capaian Indikator Bidang Urusan Perhubungan Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023

Indikator/ Uraian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis	Unit	15	15	15	15	15
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	%	0,027	0,026	0,025	0,025	0,024
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Unit	512	704	712	712	491

(Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Biak Numfor Tahun 2024)

J. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Kemajuan di bidang komunikasi dan informatika telah mendorong globalisasi dengan berbagai perspektif dan implikasinya. Arus informasi saat ini tidak terbatas pada media cetak dan elektronik, namun juga semakin berkembang melalui media sosial. Kelompok informasi masyarakat bisa menjadi salah satu wahana penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat. Indikator yang digunakan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor adalah Cakupan Layanan Telekomunikasi, yang mengukur wilayah yang sudah tercover layanan komunikasi di Kabupaten Biak Numfor. Data cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Biak Numfor tergambar sebagai berikut.

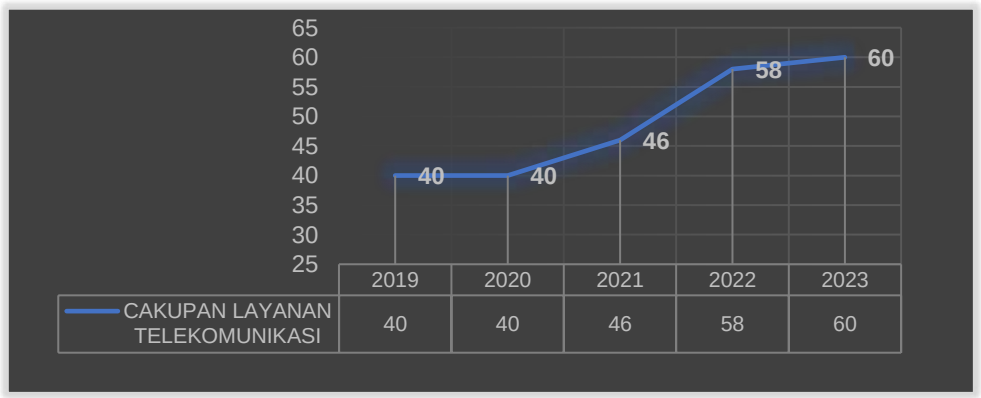

Gambar 2. 56
Cakupan Layanan Telekomunikasi Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023
(Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Biak Numfor Tahun 2024)

Data tersaji pada grafik diatas menunjukan cakupan layanan telekomunikasi Biak Numfor tahun 2019 mencapai 40 persen dan pada akhir tahun 2023 cakupan meningkat 20 persen hingga mencapai angka 60 persen yang artinya sudah 60 persen wilayah Kabupaten Biak Numfor dapat menjangkau atau mendapatkan layanan telekomunikasi.

K. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menegah

Saat ini koperasi masih menjadi soko guru perekonomian dan masih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terdapat *trend* yang positif atas keberadaan koperasi di Kabupaten Biak Numfor. Jumlah koperasi aktif pada tahun 2023 tercatat sebanya 271 unit, meningkat dari tahun 2022 sebanyak 262 unit. Jumlah koperasi aktif menurun dari 252 di tahun 2019 menjadi 246 di tahun 2020, kemudian mengalami peningkatan kembali di tahun 2021 menjadi 262 unit koperasi aktif.

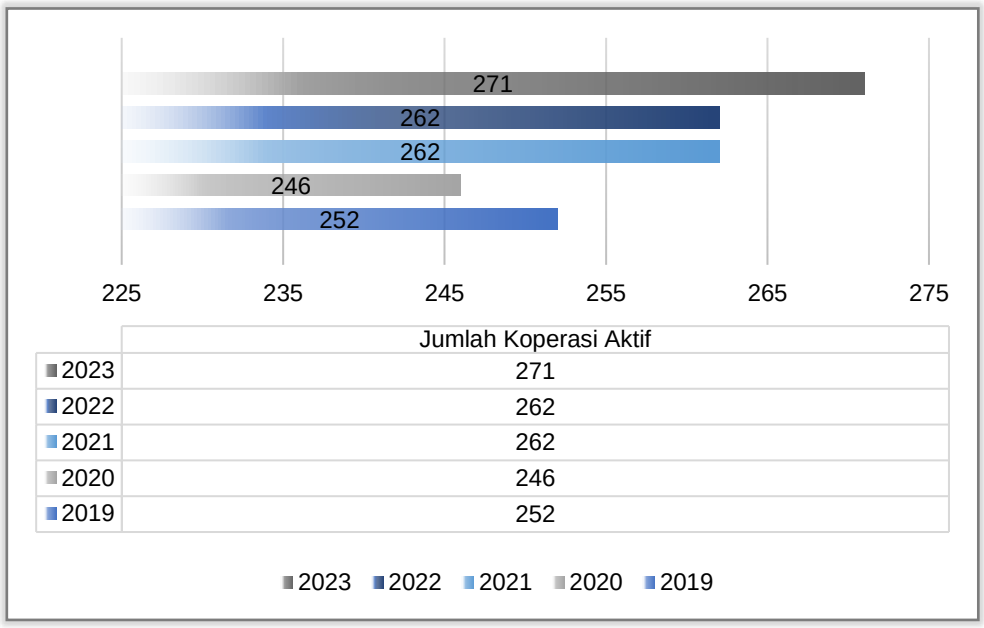

Gambar 2. 57
Jumlah Koperasi Aktif Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023
(Sumber: Biak Numfor Dalam Angka Tahun 2020-2024, data diolah)

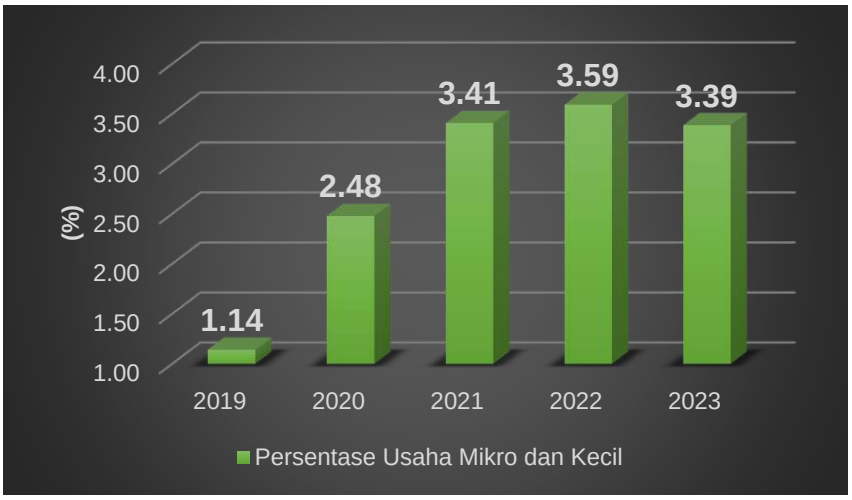

Gambar 2. 58
Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023
(Sumber: Dinas Koperasi UMKM Kab. Biak Numfor Tahun 2024, data diolah)

L. Bidang Urusan Penanaman Modal

Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak ganda (*mulitiplier effect*) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinan perekonomian menghasilkan output yang banyak, pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.

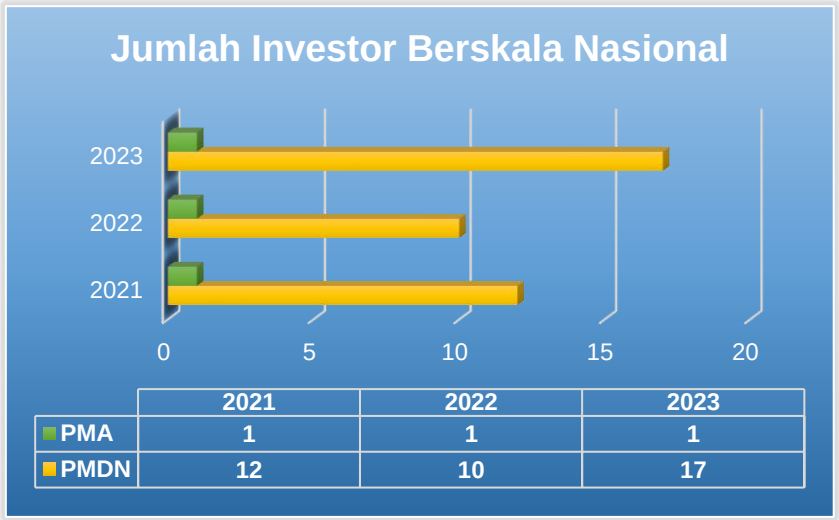

Gambar 2. 59
Data Jumlah Investor Berskala Nasional Kab. Biak Numfor Tahun 2021-2023
(Sumber: DPMPTSP Kab. Biak Numfor Tahun 2024, data diolah)

Gambar diatas menunjukan jumlah investor berskala nasional baik PMDN maupun PMA di Kabupaten Biak Numfor tahun 2023 berjumlah 18 investor, yang terdiri dari 17 PMDN dan 1 PMA. Angka ini meningkat dari tahun 2022 yang hanya berjumlah 11 investor yang terdiri dari 1 PMA dan 10 PMDN. Sedangkan pada tahun 2021 data menunjukan jumkah investor berskala nasional di Kabupaten Biak Numfor berjumlah 13 investor yang terdiri dari 12 PMDN dan 1 PMA.

M. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Analisis yang dilakukan untuk mengkur capaian bidang urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Biak Numfor menggunakan indikator/ variabel sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 38
Indikator Capaian Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kab. Biak Numfor Tahun 2020-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun		
			2020	2021	2022
1	Persentase Pemuda Berwirausaha Demi Kecakapan Hidup	%	20	30	45
2	Persentase Pembinaan Olahraga Masyarakat	%	30	40	55

(Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Biak Numfor Tahun 2023, data diolah)

Data tabel diatas menunjukan tahun 2022 persentase pemuda berwirausaha demi kecakapan hidup mencapai angka 45 persen, naik 15 persen dari tahun sebelumnya (2021) yang mencapai angka 30 persen, sedangkan pada tahun 2020 pada indikator yang sama persentase yang dicapai adalah 20 persen.

Sementara untuk indikator pembinaan olah raga masyarakat pada tahun 2020 capaianya adalah 30 persen, di tahun 2021 angka naik 10 persen ke angka 40 persen, dan meningkat lagi pada tahun 2022 hinga mencapai angka 55 persen. Sehingga dapat siartikan bahwa perkembangan kepemudaan dan olahraga dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang kemudian diukur dengan indikator tersebut dikatakan cukup berhasil karena menunjukan ternd positif dengan adanya kenaikan setiap tahunnya.

N. Bidang Urusan Statistik

Pemerintah wajib menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu sumber data yang akurat adalah ketersedian dokumen atau buku yang mudah diakses dan meiliki data baik makro dan data mikro atau penunjang lain yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 2. 39
Capaian Indikator Urusan Statistik

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku PDRB (Produk Domestik Regional Bruto	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

(Sumber: BPS Kab. Biak Numfor)

Buku Kabupaten Biak Numfor dalam Angka dan Buku PDRB tersedia setiap tahunnya serta mudah di akses melalui website BPS Kabupaten Biak Numfor.

O. Bidang Urusan Persandian

Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran *(e-office)*, perencanaan *(e-planning)*, keuangan *(e-budgeting)* dan fungsi pemerintahan lainnya.

Salah satu wujud modernisasi yang hadir yaitu implementasi Tanda Tangan Elektronik bagi para pemangku kepentingan. Penerapan Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memberikan manfaat diantaranya, simplifikasi proses bisnis, menciptakan efisiensi dalam persetujuan dokumen dan biaya operasional, seperti pencetakan surat, serta tetap menjaga aspek legalitas. Upaya penggunaan Tanda Tangan Elektronik terus bertransformasi sebagai wujud penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) domain keamanan,

sehingga penanganan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat semakin cepat, tepat dan aman.

Data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 menunjukan bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, telah terdaftar sebanyak 27 OPD yang telah menggunakan tanda tangan elektronik di lingkungan pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

P. Bidang Urusan Kebudayaan

Seberapa penting arti dan peran Seni dan Budaya di suatu daerah terhadap kehidupan manusia, dapat dilihat dari peran pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan seni budaya dan sarana prasarana yang mendukungnya. Indikator pengelolaan produk budaya sebagaimana terlihat dalam tabel.

Tabel 2. 40
Capaian Indikator Urusan Kebudayaan Kab. Biak Numfor Tahun 2020-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun		
			2020	2021	2022
1	Cakupan pengelolaan hak cipta budaya seni OAP	%	12	15	20
2	Cakupan sekolah yang memuat pelajaran bahasa biak (muatan lokal) dalam kurikulum sekolah	%	10	20	40
3	Persentase benda, situs, kawasan yang dilestarikan	%	70	75	80
4	Jumlah sanggar seni budaya asli biak yang aktif	Kelompok	8	15	20
5	Presentase bangunan pemerintah yang menggunakan motif/ corak asli budaya Biak	%	30	50	80

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Biak Numfor Tahun 2023)

Indikator diatas mengukur capaian pelaksanaan pelayanan pemerintah Kabupaten Biak Numfor pada urusan kebudayaan. Data menunjukan pada tahun 2022 capaian indikator cakupan pengelolaan hak cipta budaya seni OAP berada di angka 20 persen, sementara untuk indikator cakupan sekolah yang memuat pelajaran bahasa biak (muatan lokal) dalam kurikulum sekolah capaiannya mencapai 40 persen. Pada tahun yang sama untuk capaian indikator Persentase benda, situs, kawasan yang dilestarikan mencapai angka 80 persen. Jumlah sanggar seni budaya

asli biak yang aktif pada tahun 2022 ada 20 kelompok, dan indikator presentase bangunan pemerintah yang menggunakan motif/ corak asli budaya Biak pada tahun 2023 menunjukan capaian sebesar 80 persen.

Secara umum dapat dilihat pada tabel bahwa pergerakan persentase maupun jumlah selalu meningkat setiap tahunnya, ini berarti bahwa program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Biak Numfor menunjukan progres yang prositif, sehingga perlu ditindaklanjuti dan dilanjutkan demi mendapatkan hasil yang lebih baik.

Q. Bidang Urusan Perpustakaan

Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Salah satu tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perpustakaan adalah meningkatnya kemampuan literasi masyarakat.

Literasi merupakan bentuk *cognitive skill* memampukan manusia untuk mengidentifikasi, mengerti, memahami, dan mencipta yang diperoleh dari kegiatan membaca yang kemudian ditransformasikan dalam kegiatan-kegiatan yang produktif yang memberikan manfaat sosial, ekonomi dan kesejahteraan.

Data dari Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Setda Kabupaten Biak Numfor tahun 2023 menunjukan jumlah koleksi buku pada perpustakaan berjumlah 9.927 buku. Semetara data series tahun berkaitan dengan perpustakaan dan pengelolaannya sangat minim sehingga belum dapat ditampilkan secara rinci.

R. Bidang Urusan Kearsipan

Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kearsipan memiliki peran sangat penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah yaitu sebagai pusat ingatan dan sumber informasi dalam melakukan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah.

Oleh karena itu arsip harus dikelola secara baik dan benar dalam sebuah sistem yang komprehensif dan terpadu sesuai dengan norma, standar, dan pedoman

penyelenggaraan kearsipan yang berlaku. Penyelenggaraan kearsipan harus dilaksanakan secara optimal oleh perangkat daerah selaku pencipta arsip, maupun oleh lembaga kearsipan daerah melalui pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan serta pengelolaan arsip statis yang meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, akses, dan pelayanan pengguna kearsipan.

Pada tahun 2023 persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip di Kabupaten Biak Numfor berjumlah 54,79 persen, sedangkan persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip berada di angka 33 persen.

2.1.4.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib bukan pelayanan dasar dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelengaraan urusan wajib bukan pelayanan dasar pada pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar meliputi 8 urusan yaitu kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, perdagangan, dan transmigrasi.

A. Bidang Urusan Perikanan

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengkur keberhasilan pelayanan urusan perikanan di Kabupaten Biak Numfor adalah jumlah produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya para nelayan.

1. Perikanan Tangkap

Jumlah produksi perikanan tangkap Biak Numfor pada akhir tahun 2023 mencapai 81.163 ton, angka ini meningkat 9.351 ton dari tahun 2019 yang berkisar pada 71.182 ton. Jumlah produksi perikanan tangkap terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu berkisar pada 40.221 ton. Data jumlah produksi perikanan tangkap tergambar sebagai beikut.

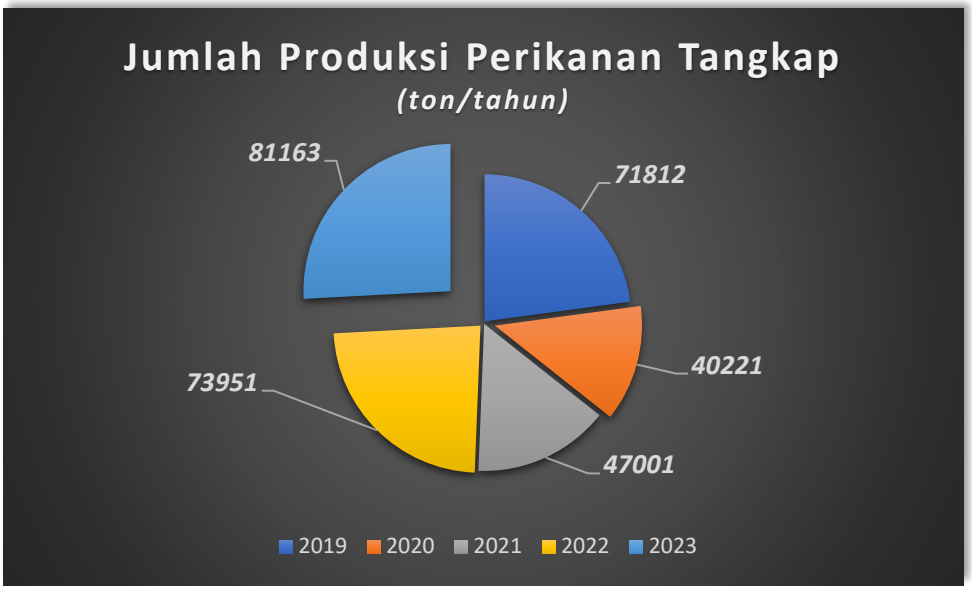

Gambar 2. 60
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023
(Sumber: Dinas Perikanan Kab. Biak Numfor Tahun 2024, data diolah)

2. Perikanan Budidaya

Jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Biak Numfor tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

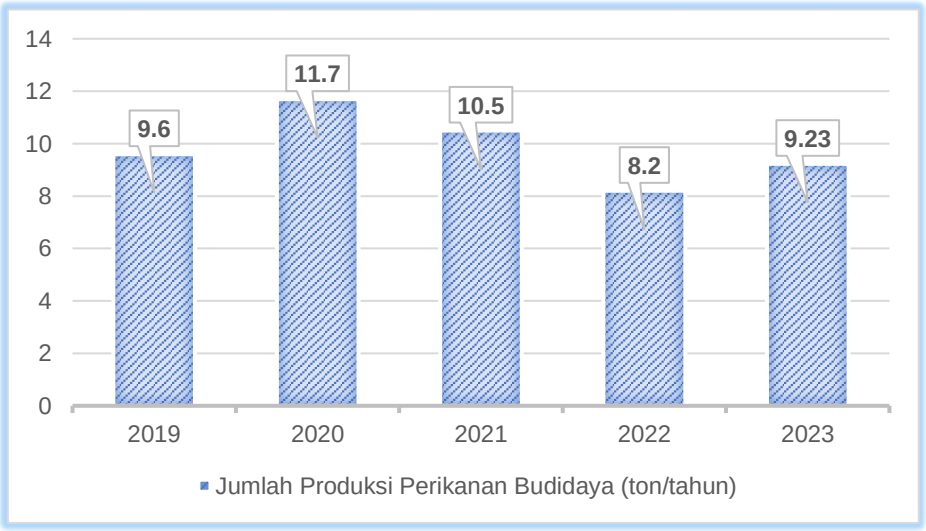

Gambar 2. 61
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023
(Sumber: Dinas Perikanan Kab. Biak Numfor Tahun 2024, data diolah)

Data menunjukan pada tahun 2019 jumlah produksi perikanan budidaya mencapai 9,6 ton. Angka ini meningkat menjadi 11,7 ton pada tahun 2020. Pada tahun 2021, jumlah produksi perikanan budidaya berada pada kisaran 10,5 ton atau

menurun 1,2 ton dari tahun sebelumnya. Jumlah produksi perikanan budidaya Biak Numfor pada akhir tahun 2023 mencapai 9,23 ton, angka ini meningkat 1.03 ton dari tahun 2022 yang berkisar pada 8,2 ton.

3. Pendapatan Rumah Tangga Nelayan

Rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan Kabupaten Biak Numfor dari tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan di Kabupaten Biak Numfor tahun 2019 berkisar Rp.1.500.000,- per bulan, pada tahun 2020 pendapatan meningkat ke angka Rp.1.650.000,- per bulan. Tahun 2021 pendapatan rumah tangga nelayan berada di angka Rp.1.750.000,- per bulan, meningkat Rp.150.000,- dari tahun sbelumnya. Pada tahun 2022 pendapatan rumah tangga nelayan per bulan berkisar Rp.2.000.000,-, dan meningkat di tahun 2023 di angka Rp.2.250.000,- per bulannya.

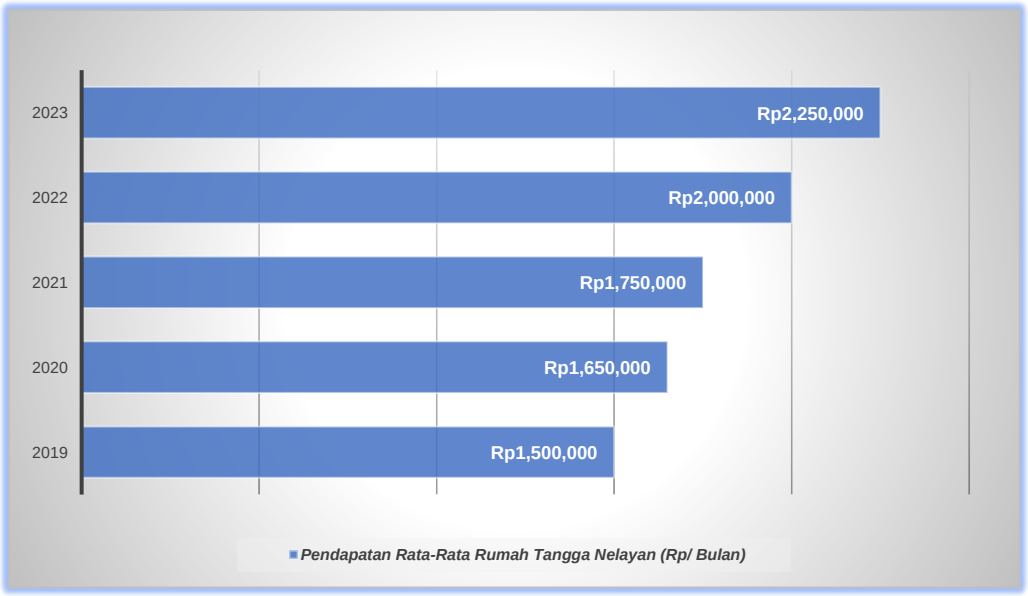

Gambar 2. 62
Rata-Rata Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023
(Sumber: Dinas Perikanan Kab. Biak Numfor Tahun 2023, data diolah)

4. Angka Konsumsi Ikan

Angka Konsumsi Ikan (AKI) merupakan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap komoditas ikan. Angka konsumsi ikan di Kabupaten Biak Numfor tahun 2019 berada pada angka 46,5 persen, kemudian meningkat pad atahun 202 menjadi 47,7 persen. Pada tahun 2021 angka konsumsi ikan di Kabupaten Biak Numfor mengalami penurunan menjadi 40,9 persen. Sedangkan pada tahun 2022

dan 2023 mengalammi kenaikan berturut-turut menjadi 50,12 pada 2022 dan 65,00 pada tahun 2023. Secara rinci persentase angka konsumsi ikan di Kabupaten Biak Numfor dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabael berikut.

Tabel 2. 41
Angka Konsumsi Ikan Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Konsumsi Ikan	%	46,5	47,7	40,9	50,12	65,00

(Sumber: Dinas Perikanan Kab. Biak Numfor Tahun 2024)

B. Bidang Urusan Pariwisata

Total kunjungan wisatawan di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2019 mencapai 64.417 kunjungan, pada tahun 2020 mengami penurunan menjadi 21.783 kunjungan. Angka ini kemudian meningkat pada tahun 2021 dan 2022 secara berturut-turut pada angka 32.983 di tahun 2021 dan 54.727 kunjungan di tahun 2022.

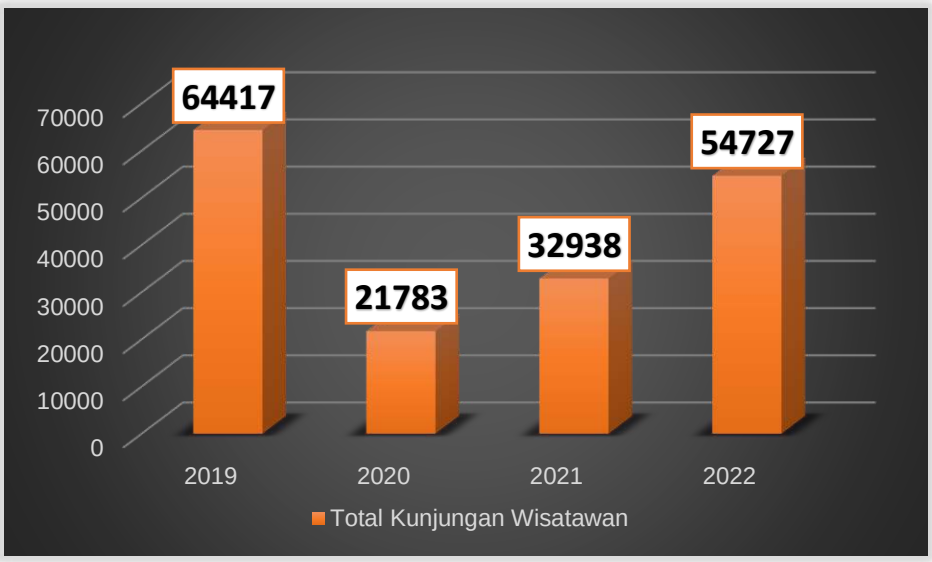

Gambar 2. 63
Total Kunjungan Wisatawan Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2022
(Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Biak Numfor Tahun 2023)

Rata-rata lama kunjungan wisatawan di Kabupaten Biak Numfor. Peningkatan dari tahun 2019 dimana pada tahun tersebut rata-rata lama kunjungan wisatawan berkisar 3 hari, namun peningkatan terjadi pada tahun-tahun setelahnya

(2020-2023) yang menunjukan rata-rata lama kunjungan wisatawan di Kabupaten Biak Numfor mencapai 4 hari.

Sektor pariwisata juga menjadi salah satu penyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Biak Numfor. Data terakhir tahun 2023 menunjukan sektor pariwisata menyumbang Rp.21.829.961.403,- PAD kepada daerah. Angka ini meningkat signifikan dari tahun 2019 yang pada tahun tersebut sektor pariwisata hanya menyumbang Rp.5.854.451.894 sebagai PAD kepada daerah. Pajak sektor pariwisata didapat dari beberapa elemen sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 42
PAD Sektor Pariwisata Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pajak Hotel dan Akomodasi (Rp)	3,704,563,443	743,399,277	1,295,863,622	15,153,657,722	15,036,319,439
2	Pajak Restoran dan Rumah Makan (Rp)	1,938,162,751	1,485,482,589	1,910,458,868	3,514,719,437	3,498,081,844
3	Pajak Hiburan (Rp)	211,725,700	270,197,095	323,777,995	2,926,415,787	3,295,560,120
Total PAD Sektor Pariwisata (Rp)		**5,854,451,894**	**2,499,078,961**	**3,530,100,485**	**21,594,792,946**	**21,829,961,403**

(Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Biak Numfor Tahun 2024)

C. Bidang Urusan Pertanian

Pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera, dengan mewujudkan peningkatan produksi pertanian, dan perikanan untuk memantapkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, perikanan dan meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari.

Kontribusi sektor pertanian terhdap PDRB Kabupaten Biak Numfor. Tahun 2019 kontribusi pertanian sebesar 3,99 persen, tahun 2020 kontribusi pertanian sebesar 3,90 persen, tahun 2021 meningkat menjadi 4,34 persen, tahun 2022 kontribusi pertanian sebesar 4,37 persen, dan tahun 2023 kontribusi pertanian terhadap PDRB sebesar 4,34 persen.

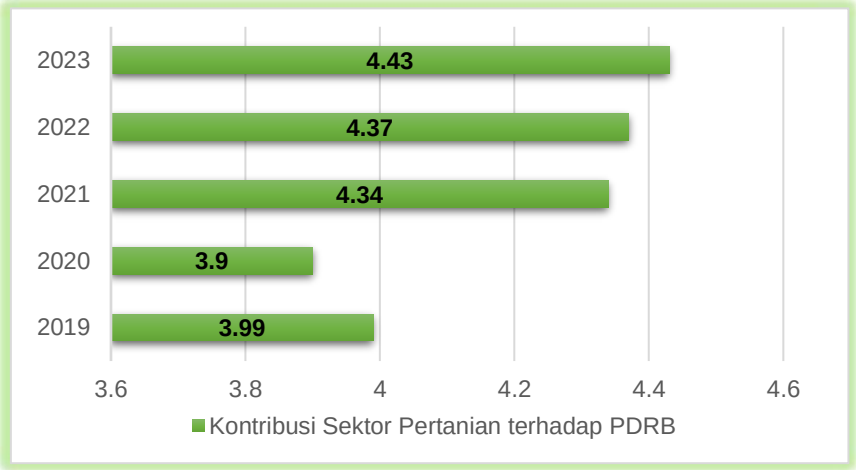

Gambar 2. 64
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023
(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Biak Numfor Tahun 2023)

D. Bidang Urusan Perdagangan

Capaian bidang urusan perdagangan di Kabupaten Biak Numfor sampai tahun 2023 dapat dilihat pada indikator Kontirbusi Sektor Pedagangan terhadap PDRB sebagaimana gambar berikut.

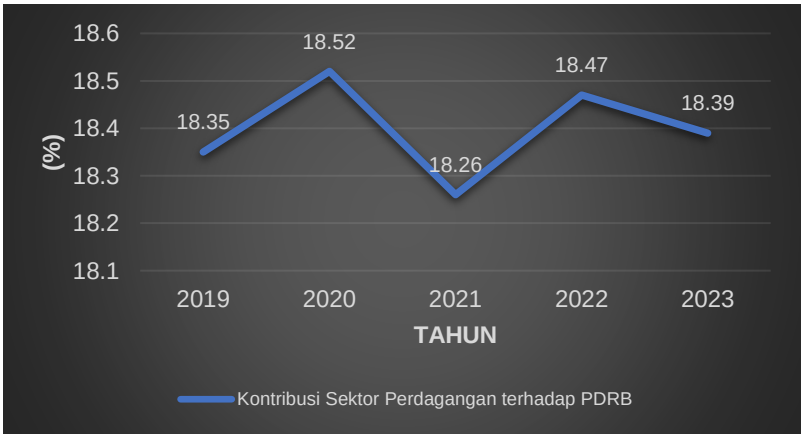

Gambar 2. 65
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023
(Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Biak Numfor Tahun 2024)

Grafik diatas menunjukan Kontribusi sektor perdagangan terhdap PDRB Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 sebesar 18,35 persen, tahun 2020 kontribusi pertanian sebesar 18,52 persen, tahun 2021 menurun menjadi 18,26 persen, tahun 2022 kontribusi pertanian sebesar 18,47 persen, dan tahun 2023 kontribusi pertanian terhadap PDRB sebesar 18,39 persen.

E. Bidang Urusan Perindustrian

Capaian bidang urusan perindurtrian di Kabupaten Biak Numfor sampai tahun 2023 dapat dilihat pada salah satu indikator yaitu Cakupan Kelompok Pengrajin dengan capaian data sebagaimana gambar berikut.

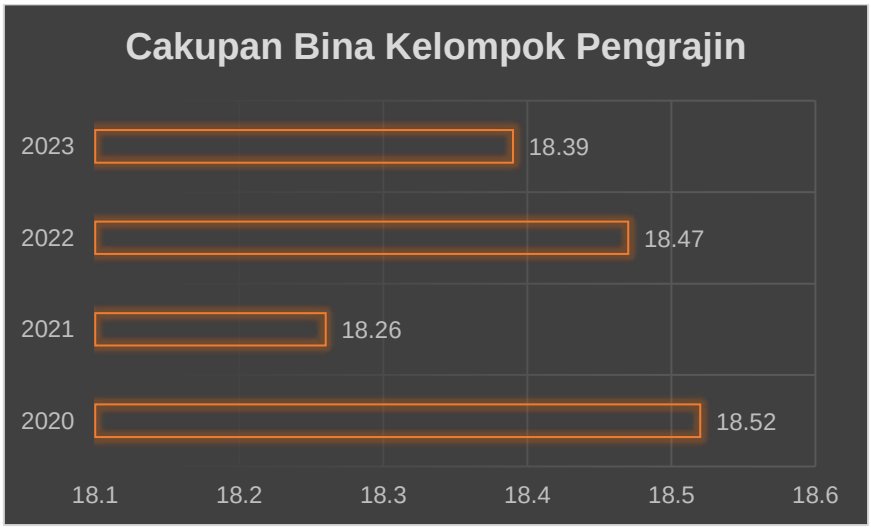

Gambar 2. 66
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kab. Biak Numfor Tahun 2020-2023
(Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Biak Numfor Tahun 2024)

Grafik diatas menunjukan persentase cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 sebesar 18,39 persen, tahun 2021 cakupan bina kelompok pengrajin meningkat menjadi18,47 persen, tahun 2022 menurun menjadi 18,26 persen, dan tahun 2023 cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Biak Numfor mencapai 18,52 persen.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sampai tahun 2024 dan realisasi RPJMD dijabarkan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 43

Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Biak Numfor

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01			**PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN**																	
1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
1	01	01	2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan bagi ASN dan tenaga honorer			98,56	177,880,619,486.00	180.478.436.989	100	177,967,887,072	109.2491085	194,428,329,984.00		109.25	207.8091085	372,308,949,470.00			Pendidikan dan kebudayaan
1	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya layanan pendidikan yang siap pakai				80,000,000.00	80.000.000	100	406,580,000	419.7402725	1,706,580,000.00		419.74	419.7402725	1,786,580,000.00			Pendidikan dan kebudayaan
1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Fasilitas Pendidikan			99,98	679,721,850.00	679.885.350	100	448,558,500	100	448,558,500.00		100.00	199.98	1,128,280,350.00			Pendidikan dan kebudayaan
1	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya layanan pendidikan yang siappakai			100	152,524,375.00	152.524.375	100	153,347,380	100	153,347,380.00		100.00	200	305,871,755.00			Pendidikan dan kebudayaan
1	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Terlaksananya layanan pendidikan yang siap pakai			100	20,000,000.00	20.000.000	100	20,013,450	100	20,013,450.00		100.00	200	40,013,450.00			Pendidikan dan kebudayaan
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tersedianya sarana dan prasarana serta anggaran dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas untuk peningkatan mutu pendidikanSekolah Dasar																
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya layananpendidikan yang siap pakai			43.91	29,259,115,237.00	66.629.403.301	100	64,180,365,700	56.09229535	36,000,240,284.00		56.09	100.0022953	65,259,355,521.00			Pendidikan dan kebudayaan
1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya layanan pendidikan yang siap pakai			52,72	31,167,828,581.00	59.118.082.295	100	42,160,884,850	15.14951565	6,387,169,850.00		15.15	67.86951565	37,554,998,431.00			Pendidikan dan kebudayaan
1	01	02	2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terlaksananya layanan pendidikan yang siap pakai		12,211,000,000.00	65,25	3,696,567,635.00	5.664.888.000	100	6,160,283,000	54.28013616	3,343,810,000.00		54.28	119.5301362	7,040,377,635.00		57.66	Pendidikan dan kebudayaan
1	01	02	2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Terlaksananya layanan pendidikan yang siap pakai		5,310,000,000.00	18,54	276,021,000.00	1.488.611.000	100	1,162,290,000	100	1,162,290,000.00		100.00	118.54	1,438,311,000.00		27.09	Pendidikan dan kebudayaan
1	01	02	3.05	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (OTSUS)	Terpenuhi layanan pendidkan bermutu dan berkualitas		5,178,000,000.00	88,59	10,015,353,905.00	11.305.342.000	100	19,438,842,000	44.41888822	8,634,517,500.00		44.42	133.0088882	18,649,871,405.00		360.18	Pendidikan dan kebudayaan
1	01	02	3.06	Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Terpenuhi layanan pendidkan bermutu dan berkualitas			92,96	7,366,822,982.00	7.924.407.000	100	8,074,407,000	33.54794982	2,708,798,009.00		33.55	126.5079498	10,075,620,991.00			Pendidikan dan kebudayaan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12	
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Menengah Kejuruan (OTSUS)																		
1	01	02	3.08	Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan diluar kewenangan Kabupaten/Kota (OTSUS)			2,251,000,000.00	43,22	2,494,634,099.00	5.771.350.000	100	5,600,000,000	565.4672336	31,666,165,082.00		565.47	608.6872336	34,160,799,181.00		1,517.58	Pendidikan dan kebudayaan
2	22	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pelestarian Budayalokal leluhur dalam daerah																Pendidikan dan kebudayaan
2	22	02	2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pendidikan		338,000,000.00	100	2,507,000,000.00	2.507.000.000	100	1,400,000,000.00	28.57142857	400,000,000.00		28.57	128.5714286	2,907,000,000.00		860.06	Pendidikan dan kebudayaan
1	01	.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Tersedianya sarana dan prasarana serta anggaran dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas untuk peningkatan mutu pendidikan Sekolah Dasar			100	100,000,000.00	100.000.000	100	650,000,000.00	18.46153846	120,000,000.00		18.46	118.4615385	220,000,000.00			Pendidikan dan kebudayaan
1	01	.03	2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Terlaksananya layanan pendidikan yang siap pakai		225,000,000.00	100	100,000,000.00	100.000.000	100	400,000,000.00	30	120,000,000.00		30.00	130	220,000,000.00		97.78	Pendidikan dan kebudayaan
																	0	-				
1	01			**SKB**																		
1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																SKB
1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			99,24	9,924,000.00	10.000.000	100	9,998,976.00	100	9,998,976.00		100.00	199.24	19,922,976.00			SKB
1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			92,47	449,174,454.00	485.739.250	100	535,543,500.00	79.77757176	427,243,600.00		79.78	172.2475718	876,418,054.00			SKB
1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			40,93	46,504,450.00	113.616.000	100	113,615,990.00	100	113,615,990.00		100.00	140.93	160,120,440.00			SKB
1	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			89,10	226,283,622.00	253.961.962	100	253,960,151.00	100	253,960,151.00		100.00	189.1	480,243,773.00			SKB
1	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			37,50	6,000,000.00	16.000.000	100	16,000,000.00	100	16,000,000.00		100.00	137.5	22,000,000.00			SKB
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Capaian Program Pengelolaan Pendidikan																SKB

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	01	02	2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pendidik dan Tenaga Kependidikan tersedia bagi PAUD Terselenggaranya Proses Belajar PAUD			99,99	599,960,000.00	600.000.000	100	599,999,815.00	99.99998083	599,999,700.00		100.00	199.9899808	1,199,959,700.00			SKB
1	01	02	2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pendidik dan tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan,pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi Tersedianya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Terselenggaranya Proses Belajar Nonformal/Kesetaraa			99,99	249,974,000.00	250.000.000	100	249,998,640.00	100.0004568	249,999,782.00		100.00	199.9904568	499,973,782.00			SKB
1	01	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Capaian Program Pengembangan Kurikulum																SKB
1	01	03	3.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini danPendidikan Non Formal	Tersedianya Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			96,65	676,560,234.00	700.000.000	100	699,999,250.00	0			-	96.65	676,560,234.00			SKB
1	02			**KESEHATAN**																	
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Anggaran untuk Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkar Daerah																Kesehatan
1	02	02	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan			0	-	28.448.000	100	48,524,480.00	100	48,524,480.00		100.00	100	48,524,480.00			Kesehatan
1	02	02	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Kesehatan			99,58	38,848,433,647.00	39.012.151.760	100	50,427,243,664.00	84.13659676	42,427,766,660.00		84.14	183.7165968	81,276,200,307.00			Kesehatan
1	02	02	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perang Perangkat Daerah			79,44	694,196,323.00	873.807.600	100	865,894,800.00	109.7014095	949,898,800.00		109.70	189.1414095	1,644,095,123.00			Kesehatan
1	02	02	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia			90,66	343,896,883.00	379.310.000	100	380,028,968.00	100	380,028,968.00		100.00	190.66	723,925,851.00			Kesehatan
1	02	02	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan Yang Terawat Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Terservice			40,04	1,096,257,480.00	2.738.183.000	100	225,304,000.00	99.99822462	225,300,000.00		100.00	140.0382246	1,321,557,480.00			Kesehatan
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Penyediaan Sarana Dan Prasana Pelayanan Kesehatan																Kesehatan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				KESEHATAN MASYARAKAT																	
1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasana Pelayanan Kesehatan		127,426,000,000.00	80,78	32,050,971,660.00	39.674.663.005	100	20,904,657,560.00	121.5934149	25,418,687,000.00		121.59	202.3734149	57,469,658,660.00		45.10	Kesehatan
1	02	02	2.01	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peyanan Kesehatan yang Terlaksana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota		5,310,000,000.00	30,10	12,933,716,525.00	42.966.156.552	100	50,332,625,980.00	78.23110603	39,375,770,000.00		78.23	108.331106	52,309,486,525.00		985.11	Kesehatan
1	02	02	2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Meningkatnya Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tercapainya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Tercapainya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan															Kesehatan
1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terpenuhinya Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM															Kesehatan
1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan			99,98	5,698,672,553.00	5.700.000.000	100	6,600,000,000.00	19.86398488	1,311,023,002.00		19.86	119.8439849	7,009,695,555.00			Kesehatan
1	02	03	2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		4,779,000,000.00	91,93	3,819,554,000.00	4.155.007.000	100	2,642,169,200.00	112.2363019	2,965,473,000.00		112.24	204.1663019	6,785,027,000.00		141.98	Kesehatan
1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan bersumber Masyarakat															Kesehatan
1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pelayanan bersumber Masyarakat			0	-	255.110.000	100	-		347,000,000.00		-	0	347,000,000.00			Kesehatan
											100						0	-			Kesehatan
1	02			**RSUD**																	Kesehatan
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG	Kelancaran Penyususnan Laporan Capaian Kinerja																Kesehatan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12	
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Iktisar Realisasi kinerja Skpd																	
01	2	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terciptanya kelancaran Penyesunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja			99,98	16,236,500.00	16.240.500	100	16,240,600.00	100	16,240,600.00		100.00	199.98	32,477,100.00			Kesehatan
01	2	02	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terciptanya Kelancaran Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN			98,03	26,226,363,292.00	26.752.439.617	100	38,903,618,899.00	47.99682019	18,672,500,010.00		48.00	146.0268202	44,898,863,302.00			Kesehatan
01	2	06	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Teciptaanya kelancaran pelayanan di RSUD			90,01	261,872,740.00	290.945.000	100	890,875,400.00	68.29142437	608,391,500.00		68.29	158.3014244	870,264,240.00			Kesehatan
01	2	08	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan Administrasi perkantoran			96,93	14,709,344,669.00	15.174.916.682	100	13,833,980,436.00	100.5028392	13,903,543,116.00		100.50	197.4328392	28,612,887,785.00			Kesehatan
01	2	09	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas dan kendaraandinas jabatan			55,79	124,104,708.00	222.457.500	100	173,429,600.00	105.1363204	182,337,500.00		105.14	160.9263204	306,442,208.00			Kesehatan
01	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan bagi Pasien di RSUD																	Kesehatan
01	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Cakupan pelayanan Bagi pasien Di RSUD			95,36	46,990,991,657.00	49.278.776.880	100	46,635,244,449.00	48.24676608	22,499,997,300.00		48.25	#VALUE!	69,490,988,957.00			Kesehatan
01	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat dengan baikdengan Baik			5,12	5,399,941,000.00	105.399.999.900	100	65,837,879,860.00	100	65,837,879,860.00		100.00	105.12	71,237,820,860.00			Kesehatan
1	03			**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**																		PUPR
1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA	Laporan Keuangan																	PUPR
1	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Keuangan yang tersusun			100	20,000,000.00	20.000.000	100	19,999,900.00	100	19,999,900.00		100.00	200	39,999,900.00			PUPR
1	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji ASN dan Tenaga Honorer Terbayarnya Gaji ASN dan Tenaga Honorer			97,42	4,281,069,177.00	4.394.303.234	100	17,231,169,322.00	23.38910916	4,030,217,002.00		23.39	120.8091092	8,311,286,179.00			PUPR
1	03	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	ASN yang mampu dalam bekerja Jumlah Pegawai yang ikut kegiatan Pelatihan			100	99,095,000.00	99.095.000	100	11,981,400.00	1000	119,814,000.00		1,000.00	1100	218,909,000.00			PUPR

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12	
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Rutin pada sekretariat bisa terlaksana Kegiatan Rutin pada sekretariat bisa terlaksana			100	380,160,000.00	380.160.000	100	340,110,198.00	100	340,110,198.00		100.00	200	720,270,198.00			PUPR
1	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Rutin pada sekretariat bisa terlaksana			100	37,964,000.00	37.964.000	100	57,979,810.00	100	57,979,810.00		100.00	200	95,943,810.00			PUPR
1	03	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan dinas yang beroperasi dengan layak			100	9,999,750.00	9.999.750	100	10,000,000.00	349.8725	34,987,250.00		349.87	449.8725	44,987,000.00			PUPR
1	03	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Presentasi Terpenuhinya Resapan Air																PUPR
1	03	02	2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Resapan Air		2,814,000,000.00	100	150,000,000.00	150.000.000	100	12,225,000,000.00	90.50835174	11,064,646,000.00		90.51	190.5083517	11,214,646,000.00			PUPR
1	03	03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Presentasi Terpenuhinya Air Bersih																PUPR
1	03	03	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dana Operasional dan Pemeliharaan SPAM Ruar		1,689,000,000.00	96,35	3,660,221,214.00	3.799.000.000	100	3,174,600,000.00	9.450009 45	300,000,000.00		9.45	105.8000095	3,960,221,214.00		234.47	PUPR
1	03	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Presentasi Terpenuhinya Sarana Prasarna Pemerintahaan Tersedianya Sarana Pemerintah Yang Memadai																PUPR
1	03	08	2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terbangunya Sarana Prasarana Pemerintah		281,000,000.00	32,48	2,176,492,566.00	6.700.000.000	100			3,259,290,000.00			32.48	5,435,782,566.00		1,934.44	PUPR
1	03	09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya Penataan banguan Presentasi Terpenuhinya penataan Bangunan																PUPR
1	03	09	2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya Landmark Biak Numfor Terbangunnya Tugu			4,83	120,642,600.00	2.500.000.000	100			2,350,000,000.00			4.83	2,470,642,600.00			PUPR
1	03	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya Struktur Jaringan JalanKabupaten																PUPR

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	03	10	2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang di pemeliharaan rutin		493,000,000.00	97,45	65,970,359,328.00	67.698.712.428	100	62,460,525,251.00	87.63224951	54,735,563,332.00		87.63	185.0822495	120,705,922,660.00		24,483.96	PUPR
1	03	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Tenaga Bina Konstruksi yang terampil																PUPR
1	03	11	2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga Bina Konstruksi yangterampil			100	50,000,000.00	50.000.000	100						100	50,000,000.00			PUPR
1	03	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Masyarakat menjadilebih paham lagi akan fungsi tata ruang daerah																PUPR
1	03	12	2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Masyarakat menjadi lebih paham lagi akan fungsi tata ruang daerah		507,000,000.00	100	85,000,000.00	85.000.000	100	84,999,620.00	0				100	85,000,000.00		16.77	PUPR
1	03	12	2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Koordinai dan Sinkronisai Pemanfaatn Ruang		1,000,000,000.00	100	75,000,000.00	75.000.000	100	74,999,900.00	133.33333778	99,999,900.00		133.33	233.3333778	174,999,900.00		17.50	PUPR
1	04			**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**																	
1	04	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Dan Kegiatan Perangkat daerah Yang Tersusun Dalam Dokumen Perencanaan Tepat Waktu																Perumahan dan pemukiman
1	04	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ProgramDan Kegiatan Perangkat daerahYang Tersusun Dalam Dokumen Perencanaan TepatWaktu			100	30,000,000.00	30.000.000	100	35,000,000.00	128.5714286	45,000,000.00		128.57	228.5714286	75,000,000.00			Perumahan dan pemukiman
1	04	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang terlayani			95,95	2,713,732,749.00	2.828.287.539	100	3,006,007,500.00	83.30982707	2,504,299,650.00		83.31	179.2598271	5,218,032,399.00			Perumahan dan pemukiman
1	04	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			88,61	161,250,000.00	181.986.000	100	148,083,801.00	79.08096578	117,106,100.00		79.08	#VALUE!	278,356,100.00			Perumahan dan pemukiman
1	04	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			100	152,280,000.00	152.280.000	100	175,132,550.00	120.2132613	210,532,550.00		120.21	220.2132613	362,812,550.00			Perumahan dan pemukiman
1	04	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Terpelihara dan Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas/Operasional			100	53,359,500.00	53.361.500	100	54,200,000.00	73.80073801	40,000,000.00		73.80	173.800738	93,359,500.00			Perumahan dan pemukiman
1	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Teraksananya kegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat																Perumahan dan pemukiman
1	04	02	2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Jumlah Rumah bagi Korban BencanaKabupaten/Kota yang TerbangunJumlah Rumah Korban		7,880,000,000.00	77,27	7,923,782,200.00	10.254.814.000	100						77.27	7,923,782,200.00		100.56	Perumahan dan pemukiman

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12	
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Kabupaten/Kota	BencanaKabupaten/Kota yang TerehabilitasJumlah Rumah pada Lokasi RelokasiProgram Kabupaten/Kota yangDilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan																	
1	04	08		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Tersedianya Sistem Informasi Database Pertanahan																	Perumahan dan pemukiman
1	04	08	2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Tersedianya data pertanahan yang akurat		282,000,000.00	21,22	2,148,437,036.00	10.125.000.000	100	5,000,000,000.00	200	10,000,000,000.00		200.00	221.22	12,148,437,036.00		4,307.96	Perumahan dan pemukiman
1	05			**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**																		
1	05			**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**																		SATPOL PP
1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	GAJI ASN																	SATPOL PP
1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji ASN			95,79	2,523,510,466.00	2.634.543.910	100	2,757,792,500.00	82.2425957	2,268,080,136.00		82.24	178.0325957	4,791,590,602.00			SATPOL PP
1	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah			95,91	151,986,860.00	158.461.550	100	201,716,638.00	100	201,716,638.00		100.00	195.91	353,703,498.00			SATPOL PP
1	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			97,14	4,955,233,140.00	5.101.143.425	100	4,862,956,200.00	100	4,862,956,200.00		100.00	197.14	9,818,189,340.00			SATPOL PP
1	05	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	102,780,000.00	102.780.000	100	126,994,800.00	100	126,994,800.00		100.00	200	229,774,800.00			SATPOL PP
1	05			**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**																		
1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Perencanaan																	BPBD
1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan			38,10	9,525,200.00	25.000.000	100	29,017,700.00	293.674895	85,217,700.00		293.67	331.774895	94,742,900.00			BPBD
1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Adanya Gaji dan Tunjangan Pegawai Adanya Penghasilan ASN			93,30	2,121,125,293.00	2.273.479.160	100	2,544,980,300.00	80.46966367	2,047,937,088.00		80.47	173.7696637	4,169,062,381.00			BPBD
1	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan kantor			50,77	211,296,139.00	416.158.000	100	135,018,580.00	37.02749651	49,994,000.00		37.03	87.79749651	261,290,139.00			BPBD

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	05	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah			96,90	50,000,000.00	51.600.000	100	44,987,200.00	100	44,987,200.00		100.00	196.9	94,987,200.00			BPBD
1	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daera			96,99	903,240,000.00	931.260.750	100	910,855,346.00	100	910,855,346.00		100.00	196.99	1,814,095,346.00			BPBD
1	05	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah			74,56	135,594,295.00	181.850.000	100	54,989,200.00	110.2747449	60,639,200.00		110.27	184.8347449	196,233,495.00			BPBD
1	05	01	2.13	Penataan Organisasi	Tersedianya penataan organisassi			54,13	11,800,000.00	21.800.000	100	25,150,000.00	185.0894632	46,550,000.00		185.09	239.2194632	58,350,000.00			BPBD
1	05	02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Adanya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketertiban umum																BPBD
1	05	02	2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum			10,00	25,000,000.00	250.000.000	100	199,999,400.00	100	199,999,400.00		100.00	110	224,999,400.00			BPBD
1	05	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Adanya informasipelayanan rawan bencana																BPBD
1	05	03	2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah pesertakegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi Rawan Bencana		1,013,000,000.00	90,67	68,000,000.00	75.000.000	100						90.67	68,000,000.00		6.71	BPBD
1	06			**SOSIAL**																	
1	06	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	Dinsos
1	06	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sejumlah koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			100	8,450,000.00	8.450.000,	100	15,200,000.00	100	15,200,000.00		100.00	200	23,650,000.00			Dinsos
1	06	01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sejumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			98,24	3,214,272,077.00	3.271.997.287	100	3,518,366,250.00	85.12333246	2,994,950,600.00		85.12	183.3633325	6,209,222,677.00			Dinsos
1	06	01	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sejumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya			100	28,800,000.00	28.800.000	100						100	28,800,000.00			Dinsos
1	06	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sejumlah barang cetakan dan pengadaan Sejumlah penyediaan bahan logistik kantor Sejumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Sejumlah penyelenggaraan			100	231,514,000.00	231.514.000	100	192,888,000.00	140.0615901	270,162,000.00		140.06	240.0615901	501,676,000.00			Dinsos

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					rapat koordinasi dan konsultasi SPKD																	
1	06	01	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sejumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sejumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sejumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Sejumlah penyediaan jasa surat menyurat			92,54	159,954,000.00	172.854.000	100	172,674,000.00	107.3699573	185,400,000.00		107.37	199.9099573	345,354,000.00			Dinsos
1	06	01	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sejumlah penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraanperorangan dinas atau kendaraan dinasjabatan			100	5,480,000.00	5.480.000	100	16,368,000.00	161.0948192	26,368,000.00		161.09	261.0948192	31,848,000.00			Dinsos
1	06	02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Capaian Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)																Dinsos
1	06	02	2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Sejumlah fasilitasi pemberdayaan sosial KAT		563,000,000.00	100	350,000,000.00	350.000.000	100	500,000,000.00	40	200,000,000.00		40.00	140	550,000,000.00		97.69	Dinsos
1	06	02	2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Sejumlah peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota			100	500,000,000.00	500.000.000	100	200,000,000.00	100	200,000,000.00		100.00	200	700,000,000.00			Dinsos
1	06	04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Capaian Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial																Dinsos
1	06	04	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Sejumlah penyediaan alat bantu		169,000,000.00	100	400,000,000.00	400.000.000	100	200,000,000.00					100	400,000,000.00		236.69	Dinsos
1	06	05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Capaian Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar																Dinsos
1	06	05	2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Sejumlah penjangkauan anakanak terlantar		169,000,000.00	100	100,000,000.00	100.000.000	100						100	100,000,000.00		59.17	Dinsos
1	06	05	2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sejumlah fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga		507,000,000.00	100	400,000,000.00	400.000.000	100	1,930,064,600.00	95.85171398	1,850,000,000.00		95.85	195.851714	2,250,000,000.00		443.79	Dinsos
2	07			**TENAGA KERJA**																	
2	07	01		PROGRAM PENUNJANG	Meningkatkan penatausahaan dan																Tenaga Kerja

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12	
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	pelaporan keuangan yang akuntabel																	
2	07	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			100	15,000,000.00	15.000.000	100	15,000,000.00	100	15,000,000.00		100.00	200	30,000,000.00			Tenaga Kerja
2	07	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			98,56	2,356,193,190.00	2.390.718.750	100	2,678,085,750.00	81.44467353	2,181,158,196.00		81.44	180.0046735	4,537,351,386.00			Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya manajemen administrasi umum yang erkelola dengan baik			92,04	276,227,320.00	300.124.600	100	240,652,800.00	100	240,652,800.00		100.00	192.04	516,880,120.00			Tenaga Kerja
2	07	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan umum perangkat daerah yang terkelola dengan baik			60,93	22,774,505.00	37.375.400	100	36,847,200.00	100	36,847,200.00		100.00	160.93	59,621,705.00			Tenaga Kerja
2	07	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah pada satuan kerja yang terkelola dengan baik			66,67	7,500,000.00	7.500.000	100	7,500,000.00		7,500,000.00		100.00	66.67	15,000,000.00			Tenaga Kerja
2	07	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan pelatihan kerja dan produktivitas																	Tenaga Kerja
2	07	03	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Meningkatkatkan pengetahuan (skill) TKBM dalam memahami pentingnya K3			0	-	250.000.000	100						0	-			Tenaga Kerja
2	07	03	2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah pembinaan dan pemberdayaan LPKS di kab. Biak Numfor yang terlaksana		169,000,000.00	100	25,000,000.00	25.000.000	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00		100.00	200	50,000,000.00		29.59	Tenaga Kerja
2	07	03	2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah pengembangan kelembagaan yang terlaksana		338,000,000.00	100	25,000,000.00	25.000.000	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00		100.00	200	50,000,000.00		14.79	Tenaga Kerja
2	07	04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tercapainya penempatan tenaga kerja melalui layanan AKAL dan AKAD																	Tenaga Kerja
2	07	04	2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan			20,00	25,000,000.00	125.000.000	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00		100.00	120	50,000,000.00			Tenaga Kerja
2	07	04	2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pelayanan informasi pasar kerja online yang terlaksana			99,81	131,747,760.00	132.000.000	100	132,000,000.00	100	132,000,000.00		100.00	199.81	263,747,760.00			Tenaga Kerja
2	07	05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Terwujudnya penyelesaian prosedur pemberiannperlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan																	Tenaga Kerja
2	07	05	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kasus tenaga kerja yang tertangani			100	50,000,000.00	50.000.000	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00		100.00	200	75,000,000.00			Tenaga Kerja

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	07			**LOKAL LATIHAN KERJA USAHA KECIL MENENGAH**																	
2	07	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan penatausahaan dan laporan keuangan yang akuntabel																LLK-UKM
2	07	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya pelayanan pelaporan keuangan yang akuntabel			99,99	7,116,200.00	7.116.700	100	12,000,000.00	100	12,000,000.00		100.00	199.99	19,116,200.00			LLK-UKM
2	07	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji ASN			94,54	1,142,252,597.00	1.208.195.532	100	1,363,493,250.00	82.26287882	1,121,648,800.00		82.26	176.80287 88	2,263,901,397.00			LLK-UKM
2	07	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aperatur Sipil Negara dan lamanya Pendidikan			100	38,438,000.00	38.438.000	100	114,076,000.00	106.5912199	121,595,000.00		106.59	206.5912199	160,033,000.00			LLK-UKM
2	07	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			90,82	77,445,800.00	85.274.360	100	383,923,000.00	97.4785048	374,242,400.00		97.48	188.2985048	451,688,200.00			LLK-UKM
2	07	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Fasilitas Sarana danPrasarana KantorJumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan			0	-	332.900.000	100						0	-			LLK-UKM
2	07	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya pelayanan surat menyurat Terciptanya lingkungan kantor yang kondusif Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai			96,69	123,602,364.00	127.830.676	100	90,000,000.00	156.4944444	140,845,000.00		156.49	253.1844444	264,447,364.00			LLK-UKM
2	07	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendara dinas operasional Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya			71,09	6,000,000.00	8.440.000	100						71.09	6,000,000.00			LLK-UKM
2	07	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi, bagi Pencari Kerja																LLK-UKM
2	07	03	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Tersedianya Siswa Teknik produki Mebuller Tersedianya siswa Terlatih Basic Office Tersedianya siswa Terlatih Basic Office Tersedianya SIswa Terlatih Instalasi Penerangan Tersedianya Siswa Terlatih Las SMAW 3G Tersedianya Siswa Terlatih		338,000,000.00	100	1,000,000,000.00	1.000.000.000	100	999,726,576.00	100.0273499	1,000,000,000.00		100.03	200.0273499	2,000,000,000.00		591.72	LLK-UKM

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12	
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Menjahit Pakaian dengan Mesin Tersedianya SiswaTerlatih Pembuatan Aneka Kripik Tersedianya Siswa Terlatih Service Motor Tempel Tersedianya Siswa Terlatih Service Sepeda Motor																	
2	08			**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**																		
2	08	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik																	DP3KB
2	08	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kelancaran Penyusunan Laporan Keuangan SKPD			98,68	2,720,492,049.00	2.756.755.660	100	2,943,591,460.00	84.41137399	2,484,725,996.00		84.41	183.091374	5,205,218,045.00				DP3KB
2	08	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Bahan Logistik Kantor			94,88	177,051,664.00	186.599.300	100	183,675,300.00	100	183,675,300.00		100.00	194.88	360,726,964.00				DP3KB
2	08	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Tenaga Arsiparis dan Perpustakaan Kantor (3 Orang) Tersedianya TenagaCleaning Service (Kebersihan Kantor) 1 Orang Tersedianya Tenaga IT dan Akuntansi (3 Orang) Tersedianya Yenaga Admin Krisna/Admin SIPD (1 Orang)			95,01	175,191,992.00	184.400.700	100	184,325,600.00	100	184,325,600.00		100.00	195.01	359,517,592.00				DP3KB
2	08	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya sejumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas			100	41,500,000.00	41.500.000	100	44,500,000.00	100	44,500,000.00		100.00	200	86,000,000.00				DP3KB
2	08	02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG																	DP3KB
2	08	02	2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		113,000,000.00	100	100,000,000.00	100.000.000	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00		100.00	200	150,000,000.00		132.74		DP3KB
2	08	02	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			100	100,000,000.00	100.000.000	100						100	100,000,000.00				DP3KB

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12	
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
2	08	02	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang mendapat dana hibah			100	1,050,000,000.00	1.050.000.000	100	1,050,000,000.00	47.61904762	500,000,000.00		47.62	147.61904762	1,550,000,000.00			DP3KB
2	08	02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pelaksanaan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																DP3KB
2	08	02	2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Manajemen BOKB			100	333,000,000.00	333.000.000	100	250,000,000.00	520.8	1,302,000,000.00		520.80	620.8	1,635,000,000.00			DP3KB
2	08	03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																DP3KB
2	08	03	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya Angka Kekerasan		1,126,000,000.00	100	100,000,000.00	100.000.000	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00		100.00	200	150,000,000.00		13.32	DP3KB
2	08	03	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewengan Kabupaten/Kota		281,000,000.00	100	50,000,000.00	50.000.000	100	75,000,000.00	100	75,000,000.00		100.00	200	125,000,000.00		44.48	DP3KB
2	08	03	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Penguatan Layanan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenagan Kabupaten/Kota			95,32	95,319,800.00	100.000.000	100						95.32	95,319,800.00			DP3KB
2	08	03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																DP3KB
2	08	03	2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatnya Pemehaman Masyarakat tentang Media KIE Bangga Kencan			99,59	2,177,492,250.00	2.186.510.000	100	7,386,647,000.00	17.4910213	1,292,000,000.00		17.49	117.0810213	3,469,492,250.00			DP3KB

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	08	03	2.01	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Meningkatnya Pemahaman masyarakat tentang Bangga Kencana			100	1,004,000,000.00	1.004.000.000	100	-		2,489,000,000.00			100	3,493,000,000.00			DP3KB
2	08	03	2.01	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendistribusian Alkon			99,99	383,028,000.00	383.048.000	100	2,340,000,000.00	37.26230769	871,938,000.00		37.26	137.25230 77	1,254,966,000.00			DP3KB
2	08	03	2.01	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentangn Bangga Kencana oleh Masyarakat		169,000,000.00	100	582,500,000.00	582.500.000	100	-		1,696,250,000.00			100	2,278,750,000.00		1,348.37	DP3KB
2	08	04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Tersedianya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi KG dan perlindunh=gan Anakbagi Keluarga																DP3KB
2	08	04	2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga			100	50,000,000.00	50.000.000	100	300,000,000.00	33.33333333	100,000,000.00		33.33	133.33333 33	150,000,000.00			DP3KB
2	08	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																DP3KB
2	08	04	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pembangunan Keluarga		225,000,000.00	100	2,289,570,000.00	2.289.600.000	100	528,000,000.00					100	2,289,570,000.00		1,017.59	DP3KB
2	08	06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak			100	300,000,000.00	300.000.000	100	500,000,000.00					100	300,000,000.00			DP3KB
2	08	06	2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Hak Anak			100	100,000,000.00	100.000.000	100	200,000,000.00	50	100,000,000.00		50.00	150	200,000,000.00			DP3KB
2	08	06	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Terpenuhinya Hak Anak			100	200,000,000.00	200.000.000	100	300,000,000.00	100	300,000,000.00		100.00	200	500,000,000.00			DP3KB

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12	
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Kewenangan Kabupaten/Kota																		
2	08	07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pemdampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak																	DP3KB
2	08	07	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak		338,000,000.00	94,00	141,000,000.00	150.000.000	100						94	141,000,000.00		41.72	DP3KB
2	08	07	2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus		225,000,000.00	100	50,000,000.00	50.000.000	100	75,000,000.00	100	75,000,000.00		100.00	200	125,000,000.00		55.56	DP3KB
2	11			**LINGKUNGAN HIDUP**																		
2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan capaian laporan kinerja																	DLH
2	11	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporancapaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja			100	15,000,000.00	15.000.000	100	19,999,534.00	100	19,999,534.00		100.00	200	34,999,534.00			DLH
2	11	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administarsi Keuangan OPD			99,10	5,015,266,295.00	5.061.032.066	100	5,515,361,757.00	1.203534055	66,379,257.00		1.20	100.3035341	5,081,645,552.00			DLH
2	11	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100	39,000,000.00	39.000.000	100	84,000,000.00					100	39,000,000.00			DLH
2	11	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Perlatan, Perlengkapan, Barang Cetak, Pengadaan dan Pelaksanaan Rapat Koordinasi			73,75	167,902,000.00	227.653.000	100	272,411,600.00	86.30730116	235,111,100.00		86.31	160.0573012	403,013,100.00			DLH
2	11	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			96,95	198,244,957.00	204.485.805	100	204,592,771.00	99.71025662	203,999,977.00		99.71	196.6602566	402,244,934.00			DLH
2	11	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			55,37	180,595,743.00	326.184.743	100	326,184,733.00	100	326,184,733.00		100.00	155.37	506,780,476.00			DLH
2	11	03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	Cakupan Pengendalian pencemaran lingkungan hidup																	DLH

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12	
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP																	
2	11	03	2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah peringatan bulan risiko bencana		901,000,000.00	100	211,629,000.00	211.633.000	100	169,427,000.00	100	169,427,000.00		100.00	200	381,056,000.00		42.29	DLH
2	11	03	2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian pencemaran lingkungan hidup		394,000,000.00	100	44,600,000.00	44.600.000	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00		100.00	200	94,600,000.00		24.01	DLH
2	11	04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)																	DLH
2	11	04	2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			169,000,000.00	40,14	3,431,878,800.00	8.550.000.000	100	197,936,000.00	96.84746585	191,696,000.00		96.85	136.9874658	3,623,574,800.00		2,144.13	DLH
2	11	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)																	DLH
2	11	06	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			338,000,000.00	100	29,631,800.00	29.631.800	100	30,000,000.00	100	30,000,000.00		100.00	200	59,631,800.00		17.64	DLH
2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Cakupan pengelolaan pelayanan persampahan																DLH
2	11	11	2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah pengelolaan pelayanan persampahan		1,013,000,000.00	96,71	14,419,005,500.00	14.909.481.200	100	14,809,920,640.00	79.68141711	11,800,754,639.00		79.68	176.3914171	26,219,760,139.00		2,588.33	DLH
2	12			**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SKPD**	TERLAKSANANYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH																CAPIL
2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA	JUMLAH DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN SEJUMLAH KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISARREALISASI KINERJA SKPD																CAPIL
2	12	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN ASN			100	8,000,000.00	8.000.000	100	8,000,000.00	100	8,000,000.00		100.00	200	16,000,000.00			CAPIL

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	12	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	SEJUMLAH BAHAN CETAK DAN PENGGANDAAN			95,93	2,445,961,082.00	2.549.663.847	100	2,811,997,500.00	79.61342391	2,238,727,490.00		79.61	175.5434239	4,684,688,572.00			CAPIL
2	12	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sejumlah Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik Sejumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor Sejumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sejumlah jasa surat menyurat			98,50	701,609,400.00	712.260.400	100	220,123,250.00	100	220,123,250.00		100.00	198.5	921,732,650.00			CAPIL
2	12	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				89,83	253,804,074.00	282.539.600	100	272,788,830.00	100	272,788,830.00		100.00	189.83	526,592,904.00			CAPIL
2	12	02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Tercapaianya Pendaftaran Penduduk																CAPIL
2	12	02	2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan pendaftarann penduduk Jumlah pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan Sejumlah pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran penduduk		1,238,000,000.00	100	500,000,000.00	500.000.000	100	400,000,000.00	106.25	425,000,000.00		106.25	206.25	925,000,000.00		74.72	CAPIL
2	12	03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Terlaksananya Pencatatan sipil																CAPIL
2	12	03	2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan pencatatan sipil Jumlah pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting			100	500,000,000.00	500.000.000	100	300,000,000.00	91.66666667	275,000,000.00		91.67	191.6666667	775,000,000.00			CAPIL
2	13			**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**																	DPMK
2	13	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																DPMK
2	13	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Dokumen Laporan Keuangan Terealisas			100	10,000,000.00	10.000.000	100	19,999,600.00	100	19,999,600.00		100.00	200	29,999,600.00			DPMK
2	13	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji danTujangan ASN			97,70	2,068,738,051.00	2.117.373.619	100	2,293,692,750.00	84.66257741	1,941,899,400.00		84.66	182.3625774	4,010,637,451.00			DPMK
2	13	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Bahan Barang CetakanPenggandaan dan ATKTersedianya Makan Minum rapat ASN danMakan Minum TamuTersedianya Penerangan ListrikBnagunan			99,90	143,870,500.00	144.019.000	100	210,902,040.00	100	210,902,040.00		100.00	199.9	354,772,540.00			DPMK

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12	
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					KantorTersedianyan Makan Minum Rapat ASN danTamu																		
2	13	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedia Jasa dan Terpeliharanya Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Pelayanan Jasa Surat menyurat Tersedianya Peralatan Kantor yang Terpelihara			85,95	52,644,225.00	61.252.781	100	127,382,080.00	100	127,382,080.00		100.00	185.95	180,026,305.00			DPMK
2	13	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinzn kenadaraan Dinas Operasioal atau Lapanga/Belanja BBM Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinzn kenadaraan Dinas Operasioal atau Lapanga/Belanja Sewa kenadaraan			96,60	42,698,000.00	44.199.210	100	97,600,540.00	100	97,600,540.00		100.00	196.6	140,298,540.00			DPMK
2	13	03		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	CAPAIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA																	DPMK
2	13	03	3.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Terlaksannaya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Terlaksannaya Pemelihan Kepala Kampung yang baik Tersedianya Aparat Kampung yang Baik			100	1,628,491,600.00	1.628.491.600	100	1,700,000,000.00					100	1,628,491,600.00			DPMK
2	13	04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	CAPAIAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,LEMBAGA ADAT DAN LEMBAGA HUKUM ADAT			100	480,000,000.00	480.000.000	100	899,999,481.00					100	480,000,000.00			DPMK
2	13	04	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Tersedianya Lembaga Kemasyarakatan di Kampung Tersedianyan lemabaga Ke Masyaraktan		675,000,000.00	100	480,000,000.00	480.000.000	100	899,999,481.00					100	480,000,000.00		71.11	DPMK
2	13	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT																	DPMK
2	13	05	2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa			1,407,000,000.00	100	2,480,000,000.00	2.480.000.000	100	1,699,999,800.00	5.882341869	99,999,800.00		5.88	105.8823419	2,579,999,800.00		183.37	DPMK

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12	
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalamDaerah Kabupaten/Kota																	
2	15			**DINAS PERHUBUNGAN**																		
2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		Dishub
2	15	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya Perencanaan Kegiatan			99,21	396,835,300.00	400.000.000	100	420,000,000.00	52.38095238	220,000,000.00		52.38	151.5909524	616,835,300.00				Dishub
2	15	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Sistem Keuangan Yang Baik			97,71	4,306,357,134.00	4.407.291.573	100	4,789,962,500.00	0.417539803	20,000,000.00		0.42	98.1275398	4,326,357,134.00				Dishub
2	15	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Adanya Koordinasi			100	484,037,440.00	484.050.000	100	145,198,772.00	100	145,198,772.00		100.00	200	629,236,212.00				Dishub
2	15	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Adanya Aktivitas Kantor			98,35	409,084,074.00	415.948.752	100	4,150,948,752.00	10.02057064	415,948,752.00		10.02	108.3705706	825,032,826.00				Dishub
2	15	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Adanya Kendaraan Dinas dan Operasional yang layak untuk digunakan			100	75,000,000.00	75.000.000	100	175,000,000.00	80.761	141,331,750.00		80.76	180.761	216,331,750.00				Dishub
2	15	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Adanya LPJU dan Terpeliharanya LPJU																	Dishub
2	15	02	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Adanya LPJU dan Pemeliharaan LPJU		3,827,000,000.00	99,91	4,021,561,900.00	4.025.000.000	100	2,750,000,000.00	144.6909091	3,979,000,000.00		144.69	244.6009091	8,000,561,900.00		209.06		Dishub
2	15	02	2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Alat Angkut Perairan dan Alat Angkut Darat		2,520,000,000.00	52,45	3,281,200,250.00	6.255.336.500	100	2,600,000,000.00	86.53846154	2,250,000,000.00		86.54	138.9884615	5,531,200,250.00		219.49		Dishub
2	16			**KOMUNIKASI dan INFORMATIKA**																		
2	16	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan																	Kominfo

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
2	16	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD			100	19,999,000.00	20.000.000	100	20,000,000.00	75	15,000,000.00		75.00	175	34,999,000.00			Kominfo
2	16	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			98,04	2,876,013,769.00	2.933.378.360	100	3,381,298,500.00	108.057984 2	3,653,763,000.00		108.06	206.097984 2	6,529,776,769.00			Kominfo
2	16	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapaianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			70,13	346,088,022.00	493.521.300,	100	503,221,333.00	67.16739471	338,000,659.00		67.17	137.2973947	684,088,681.00			Kominfo
2	16	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			90,08	133,761,227.00	148.497.643	100	148,494,964.00	54.44446991	80,847,296.00		54.44	144.5244699	214,608,523.00			Kominfo
2	16	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah			85,33	44,788,000.00	52.490.000	100	64,952,000.00	24.46421973	15,890,000.00		24.46	109.7942197	60,678,000.00			Kominfo
2	16	02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terwujudnya pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																Kominfo
2	16	02	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1,288,000,000.00	98,74	640,228,430.00	648.413.590	100	999,998,201.00	0				98.74	640,228,430.00		49.71	Kominfo
2	16	03		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	TerwujudnyaPengelolaan EGovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kota																Kominfo
2	16	03	2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengelolaan EGovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten/Kota		225,000,000.00	96,26	1,666,803,482.00	1.731.478.766	100	1,499,999,751.00	0				96.26	1,666,803,482.00		740.80	Kominfo
2	17			**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**																	
2	17	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Laporan Keuangan Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan																Koperasi dan UKM
2	17	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tenaga Administrasi Keuangan			93,33	1,920,120,454.00	2.057.419.099	100	2,408,775,000.00	72.34997042	1,742,748,000.00		72.35	165.6799704	3,662,868,454.00			Koperasi dan UKM
2	17	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor			100	307,000,000.00	307.000.000	100	373,790,000.00	93.53091308	349,609,200.00		93.53	193.5309131	656,609,200.00			Koperasi dan UKM
2	17	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah			98,13	53,972,000.00	55.000.000	100	55,000,000.00	100	55,000,000.00		100.00	198.13	108,972,000.00			Koperasi dan UKM

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	17	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan			57,25	22,900,000.00	40.000.000	100	273,210,000.00	102.0159218	278,717,700.00		102.02	159.2659218	301,617,700.00			Koperasi dan UKM
2	17	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Pengelola Koperasi																Koperasi dan UKM
2	17	05	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang dilatih		225,000,000.00	100	300,000,000.00	300.000.000	100	1,100,000,000.00	44.09090909	485,000,000.00		44.09	144.0909091	785,000,000.00		348.89	Koperasi dan UKM
2	17	06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERAS	Cakupan Usaha Mikro Kecil yang Mandiri																Koperasi dan UKM
2	17	06	2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Mandiri			99,71	12,956,545,000.00	12.994.045.000	100	175,000,000.00					99.71	12,956,545,000.00			Koperasi dan UKM
2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Terlaksananya Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM																Koperasi dan UKM
2	17	07	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM		1,126,000,000.00	98,18	1,975,992,000.00	2.012.552.000	100	17,725,000,001.00					98.18	1,975,992,000.00		175.49	Koperasi dan UKM
2	18			**DPMPTSP**																	
2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota																DPTSP
2	18	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan			93,60	2,434,448,947.00	2.600.916.275	100	3,051,916,250.00	59.30631275	1,809,978,996.00		59.31	152.9063127	4,244,427,943.00			DPTSP
2	18	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Penerangan Bangunan Tersedianya Rapat			99,99	298,331,500.00	298.371.500	100	165,213,200.00	100	165,213,200.00		100.00	199.99	463,544,700.00			DPTSP

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12	
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					koordinasi dan Konultasi SKPD																		
2	18	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan lsitrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Perkantoran Tersedianya Jasa Surat Menyurat			99,42	203,943,780.00	205.133.780	100	260,602,273.00	100	260,602,273.00		100.00	199.42	464,546,053.00			DPTSP
2	18	02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Terlaksananya Pengembangan iklim penanaman modal																	DPTSP
2	18	02	2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemetaan peluang investasi Kabupaten			99,55	219,018,000.00	220.000.000	100	110,000,000.00	82.46545455	90,712,000.00		82.47	182.0154545	309,730,000.00			DPTSP
2	18	04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Tercapainya Pelayanan investasi yang optimal																	DPTSP
2	18	04	2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	terlaksananya pelaksanaan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan investasi Pelaku usaha		338,000,000.00	100	211,083,700.00	211.084.200	100	311,083,960.00	54.64762632	170,000,000.00		54.65	154.6476263	381,083,700.00		112.75	DPTSP
2	18	05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tercapainya pengendalian penanaman modal																	DPTSP
2	18	05	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian masalah dan hambatan pelaku usaha		1,126,000,000.00	100	417,400,000.00	417.400.000	100	417,400,000.00	10.19405846	42,550,000.00		10.19	110.1940585	459,950,000.00		40.85	DPTSP
2	19			**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**																		
2	19	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya gaji dan tunjangan ASN																	DISPORA
2	19	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Gaji dan Tunjangan ASN			96,29	2,813,848,403.00	2.922.387.660	100	3,166,282,500.00	84.45691122	2,674,144,400.00		84.46	180.7469112	5,487,992,803.00			DISPORA
2	19	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Perkantoran yang baik			99,96	434,900,000.00	435.087.000	100	870,000,000.00	100	870,000,000.00		100.00	199.96	1,304,900,000.00			DISPORA
2	19	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan pada Dinas Pemuda dan Olahraga			79,25	126,800,000.00	159.996.000	100	239,000,000.00	130.125523	311,000,000.00		130.13	209.375523	437,800,000.00			DISPORA
2	19	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Terlaksananya pengumpulan datakepemudaan dari 19 distrik																	DISPORA

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	19	02	2.02	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota tercapainya pengumpulan data kepemudaan pada 19 distrik		169,000,000.00	100	50,000,000.00	50.000.000	100	350,000,000.00	100	350,000,000.00		100.00	200	400,000,000.00		236.69	DISPORA
2	19	02	2.03	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terlaksananya pelantikan pengurus koni;pemberian hibah KNI			84,38	810,000,000.00	960.000.000	100	200,000,000.00					84.38	810,000,000.00		479.29	DISPORA
2	19	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Tercapainya pendataan keolahragaan di 19 distrik																DISPORA
2	19	03	2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Tercapainya pendataan keolahragaan di 19 distrik			100	50,000,000.00	50.000.000	100	934,999,560.00	89.30485486	835,000,000.00		89.30	189.3048549	885,000,000.00			DISPORA
2	19	03	2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya penyaluran dana hibah KONI		2,814,000,000.00	91,94	3,420,000,000.00	3.720.000.000	100						91.94	3,420,000,000.00		121.54	DISPORA
2	19	03	2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Tercapainya pembangunan olahraga rekreasi			100	900,000,000.00	900.000.000	100	2,165,000,000.00					100	900,000,000.00			DISPORA
2	19	04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Terlaksananyapengembangan kepramukaan																DISPORA
2	19	04	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terlaksananya pengembangan organisasi kepramukaan			99,53	210,000,000.00	211.000.000	100	100,000,000.00					99.53	210,000,000.00			DISPORA
3	25			**KELAUTAN DAN PERIKANAN**																	
3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan																
3	25	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sejumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktishar Realisasi Kinerja SKPD			63,06	22,700,000.00	36.000.000	100	36,000,000.00	100	36,000,000.00		100.00	163.06	58,700,000.00			Perikanan
3	25	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sejumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			98,18	3,772,310,844.00	3.842.396.660	100	4,301,272,500.00	82.394733	3,544,021,992.00		82.39	180.574733	7,316,332,836.00			Perikanan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	25	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				35,71	23,500,000.00	65.800.000	100	67,022,000.00	100	67,022,000.00		100.00	135.71	90,522,000.00			Perikanan
3	25	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sejumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah			99,98	673,207,165.00	673.310.900	100	358,436,820.00	130.6890347	468,437,620.00		130.69	230.6690347	1,141,644,785.00			Perikanan
3	25	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sejumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor			100	84,847,800.00	84.847.800	100	40,835,184.00	202.0933321	82,525,184.00		202.09	302.0933321	167,372,984.00			Perikanan
3	25	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sejumlah Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik			100	357,899,506.00	357.900.298	100	161,356,626.00	308.8535602	498,355,684.00		308.85	408.8535602	856,255,190.00			Perikanan
3	25	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sejumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			100	24,000,000.00	24.000.000	100	24,960,000.00	1702.564103	424,960,000.00		1,702.56	1802.564103	448,960,000.00			Perikanan
3	25	03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Capaian Pengelolaan Perikanan Tangkap																	Perikanan
3	25	03	2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Sejumlah Prasarana Penangkapan Ikan		2,026,000,000.00	63,83	989,303,695.00	1.550.000.000	100	18,780,000,000.00	40.87526624	7,676,375,000.00		40.88	104.7052662	8,665,678,695.00		427.72	Perikanan
3	25	03	2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan Nelayan Ikan		281,000,000.00	100	200,000,000.00	200.000.000	100						100	200,000,000.00		71.17	Perikanan
3	25	04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Capaian Pengelolaan Perikanan Budidaya																	Perikanan
3	25	04	2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan Pembudidaya Ikan		1,126,000,000.00	97,84	195,670,480.00	200.000.000	100	-					97.84	195,670,480.00		17.38	Perikanan
3	25	04	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Sejumlah Prasarana Budidaya Ikan			99,96	683,312,080.00	683.600.000	100	2,800,000,000.00	53.57142857	1,500,000,000.00		53.57	153.5314286	2,183,312,080.00			Perikanan
3	25	06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN																		Perikanan
3	25	06	2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			2,026,000,000.00	99,00	99,000,000.00	100.000.000	100	-					99	99,000,000.00		4.89	Perikanan
3	25	06	2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan Pelaku Pengolahan Hasil Perikanan		281,000,000.00	100	625,000,000.00	625.000.000	100						100	625,000,000.00		222.42	Perikanan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	25	06	2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Sarana Pengolahan Ikan Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro			93,48	7,327,199,354.00	7.838.400.000	100	700,000,000.00	449.28571 43	3,145,000,000.00		449.29	542.76571 43	10,472,199,354.00			Perikanan
3	26			**PARIWISATA**																	
3	26	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Laporan Evaluasi Kinerja Yang Akuntabel																Pariwisata
3	26	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja			100	15,000,000.00	15.000.000	100	15,000,000.00	100	15,000,000.00		100.00	200	30,000,000.00			Pariwisata
3	26	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji ASN			98,05	3,865,261,012.00	3.942.091.192	100	4,270,271,250.00	85.56278 48	3,653,763,000.00		85.56	183.61278 48	7,519,024,012.00			Pariwisata
3	26	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor			99,00	330,225,000.00	333.559.000	100	314,500,259.00	107.4862 609	338,044,569.00		107.49	206.4862 609	668,269,569.00			Pariwisata
3	26	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Adminstrasi Kantor			99,44	80,397,000.00	80.850.000	100	80,847,296.00	100.0007 731	80,847,921.00		100.00	199.4407 731	161,244,921.00			Pariwisata
3	26	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Fasilitas Kantor			73,29	15,090,000.00	20.590.000	100	20,390,000.00	77.93035 802	15,890,000.00		77.93	151.2203 58	30,980,000.00			Pariwisata
3	26	02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Perencanaan Daya tarik Wisata																Pariwisata
3	26	02	2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terbangunannya Kawasan Wisata Bahari dan Perairan		1,689,000,000.00	83,75	18,866,966,660.00	22.528.980.250	100	53,592,643,000.00	10.59821 588	5,679,864,000.00		10.60	94.34821 588	24,546,830,660.00		1,453.34	Pariwisata
3	26	02	2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terbangunnya Sarpras dan Meningkatnya Kapasitas SDM dalam Bidang Pariwisata		4,390,000,000.00	89,42	10,168,603,888.00	11.371.417.248	100	8,684,775,000.00	80.60082 155	7,000,000,000.00		80.60	170.0208 216	17,168,603,888.00		1,016.50	Pariwisata
3	26	03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Terlaksananya Promosi Pariwisata Kab.Biak Numfor																Pariwisata
3	26	03	2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Adanya Materi Promosi Pariwisata		900,000,000.00	100	17,840,487,525.00	17.810.510.000	100	6,700,000,000.00	41.32537 313	2,768,800,000.00		41.33	141.3253 731	20,609,287,525.00		2,289.92	Pariwisata
3	26	05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kemitraan Pariwisata Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kemitraan Pariwisata																Pariwisata

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	26	05	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya Kapasitas SDM dalam bidang Pariwisata dan Usaha Jasa Pariwisata			100	1,152,768,000.00	1.152.768.000	100						100	1,152,768,000.00			Pariwisata
3	27			**PERTANIAN**																	
3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																Pertanian Tanaman Pangan
3	27	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			100	30,000,000.00	30.000.000	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00		100.00	200	40,000,000.00			Pertanian Tanaman Pangan
3	27	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			98,61	11,684,462,512.00	11.849.583.554	100	13,513,310,750.00	85.13193259	11,504,142,598.00		85.13	183.7419326	23,188,605,110.00			Pertanian Tanaman Pangan
3	27	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan			100	249,300,000.00	249.300.000	100	677,034,500.00	56.8140176	384,650,500.00		56.81	156.8140176	633,950,500.00			Pertanian Tanaman Pangan
3	27	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100	80,442,000.00	80.442.000	100	86,106,000.00	100	86,106,000.00		100.00	200	166,548,000.00			Pertanian Tanaman Pangan
3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tercapainya Penyediaan Pengembangan Sarana Pertanian																Pertanian Tanaman Pangan
3	27	02	2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian penyediaan benih bibit ternak		281,000,000.00	99,94	1,444,197,000.00	1.445.000.000	100						99.94	1,444,197,000.00		513.95	Pertanian Tanaman Pangan
3	27	02	2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah pengadaan bibit Ternak Ayam		1,013,000,000.00	94,82	3,964,339,500.00	4.180.927.500	100	8,583,800,000.00	81.54896433	7,000,000,000.00		81.55	176.3689643	10,964,339,500.00		1,082.36	Pertanian Tanaman Pangan
2	09	03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN																	Pertanian Tanaman Pangan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12	
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				KETAHANANPANGAN MASYARAKAT																		
2	09	03	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		338,000,000.00	99,36	198,718,750.00	200.000.000	100	435,323,000.00					99.36	198,718,750.00		58.79	Pertanian Tanaman Pangan
2	09	03	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	JumlahTarget Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Giz			100	760,000,000.00	760.000.000	100	760,000,000.00	32.89473684	250,000,000.00		32.89	132.8947368	1,010,000,000.00			Pertanian Tanaman Pangan
3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tercapainya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertaniian																	Pertanian Tanaman Pangan
3	27	03	2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Tercapainya Pengembangan Prasarana Pertanian			99,89	2,626,197,945.00	2.629.072.500	100	1,914,677,001.00	130.5703259	2,500,000,000.00		130.57	230.4603259	5,126,197,945.00			Pertanian Tanaman Pangan
3	27	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tercapainya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner																	Pertanian Tanaman Pangan
3	27	04	2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Terawasinya Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan			100	21,000,000.00	21.000.000	100	21,000,000.00	100	21,000,000.00		100.00	200	42,000,000.00			Pertanian Tanaman Pangan
3	27	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Tercapainya Penyuluhan Pertanian																	Pertanian Tanaman Pangan
3	27	07	2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	umlah Tenaga Harian Lepas Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa (pelatihan hidroponik) Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan DesaPelatihan pembuatan pupuk organik /BOKASI) Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa (Pelatihan pengolahan Sagu) Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa petani/peternak ayam		169,000,000.00	74,88	2,561,263,625.00	3.420.552.000	100	2,813,453,001.00	3.305546599	93,000,000.00		3.31	78.1855466	2,654,263,625.00		1,570.57	Pertanian Tanaman Pangan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12	
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					petelur Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Cultivator) Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Traktor roda 4) Tersedianya sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna (Pengadaan Pestisida) Tersedianya sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna (Pengadaan Pupuk An Organik dan Organik)																
3	31			**PERINDUSTRIAN**																		
3	31	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah Terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah																	PERINDAG
3	31	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya laporan capaian dan kinerja			100	14,998,000.00	14.998.000	100	14,988,000.00	100	14,988,000.00		100.00	200	29,986,000.00			PERINDAG
3	31	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersediannya gaji dan tunjangan ASN			97,75	3,546,421,312.00	3.628.055.410	100	4,019,257,500.00	82.98519356	3,335,388,616.00		82.99	180.7351936	6,881,809,928.00			PERINDAG
3	31	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya administrasi umum perangkat daerah			91,82	132,935,000.00	144.779.000	100	144,753,000.00	66.80621472	96,704,000.00		66.81	158.6262147	229,639,000.00			PERINDAG
3	31	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya pengadaan mebel Tersedianya peralatan dan mesin lainnya			0	-	31.900.000	100	31,666,400.00	100	31,666,400.00		100.00	100	31,666,400.00			PERINDAG
3	31	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa surat menyurat			94,96	89,567,000.00	94.323.000	100	94,586,630.00	150.8070855	142,643,340.00		150.81	245.7670855	232,210,340.00			PERINDAG
3	31	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya jasa pemeliharaan			89,29	12,500,000.00	14.000.000	100	13,995,000.00	100	13,995,000.00		100.00	189.29	26,495,000.00			PERINDAG
3	30	02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Terlaksananya pengawasan terhadap bahan berbahaya																	PERINDAG
3	30	06	2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengawasan terhadap bahan berbahaya			100	60,000,000.00	60.000.000	100	60,000,000.00	100	60,000,000.00		100.00	200	120,000,000.00			PERINDAG

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12	
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Terlaksananya perencanaan dan pembangunan industr																PERINDAG
3	31	01	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana Industri			82,49	16,263,162,072.00	19.716.350.000	100	14,003,902,001.00	54.52866636	7,636,141,000.00		54.53	137.0186664	23,899,303,072.00			PERINDAG
3	30	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Terpantau dan terkendalinya harga barang kebutuhan pokok dan barang penting																PERINDAG
3	30	04	2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana perdagangan		113,000,000.00	100	390,000,000.00	390.000.000	100	390,000,000.00	100	390,000,000.00		100.00	200	780,000,000.00		690.27	PERINDAG
3	31	04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Terlaksananya pengawasan dan pengumpulan data industr																PERINDAG
3	31	04	2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengawasan industri dan jumlah data industri			100	60,000,000.00	60.000.000	100	60,000,000.00	100	60,000,000.00		100.00	200	120,000,000.00			PERINDAG
3	30	06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Terlaksananya pengawasan metrologi legal dan perlindungan konsumen																PERINDAG
3	30	06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah pengawasan metrologi legal dan perlindungan konsumen			99,94	139,916,000.00	140.000.000	100	140,000,000.00	100	140,000,000.00		100.00	199.94	279,916,000.00			PERINDAG
4	01			**SEKRETARIAT DAERAH**																	
4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	SETDA
4	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya laporan capaian dan kinerja			99,02	17,818,475,656.00	17.994.190.160	100	19,900,000,000.00	54.21326633	10,788,440,000.00		54.21	153.2332663	28,606,915,656.00			SETDA
4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan			84,58	10,707,876,380.00	12.659.873.999	100	4,500,000,000.00	57.77777778	2,600,000,000.00		57.78	142.3577778	13,307,876,380.00			SETDA

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya administrasi umum perangkat daerah			98,51	7,085,069,267.00	7.191.907.675	100	6,050,000,000.00	50.20652893	3,037,495,000.00		50.21	148.7165289	10,122,564,267.00			SETDA
4	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya jasa pemeliharaan			25,79	61,000,000.00	236.500.000	100	250,000,000.00	30	75,000,000.00		30.00	55.79	136,000,000.00			SETDA
4	01	01	2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			31,18	401,316,515.00	1.287.190.000	100	1,550,000,000.00	12.69690323	196,802,000.00		12.70	43.87690323	598,118,515.00			SETDA
4	01	01	2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				97,38	53,270,500,000.00	54.702.385.162	100	23,000,000,000.00	39.13043478	9,000,000,000.00		39.13	136.5104348	62,270,500,000.00			SETDA
4	01	01	2.13	Penataan Organisasi			1,238,000,000.00	99,47	746,000,000.00	750.000.000	100	850,000,000.00	76.47058824	650,000,000.00		76.47	175.9405882	1,396,000,000.00		112.76	SETDA
4	01	01	2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				98,69	894,125,000.00	906.000.000	100	1,000,000,000.00	70	700,000,000.00		70.00	168.69	1,594,125,000.00			SETDA
4	01	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																	SETDA
4	01	02	2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			19,249,000,000.00	85,36	2,475,453,000.00	2.900.000.000	100	2,230,000,000.00	67.80959641	1,512,154,000.00		67.81	153.1695964	3,987,607,000.00		20.72	SETDA
4	01	02	2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				69,83	23,878,550,000.00	34.195.400.000	100	22,750,000,000.00	88.57142857	20,150,000,000.00		88.57	158.4014286	44,028,550,000.00			SETDA
4	01	02	2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			732,000,000.00	100	884,000,000.00	884.000.000	100	900,000,000.00	109.6666667	987,000,000.00		109.67	209.6666667	1,871,000,000.00		255.60	SETDA
4	01	03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN																	SETDA
4	01	03	2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Sejumlah Kebijakan Perekonomian			100	316,000,000.00	316.000.000	100	650,000,000.00	53.84615385	350,000,000.00		53.85	153.8461538	666,000,000.00			SETDA
4	01	03	2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	sejumlah Administrasi Pembanguna			100	350,693,000.00	350.693.000,	100	650,000,000.00	46.15384615	300,000,000.00		46.15	146.1538462	650,693,000.00			SETDA
4	01	03	2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa			87,68	1,096,042,000.00	1.250.000.000	100	1,415,000,000.00	32.72438163	463,050,000.00		32.72	120.4043816	1,559,092,000.00			SETDA
4	02			**SEKRETARIAT DPRD**																	
4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	SETWAN
4	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	Terwujudnya laporan capaian dan kinerja			100	165,739,200.00	165.739.200	100	-					100	165,739,200.00			SETWAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12	
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
4	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersediannya gaji dan tunjangan ASN			93,58	4,292,793,485.00	4.587.392.660	100	5,058,040,000.00	48.2076461	2,438,362,023.00		48.21	141.7876461	6,731,155,508.00			SETWAN
4	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	50,000,000.00	50.000.000	100	-		151,364,000.00			100	201,364,000.00			SETWAN
4	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan			100	974,122,850.00	974.122.850	100	203,622,200.00	1320.534893	2,688,902,200.00		1,320.53	1420.534893	3,663,025,050.00			SETWAN
4	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			95,67	2,086,272,387.00	2.180.696.800	100	2,918,568,600.00	64.68082333	1,887,754,200.00		64.68	160.3508233	3,974,026,587.00			SETWAN
4	02	01	2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				91,05	15,534,132,140.00	17.060.412.069	100	17,055,782,073.00	2.067410327	352,613,000.00		2.07	93.11741033	15,886,745,140.00			SETWAN
4	02	02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD																	SETWAN
4	02	02	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			99,99	799,900,000.00	800.000.000	100	750,000,000.00	93.97746667	704,831,000.00		93.98	193.9674667	1,504,731,000.00			SETWAN
4	02	02	2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya pembahasan		1,013,000,000.00	98,24	1,219,660,000.00	1.241.527.000	100	1,500,000,000.00	79.99998	1,199,999,700.00		80.00	178.23998	2,419,659,700.00		238.86	SETWAN
4	02	02	2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksanya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			98,63	730,110,000.00	740.250.000	100	300,000,000.00	100	300,000,000.00		100.00	198.63	1,030,110,000.00			SETWAN
4	02	02	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Seju,mlah anggota DPRD terlatih			99,87	6,697,719,100.00	6.706.368.780	100	350,979,700.00	753.1034986	2,643,240,400.00		753.10	852.9734986	9,340,959,500.00			SETWAN
4	02	02	2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Sejumlah Aspirasi Masyarakat terhimpun			99,82	9,001,375,408.00	9.017.394.300	100	7,413,743,600.00	89.25440313	6,617,092,600.00		89.25	189.0744031	15,618,468,008.00			SETWAN
4	02	02	2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	tersedianya Fasilitasi Tugas DPRD			92,60	4,187,081,200.00	4.521.595.000	100	4,310,173,000.00	49.18187739	2,119,824,000.00		49.18	141.7818774	6,306,905,200.00			SETWAN
5	01			**PERENCANAAN**																		
5	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota																BAPPEDA
5	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			91,90	13,500,000.00	14.690.000	100						91.9	13,500,000.00			BAPPEDA
5	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran			98,11	5,443,082,023.00	5.547.748.280	100	6,575,028,250.00	0.958703105	63,035,000.00		0.96	99.06870311	5,506,117,023.00			BAPPEDA

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					SKPD Tersedianya Gaji dan Penunjang ASN																	
5	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek/Pelatihan Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			84,21	1,002,344,600.00	1.190.291.000	100	1,030,821,500.00	100	1,030,821,500.00		100.00	184.21	2,033,166,100.00			BAPPEDA
5	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			86,60	3,341,034,092.00	3.857.971.200	100	3,046,023,780.00	91.66126011	2,792,023,780.00		91.66	178.2612601	6,133,057,872.00			BAPPEDA
5	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya mebel Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya			74,58	510,500,000.00	684.473.600	100	32,464,130.00	270.6597405	87,867,330.00		270.66	345.2397405	598,367,330.00			BAPPEDA
5	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			80,40	587,510,280.00	730.712.120	100	470,947,352.00	96.31024574	453,570,552.00		96.31	176.7102457	1,041,080,832.00			BAPPEDA
5	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainny			55,32	240,845,000.00	435.359.500	100	468,426,400.00	100	468,426,400.00		100.00	155.32	709,271,400.00			BAPPEDA
5	01	02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH																BAPPEDA
5	01	02	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya Konsultasi Publik Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan		2,702,000,000.00	79,94	2,450,447,080.00	3.065.496.000	100	4,080,362,400.00	139.1470748	5,677,704,920.00		139.15	219.0870748	8,128,152,000.00		300.82	BAPPEDA

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12	
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota																	
5	01	02	2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		1,013,000,000.00	100	200,000,000.00	200.000.000	100	399,999,954.00	100	399,999,954.00		100.00	200	599,999,954.00		59.23	BAPPEDA
5	01	02	2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksanya Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Terlaksanya Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Terlaksanya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			79,32	1,552,972,300.00	1.957.964.700	100	1,509,244,000.00	77.67590926	1,172,319,000.00		77.68	156.9959093	2,725,291,300.00			BAPPEDA
5	01	03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Data Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat																	BAPPEDA
5	01	03	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Meningkatnya Jumlah Koordinasi Bidang dan Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		169,000,000.00	98,64	750,403,646.00	760.716.000	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00		100.00	198.64	1,750,403,646.00		1,035.74	BAPPEDA
5	01	03	2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Organisasi perangkat Daerah /OPD yang amendapatkan asistensi Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Rencana Kernja Bidang Perekonomian Terlakasanay Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		169,000,000.00	70,91	498,726,496.00	703.339.000	100	700,000,000.00	100	700,000,000.00		100.00	170.91	1,198,726,496.00		709.31	BAPPEDA

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12	
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Terlaksananta Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																	
5	01	03	2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Terlaksanya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		732,000,000.00	96,18	1,103,570,846.00	1.147.433.000	100	1,555,000,000.00	75.56270096	1,175,000,000.00		75.56	171.742701	2,278,570,846.00		311.28	BAPPEDA
5	02			**KEUANGAN (BPKAD)**																		
5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	BPKAD
5	02	01	2'01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			99,79	504,316,000.00	505.400.000	100	306,878,100.00	100	306,878,100.00		100.00	199.79	811,194,100.00			BPKAD
5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN			97,98	10,926,301,598.00	11.152.090.605	100	13,852,314,649.00	26.49736684	3,670,498,629.00		26.50	124.4773668	14,596,800,227.00			BPKAD
5	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				94,15	1,625,736,200.00	1.726.808.000	100	1,563,494,000.00	94.40033029	1,475,943,500.00		94.40	188.5503303	3,101,679,700.00			BPKAD
5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Bakar Kendaraan Operasional yang tersedia Jumlah Makan Minum yang terlayani			89,31	3,212,764,623.00	3.597.177.400	100	2,331,759,500.00	72.12405482	1,681,759,500.00		72.12	161.4340548	4,894,524,123.00			BPKAD
5	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			82,86	662,892,000.00	800.000.000	100	999,796,000.00	8.69823364	86,964,592.00		8.70	91.55823364	749,856,592.00			BPKAD
5	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			60,68	1,374,241,055.00	2.264.864.415	100	1,441,829,200.00	106.6582089	1,537,829,200.00		106.66	167.3382089	2,912,070,255.00			BPKAD
5	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			66,03	891,462,000.00	1.350.000.000	100	950,000,000.00	63.15789474	600,000,000.00		63.16	129.1878947	1,491,462,000.00			BPKAD
5	02	02		**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**																	BPKAD
5	02	02	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	terlaksana Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		1,126,000,000.00	90.03	4,008,285,000.00		100	3,952,022,400.00	89.8274362	3,550,000,400.00		89.83		3,550,000,400.00		315.28	BPKAD
5	02	02	2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	tersedianya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			99.78	2,984,204,050.00		100	2,700,000,000.00	96.52222222	2,606,100,000.00		96.52		2,606,100,000.00			BPKAD

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	02	02	2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	sejumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			82.13	3,285,877,000.00		100	3,376,454,300.00	97.77560976	3,301,348,780.00		97.78		3,301,348,780.00			BPKAD
5	02	02	2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	tersedianya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			17.05	44,072,960,223.00		100	251,931,859,300.00						258,377,757,900.00			BPKAD
5	02	02	2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Lingkup Keuangan Daerah	terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Lingkup Keuangan Daerah		1,689,000,000.00	96.14	2,864,480,000.00		100	2,110,000,000.00	26.45772512	558,258,000.00		26.46		558,258,000.00		33.05	BPKAD
5	02	03		**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**																	BPKAD
5	02	03	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	terlaksannya Pengelolaan Barang Milik Daerah			99.8	3,234,405,269.00		100	2,714,072,000.00	78.9983464	2,144,072,000.00		79.00		2,144,072,000.00			BPKAD
5	02	04		**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**																	BPKAD
5	02	04	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	sejumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			100	600,000,000.00		100								BPKAD
5	02			**KEUANGAN (BAPENDA)**																	
5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	BAPENDA
5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN Bapenda			90,30	4,613,217,577.00	5.108.548.960	100	4,760,650,500.00	54.08829739	2,574,954,800.00		54.09	144.3882974	7,188,172,377.00			BAPENDA

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12	
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Bakar Kendaraan Operasional yang tersedia Jumlah Makan Minum yang terlayani			86,07	284,071,750.00	330.049.750	100	174,311,400.00	458.4653672	799,157,400.00		458.47	544.5353672	1,083,229,150.00			BAPENDA
5	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			87,30	815,657,692.00	934.368.600	100	972,445,636.00	100	972,445,636.00		100.00	187.3	1,788,103,328.00			BAPENDA
5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tersedianya Hasil Pengelolaan Pendapatan Daerah			85,94	950,049,550.00	950.049.550	100	600,039,100.00	0				85.94	950,049,550.00			BAPENDA
5	02	04	2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Hasil Pengelolaan Pendapatan Daerah		901,000,000.00	85,94	950,049,550.00	950.049.550	100	600,039,100.00	129.1647661	775,039,100.00		129.16	215.1047661	1,725,088,650.00		191.46	BAPENDA
5	03			**KEPEGAWAIAN (BPKSDM)**																		
5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
5	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran			100	40,000,000.00	40.000.000	100	65,620,280.00	100	65,620,280.00		100.00	200	105,620,280.00			BKPSDM
5	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran			97,64	4,832,665,150.00	4.949.697.567	100	5,435,269,541.00	55.72630655	3,028,874,966.00		55.73	153.3663065	7,861,540,116.00			BKPSDM
5	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran			99,98	409,969,509.00	410.061.000	100	814,164,000.00	76.24065913	620,724,000.00		76.24	176.2206591	1,030,693,509.00			BKPSDM
5	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran			89,82	365,481,429.00	406.910.145	100	411,795,813.00	100	411,795,813.00		100.00	189.82	777,277,242.00			BKPSDM
5	03	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran			100	212,700,000.00	212.700.000	100	285,966,800.00	100	285,966,800.00		100.00	200	498,666,800.00			BKPSDM
5	03	02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatkan Pelayanan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur																	BKPSDM
5	03	02	2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Pelayanan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		1,351,000,000.00	94,46	682,932,249.00	723.015.800	100	296,514,147.00	89.18333566	264,441,207.00		89.18	183.6433357	947,373,456.00		70.12	BKPSDM
5	03	02	2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Tercapainya Pelayanan Mutasi dan Promosi ASN di Lingkungan Pemerintah Kab. biak Numfor			56,77	408,767,068.00	720.000.400	100	559,356,414.00	69.96274651	391,341,110.00		69.96	126.7327465	800,108,178.00			BKPSDM
5	03	02	2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Meningkatnya Kompetensi ASN			75,88	181,521,000.00	239.211.000	100	243,422,100.00	62.475182	152,078,400.00		62.48	138.355182	333,599,400.00			BKPSDM
5	03	02	2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tercapainya Pelayanan Kinerja ASN			74,59	105,168,250.00	141.000.000	100	141,009,268.00	94.64063596	133,452,068.00		94.64	169.230636	238,620,318.00			BKPSDM
6	01			**INSPEKTORAT**																		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran			0	-	3.718.500	100	3,699,720.00	100	3,699,720.00		100.00	100	3,699,720.00			INSPEKTORAT
6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran			98,18	6,092,233,961.00	6.205.323.733	100	6,583,125,733.00	55.5373093	3,656,090,900.00		55.54	153.7173093	9,748,324,861.00			INSPEKTORAT
6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sejumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			99,15	669,978,116.00	675.694.616	100	705,628,120.00	100	705,628,120.00		100.00	199.15	1,375,606,236.00			INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran			33,83	100,076,859.00	295.850.260	100	345,274,200.00	100	345,274,200.00		100.00	133.83	445,351,059.00			INSPEKTORAT
6	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	-	64.500.000	100	498,756,000.00	100	498,756,000.00		100.00	100	498,756,000.00			INSPEKTORAT
6	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran			94,24	99,979,136.00	106.089.750	100	296,172,813.00	100	296,172,813.00		100.00	194.24	396,151,949.00			INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran			59,65	28,774,000.00	48.237.875	100	62,442,880.00	100	62,442,880.00		100.00	159.65	91,216,880.00			INSPEKTORAT
6	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN																	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal		1,689,000,000.00	76,72	3,402,491,298.00	4.434.763.300	100	3,648,377,125.00	99.99999997	3,648,377,124.00		100.00	176.72	7,050,868,422.00		417.46	INSPEKTORAT
8	01			**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**																	
8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
8	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran			98,09	3,324,561,460.00	3.389.334.448	100	3,596,437,500.00	85.58667014	3,078,071,100.00		85.59	183.6766701	6,402,632,560.00			KESBANGPOL
8	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran			100	236,011,930.00	236.011.930	100	300,521,200.00	100	300,521,200.00		100.00	200	536,533,130.00			KESBANGPOL
8	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran			98,87	149,338,570.00	151.048.055	100	154,538,288.00	100	154,538,288.00		100.00	198.87	303,876,858.00			KESBANGPOL
8	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran			0	-	3.000.000	100						0	-			KESBANGPOL

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12	
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
8	01	02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN																	KESBANGPOL
8	01	02	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Sejumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		169,000,000.00	100	100,000,000.00	100.000.000	100	120,000,000.00	100	120,000,000.00		100.00	200	220,000,000.00		130.18	KESBANGPOL
8	01	03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK																	KESBANGPOL
8	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Sejumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		169,000,000.00	3,50	839,500,000.00	23.970.000.000	100	26,070,000,000.00	11.58419639	3,020,000,000.00		11.58	15.08419639	3,859,500,000.00		2,283.73	KESBANGPOL
8	01	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN																	KESBANGPOL
8	01	04	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Sejumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		169,000,000.00	100	600,000,000.00	600.000.000	100	600,000,000.00	16.66666667	100,000,000.00		16.67	116.66666667	700,000,000.00		414.20	KESBANGPOL
8	01	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI																	KESBANGPOL

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023		Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4		5		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10=9/4 x100%		12	
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				PENANGANAN KONFLIK SOSIAL																		
8	01	06	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Sejumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		225,000,000.00	33,33	100,000,000.00	300.000.000	100	700,000,000.00	28.57142857	200,000,000.00		28.57	61.90142857	300,000,000.00		133.33	KESBANGPOL

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, maka diketahui permasalahan utama Kabupaten Biak Numfor adalah Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Biak Numfor.

Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Biak Numfor tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 4 pokok permasalahan yaitu 1) Rendahnya Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia; 2) Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah; 3) Belum optimalnya infrastruktur dan daya dukung lingkungan; 4. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Permasalahan pembangunan daerah selanjutnya diidentifikasi melalui kajian data dan informasi pembangunan daerah khususnya data strategis pembangunan. Berikut penjabaran permasalahan pembangunan Kabupaten Biak Numfor berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah di Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan pembangian urusan. Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diidentifikasi dari adanya gap antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas dan sasaran yang dievaluasi adalah prioritas dan sasaran yang dilaksanakan tahun sebelumnya tahun 2023. Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor pada Tahun 2023, dilaksanakan dengan tema “Memantapkan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Demi Terwujudnya Biak Numfor Yang Mandiri dan Sejahtera”.

Hasil pelaksanaan prioritas tahun 2023 dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. **Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif**

   Perekonomian yang tumbuh cepat, mandiri, inklusif dan berkelanjutan lebih diutamakan, ehingga bedampak terhadap transformasi struktural dalam perekonomian wilayah. Selanjutnya, korporasi dalam agro bisnis menjadi jalan utama meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan peternak. Masih rendahnya peran investasi dalam pembangunan ekonomi daerah. Potensi dan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menjadi salah satu prioritas daerah yang perlu ditingkatkan. Terjadi kemunculan konsumen baru yaitu *social customer* dengan ciri: (1) *knowledgeable* (tahu segalanya), (2) *socially connected* (terkoneksi tanpa batas).

2. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

   Terjadi pergeseran fokus kualitas pembangunan manusia dari pembangunan manusia menjadi peningkatan modal manusia. Selain itu, adanya fokus prioritas pembangunan nasional mengenai penurunan stunting, serta prioritas pendidikan dalam wajib belajar 12 tahun, unit layanan pendidikan dan kesehatan terakreditasi menjadi kebutuhan layanan dasar yang wajib dilakukan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan berkembangnya teknologi infromasi bedampak pada adanya *market place* dalam dunia pendidikan dan kesehatan. Transformasi kesehatan dan pendidikan menjadi pilihan utama menuju masayarakat Biak Numfor yang maju. Selanjutnya, peranan pemuda dalam pembangunan menjadi lebih dominan, terjadi transformasi peran pemuda dari objek menjadi subjek pembangunan, serta adanya revitalisasi pembangunan olahraga yang berdaya saing.

3. **Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pemerataan Pembangunan**

   Kabupaten Biak Numfor marupakan salah satu daerah yang mendapatkan bonus demografi, sehingga potensi ekonomi daerah dapat meningkat karena jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah tanggungan. Selain itu, tingginya migrasi dan

urbanisasi penduduk di Kabupaten Biak Numfor disebabkan karena lokasi Biak Numfor merupakan daerah transit antar Provinsi Papua dan Papua Pegunungan. Selanjutnya, terjadi perubahan struktur pasar tenaga kerja dari pendidikan rendah ke pendidikan menegah dan tinggi, serta dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Sehingga dapat menimbulkan persaingan tenaga kerja membuat ketimpangan dalam penyerapan tenaga kerja.

4. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan

Diperlukan respon yang cepat untuk mengadaptasi dan harmonisasi perubahan regulasi atas kutuhan daerah. Selanjutnya, transformasi birokrasi dan kinerja ASN yang terus berkembang sesuai kebutuhan birokrasi yang lebih profesional. Adanya orientasi pelayanan publik yang bergeser dari *supplier-orinted* (mengejar terget) ke *consumer-oriented* (kepentingan masyarakat) dan terakhir ke *customer-oriented* (sesuai kebutuhan masyarakat) dimana tingkat partisipasi menjadi lebih besar. Pengelolaan keuangan daerah dituntut semakin transparan dan akuntabel dengan terintegrasinya sistem-sistem yang sedang berkembang.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Hasil identifikasi masalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2023 diuraiakan sebagai berikut.

Tabel 2. 44
Identifikasi dan Pemetaan Masalah

No	Urusan/ Bidang/ Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
A.	**Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar**		
1	Pendidikan		
	Belum optimalnya kualitas manajemen penyelenggaraan pendidikan	Disparitas tenaga pendidikan	Masih terdapat kekurangan jumlah guru di semua jenjang pendidikan
			Belum meratanya penempatan guru baik PNS maupun Tenaga Kontrak
			Terbatasnya jumlah guru yang berkualifikasi S1/D4
			Masih perlunya peningkatan kompetensi bagi guru

No	Urusan/ Bidang/ Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum meratanya ketersediaan sarana prasarana pendidikan	Masih terdapat rombel yang melebihi jumlah kelas yang tersedia
			Masih terdapat beberapa sekolah yang mengalami rusak ringn dan rusak berat
			Keterbatasa moda transportasi untuk mengangkut siswa siswi
2	Kesehatan		
	Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan	Masih tingginya angka kesakitan dan kematian	Belum optimalnya pelayanan Promotif dan Preventif
			Terbatasnya SDM Kesehatan yang menjalankan fungsi Kesehatan Masyarakat
			Masih tingginya angka penyakit menular akibat tingginya mobilisasi penduduk
			Penyakit tidak menular cenderung mengalami peningkatan (Diabetes dan Hipertensi)
		Prevalensi Stunting masih tinggi	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terkait pola konsumsi gizi seimbang
			Masih rendahnya pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja putri
			Belum semua masyarakat memiliki akses air bersih dan sanitasi yang layak
		Tingginya kesenjangan hasil pengukuran Bayi dan Balita dengan total bayi diwilayah kerja 21 Puskesmas	Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membawa bayi dan balita ke posyandu
			Belum optimalnya kegiatan swiping bayi dan balita ke rumah msyarakat
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
3.1	Pekerjaan Umum		
	Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Pekerjaan Umum	Belum optimalnya Akses, koneksifitas dan kualitas infrastruktur jalan/ Jembatan	Proporsi jalan Kabupaten dengan kondisi baik masih belum mencapai target
			Proporsi jalan Provinsi dengan kondisi baik masih belum mencapai target
			Masih terbatasnya prasarana jalan khususnya jalan non status yang menghubungkan sektor unggulan dengan kawasan penunjang di Kabupaten Biak Numfor
		Masih rendahnya capaian SPM bidang PU dan Penataan Ruang (Air bersih dan Air limbah)	Masih rendahnya akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi
			Terbatasnya layanan air minum (hanya di daerah perkotaan)

No	Urusan/ Bidang/ Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3.2	Penataan Ruang		
	Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Penataan Ruang	Belum optimalnya penataan bangunan gedung dan lingkungan	Bangunan gedung pemerintahan dan publik belum memadai
			Kawasan perbatasan belum terbangun landmark yang baik
			Menurunnya kondisi baik bangunan gedung pemerintah
			Sistem draenase dan sumur resapan yang tidak memadai, menyebabkan banyak genangan air saat terjadi hujan deras
4	Perumahan		
	Belum optimalnya penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh serta rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta pengelolaan pemakaman di Kabupaten Biak Numfor	Masih banyaknya kualitas rumah di kawasan perkotaan dan perdesaan yang belum memenuhi kriteria layak huni	Masih banyaknya Penduduk yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni
			Masalah legalitas lahan
			Belum Optimalnya pendataan RTLH
		Kurangnya Kegiatan yang mendukung tercapainya akses terutama penanganan Perumahan dan permukiman kumuh	Belum adanya Rencana Penanganan dan Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)
		Masih rendahnya kualitas lingkungan kawasan permukiman yang prioritas dan permasalahannya di Kota Biak	Belum adanya jumlah rumah susun untuk MBR yang disediakan oleh Pemerintah
		Belum optimalnya pengelolaan tempat pemakaman umum	Belum memadainya infrastruktur di lingkungan pemakaman
5	Sosial		
	Persentase Kemiskinan masih cukup tinggi	Belum optimalnya penanganan kemiskinan	Kurangnya lapangan pekerjaan
			Tingkat pendidikan (SDM) rendah
			Masih terdapat masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial
		Belum optimalnya penanganan anak terlantar	Pemenuhan kebutuhan dasar keluarga tidak terpenuhi sehingga menjadi miskin
			Keterbatasan wewenang Dinas Sosial dalam penanganan Anak Terlantar
		Belum optimalnya penanganan penyandang disabilitas	Minim akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas

No	Urusan/ Bidang/ Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya penanganan lanjut usia terlantar	Keterbatasan informasi bagi lanjut usia terlantar
6	Kemanan dan Keterbiban Umum		
	Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang Belum Optomal dalam Upaya Penegakan Peraturan Daerah	Kualitas Sumberdaya Manusia Satpol PP masih rendah	Belum terlaksananya Pendidikan atau pelatihan bagi anggota Satpol PP
			Belum tersedianya tenaga PPNS
			Perekrutan tenaga harian Satpol PP belum berbasis kompetensi
			Kurangnya pemahaman dan disiplin anggota Satpol PP dalam pelaksanaan tugas
			Belum optimalnya peran Linmas di setiap Distrik
		Kurangnya koordinasi antas instansi dalam rangka penegakan perda	Lemahnya koordinasi antar instansi baik pemerintah maupun TNI/Polri
			Masih sering terjadi kebocoran informasi pada saat penyidakan
			Masih terjadinya pelanggaran terhadap K3
			Minimnya sarana dan prasarana pendukung
		Masih kurangnya dukungan anggaran terhadap rencana penanggulangan bencana dan resiko bencana	Program penanggulangan/ pencegahan bencana belum menjadi prioritas
			Kasus bencana kebakaran yang semakin meningkat
			Terbatasnya personil DAMKAR
B	**Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**		
1	Tenaga Kerja		
	Meningkatnya Angka Pengangguran Terbuka dan Masalah Kesejahteraan Tenaga Kerja	Tindak maksimalnya penempatan tenaga kerja	Kurangnya informasi lowongan pekerjaan ke pencari kerja
		Kurangnya perluasan kesempatan kerja	Keterampilan dan keahlian para pencari kerja masih relatif rendah
		Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung ASN
		Tingkat perselisihan hubungan industrial masih tinggi	Tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	Belum oprtimalnya pelayanan pemberdayaan dan perlindungan anak	Belum optimalnya perlindungan dan penanganan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak	Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga
			Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan,penanganan, dan

No	Urusan/ Bidang/ Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif
			Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak
3	Pangan		
	Belum meratanya ketersediaan pangan di seluruh kawasan di Kabupaten	Masih kurang optimalnya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga	Kurangnya pengetahuan, pemahaman masyarakat tentang penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan
			Luasnya halaman pekarangan yang belum dimanfaatkan
4	Pertanahan		
	Belum optimalnya pengelolaan pelayana pertanahan	Minimnya ketersediaan lahan bagi pembangunan	Masih banyak lahan milik pemerintah daerah yang belum terselesaikan.
			Perencanaan pembangunan strategis daerah terhambat karena permasalahan lahan
5	Lingkungan Hidup		
	Belum optimalnya peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	Belum optimalnya perencanaan lingkungan hidup	Belum adanya kajian strategi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan
			Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup
		Belum Optimalnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun B3 dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Kurangnya penanganan limbah B3 yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup
		Belum Optimal Kepatuhan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Masih ada pemegang izin yang kurang patuh pada ketentuan dan syarat yang ditetapkan
		Masih Rendahnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Lembaga kemasyarakatan perlu dibina untuk peningkatan kesadaran pengelolaan lingkungan hidup
		Meningkatnya Pengaduan Lingkungan Hidup	Pemanfaatan sumberdaya alam yang kurang berwawasan lingkungan dan adanya masyarakat yang peduli lingkungan

No	Urusan/ Bidang/ Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Rendahnya volume timbulan sampah yang diolah
			Belum dilaksanakan penanganan pengolahan sampah secara efektif
6	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil		
	Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan	Belum tercapainya pelayanan dokumen administrasi kependudukan yang cepat	Terbatasnya cakupan layanan pendaftaran penduduk
			Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola administrasi kependudukan
		Belum tercapainya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan administrasi pencatatan sipil	Terbatasnya cakupan layanan dokumen administrasi pencatatan sipil
			Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi pencatatan sipil
		Masih terbatasnya akses data kependudukan yang diolah dan disajikan	Terbatasnya akses data akibat pemberlakuan SIAK terintegrasi
			Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan administrasi kependudukan
7	Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pemerintahan kampung	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat kampung dalam pembangunan	Rendahnya kualitas SDM aparatur kampung
			Kurangnya fasilitas/ sarana prasarana pendukung kinerja aparatur kampung
			Belum aktidnya BUMKAM untuk medukung terwujudnya Kampung Mandiri
		Rendahnya peran dan kapasitas lembaga kemasyarakatan kampung	Pasifnya lembaganya masyarakat di kampung
			Kurangnya dukungan dana dalam pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan di kampung
			Kurangnya pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan di kampung
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Belum optimalnya pelayana pengendalian penduduk dan KB	Belum maksimalnya kualitas Kelompok Bina Keluarga	Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan
			Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam

No	Urusan/ Bidang/ Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
			Terbukanya akses Informasi melalui media sosial yang bisa berdampak negatif bagi anak dan remaja
		Kebutuhan Ber-KB belum terpenuhi	Masih tingginya tingkat Kelahiran bagi Pasangan Usia Subur (PUS) yang rentan seperti tingkat kelahiran pada wanita dibawah 20 tahun dan diatas 30 tahun
			Masih adanya tantangan dari Tokoh-tokoh adat dan Agama pada Program Keluarga berencana
			Masih rendahnyaSDM bagi PUS dalam pengasuhan tumbuh kembang Anak
9	Perhubungan		
	Belum optimalnya pelayanan perhubungan	Belum optimalnya penyediaan dan penataan fasilitas Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan	Kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Penunjang Lalu Lintas Angkutan Jalan
			Kurang Optimalnya penataan dan peningkatan fungsi terminal
			Kurang Optimalnya Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor
			Masih lemahnya partisipasi dan peran swasta dalam penyediaan sarana transportasi
		Belum Optimalnya Pengawasan dan Pembinaan serta Pelayanan Bidang Perhubungan	Lemahnya kesadaran masyarakat akan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas
			Belum optimalnya Sumber daya manusia sesuai dengan spesifikasi keahlian bidang perhubungan
			Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam penataan dan rekayasa lalu lintas
			Belum Optimalnya pelayanan dan pengawasan pengujian kendaraan bermotor
10	Komunikasi dan Informatika		
	Belum Optimalnya Pelayanan Informasi Publik dan Pengelolaan Komunikasi Publik	Belum terciptanya etika dan budaya birokrasi yang melayani (Good Governance)	Terbatasnya infrastruktur media komunikasi dan informasi
			Kompetensi ASN dalam pengelolaan informasi dan komunikasi masih rendah
			Pengembangan kompetensi belum optimal
			Rendahnya alokasi anggaran
		Kinerja sebagai regulator dan	Belum dilakukan program pelatihan softskill terkait transformasi leadership

No	Urusan/ Bidang/ Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		integrator TIK dalam penerapan SPBE untuk mewujudkan birokrasi yang profesional belum optimal	Belum terpenuhinya secara merata infrastruktur dasar TIK sebagai syarat penerapan SPBE
			Dukungan terhadap ketersediaan infrastruktur dasar TIK masih kurang
		Peran kominfo sebagai penyedia data atau wali data sektoral belum terwujud	Perubahan alur penyedia data
			Kesenjangan antara data yang tersedia dengan data yang dibutuhkan
			Kurang maksimalnya dukungan data OPD
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		
	Masih rendahnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM	Lemahnya kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi simpan pinjam masih banyak yang belum memiliki ijin
			Belum adanya regulasi terkait Koperasi
		Rendahnya status koperasi sehat	Pembinaan, fasilitas dan pelatihan untuk meningkatkan status sehat koperasi belum maksimal
		Masih lemahnya kemampuan SDM dalam mengelola Koperasi	Pengurus dan pegawai koperasi tidak memiliki kemampuan cukup untuk mengelola koperasi
		Masih Lemahnya kualitas kelembagaan UMKM	Ijin usaha yang belum ada
			Belum adanya regulasi terkait UMKM
		Masih rendahnya kualitas produksi	Kemasan produksi masih belum memenuhi standar berupa stiker mempunyai PRT dan halal
		Masih rendahnya pemasaran UMKM	Persaingan harga jual
			Permintaan konsumen kurang
			Kurang memanfaatkan metode pemasaran online
		Masih lemahnya kemampuan kewirausahaan UMKM	Minimnya generasi milenial sebagai pelaku UMKM
			Kurangnya jumlah SDM yang kompoten sesuai dengan bidang usaha
12	Penanaman Modal		
	Belum optimalnya iklim penanaman modal	Masih kurangnya kajian investasi dan peta potensi investasi yang tersedia di Kabupaten Biak Numfor	Belum tersedia kebijakan daerah yang mendasari kajian investasi dan peta potensi investasi
			Minimnya anggaran untuk kegiatan kajian investasi dan peta potensi investasi
		Belum optimalnya regulasi/ kebijakan pusat dan daerah untuk mendukung	Regulasi/kebijakan pemerintah pusat yang berubah-ubah dalam waktu yang singkat
			Belum efektifnya regulasi daerah yang mendukung peningkatan investasi

No	Urusan/ Bidang/ Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		peningkatan investasi	
13	Kepemudaan dan Olahraga		
	Belum optimalnya pelayanan kepemudaan dan olahraga	Belum optimalnya prestasi olahraga pemuda	Kurangnya pembinaan bagi calon atlit muda
			Kurangnya sarana dan prasaran pendukung olahraga
		Belum optimalnya pemberdayaan wirausaha mandiri	Kurangnya prestasi pemuda terampil
			Kurangnya program dan pelatihan kewirausahaan
14	Statistik		
	Belum maksimalnya pelayanan statistik di Daerah	Belum optimalnya pemanfaatan data	Data dan informasi yang sama masih dihasilkan dari berbagai sumber data
			Belum link and match antara data yang dihasilkan dengan dinamika kebutuhan pembangunan serta belum tersedianya sistem informasi yang mempermudah kemudahan akses masyarakat
			Lemahnya koordinasi dalam pengadan dan penyediaan data pembangunan
15	Persandian		
	Belum maksimalnya pelayanan dengan menggunakan layanan ekeltronik untuk memangkas waktu pelayanan pemerintahan	Belum Optimalnya Pemantaan Tanda Tangan Elektornik dalam pelayanan pemerintahan	Belum semua OPD melaukan pendaftaran penggunaan tanda tangan elektronik
			Regulasi di daerah belum mengatur secara gamblang penggunaan tanda tangan elektronik
16	Kebudayaan		
	Belum optimalnya pengelolaan kebudayaan	Belum optimalnya pengelolaan budaya dan aset-aset budaya lokal biak	Belum optimalnya pemberdayaan seniman lokal
			Masih kurang minat pada event seni lokal
			Belum optimalnya dukungan pelaksanaan kesenian budaya diluar daerah
			Pemeiliharaan cagar budaya belum optimal
17	Perpustakaan		
	Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan	Kurangnya inovasi program dalam pengelolaan perpustakaan daerah	Belum optimalnya pelayanan perpustakaan dalam mendukung peningkatan minat baca masyarakat;
			Terbatasnya jumlah perpustakan dan tenaga kepustakaan;
			Terbatasnya fasilitas layanan perpustakaan umum keliling.

No	Urusan/ Bidang/ Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
18	Kearsipan		
	Belum optimlanya pemanfaatan arsip di daerah	Belum Optimalnya pengelolaan arsip Perangkat Daerah secara baku	Rendahnya Pengelolaan Arsip OPD secara Digital
C	**Urusan Pemerintah Pilihan**		
1	Perikanan		
	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap	Masih terbatasnya sarana prasarana dan inovasi teknologi penangkapan ikan yang dimiliki nelayan/ kelompok nelayan
			Relatif tingginya *unreported* produksi hasil tangkapan
		Masih rendah dan kurang meratanya tingkat kesejahteraan nelayan	Belum optimalnya jaminan perlindungan nelayan
		Belum optimalnya produksi perikanan budidaya	Kurangnya kualitas benih dan induk bermutu
			Tingginya harga pakan
			Keterbatasan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan komoditas perikanan
			Masih terbatasanya saran prasarana dan inovasi teknologi pengembangan budidaya ikan
		Masih rendahnya angka konsumsi ikan	Kurangnya sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan
			Adanya opini masayarakat tentang mahalnya harga ikan
			Kurangnya variasi jumlah olahan produk-produk ikan
2	Pariwisata		
	Masih rendahnya daya saing pariwisata, daya saing usaha jasa, pemanfaatan teknologi informasi kurang optimal, dan kemampuan kelembagaan pariwisata	Kurangnya pengelolaan obyek wisata yang baik, dan rendahnya kualitas destinasi pariwisata yang berbasis keunikan local dan terkoneksi antar wilayah	Image pariwisata belum terbentuk, masyarakat belum memahami bagaimana mengelola Kawasan wisata
			Kelompok Sadar Wisata belum menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik
			Kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang belum optimal
			Peran serta masyarakat belum optima
			Masih adanya beberapa akses jalan menuju obyek wisata yang rusak, Lampu Penerangan Jalan Umum menuju lokasi wisata kurang banyak, dan transportasi menuju lokasi obyek wisata masih terbatas

No	Urusan/ Bidang/ Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya Kerjasama antar lembaga kepariwisataan dan ekonomi kreatif	Terbatasnya SDM pariwisata
			Minimnya *street furniture* disepanjang jalan menuju obyek wisata
			Belum efektif kinerja kelembagaan dan kemitraan usaha pariwisata yang belum optimal
			Belum adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder
			Belum optimal dalam pembinaan dan pendampingan masyarakat
		Belum efektif dan sinerginya pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Promosi wisata hanya dilakukan saat event saja
			Strategi komunikasi pemasaran belum optimal
			Masih kurangnya aplikasi-aplikasi pendukung pariwisata
3	Pertanian		
	Semakin berkurangnya lahan pertanian di Kabupaten Biak Numfor	Belum optimalnya kegiatan produksi	Berkurangnya lahan pertanian
			Kurangnya tenaga kerja sektor pertanian
		Belum maksimalnya penyuluhan usaha pertanian	Terbatasnya kapsitas tenaga penyuluh pertanian
			Kelembagaan petani masih didominasi oleh kelas pemula
4	Perdagangan		
	Belum optimalnya perdagangan daerah	Belum optimalnya pemanfaatan gedung metrologi dan pengukuran tera ulang	Kurangnya alat Ukur UTTP
		Belum optimalnya upaya ekspor komoditi unggulan daerah.	Belum adanya jasa / subsidi tol laut
			Belum adanya komoditi unggulan
			Masih rendahnya kapasitas dan kualitas produksi
		Kurangnya pengawasan barang dan jasa	Belum adanya kendaraan dinas operasional
			Minimnya dana penunjang
5	Perindustrian		
	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas industri lokal	Kurangnya pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah	Kurangnya daya saing produk lokal
			Kurangnya akses terhadap modal usaha
			Belum adanya kawasan sentra industri yang terintegrasi
D	**Penunjang Pemerintah**		
1	Perencanaan		
	Belum optimalnya kualitas dokumen	Masih kurangnya keselarasan dan konsistensi	Masih kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, maupun dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

No	Urusan/ Bidang/ Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	perencanaan yang dihasilkan oleh BAPPEDA	perencanaan pembangunan, antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah	Pusat, juga Pemerintah Kampung dan DPRD
		Masih rendahnya kualitas data pembangunan	Kualitas data belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan
			Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memenuhi standar kompetensi
			Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus mengalami perubahan
			Kurangnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan sebagai bahan perencanaan pembangunan
2	Keuangan		
	Masih rendahnya kinerja BPKAD dalam mengelola keuangan dan aset daerah	Kurangnya tingkat pemahaman penganggaran, penatausahaan keuangan dan BMD	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran terkait pengelolaan keuangan perintah daerah
			Belum terintegrasinya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah
3	Kepegawaian		
	Belum optimalnya manajemen sistem kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia	Belum optimalnya pelaksanaan seleksi CASN dan seleksi pengembangan karier	Belum adanya sarana prasarana kegiatan CAT sebagai penunjang kegiatan tes CPNS sehingga harus menyewa peralatan
			Keterbatasan anggaran
		Belum optimalnya administrasi perkantoran terkait urusan kepegawaian dan sumber daya manusia	Lemahnya koneksi jaringan
			Belum adanya sarana air bersih sebagai salah satu kebutuhan kantor
			Belum adanya pemeliharaan perawatan gedung kantor (di atas 10 tahun)
		Kurangnya kualitas dan kuantitas pegawai yang berkompeten	Kurangnya tenaga administrasi informatika
4	Penelitian dan Pengembangan		
	Ekosistem Penelitian dan Inovasi Belum Terintegrasi	Hasil-hasil riset sebagian besar belum terimplikasikan di dunia usaha industri dan masyarakat	Belum Adanya Minat dan Keseriusan
	Masih rendahnya kualitas riset dan inovasi daerah	Rendahnya iklim riset dan inovasi di daerah	Terbatasnya SDM
			Terbatasnya sarana dan prasarana
			Terbatasnya penganggaran

No	Urusan/ Bidang/ Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
5	Pengawasan		
	Belum optimalnya profesionalisme APIP	Belum optimalnya kapabilitas APIP	Belum optimalnya pengelolaan SDM, struktur, dan tata kelola (manajemen kinerja) APIP
			Belum optimalnya akuntabilitas, manajemen kinerja, dan praktik profesional APIP
	Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Belum optimalnya penyelenggaraan SPIP	Belum adanya penerapan manajemen risiko
			Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi maturitas SPIP pada perangkat daerah secara berkala
			Belum optimalnya pelaksanaan pendampingan maturitas SPIP pada perangkat daerah secara berkala
			Belum optimalnya dukungan sumber daya dan penerapan strategi pencegahan korupsi dalam pengendalian korupsi pada perangkat daerah
		Belum optimalnya kegiatan pengawasan berbasis risiko	Belum disusunnya PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) berbasis risiko
		Belum optimalnya pembangunan Zona Integritas pada Perangkat Daerah	Belum optimalnya pendampingan dan asistensi dalam Pembangunan Zona Integritas Perangkat Daerah
			Masih rendahnya komitmen, baik kepala maupun staf perangkat daerah, dalam melakukan pembangunan zona integritas yang efektif
			Belum adanya implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi yang mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang efektif dan efisien
			Belum adanya mitigasi risiko yang dipetakan secara komprehensif untuk meminimalisasi potensi kemungkinan terjadinya penyimpangan

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

"Membahas tentang Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang mengemukakan tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah."

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab ini akan membahas tentang kondisi ekonomi Kabupaten Biak Numfor tahun 2023 dan prospek perekonomian Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2025 yang diantaranya mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Perubahan pada laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah berimplikasi pada besaran pendapatan daerah, dan selanjutnya akan mempengaruhi besaran belanja daerah serta besaran pembiayaan daerah. Oleh sebab itu, penyusunan rancangan kerangka ekonomi daerah yang cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan kebijakan keuangan daerah yang tepat.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Biak Numfor tahun 2025 diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang memiliki tema " Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Selain itu, kebijakan perekonomian Kabupaten Biak Numfor juga Meperkuat Daya Saing Daerah Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Demi Terwujudnya Biak Numfor Yang Mandiri dan Sejahtera

Kebijakan perekonomian Kabupaten Biak Numfor bersifat terbuka dan sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional dan global. Oleh sebab itu, penyusunan asumsi perekonomian Kabupaten Biak Numfor tahun 2025 memperhitungkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian global, regional dan nasional tahun sebelumnya.

3.1.1 Perekonomian Global

Perekonomian global pada tahun 2023 diprediksi melambat menjadi 3,0 persen dibanding tahun 2022 yang mencapai 3,5 persen. Proyeksi perlambatan ini

berlanjut hingga tahun 2024, dengan pertumbuhan sekitar 2,9 persen. Beberapa faktor penyebab penurunan pertumbuhan ekonomi global antara lain; pertama, perang Rusia dan Ukraina belum dapat diprediksi kapan akan berakhir meskipun ada kecenderungan penurunan tensi konflik. Kedua, negara utama seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa menghadapi tekanan permintaan domestik. Ketiga, pengetatan moneter yang dimulai pada januari 2022 saat ini sudah meluas. Oleh karena itu, walaupun tekanan pada 2023 menurun, tingginya ketidakpastian masih mengiringi.

Amerika Serikat dihadapkan pada persoalan inflasi yang masih tinggi, potensi berkurangnya penciptaan lapangan kerja, dan tinggnya tingkat suku bunga perbankan. Meskipun inflasi di Amerika Serikat lambat laun sudah menunjukkan penurunan, tingkat harga masih relatif tinggi. Tingkat inflasi saat ini masih di level 6 persen setelah sebelumnya sempat menyentuh 9 persen, sementara target inflasi yang ingin dicapai adalah di kisaran 2 persen. Oleh karenanya, *The Fed* diprediksi masih akan terus menaikkan suku bunga sampai target inflasi tercapai, sehingga berdampak pada perlambatan atau tidak menutup kemungkinan kontraksi ekonomi. Sementara itu, lapangan kerja yang tercipta lebih banyak disebabkan oleh kembali bergeraknya bisnis di sektor jasa yang sempat kontraksi dalam akibat pandemi COVID-19, bukan karena adanya ekspansi bisnis atau lonjakan permintaan secara agregat.

Negara-negara Eropa masih menghadapi persoalan kurangnya pasokan energi dan kenaikan harga energi akibat perang Rusia-Ukraina. Situasi ini mengerek inflasi yang berdampak pada tertekannya konsumsi masyarakat dan stagnasi pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan Amerika Serikat dan Eropa, Tiongkok yang permintaan domestiknya mengalami perlambatan bahkan sempat terkontraksi akibat penerapan *zero covid policy* pada tahun ini, diprediksi membaik pada 2023.

Tingginya inflasi Amerika Serikat yang mendorong *The Fed* mengambil langkah agresif menaikkan *Federal Fund Rate* (FFR) berdampak pada penguatan Dollar terhadap mata uang lainnya di dunia. Faktor ini pula yang mendorong sejumlah bank sentral negara lainnya juga melakukan pengetatan moneter untuk meredam inflasi.

Pada tahun 2023, tingkat inflasi global diperkirakan relatif lebih rendah sebagai dampak pelemahan permintaan dan peningkatan suku bunga. Pelemahan

permintaan global dan kekhawatiran terhadap ancaman resesi berpotensi menekan harga-harga komoditas yang pada gilirannya menekan pertumbuhan perdagangan global, penerimaan ekspor dan pendapatan pemerintah.

Ekonomi Amerika Serikat tumbuh 2,6 persen (YoY) pertumbuhan positif melanjutkan triwulan sebelumnya. Kinerja ini didorong oleh peningkatan pada pengeluaran pemerintah pusat dan daerah, investasi non residensial tetap, investasi inventori swasta. Belanja konsumen yang meningkat dan investasi bisnis yang bangkit membantu Amerika Serikat untuk menghindari resesi. Data perekonomian Amerika Serikat menunjukkan resiliensi terhadap tekanan inflasi dan tingkat suku bunga yang tinggi.

Proyeksi ekonomi global untuk tahun 2024 juga terlihat melandai dibandingkan tahun sebelumnya, dengan perkiraan sebesar 3,2 persen. Sementara itu untuk proyeksi tahun 2025, diperkirakan sama seperti tahun sebelumnya.

Tabel 3. 1
Proyeksi Ekonomi Global

Prospek Ekonomi Dunia (WEO)	2022 (%)	Proyeksi (%)		
		2023	2024	2025
Dunia	3,5	3,2	3,2	3,2
Negara Maju	2,6	1,6	1,7	1,8
Amarika Serikat	1,9	2,5	2,7	1,9
Zona Euro	3,4	0,4	0,8	1,5
Jepang	1,0	1,9	0,9	1,9

Sumber : World Economic Outlook

3.1.2 Perekonomian Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat pada triwulan II tahun 2023 sebesar 5,17 persen (YoY). Ekonomi Indonesia tetap tumbuh diatas 5 persen selama tujuh triwulan berturut-turut, ditengah melambatnya ekonomi global dan menurunnya harga komoditas ekspor unggulan. Tetap kuatnya perekonomian Indonesia dipicu oleh peningkatan mobilitas dan daya beli masyarakat seiring masa bulan Ramadhan,

banyaknya libur HBKN seperti Idul Fitri, Paskah, Idul Adha, Waisak, dan sebagainya, serta masa libur panjang sekolah.

Gambar 3. 1
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II
(Sumber: Badan Pusat Statistik)

Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen tumbuh meningkat, kecuali kinerja perdagangan internasional yang mengalami kontraksi ditengah perlambatan perdagangan global. Konsumsi rumah tangga yang menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi tertinggi, tumbuh meningkat sebesar 5,2 persen (YoY). Konsumsi rumah tangga meningkat seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat selama bulan Ramadhan, adanya momen libur hari raya seperti Idul Fitri, Idul Adha, Waisak, dan sebagainya, serta dimulainya libur kenaikan kelas pada bulan Juni.

Sub komponen dengan pertumbuhan tertinggi yakni transportasi dan komunikasi yang tumbuh sebesar 7,5 persen (YoY), sejalan dengan periode mudik menjelang hari raya terutama hari raya Idul Fitri dan dimulainya masa libur sekolah, sehingga mendorong mobilitas masyarakat untuk bepergian. Sub komponen transportasi dan komunikasi ini tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 7,8 persen (YoY).

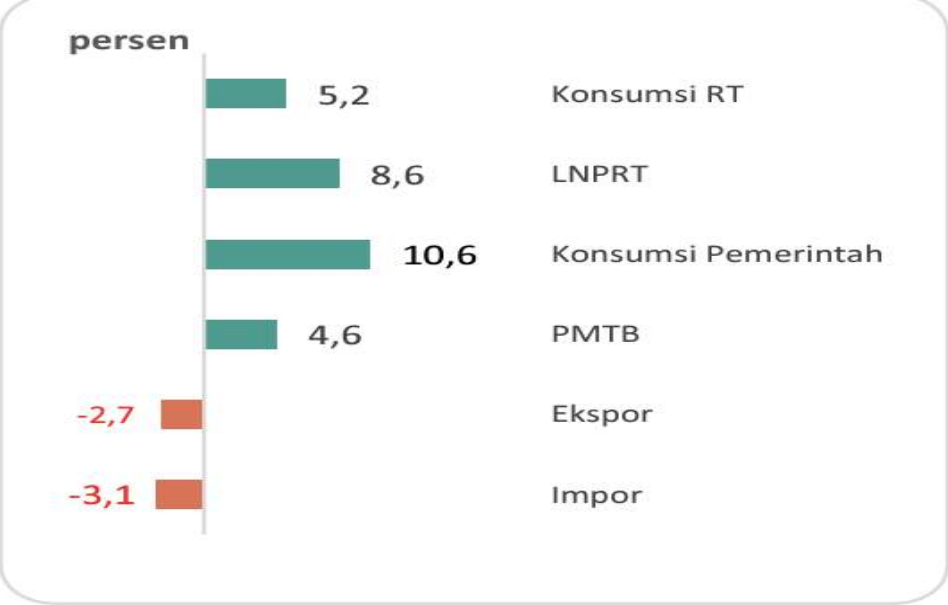

Gambar 3. 2
Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran Triwulan II Tahun 2023
(Sumber: Badan Pusat Statistik)

Investasi, Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada triwulan II tahun 2023 mencapai Rp186,3 triliun dan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp163,4 triliun. Total nilai realisasi investasi pada triwulan II tahun 2023 mencapai Rp349,9 triliun, naik sebesar 6,3 persen (QtQ) dan 15,7 persen (YoY). Nilai realisasi PMA mengalami kenaikan sebesar 14,2 persen (YoY), sedangkan nilai realisasi PMDN mengalami kenaikan sebesar 17,6 persen (YoY).

Secara QtQ pada triwulan II tahun 2023, nilai realisasi PMA maupun PMDN mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 7,6 persen (QtQ) dan 5,2 persen (QtQ). Pertumbuhan PMA secara QtQ pada triwulan ini lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang mana pada triwulan I tahun 2023 hanya tumbuh sebesar 1,1 persen, sedangkan pertumbuhan PMDN secara QtQ pada triwulan I tahun 2023 mengalami perlambatan dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,8 persen.

Tabel 3. 2
Realisasi Investasi

Uraian	Nilai Q2 2023 (triliun Rp)	Growth (%)		*Sahre* thd Realisasi Investasi
		Qtq	Yoy	
Realisasi Investasi	**349,9**	**6,3**	**15,7**	**100,0**
PMDN	163,4	7,6	17,6	46,7
PMA *(kurs: Rp.14.800/USD)*	186,3	5,2	14,2	53,3

Uraian	Nilai Q2 2023 (triliun Rp)	Growth (%)		*Sahre* thd Realisasi Investasi
		Qtq	Yoy	
Berdasarkan Sektor				
Primer	68,4	22,4	34,0	19,6
Sekunder	130,4	-6,8	2,4	37,3
Tersier	151,0	13,4	21,9	43,2

Sumber : Kemeterian Investasi/ BKPM

Secara YoY pada triwulan II tahun 2023, realisasi PMA tumbuh sebesar 14,2 persen dan realisasi PMDN tumbuh sebesar 17,6 persen. Kontribusi Penanaman Modal Asing (PMA) yang pada triwulan II tahun 2023 mencapai Rp.186,3 triliun atau 53,3 persen, melampaui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp163,4 triliun atau 46,7 persen dari capaian investasi periode ini. Hal ini menunjukan bahwa tingkat kepercayaan internasional dalam melakukan penanaman modal di Indonesia masih tetap baik dan bahkan menunjukkan peningkatan sebanyak 14,2 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Di tengah potensi perlambatan ekonomi dunia, berkeyakinan ekonomi Indonesia relatif resilient pada tahun depan. Dengan memprediksi ekonomi nasional di tahun 2023 berpotensi tumbuh 4,5 hingga 5,0 persen. Sumber utama pendorong pertumbuhan berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi yang diperkirakan masih cukup kuat. Meski demikian, net ekspor yang berperan besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 dan 2022, diprediksi akan berkurang perannya di tahun depan. Sementara itu, rencana normalisasi kebijakan di tahun 2023 juga berpotensi menahan pertumbuhan belanja pemerintah.

Masih kuatnya konsumsi domestik memberikan harapan bagi dunia bisnis untuk melakukan ekspansi dan investasi. Meskipun surplus perdagangan berpotensi menyempit akibat melemahnya permintaan global dan menurunnya harga komoditas, potensi peningkatan impor barang modal dan bahan baku/penolong menunjukkan bahwa aktivitas produktif di dalam negeri masih berjalan dengan baik.

Berdasarkan perekonomian global yang masih belum stabil serta penuh dengan risiko dan ketidakpastian, perekonomian Indonesia masih harus mengandalkan potensi domestik sebagai mesin pendorong pertumbuhan dan

peningkatan kesejahteraan. Selain itu, kebijakan ekonomi akan terus diarahkan untuk mengantisipasi serta merespon dinamika global tersebut.

3.1.3 Kondisi Ekonomi Daerah

Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa menyediakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor usaha. Indikator-indikator lain yang tak kalah penting antara lain inflasi, kemiskinan, investasi, nilai tukar, dan lain-lain. Analisis ekonomi daerah dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah dalam kurun waktu tertentu.

3.1.3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Sumbangan sektor-sektor ekonomi Perkategori Usaha telah mendorong pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu lima tahun terakhir walaupun disadari bahwa pergerakannya masih lambat. Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Biak Numfor akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2019 s.d 2023, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan antar kabupaten.

Data yang ada menunjukan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Biak Numfor digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori).

Nilai PDRB Kabupaten Biak Numfor (harga Berlaku) kurun waktu 10 tahun selama periode tahun 2019-2016 menunjukkan peningkatan. Pada tahun, 2019 nilai PDRB Kabupaten Biak Numfor menurun menjadi sebesar 4,39 Triliun rupiah. Penurunan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya resesi yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor. Dan pada tahun 2019 dan 2020 data menunjukkan ekonomi daerah mengalami pemulihan/ *recovery*. Namun di tahun 2020 ekonomi Biak Numfor mengalami kontraksi yang cukup berat akibat adanya Pandemi COVID-19 yang melemahkan seluruh sektor usaha di masyarakat. Dan di tahun 2022 dan 2023 ekonomi kembali pulih dengan pertumbuhan positif.

Tabel 3. 3
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Kab. Biak Numfor
Tahun 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021*	2022*	2023**
Konsumsi Rumah Tangga	4.398,87	4.199,76	4.185,52	4.442,78	4.672,76
Konsumsi LNPRT	315,78	231,78	242,99	245,99	260,61
Konsumsi Pemerintah	1.331,16	1.368,91	1.450,68	1.572,40	1.776,02
PMTB	1.015,30	933,60	1.026,32	1.090,94	1.195,83
Perubahan Inventori	6,82	-57,14	19,63	-18,57	234,22
Net Ekspor (Ekspor-Impor)	-1.581,82	-1.453,24	-1.427,44	-1.468,38	-1.857,81
Total PDRB	**5.486,11**	**5.223,67**	**5.497,70**	**5.865,16**	**6.281,62**

(Sumber: Badan Pusat Satistik PDRB 2019-2023)

PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2019-2023, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Biak Numfor berdasarkan PDRB ADHK dapat dilihat Sama halnya dengan PDRB ADHB, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK juga menunjukkan fluktuasi data selama lima tahun ini.

Tabel 3. 4
PDRB Atas Dasar Harga Konstant 2010 menurut Pengeluaran Kab. Biak Numfor

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021*	2022*	2023**
Konsumsi Rumah Tangga	2.729,40	2.552,25	2.511,47	2.577,34	2.632,43
Konsumsi LNPRT	193,05	140,62	145,47	147,03	150,38
Konsumsi Pemerintah	811,22	800,61	825,89	874,11	958,77
PMTB	593,49	532,63	578,87	594,37	623,09
Perubahan Inventori	2,48	-38,25	12,03	-12,77	143,10
Net Ekspor (Ekspor-Impor)	-900,03	-731,96	-737,43	-680,53	-895,69
Total PDRB	**3.429,60**	**3.255,91**	**3.336,29**	**3.499,54**	**3.612,07**

(Sumber: Badan Pusat Satistik PDRB Tahun 2019-2023)

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (economic growth), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Secara umum pertumbuhan ekonomi Biak Numfor dari tahun 2019-2023 mengalami perubahan yang lebih baik / terjadi peningkatan positif. Pada tahun 2019 ekonomi Biak Numfor tumbuh 2,21 persen, kemudian selang lima tahun berjalan di tahun 2023 ekonomi biak meningkat menjadi 3,22 persen. Pada tahun 2023 terjadi pemulihan ekonomi paska Pandemi Covid 19. Aktivitas ekonomi perlahan pulih setelah diterpa oleh Pandemi tersebut.

Tabel 3. 5
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut Pengeluaran Kab. Biak Numfor
Tahun 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021*	2022*	2023**
Konsumsi Rumah Tangga	0,23	-6,49	-1,60	2,62	2,14
Konsumsi LNPRT	9,29	-27,16	3,45	1,07	2,28
Konsumsi Pemerintah	10,59	-1,31	3,16	5,84	9,68
PMTB	1,96	-10,25	8,68	2,68	4,83
Perubahan Inventori	-45,21	-1640,77	-131,46	-206,13	-1220,42
Net Ekspor (Ekspor-Impor)	4,13	-18,67	0,75	-7,72	31,62
Total PDRB	2,21	-5,06	2,47	4,89	3,22

(Sumber: Badan Pusat Satistis PDRB Tahun 2019-2023)

Tabel 3. 6
Perkembangan PRDB Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023

Tahun	Perkembangan Ekonomi Kabupaten Biak Numfor		
	Nilai PDRB ADHB (Juta Rp)	Nilai PDRB ADHK (Juta Rp)	Pertumbuhan ADHK (%)
2019	*5.486,11*	*3.429,60*	*2,21*
2020	*5.223,67*	*3.255,91*	*-5,06*
2021	*5.497,70*	*3.336,29*	*2,47*
2022	*5.865,16*	*3.499,54*	*4,89*
2023	*6.281,62*	*3.612,07*	*3,22*

(Sumber: Badan Pusat Satistik Tahun 2023)

Secara umum pertumbuhan ekonomi Biak Numfor dari tahun 2019– 2023 mengalami perubahan yang lebih baik / terjadi peningkatan positif. Pada tahun 2019 ekonomi Biak Numfor tumbuh 2,21 persen, kemudian selang lima tahun berjalan di tahun 2023 ekonomi biak meningkat menjadi 3,22 persen. Pada tahun 2023 terjadi pemulihan ekonomi paska Pandemi *Covid 19*. Aktivitas ekonomi perlahan pulih setelah diterpa oleh Pandemi tersebut

A. PDRB Menurut Lapangan Usaha

1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2024 terhadap Triwulan I 2023 (y-on-y)

Pada triwulan I-2024, ekonomi Papua jika dibandingkan dengan triwulan I-2023 mengalami pertumbuhan siginifikan sebesar 17,49 persen (y-on-y). Jika dilihat pertumbuhan ekonomi Papua tanpa pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan sebesar 5,07 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha dimana pertumbuhan tertinggi dialami oleh Sektor Pertambangan dan Penggalian yang tumbuh sebesar 36,55 persen; diikuti oleh Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,29 persen; Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,50 persen; Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,66 persen; serta Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 5,91 persen.

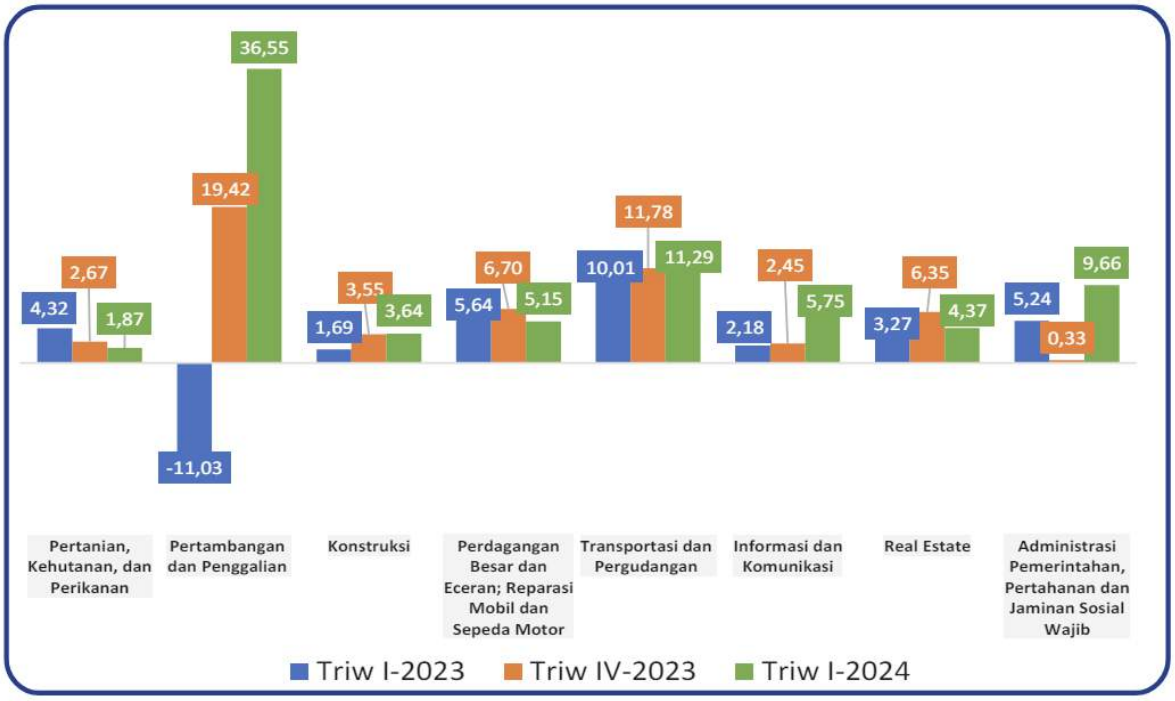

Gambar 3. 3
Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha (y-o-y)
(Sumber: BPS Provinsi Papua per Mei 2024)

Struktur PDRB Papua menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I-2024 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 42,84 persen; diikuti oleh Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 12,57 persen; Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,37 persen; Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 8,66 persen; serta Lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,95 persen. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Papua, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 14,42 persen; diikuti oleh Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,80 persen; serta Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,46 persen.

Lapangan Usaha		2023**				2024**
		Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I
(1)		(2)			(3)	(4)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	10,70	10,30	9,98	9,45	9,37
B.	Pertambangan dan Penggalian	36,56	39,57	40,47	41,49	42,84
C.	Industri Pengolahan	1,71	1,60	1,61	1,57	1,57
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
F.	Konstruksi	14,40	13,20	12,99	13,27	12,57
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,61	9,20	9,37	9,13	8,66
H.	Transportasi dan Pergudangan	4,70	4,50	4,63	4,94	4,58
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,65	0,61	0,60	0,59	0,57
J.	Informasi dan Komunikasi	3,61	3,43	3,30	3,12	3,18
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,71	1,61	1,62	1,55	1,50
L.	Real Estat	2,63	2,44	2,44	2,36	2,36
M,N.	Jasa Perusahaan	1,08	1,05	1,05	1,00	0,97
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,34	8,48	7,93	7,54	7,95
P.	Jasa Pendidikan	1,61	1,55	1,51	1,50	1,45
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,62	1,44	1,48	1,50	1,46
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	0,98	0,95	0,95	0,93	0,90
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Gambar 3. 4
Distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha
(Sumber: BPS Provinsi Papua Tahun 2024)

B. PDRB menurut Pengeluaran

1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2024 terhadap Triwulan I-2023 (y-on-y)

Ekonomi Papua periode triwulan I-2024 mengalami pertumbuhan yang tinggi, yaitu sebesar 17,49 persen (y-on-y). Pertumbuhan terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 128,37 persen; dikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 27,95 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang tumbuh sebesar 16,71 persen. Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto

(PMTB) hanya mengalami pertumbuhan di bawah 5 persen, dimana masing-masing tumbuh sebesar 4,33 persen dan 2,41 persen. Sementara itu, komponen Impor Barang dan Jasa, yang merupakan faktor pengurang PDRB, tumbuh sebesar 19,01 persen.

Struktur PDRB Papua menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Triwulan I-2024 didominasi oleh tiga komponen. Ketiga komponen tersebut adalah Komponen Ekspor Barang dan Jasa dengan kontribusi sebesar 64,11 persen; Komponen PK-RT sebesar 40,79 persen; dan Komponen PMTB sebesar 28,13 persen. Sementara itu, Komponen PK-P memiliki kontribusi sebesar 16,59 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 2,25 persen; Komponen Perubahan Inventori (PI) sebesar -1,09 persen; dan Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB sebesar 50,78 persen

Komponen	2023**				2024**
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	45,18	43,23	42,38	40,73	40,79
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,04	2,04	1,94	2,00	2,25
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	16,35	16,86	18,05	19,09	16,59
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	32,41	29,51	30,60	31,68	28,13
5. Perubahan Inventori	12,30	1,46	3,96	(1,21)	(1,09)
6. Ekspor Barang dan Jasa	32,19	52,99	50,78	62,48	64,11
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	40,47	46,09	47,71	54,76	50,78
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Catatan: **Angka Sangat Sementara*

Gambar 3. 5
Distribusi PDRB menurt Pengeluaran
(Sumber: BPS Provinsi Papua Tahun 2024)

2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2024 terhadap Triwulan IV-2023 (q-to-q)

Ekonomi Papua Triwulan I-2024 dibanding Triwulan IV-2023 terkontraksi sebesar -2,68 persen (q-to-q). Kontraksi terjadi pada semua komponen, kecuali pada Komponen PK-LNPRT yang justru tumbuh tinggi sebesar 12,10 persen. Kontraksi

tertinggi terjadi pada Komponen PKP, yaitu sebesar -15,30 persen; diikuti Komponen PMTB sebesar -11,94 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar -2,85 persen; dan Komponen PK-RT sebesar -0,70 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB juga terkontraksi sebesar -16,35 persen.

Komponen	Triw IV-2023** terhadap Triw III-2023** (q-to-q)	Triw I-2024** terhadap Triw IV-2023** (q-to-q)	Triw IV-2023** terhadap Triw IV-2022** (y-on-y)	Triw I-2024** terhadap Triw I-2023** (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan Triw I-2024** (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,85	(0,70)	3,27	4,33	1,78
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	10,35	12,10	9,64	27,95	0,53
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12,71	(15,30)	2,67	16,71	2,59
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	10,09	(11,94)	3,22	2,41	0,70
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	27,40	(2,85)	26,03	128,37	30,21
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	20,05	(16,35)	(1,73)	19,01	4,52
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	6,15	(2,68)	10,79	17,49	17,49

*Catatan: **Angka Sangat Sementara*

Gambar 3. 6
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran
(Sumber: BPS Provinsi Papua Tahun 2024)

3.1.3.2 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Fluktuasi inflasi pada suatu daerah dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang tidak stabil dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Inflasi yang tidak stabil juga akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan

menyebabkan perlambatan ekonomi. Mengingat pentingnya peran inflasi terhadap kondisi sosial-ekonomi daerah, menjadikan indikator ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan keuangan Kabupaten Biak Numfor.

3.1.3.3 Kemiskinan

Pada 2021 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Biak Numfor sebesar 36.380 jiwa dan naik menjadi 36.800 jiwa pada 2022. Kemudian turun lagi pada 2023 menjadi 35.700 jiwa. Sebagai informasi, secara umum pola perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Biak Numfor selama 10 tahun terakhir mengalami penurunan. Pada periode tahunan (periode yang lebih pendek) sempat terjadi pola fluktuatif, di mana pada tahun tertentu mengalami kenaikan, dan pada tahun berikutnya mengalami penurunan. Pada 2014, persentase penduduk miskin di Kabupaten Biak Numfor sekitar 27,44 persen dan terus menurun menjadi 25,44 persen di Tahun 2017. Namun pada 2018-2019 persentase penduduk miskinnya kembali meningkat. Kemudian pada 2021- 2023 menurun menjadi 23,53 persen. Untuk mengetahui pola perkembangan yang lebih lengkap bisa dilihat pada

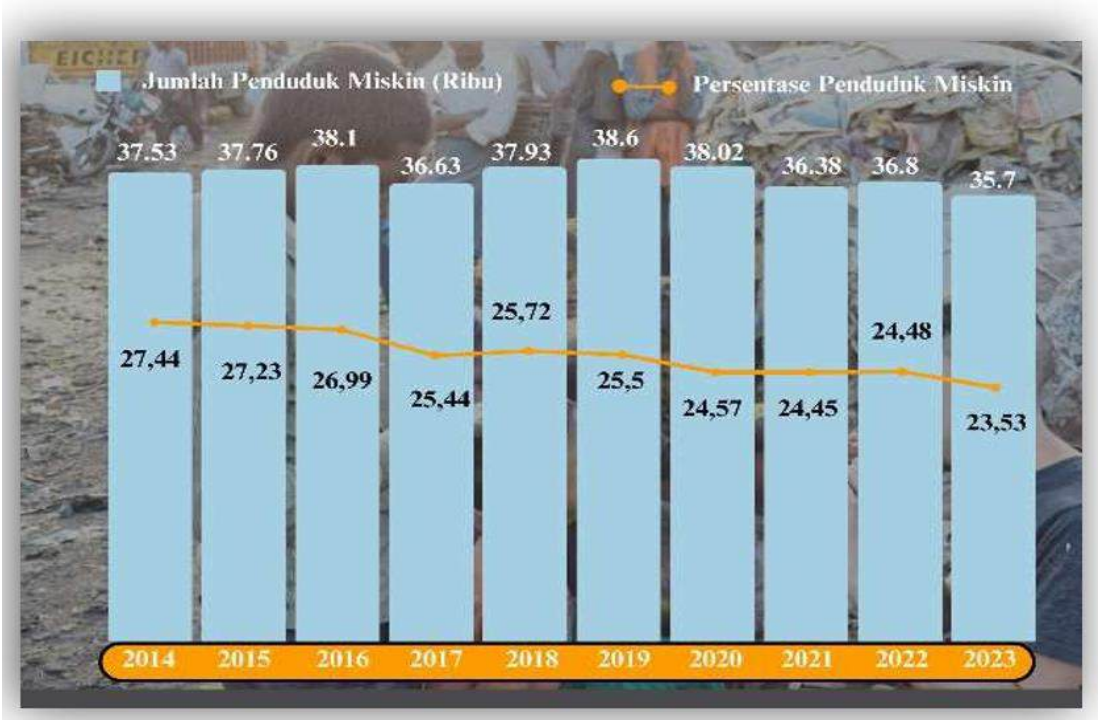

Gambar 3. 7
Persentase Penduduk Miskin Kab. Biak Numfor Tahun 2014-2023
(Sumber: BPS Provinsi Papua Tahun 2024)

Perkembangan tren tingkat kemiskinan dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain garis kemiskinan, persentase penduduk miskin, dan jumlah penduduk miskin. Garis kemiskinan menunjukkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama Maret 2021-Maret 2023, garis kemiskinan di Kabupaten Biak Numfor mengalami peningkatan. Masyarakat dikatakan miskin jika memiliki pengeluaran perkapita di bawah garis kemiskinan. Pada 2021 garis kemiskinan di Kabupaten Biak Numfor sebesar 602.931 rupiah. Garis kemiskinan terus mengalami kenaikan dari waktu ke waktu sesuai harga-harga kebutuhan dasar. Peningkatan garis kemiskinan pada periode Maret 2021 – Maret 2022 meningkat sebesar 24.990 rupiah perkapita per bulan atau sebesar 4,14 persen.

Tabel 3. 7
Garis Kemiskinan Kab. Biak Numfor per Maret 2021-Maret 2023
(Rp/ Kapita/ Bulan)

Tahun	Garis Kemiskinan
2021	602 931
2022	627 921
2023	657 182

(Sumber: BPS Provinsi Papua, data diolah)

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa besarnya garis kemiskinan di Kabupaten Biak Numfor pada 2023 sebesar 657.182 rupiah. Nilai ini menggambarkan besarnya pengeluaran perkapita, Dengan kata lain, penduduk Kabupaten Biak Numfor yang memiliki daya beli kurang dari 657.182 rupiah sebulan termasuk sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan tersebut naik sebesar 4,65 persen bila dibandingkan garis kemiskinan pada 2022. Di mana angka tersebut dapat dibaca adanya inflasi terhadap harga kebutuhan pokok penduduk.

Indikator *Head Count Index* (P_0) merupakan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Pada 2021, persentase penduduk miskin di Kabupaten Biak Numfor besarnya 24,45 dan terus meningkat menjadi 24,48 persen pada 2022. Akan tetapi, pada 2023 persentase penduduk miskin turun sebesar 0,95

persen poin (dari 24,48 persen menjadi 23,53 persen). Secara lengkap, hal ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 8
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kab. Biak Numfor
(Maret 2021-Maret 2023)

Tahun	Persentase Penduduk Miskin
2021	24,45
2022	24,48
2023	23,53

(Sumber: BPS Provinsi Papua, data diolah)

3.1.3.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah, sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. Perkembangan angka IPM, memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada suatu daerah. Perkembangan IPM Kabupaten Biak Numfor tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

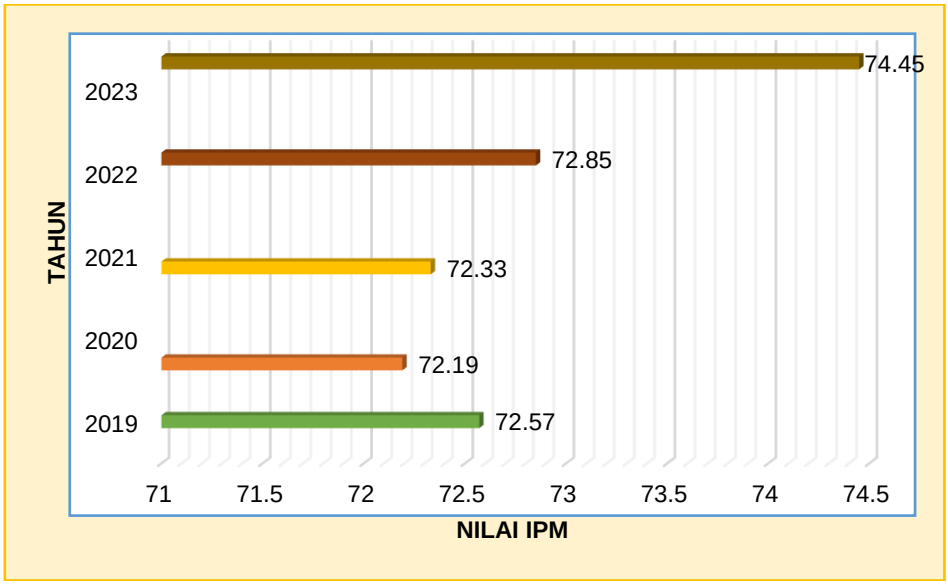

Gambar 3. 8
IPM Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023
(Sumber: Kabupaten Biak Numfor Dalam Angka Tahun 2020-2024, data diolah)

Pada grafik diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan IPM di Kabupaten Biak Numfor pada awal perencanaan jangka menengah di tahun 2019 adalah 72,57, nilai ini menurun pada tahun 2020 menjadi 72,19. Pencapaian angka IPM di tahun 2021 kembali meningkat menjadi 72,33 dan mengalami peningkatan berturut-turut menjadi 72,85 di tahun 2022 dan 74,45 pada tahun 2023. Dengan pencapaian IPM 74,23, maka menurut Konsep Pembangunan Manusia IPM Biak Numfor masih masuk dalam kategori kinerja pembangunan manusia ”tinggi” dengan angka pencapaian IPM antara 70,0 sampai 79,9.

3.1.3.5 Ketenagakerjaan

Data ketenagakerjaan merupakan salah satu informasi penting yang diperlukan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan. Ada dua faktor yang mempengaruhi keadaan ketenagakerjaan, yaitu faktor permintaan dan faktor penawaran. Faktor permintaan dipengaruhi oleh dinamika pembangunan ekonomi, sedangkan faktor penawaran ditentukan oleh perubahan struktur umur penduduk.

Pertumbuhan angkatan kerja yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan tenaga kerja dapat menimbulkan meningkatnya jumah pengangguran. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan masalah ketenagakerjaan. *Pertama*, apakah pertumbuhan penduduk di Kabupaten Biak Numfor melebihi pertumbuhan capital. *Kedua*, apakah profil penduduk di Kabupaten Biak Numfor merupakan penduduk muda. Jika suatu daerah memiliki struktur penduduknya didominasi penduduk muda, maka akan semakin banyak penduduk yang masuk ke lapangan kerja dan perlunya kebijakan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru. *Ketiga*, struktur ekonomi yang cenderung bukan *labour intensive* dan tingkat keterampilan penduduk yang belum memadai membuat usaha penciptaan lapangan kerja baru semakin sulit dan kompleks

Berdasarkan data BPS Tahun 2020-2024 menunjukkan lebih dari separuh penduduk usia kerja di Kabupaten Biak Numfor adalah penduduk bekerja. Anga tahun 2023 menunjukan Angkatan kerja berjumlah 61.436 jiwa sementara Angkatan bukan kerja berada diangka 31.696 jiwa.

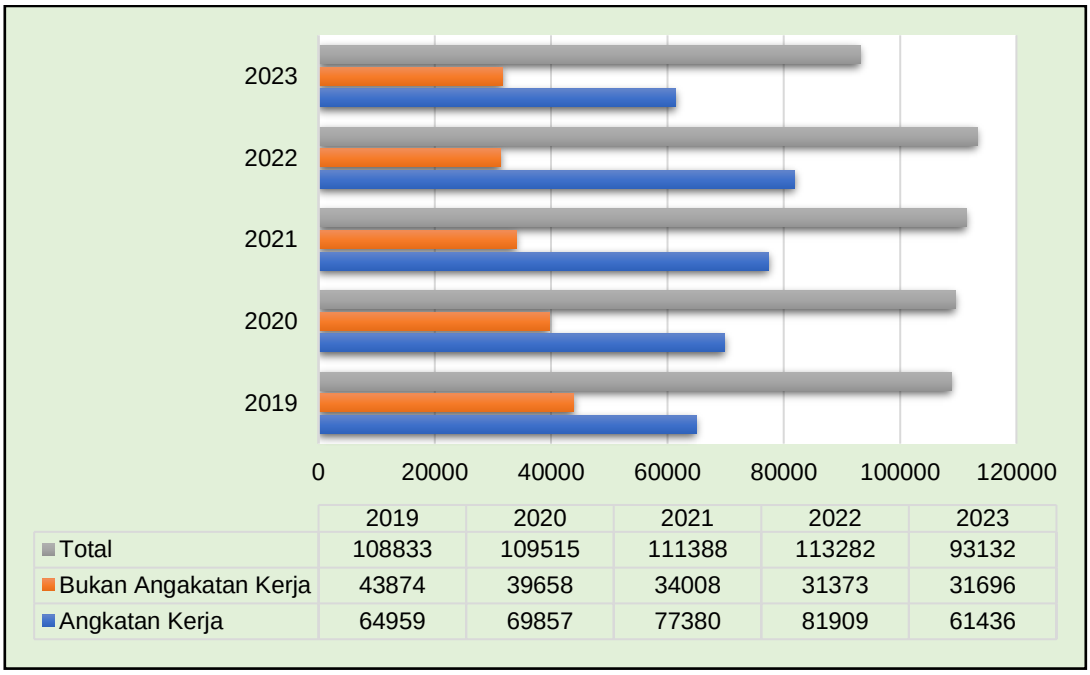

	2019	2020	2021	2022	2023
Total	108833	109515	111388	113282	93132
Bukan Angakatan Kerja	43874	39658	34008	31373	31696
Angkatan Kerja	64959	69857	77380	81909	61436

Gambar 3. 9
Distribusi Tenaga Kerja di Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023
(Sumber: Kabupaten Biak Numfor Dalam Angka Tahun 2020-2024, data diolah)

Seiring dengan perkembangan kondisi, maka kebijakan ekonomi daerah tetap diarahkan dan diupayakan dengan cara-cara: (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2) menekan laju inflasi agar tidak melebihi satu digit, (3) menekan laju pertumbuhan penduduk. Agar pertumbuhan perekonomian daerah berjalan pada jalur yang benar perlu dijaga terciptanya kondisi keuangan yang baik, yaitu dengan mengupayakan terciptanya pelaksanaan pembangunan yang aman secara politis dan layak secara ekonomis.

Kondisi perekonomian global yang lebih kuat diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi nasional sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Biak Numfor. Masih berlanjutnya berbagai proyek infrastruktur pemerintah diharapkan dapat menjaga pertumbuhan investasi yang sedang dalam trend yang positif. Semakin kondusifnya perekonomian juga diharapkan dapat memulihkan optimisme sektor swasta dan turut berkontribusi positif untuk mendorong investasi. Pelaksanaan STC sebagai Event Nasional di Provinsi Papua dan Kabupaten Biak Numfor dipercayakan sebagai tuan rumah juga diperkirakan dapat berkonstribusi positif terhadap menguatnya perekonomian dan sektor jasa.

Berlandaskan terhadap keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, RKPD Provinsi Papua Tahun 2025 serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026, serta mempertimbangkan permasalahan yang akan dihadapi pada tahun 2025. Untuk mencapai target sasaran pembangunan, Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 adalah

1. Pendampingan kepada kelompok nelayan baik nelayan tangkap maupun budidaya
2. Pembangunan destinasi wisata unggulan, wisata alam/Bahari dan budaya
3. Pengembangan komoditi pertanian yang berorientasi pasar dengan mengedepankan komoditas unggulan daerah
4. Pengembangan peternakan lokal dan peternakan anakan
5. Penguatan Kualitas Produksi
6. Peningkatan Promosi dan Pemasaran Produk
7. Pendampingan usaha mikro kecil dan menengah
8. Promosi potensi investasi daerah
9. Mempercepat upaya perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 sebagai pelaksanaan agenda tahun ke dua pelaksanaan RPD 2024-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Resposibility (CSR).*

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri

dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Transfer Terdidi dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antara Daerah ; 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Proyeksi keuangan daerah memberikan gambaran tentang perkiraan pendapatan pemerintah kabupaten Biak Numfor pada tahun 2024, sedang kerangka pendanaan memberikan gambaran atas perkiraan kebutuhan belanja pemerintah kabupaten Biak Numfor pada tahun 2025. Dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memperhatikan dan mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2024 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

1. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;

2. Proyeksi Pendapatan diasumsikan naik atau tetap dari tahun 2024, yaitu kenaikan dari komponen PAD dan Pendapatan Transfer;

3. Pendapatan Transfer berupa Dana perimbangan komponen Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur. Untuk sumbetr dana DAU, DAK dan OTSUS diasumsikan sama dengan tahun lalu atau naik 5% dari tahun sebelumnya (tahun berjalan).

4. Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Biak Numfor, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini;

b. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;

c. Pendayagunaan aset daerah;

d. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya; dan

e. Mengadakan peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Adapun proyeksi pendapatan daerah tahun 2025 Kabupaten Biak Numfor dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 9
Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Kab. Biak Numfor Tahun 2022- 2026

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024 *	Proyeksi/ Target Tahun 2025	Proyeksi/ Target Tahun 2026
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**95,175,553,249.67**	**25,685,408,105.42**	**9,002,048,973.00**	**98,569,370,800.80**	**99,775,553,249.67**
4.1.1	Pajak Daerah	15,153,657,722.00	25,685,408,105.42	5,651,078,337.00	17,352,117,325.43	18,153,657,722.00
4.1.2	Retribusi Daerah	8,088,269,121.00	2,949,747,295.00	722,833,780.00	8,460,443,548.22	8,588,269,121.00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1,887,784,720.00	1,900,532,809.00	2,257,355,643.00	1,962,298,751.53	1,987,784,720.00
4.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	70,045,841,686.67	5,798,808,562.42	370,781,213.00	70,794,511,175.62	71,045,841,686.67
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1,281,910,309,658.00**	**1,266,879,027,218.00**	**317,189,875,089.00**	**1,326,695,774,427.02**	**1,339,910,309,658.00**
4.2.1.1	**Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan**	**939,531,985,515.00**	**1,241,633,869,346.00**	**268,928,555,298.00**	**961,917,464,293.59**	**969,531,985,515.00**
4.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	110,729,139,171.00			114,458,361,069.53	115,729,139,171.00
4.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	530,431,133,683.00			537,913,596,762.57	540,431,133,683.00
4.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	237,881,139,762.00			245,342,403,737.07	247,881,139,762.00
4.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)	60,490,572,899.00			64,203,102,724.41	65,490,572,899.00
	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	**318,924,781,000.00**	**-**	**48,928,319,800.00**	**330,108,952,425.80**	**333,924,781,000.00**

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024 *	Proyeksi/ Target Tahun 2025	Proyeksi/ Target Tahun 2026
4.2.1.3	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	125,528,776,000.00		48,928,319,800.00	129,260,408,087.15	130,528,776,000.00
4.2.1.5	Dana Desa	193,396,005,000.00		-	200,848,544,338.65	203,396,005,000.00
4.2.2	**Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**	**25,453,543,143.00**	**25,245,157,872.00**	**-**	**25,669,357,707.64**	**26,453,543,143.00**
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	25,453,543,143.00	25,245,157,872.00	-	25,669,357,707.64	26,453,543,143.00
4.2.2.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya					
4.2.3	**Bantuan Keuangan**	**-**			**9,000,000,000.00**	**10,000,000,000.00**
4.2.3.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	-			9,000,000,000.00	10,000,000,000.00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**63,408,683,619.00**	**169,393,522,867.01**	**-**	**68,987,213,629.57**	**70,908,683,619.00**
4.3.1	Pendapatan Hibah	39,641,473,516.00			43,335,253,186.29	44,641,473,516.00
4.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-			400,000,000.00	500,000,000.00
4.3.3	Pendapatan Lainnya	23,767,210,103.00			25,251,960,443.28	25,767,210,103.00
4	***PENDAPATAN DAERAH***	***1,440,494,546,526.67***	***1,461,957,958,190.43***	***326,191,924,062.00***	***1,494,252,358,857.39***	***1,510,594,546,526.67***

(Sumber: BPKAD Kab. Biak Numfor; RPD Kab. Biak Numfor Tahun 2024-2026, data diolah)
(*) : Realisasi per Mei 2024

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perencanaan belanja daerah pada Tahun 2025 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

1. Proyeksi Belanja daerah diasumsikan naik sebesar 5,29 persen dari tahun 2024;

2. Penghitungan gaji menggunakan basis data tahun 2024 dan menambah akres 2,5 persen untuk mengakomodir belanja ASN (kenaikan pangkat).

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan diatas dan dikaitkan dengan permasalahan/ isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah masih diarahkan sebagai berikut:

a. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan;

b. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial, diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan, termasuk bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi Papua dalam rangka pembiayaan Mahasiswa Unggul Papua, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

c. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak,pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan DAU dan DBH;

d. Belanja daerah berupa belanja operasi setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat;

e. Belanja daerah berupa belanja operasi urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan,kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung program diutamakan untuk membiayai 12 (dua belas) prioritas pembangunan Tahun 2025;

f. Mendukung program/ kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.

Adapun realiasi belanja APBD dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 10
Realisasi dan Proyeksi/ Target Belanja Daerah Kab. Biak Numfor Tahun 2022-2026

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024 *	Proyeksi/ Target Tahun 2025	Proyeksi/ Target Tahun 2026
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1,010,282,648,594.48**	**1,029,495,177,403.89**	**232,162,606,914.00**	**1,052,798,121,929.56**	**1,067,585,366,923.48**
5.1.1	Belanja Pegawai	373,107,100,365.00	431,843,584,157.01	147,989,200,995.00	377,224,545,799.82	378,607,100,365.00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	578,716,286,270.48	506,665,766,512.88	49,516,720,362.00	615,825,203,403.84	628,716,286,270.48
5.1.3	Belanja Bunga	2,153,281,671.00	2,080,595,223.00	580,685,557.00	1,956,000,000.00	1,956,000,000.00
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-		-	-
5.1.5	Belanja Hibah	48,701,520,288.00	79,095,191,511.00	34,000,000,000.00	49,449,611,578.34	49,701,520,288.00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7,604,460,000.00	9,810,040,000.00	76,000,000.00	8,342,761,147.58	8,604,460,000.00
5.2	**BELANJA MODAL**	**155,650,647,918.00**	**219,484,323,441.00**	**7,035,028,951.00**	**156,691,588,687.33**	**157,050,647,918.00**
5.2.1	Belanja Modal-Tanah	6,313,876,700.00	1,950,000,000.00	5,000,000,000.00	6,238,727,228.84	6,213,876,700.00
5.2.2	Belanja Modal-Peralatan dan Mesin	45,438,527,231.00	65,003,742,758.00	295,502,370.00	45,138,195,897.78	45,038,527,231.00
5.2.3	Belanja Modal-Gedung dan Bangunan	64,201,010,363.00	78,385,346,781.00	1,739,526,581.00	64,575,646,487.13	64,701,010,363.00

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024 *	Proyeksi/ Target Tahun 2025	Proyeksi/ Target Tahun 2026
5.2.4	Belanja Modal-Jalan, Irigasi dan Jaringan	37,240,066,624.00	69,095,292,048.00	-	37,987,576,922.89	38,240,066,624.00
5.2.5	Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya	2,457,167,000.00	2,900,941,854.00	-	2,751,442,159.69	2,857,167,000.00
5.2.6	Belanja Modal-Aset Lainnya		150,000,000.00		150,000,000.00	150,000,000.00
5.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**4,072,013,000.00**	**3,778,098,000.00**	**750,600,000.00**	**3,690,940,651.84**	**3,572,013,000.00**
5.3.1	Belanja Tak Terduga	4,072,013,000.00	3,778,098,000.00	750,600,000.00	3,690,940,651.84	3,572,013,000.00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**236,125,804,240.00**	**229,842,116,000.00**	**15,219,291,250.00**	**236,875,407,904.82**	**237,125,804,240.00**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	236,125,804,240.00	229,842,116,000.00	15,219,291,250.00	236,875,407,904.82	237,125,804,240.00
5	***BELANJA DAERAH***	***1,406,131,113,752.48***	***1,482,599,714,844.89***	***255,167,527,115.00***	***1,450,056,059,173.55***	***1,465,333,832,081.48***

(Sumber: BPKAD Kab. Biak Numfor; RPD Kab. Biak Numfor Tahun 2024-2026, data diolah)
(*) : Realisasi per Mei 2024

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiyaan Daerah

Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan diarahkan yaitu untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo. Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Tahun 2025 antara lain diarahkan untuk:

a. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu;

b. Membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya strategis, misalnya belanja Pemilihan Kepala Daerah (pilkada), dan dana cadangan bencana alam; dan

c. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*).

Adapun realiasi dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Biak Numfor tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 11
Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiyaan Daerah Kab. Biak Numfor Tahun 2022-2026

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024 *	Proyeksi/ Target Tahun 2025	Proyeksi/ Target Tahun 2026
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**51,062,286,225.49**		**-**	**51,806,595,881.99**	**52,062,286,225.49**
6.1.1	Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	16,062,286,225.49		-	16,806,595,881.99	17,062,286,226.49
6.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	35,000,000,000.00		-	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**35,570,000,000.00**		**23,333,333,334.00**	**35,573,745,903.11**	**35,575,000,000.00**
6.2.1	Penyertaan Modal Daerah	570,000,000.00		-	573,745,903.11	575,000,000.00
6.2.5	Pembayaran Pokok Pinjman Dalam Negeri	35,000,000,000.00		23,333,333,334.00	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00
6	***PEMBIAYAAN***	***15,492,286,225.49***	***-***	***(23,333,333,334.00)***	***16,232,849,978.88***	***16,487,286,225.49***

(Sumber: BPKAD Kab. Biak Numfor; RPD Kab. Biak Numfor Tahun 2024-2026, data diolah)
(*) : Realisasi per Mei 2024

3.2.4 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Gambaran kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 12
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2025
1	Pendapatan	1,494,252,358,857.39
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	6,529,045,771.06
	Total Penerimaan	**1,500,781,404,628.45**
	Dikurangi:	
4	Belanja Operasi	528,566,697,000.00
	Belanja Pegawai	*377,224,545,799.82*
	Belanja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*151,342,151,200.18*
5	Pengeluaran Pembiayaan	35,573,745,903.11
Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan		**936,640,961,725.34**

(Sumber: RPD Kab. Biak Numfor Tahun 2024-2026, data diolah)

3.2.5 Kerangka Kebijakan dan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Papua

Gambaran pengalokasian dana Otonomi Khusus Papua di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2025 digambarkan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 13

Kerangka Pengalokasian Sumber Dana OTSUS Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025

No	OPD Pengelola	Pagu															Jumlah Per OPD	Persentase Total OPD
		PENERIMAAN BERBSIS KINERJA (SG 1.25%)				PENERIMAAN UMUM (BG 1%)							DTI (Dana Tambahan Infrastruktur					
		Dana Penerimaan Berbasis Kinerja - Bidang Pendidikan	Dana Penerimaan Berbasis Kinerja - Bidang Kesehatan	Dana Penerimaan Berbasis Kinerja - Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	%	Dana Penerimaan Umum - Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pelaksanaan Pelayanan Publik	%	Dana Penerimaan Umum - Peningkatan Kesejahteraan OAP dan Penguatan Lembaga Adat	%	Dana Penerimaan Umum - Kebutuhan dan Prioritas Daerah	%	Persentase % Keseluruhan	DTI (Infrastruktur Perhubungan)	%	DTI (Air Bersih)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18
A	**BIDANG PENDIDIKAN**	**27,669,800,000**			**36.53**							-						
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	26,819,800,000			**35.41**												26,819,800,000	24.10
	Urusan Kebudayaan				-												-	
2	SKB (Sanggar Kegiatan Belajar)	850,000,000			**1.12**												850,000,000	0.53
B	**BIDANG KESEHATAN**		**21,216,525,000**		**28.01**													
3	Dinas Kesehatan		8,216,525,000		**10.85**												8,216,525,000	5.11
4	RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah)		13,000,000,000		**17.16**							-					13,000,000,000	8.08
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											-	8,806,250,000	**60.92**	1,000,000,000	**6.92**	9,806,250,000	6.10
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman					1,641,200,000				2,100,000,000		2.32	-	-	-	2.97	3,741,200,000	4.35
7	Dinas Sosial							1,700,000,000				2.41					1,700,000,000	1.74
8	Usulan Disnaker							1,000,000,000				1.42					1,000,000,000	0.12
9	Loka Latihan Kerja dan UKM							1,000,000,000				1.42					1,000,000,000	0.62
10	Dinas Pembaerdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana					2,100,000,000						2.97					2,100,000,000	1.37
11	Dinas Catatan Sipil									2,500,000,000		3.54					2,500,000,000	0.93
12	BPMK							1,150,000,000				1.63					1,150,000,000	0.44
13	Dinas Perhubungan					-				4,050,000,000		5.73	4,650,000,000	**32.17**			8,700,000,000	4.34
14	Dinas Informasi dan Komunikasi									750,000,000		1.06					750,000,000	0.47
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)									3,000,000,000		4.25					3,000,000,000	1.31
16	Inspektorat									1,500,000,000		2.12					1,500,000,000	0.93
17	Bagian Kesejahteraan Rakyat (SETDA)									29,479,408,000		41.71					29,479,408,000	12.43
18	Bagian Arsip dan									500,000,000		0.71					500,000,000	0.31

No	OPD Pengelola	Pagu																Jumlah Per OPD	Persentase Total OPD
		PENERIMAAN BERBSIS KINERJA (SG 1.25%)				PENERIMAAN UMUM (BG 1%)							DTI (Dana Tambahan Infrastruktur						
		Dana Penerimaan Berbasis Kinerja - Bidang Pendidikan	Dana Penerimaan Berbasis Kinerja - Bidang Kesehatan	Dana Penerimaan Berbasis Kinerja - Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	%	Dana Penerimaan Umum - Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pelaksanaan Pelayanan Publik	%	Dana Penerimaan Umum - Peningkatan Kesejahteraan OAP dan Penguatan Lembaga Adat	%	Dana Penerimaan Umum - Kebutuhan dan Prioritas Daerah	%	Persentase % Keseluruhan	DTI (Infrastruktur Perhubungan)	%	DTI (Air Bersih)	%		
	perpustakaan daerah (SETDA)																		
19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)									1,000,000,000		1.42					1,000,000,000	0.16
20	Brida									200,000,000							200,000,000	0.16
C	**BIDANG EKONOMI KERAKYATAN**			**26,857,883,000**	**35.46**					**-**								
20	Dinas Koperasi dan UKM			14,857,883,000	**19.62**					-		-					14,857,883,000	11.62
21	Dinas Perikanan			2,000,000,000	**2.64**												2,000,000,000	1.24
22	Dinas Pariwisata							11,000,000,000				15.57					11,000,000,000	4.04
23	Dinas Pertanian Tanaman Pangan			9,750,000,000	**12.87**							-					9,750,000,000	6.06
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			250,000,000	**0.33**			3,650,000,000		350,000,000		5.16	-	0			4,250,000,000	0.78
25	KESBANGPOL					500,000,000						0.71					500,000,000	1.86
26	Pemuda dan Olahraga					1,500,000,000						2.12					1,500,000,000	0.95
	JUMLAH PER JENIS DAN BIDANG	**27,669,800,000**	**21,216,525,000**	**26,857,883,000**	**100.00**	**5,741,200,000**	**8.12**	**19,500,000,000**	**27.59**	**45,429,408,000**	**64.28**	**100.00**	**13,456,250,000**	**93.58**	**1,000,000,000**	**9.89**	**160,871,066,000**	**100.00**
	TOTAL PER JENIS PENERIMAAN	**75,744,208,000**				**70,670,608,000**							**14,456,250,000**					
	TKD 2025 OTSUS	**75,744,208,000**			**47.08**	**70,670,608,000**						**43.93**	**14,456,250,000**			**8.99**		
	SELISIH PAGU PENYESUAIAN	-				-							-					
	TOTAL PAGU USULAN DAERAH 2025	**160,871,066,000**																
	TOTAL PAGU OTSUS 2025	**160,871,066,000**																

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

"Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dan Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah, terdiri dari program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan prioritas pembangunan lainnya sebagai penjabaran dari RKPD Kabupaten Biak Numfor

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNGAN DAERAH

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD tahun 2025 dirumuskan sebagai dokumen operasional tahunan dari penjabaran RPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026 dalam rangka mencapai target dan sasaran penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Selain itu dokumen ini juga mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dalam RKP, Rancangan RKPD Provinsi Papua tahun 2025. Penyusunan Bab ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Substansi dokumen RKPD tahun 2025 mendasarkan dan memperhatikan:

1. Tema RKP 2025 dan 8 sasaran Prioritas;
2. Sasaran pokok arah kebijakan yang tertuang didalam RPD 2024-2026;
3. Konsistensi antara kebijakan pusat dan Provinsi Papua dan Kabupaten Biak Numfor sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan nasional maupun provinsi;
4. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2025.

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2025. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Biak Numfor tahun 2025 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Tujuan pembangunan daerah pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945. Esensi dasar inilah yang dijadikan landasan dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah.

Strategi Pembangunan yang digariskan sebagaimna Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca, sehingga target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada.

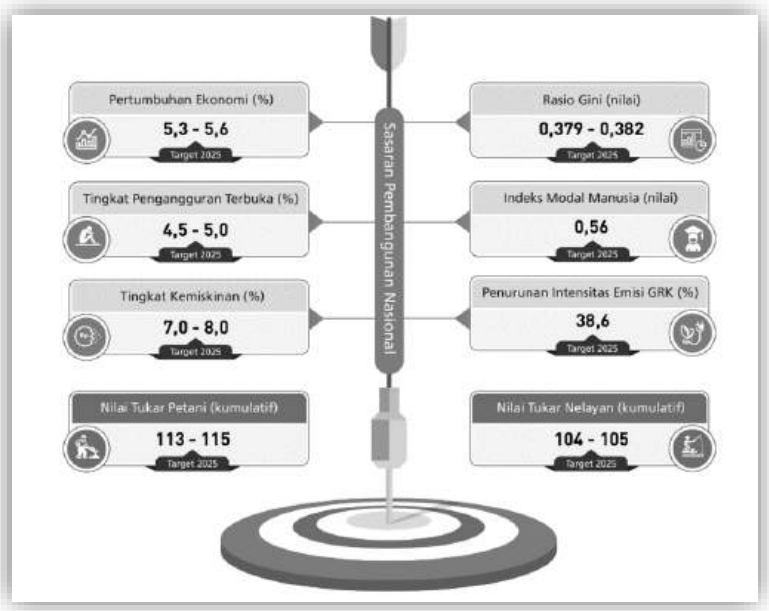

Gambar 4. 1
Sasaran Pembangunan Nasional

Selanjutnya penyusunan RKPD Tahun 2025 akan di sinergikan dengan delapan Prioritas Nasional sebagai kesatuan perencanaan sebagaiman Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SP2N).

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Papua

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan melalui pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dapat dicapai dan rasional, untuk dapat dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan tahapan perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai pedoman utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Tujuan dan Sasaran dalam RPD Provinsi Papua juga disusun dengan memperhatikan pokok masalah dan permasalahan, serta isu-isu strategis.

Adapun arsitektur tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua tahun 2024-2026 mempunyai 4 tujuan dan 22 sasaran, yaitu:

1. **Tujuan 1: Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan, Berkelanjutan, Dan Mandiri Berbasis Kampung,** dengan sasaran:

    a. Pembangunan kampung mandiri ekonomi;
    b. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kemandirian pangan;
    c. Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan;
    d. Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
    e. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim;
    f. Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan;

g. Membangun struktur perekonomian yang kokoh pada penciptaan nilai tambah komoditas unggulan yang optimal dan berkelanjutan berbasis UKM dan Koperasi;
h. Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan;
i. Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah.

2. **Tujuan 2: Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Pengembangan Wilayah Serta Akses pada Layanan Dasar dan Pasar,** dengan sasaran:

a. Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten;
b. Meningkatnya ketersediaan air baku untuk menunjang kebutuhan dasar maupun aktivitas masyarakat serta sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah;
c. Peningkatan aksesbilitas transportasi antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah;
d. Menyiapkan papua gerbang eksport;
e. Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman;
f. Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan;
g. Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah.

3. **Tujuan 3: Terwujudnya Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing,** dengan sasaran:

a. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
b. Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat;
c. Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat.

4. **Tujuan 4: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,** dengan sasaran:

a. Meningkatnya akuntabilitas birokrasi otonomi khusus Papua;
b. Meningkatnya transparansi penggunaan dana otonomi khusus Papua;
c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Biak Numfor

Tujuan dan Sasaran RKPD adalah tahapan perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas pembangunan Kabupaten Biak Numfor jangka pendek yang telah tersusun diterjemahkan dalam bentuk program unggulan dan prioritas daerah yang akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2025. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Tema pembangunan di tahun 2025 yang termuat di dalam RPD memberi gambaran rancangan pembangunan sebagai konsep dan alur pikir yang di sinergikan dengan Tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tercantum pada dokumen dokumen RKP yang telah disusun. Selanjutnya tujuan merupakan suatu kondisi ideal yang ingin dicapai pada akhir periode dimana upaya pencapaiannya dilakukan dengan memenuhi sasaran-sasaran yang telah ditentukan.

Guna tercapainya sasaran pembangunan yang efektif dan efisien, tentunya harus didukung oleh strategi pembangunan yang ideal dan tepat sasaran. Hal tersebut nantinya akan menjadi acuan penyusunan program unggulan dan prioritas daerah di tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4. 1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target 2025
1	*2*	*3*	*4*
1	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**73.39**
1.1	Meningkatnya Akesesibilitas Dan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	10.86
		Harapan Lama Sekolah	14.37
1.2	Meningkatmya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	68.8
1.3		Persentase Pemuda Terampil	74

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target 2025
1	*2*	*3*	*4*
	Meningkatnya Partisipasi Dan Daya Saing Pemuda Dan Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase Prasarana Olah Raga Berastandar Nasional dan Internasional	100
		Persentase Benda, Situs, Kwasan yang Dilestеariakn	80
		Tingkat Prtisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	74.98
		Indeks Pembangunan Gender	90.52
1.4	Berkurangnya Penduduk Miskin Rawan Sosial Dan Pengendalian Penduduk	Persentase Penduduk Miskin	23.87
		Gini Rasio	0.366
		Rasio Penduduk Ber KTP	85.53
		Total Fertility Rate	20
1.5	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Dan Partisipasi Politik Masyarakat	Indeks Demokrasi	57.45
2	**Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berdaya Saing**	**Pertumbuhan Ekonomi**	**5.04**
2.1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	15.59
		PDRB Perkapita	**43.538.630**
2.2	Pengembangan Destinasi Pariwisata Dan Promosi Wisata	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	6
2.3	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dan Ekspansi Produksi Lokal	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	4.57
2.4	Menguatnya Industri dan Perdagangan yang Berdaya Saing	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	4.41
		Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	18.41
		Laju Inflasi	0.79
		Persentase pertumbuhan UMKM	25
3	**Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas**	**Indeks Infrastruktur Wilayah**	**2.62**
3.1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar	Proporsi Penduduk/ Rumah Tangga Dengan Akses Terhadap Pelayanan Infrastruktur Dasar	70
3.2	Menigkatnya Kualitas Lingkungan Sehat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	79.76
3.3	Meningkatnya Penyelenggaraan Tranportasi	Cakupan Layanan Transportasi	65

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target 2025
1	*2*	*3*	*4*
3.4	Meningkatnya Kualitas Layanan Jaringan Telkomunikasi Dan Informatika	Cakupan Layanan Telekomunikasi	90
3.5	Meningkatnya Rasa Aman Dan Nyaman Masyarakat	Indeks Resiko Bencana	Rendah
4	**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Akuntabel, Transparan Dan Melayani**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**58.26**
4.1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Dan Melayani	Indeks Desa Membangun	0.5969
		Nilai AKIP	69,43
		Jumlah PERDA yang dihasilkan	7
		Opini BPK	WTP

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*, holistic-tematik, integratif, dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasioanl adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi Papua Tahun 2025. Secara umum prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Papua dan Kabupaten Biak Numfor.

4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat 3 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk

kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian seluruh aspek tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menciptakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu. Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran prioritas dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai dengan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan Tema RKP 2025 "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dan Untuk membangun dasar yang kokoh guna mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 dan mencapai target pembangunan tahun 2025, prioritas nasional yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut terbagi menjadi 8 prioritas nasional yaitu:

Prioritas 1	:	Memeperkokoh Idiologi Pancasila, dan hak Asasi Manusia
Prioritas 2	:	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
Prioritas 3	:	Melanjutkan Pengembanagn Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Indiustri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
Prioritas 4	:	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Minelial dan Generasi Z) dan Panyandang Disabilitas.
Prioritas 5	:	Malanjutkan Hilirisasi dan Mengambangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
Prioritas 6	:	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan
Prioritas 7	:	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, Serta Mempekuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan

Prioritas 8	:	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Sasaran pembangunan pada Rancangan RKP Tahun 2025 yang ingin dicapai yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi 5,3 – 5,6%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,5 – 5,0%
3. Tingkat Kemiskinan 7,0 – 8,0%
4. Rasio Gini 0,379 – 0,382
5. Indeks Modal Manusia 0,56
6. Penurunan Intensitas Emisi GRK 38,6
7. Nilai Tukar Petani 113 – 115
8. Nilai Tukar Nelayan 104 – 105

4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2025

Arah kebijakan utama pembangunan wilayah Papua difokuskan pada akselerasi pembangunan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Pengembangan ekonomi wilayah adat secara umum disesuaikan berdasarkan potensi pengembangan komoditas lokal, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta prospek pasar. Sebagai perwujudan pengembangan keterkaitan ekonomi hulu dan hilir di Papua terdapat arah pengembangan klaster (cluster) pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata di Papua. Penentuan lokasi klaster telah mempertimbangkan potensi komoditas lokal, kedudukan dan fungsi lokasi dalam sistem perkotaan, kondisi infrastruktur pendukung, arahan KLHS, serta penetapan fungsi lindung dan budidaya dalam RTRWP.

Prioritas Pembangunan daerah Provinsi Papua tahun 2025 merupakan satu proses konsolidasi beberapa arahan yang telah diberikan oleh beberapa dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah lainnya, berpedoman pada RPD

Tahun 2024-2026 serta pemetaan terhadap permasalahan serta isu strategis yang mengemuka di Papua. Selain itu, uraian prioritas pembangunan daerah tahun 2025 juga sangat terkait dengan tema pembangunan daerah yang disusung pada tahun 2025 seiring dengan adanya faktorfaktor yang menjadi pertimbangan utama dalam menjalankan agenda pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Papua tahun 2025.

Berdasarkan Tema RKPD Provinsi Papua Tahun 2025 yang telah dirumuskan maka dirumuskan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Papua tahun 2023 yaitu: a. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM b. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan c. Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah d. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban e. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025

Berpedoman pada dokumen perencanaan nasional dan Provinsi Papua, serta RPD Kabupaten Biak Numfor tahun 2024-2026, maka prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor pada Tahun 2024, dilaksanakan dengan tema: **"Memperkuat Daya Saing Daerah Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Demi Terwujudnya Biak Numfor yang Mandiri dan Sejahtera"** dengan prioritas:

1) **Penguatan Mutu SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing**
   Pembangunan sumber daya manusia yang unggul kompetitif, generative, inovatif mampu bersaing perprestasi dan kreatif yang diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melingkupi cakupan kesehatan semesta, peningkatan layanan dan pemerataan pendidikan yang berkualitas, penguatan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda serta peningkatan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia.
2) **Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Skala Kecil dan Menengah Melalui Penguatan Potensial Sumber Daya Alam**
   Pemberdayaan dan penguatan sumber daya usaha skala kecil dan menengah yang mandiri melalui pengelolan sumber daya alam untuk

pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok wilayah diarahkan pada penguatan sektor usaha perikanan, usaha pariwisata, usaha pertanian/ pertenakan.

3) **Percepatan, Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Strategis, Pembangunan Keparawisataan dan Perikanan Melalui Iven Wisata Daerah dan Nasional**

Memperkuat Akses terhadap layanan infrastruktur yang berkualitas, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur ekonomi, untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk melangkah ke arah masa depan yang lebih makmur dan berkelanjutan, diarahkan pada penguatan transportasi udara darat dan laut pada kawasan potensial dan strategis, meningkatkan akses air minum, sarana pengendali banjir, abrasi, bencana lainnya serta lingkungan dan perumahan layak huni.

4) **Penguatan Sumber Daya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel menuju *e-government***

Tata kelola pemerintahan yang dimaksud adalah tata kelola pemerintahan yang efektif, partisipatif, adaptif, responsif, kolaboratif lintas sektor, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (*internet-worked government*) serta dapat mewujudkan pelayanan publik yang akuntabel, transparan, dan melayani diarahkan pada birokrasi pemerintahan yang profesionalisme cetat tanggap dalam meberikan pelayanan.

Dari keempat program prioritas Kabupaten Biak Numfor tahun 2025, dapat disajikan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4. 2
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kab. Biak Numfor Tahun 2025

No	Prioritas Tahun 2025	Sasaran	Target
1	Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kerakyatan Skala Kecil dan Menengah Melalui	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dan Ekspansi Produksi Lokal	4,57

No	Prioritas Tahun 2025	Sasaran	Target
	Penguatan Potensial Sumber Daya Alam	Menguatnya Industri dan Perdagangan yang Berdaya Saing	4,41
2	Peningkatan Mutu SDM Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akesesibilitas Dan Mutu Penyelenggaraan Pendidik	14,37
		Meningkatmya Derajat Kesehatan Masyarakat	68,8
		Meningkatnya Partisipasi Dan Daya Saing Pemuda Dan Perempuan Dalam Pembangunan	100
		Berkurangnya Penduduk Miskin Rawan Sosial Dan Pengendalian Penduduk	23,87
		Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Dan Partisipasi Politik Masyarakat	57,45
3	Percepatan, Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Strategis, Pembangunan Kepariwisataan dan Perikanan Menuju Iven Wisata Daerah dan Nasional	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar	70
		Menigkatnya Kualitas Lingkungan Sehat	79,76
		Meningkatnya Penyelenggaraan Tranportasi	65
		Meningkatnya Kualitas Layanan Jaringan Telkomunikasi Dan Informatika	90
		Meningkatnya Rasa Aman Dan Nyaman Masyaraka	Rendah
		Meningkatnya Produksi Perikanan	15,59
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Dan Promosi Wisata	6
4	Pemantapan Sumber Daya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel Menuju *e-goverment*	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Dan Melayani	WTP

Selanjutnya akan disajikan persandingan prioritas Kabupaten Biak Numfor dengan prioritas nasional, dan Provinsi Papua dengan menyesuaiakan perkembangan kondisi yang ada. Berikut tabel persandingan prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Papua dan Kabupaten Biak Numfor, disajikan pada tabel dibawah ini. Sedangkan jika disandingkan dengan tema RKP Nasional, Provinsi dan Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 3
Keterkaiatan Tema dan Prioritan Pembangunan Nasional, Provinsi Papua, dan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025

Tema/ Prioritas Pembangunan		
Nasional	**Provinsi**	**Kabupaten**
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkarakter Berbasis Ekonomi Inklusif sebagai Modal Dasar Transformasi Pembangunan Papua	Meperkuat Daya Saing Daerah Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Demi Terwujudnya Biak Numfor Yang Mandiri dan Sejahtera
Prioritas Pembangunan		
1. Memeperkokoh Idiologi Pancasila, dan hak Asasi Manusia 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru 3. Melanjutkan Pengembanagn Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Indiustri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi. 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga Kesetaraan Gender, Serta	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	1. Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Skala Kecil dan Menengah Melalui Penguatan Potensial Sumber Daya Alam 2. Penguatan Mutu SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing 3. Percepatan, Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Strategis, Pembangunan Keparawisataan dan Perikanan Melalui Iven wisata daerah dan Nasional 4. Penguatan Sumber Daya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel menuju egovernment

Tema/ Prioritas Pembangunan		
Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Minelial dan Generasi Z) dan Panyandang Disabilitas. 5. Malanjutkan Hilirisasi dan Mengambangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, Serta Mempekuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur		

Tabel 4. 4
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten	Fokus Kebijakan	Program	Perangkat Daerah
1. Memeprkokoh Idiologi Pancasila, dan hak Asasi Manusia	4. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban	4. Penguatan Sumber Daya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel menuju e government	Menciptakan suasana aman, nyaman, rukun dan damai	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Kesbang Linmas
			Penguatan peran penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Kesbang Linmas
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	2. Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan	1. Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Skala Kecil dan Menengah Melalui Penguatan Potensial Sumber Daya Alam	Pendampingan budidaya perikanan	Program pengelolaan perikanan budidaya	Perikanan
			Pendampingan kelompok nelayan	Program pengelolaan perikanan budidaya	Perikanan
3. Melanjutkan Pengembanagn Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong	2. Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan	3. Percepatan, Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Strategis, Pembangunan Keparawisataan dan Perikanan Melalui Iven	Pengawasan dan perlindungan sumber-sumber mata air (area perkotaan)	Program perencanaan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten	Fokus Kebijakan	Program	Perangkat Daerah
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Indiustri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.		wisata daerah dan Nasional			
	3. Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah		Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana di kawasan permukiman kumuh	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Kumuh
			Peningkatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh	Program pengembangan perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Kumuh
			Pemeliharaan rutin jalan/berkala untuk mencapai kondisi kemantapan jalan	Program penyelenggaraan jalan	Dinas PUPR
			Pembangunan jalan strategis Kabupaten	Program penyelenggaraan jalan	Dinas PUPR
			Pelatihan dan pendampingan kewirausahaan	Program pengembangan umkm	Dinak Koparesi dan UKM
			Pendampingan usaha mikro kecil dan menengah	Program pengembangan umkm	Dinak Koparesi dan UKM
			Pembinaan Kelompok Sadar Wisata	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Pariwisata
			Pembangunan destinasi wisata unggulan	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Dinas Pariwisata
			Pembangunan dan peningkatan	Program pengelolaan	Dinas PUPR

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten	Fokus Kebijakan	Program	Perangkat Daerah
			jaringan air minum	dan pengembangan sistem penyediaan air minum	
			Penyelenggaraan Event Nasional (Sail Teluk Cenderawasih)	Program pemasaran pariwisata	Dinas Pariwisata
			Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Kesehatan sesuai standar	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Minelial dan Generasi Z) dan Panyandang Disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	2. Penguatan Mutu SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM Aparat Kampung	Program pemberdayaan masyarakat dan kampung papua	DPMK
			Meningkatkan kualitas website pemda	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	KOMINFO
			Meningkatkan pelayanan pemberdayaan perempuan	Program perlindungan perempuan	DP3KB
			Peningkatan status LLK menjadi BLK	Program pelatihan kerja dan	LLK-UKM

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten	Fokus Kebijakan	Program	Perangkat Daerah
				produktivitas tenaga kerja	
			Revitalisasi LLK Biak	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	LLK-UKM
			Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemuda, olahraga, seni dan budaya	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Peningkatan pembinaan, pemberdayaan, penggalian potensi pemuda dan olahraga	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Peningkatan sinergitas lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Kesehatan
			Penyediaan tenaga kontrak guru	Program pengelolaan pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Program pengelolaan pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyediaan Kartu Biak Pintar	Program pengelolaan pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Peningkatan kompetensi guru dan siswa (metode gasing)	Program pengelolaan pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Malanjutkan Hilirisasi dan	2. Pertumbuha	1. Pengembangan Sumber	Penguatan kelompok	Program pemberdayaa	DPMK

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten	Fokus Kebijakan	Program	Perangkat Daerah
Mengambangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	n Ekonomi Yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan	Daya Ekonomi Skala Kecil dan Menengah Melalui Penguatan Potensial Sumber Daya Alam	ekonomi masyarakat dan pemberdayaan PKK;	n lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan	1. Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Skala Kecil dan Menengah Melalui Penguatan Potensial Sumber Daya Alam	Pengendalian harga kebutuhan pokok	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Perindag
			Pengawasan peredaran barang kebutuhan pokok masnyarakat	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Perindag
			Pengembangan peternakan lokal dan peternakan anakan	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Pengembangan komoditi pertanian yang berorientasi pasar	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Mempercepat upaya perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial	Program pemberdayaan sosial	Dinas Soail
			Fasilitasi bantuan sosial	Program perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Soail
			Penyediaan jaminan kesehatan Kartu	Program pemenuhan upaya	Dinas Kesehatan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten	Fokus Kebijakan	Program	Perangkat Daerah
			Biak Sehat dan keberlanjutan UHC	kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	
			Penguatan kelembagaan BUMDES/BUMKAM;	Program pemberdayaan masyarakat dan kampung papua	DPMK
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, Serta Mempekuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	4. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban	4. Penguatan Sumber Daya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel menuju e[1]government	Kolaborasi lintas sektor dalam rangka pemantauan dan pengawasan bahan makanan berbahaya dan obat	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Perindag
	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		Pengawasan peredaran barang kebutuhan pokok masnyarakat	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Perindag
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	4. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban	4. Penguatan Sumber Daya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel menuju e[1]government	Peningkatan upaya mitigasi, pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat	Program penanggulangan bencana	BPBD
	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Peningkatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	Program penataan bangunan gedung	PUPR
			Penertiban dan penataan	Program penataan	PUPR

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten	Fokus Kebijakan	Program	Perangkat Daerah
			bangunan gedung	bangunan gedung	
			Menciptakan suasana aman, nyaman, rukun dan damai	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Kesbang Linmas
			Pemantapan Tribina Keluarga	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	Kesbang Linmas

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

"Mengemukakan secara eksplisit rencana program prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAN

5.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah

RKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 merupakan dokumen rencana tahunan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan menengah daerah, arah kebijakan dalam RPD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Rencana Kerja Tahunan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi. dunia usaha. komunitas. pemerintahan. dan masyarakat. Berikut Pagu Indikatif Perangkat Daerah dalam RKPD.

Tabel 5. 1
Rekapitulasi Anggaran Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kab. Biak Numfor Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	380.185.529.297,00
2	Sanggar Kegiatan Belajar	2.084.393.316,00
3	Dinas Kesehatan	130.591.324.545,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	133.408.862.716,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	75.553.490.500,00
6	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman	18.073.138.300,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	8.755.730.938,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.059.615.000,00
9	Dinas Sosial	6.809.210.600,00
10	Dinas Tenaga Kerja	4.389.666.500,00
11	Lokal Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah	2.895.233.400,00

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	15.145.432.860,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	20.971.533.041,00
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.066.465.080,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	8.426.967.406,00
16	Dinas Perhubungan	27.629.266.500,00
17	Dinas Komunikasi Dan Informatika	6.883.146.000,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	18.056.654.000,00
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.633.262.973,00
20	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	7.487.660.360,00
21	Dinas Perikanan	19.038.870.000,00
22	Dinas Pariwisata	28.287.030.455,00
23	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	27.568.787.847,00
24	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	16.624.239.500,00
25	Sekretariat Daerah	84.918.910.232,00
26	Sekretariat Dewan	56.136.652.482,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21.390.019.000,00
28	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	290.216.287.422,00
29	Badan Pendapatan Daerah	8.927.041.472,00
30	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.911.064.432,00
31	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	860.000.000,00
32	Inspektorat	9.236.441.757,00
33	Distrik Biak Kota	12.170.000.000,00
34	Distrik Samofa	10.876.125.000,00
35	Distrik Yendidori	3.234.954.968,00
36	Distrik Biak Timur	2.948.610.000,00
37	Distrik Padaido	2.068.849.750,00
38	Distrik Biak Utara	2.508.755.000,00
39	Distrik Warsa	2.132.527.150,00

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
40	Distrik Biak Barat	2.352.862.000,00
41	Distrik Numfor Barat	1.946.193.500,00
42	Distrik Numfor Timor	1.743.887.500,00
43	Distrik Bondifuar	1.734.008.500,00
44	Distrik Yawosi	2.035.824.320,00
45	Distrik Andei	2.227.395.000,00
46	Distrik Swandiwe	2.052.874.000,00
47	Distrik Bruyadori	1.596.386.000,00
48	Distrik Orkeri	1.782.971.400,00
49	Distrik Poiru	1.648.162.500,00
50	Distrik Aimando	1.873.260.000,00
51	Distrik Oridek	2.830.149.500,00
52	Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat	5.308.190.076,00
Jumlah		**1.517.293.914.095,00**

Pagu Anggaran berdasarkan Perangkat tersebut kemudian dijabarkan kedalam Rencana Program. Kegiatan. Sub Kegiatan. dan Kerangka Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana Nomenklatur Pada Perarturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-588 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagaimana lampiran.

5.2 Penganggaran Dana Otonomi Khusus

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ditandatangani Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Juli 2021, merupakan upaya pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan

pembangunan di wilayah Papua, untuk itu perlu dilakukan upaya untuk melanjutkan dan mengoptimalkan pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua secara akuntabel, efisien, efektif, transparan,dan tepat sasaran, serta untuk melakukan penguatan penataan daerah provinsi di wilayah Papua sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi masyarakat Papua.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, maka kebijakan pengalokasian dana otonomi khusus telah dirubah dimana pengalokasian diatur langsung oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sehingga semua proses penyusunan usulan program dan kegiatan, realisasi anggaran sampai dengan laporan disampaikan secara langsung ke DJPK. Selanjutnya pengalokasian dana Otsus Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut.

Tabel 5. 2
Alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Kab. Biak Numfor Tahun 2025

No	Bidang	OPD	Pagu (Rp.)
1	Spesific Grant (1,25%)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	26.819.800.000
		SKB	850.000.000
		Dinas Kesehatan	8.216.525.000
		Rumah Sakit Umum Daerah	13.000.000.000
		Dinas Koperasi dan UKM	14.857.883.000
		Dinas Perikanan	2.000.000.000
		Dinas Pertanian Ketahanan Pangan	9.750.000.000
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	250.000.000
		Jumlah Spesific Grant	***75.744.208.000***
2	Block Grant (1%)	Dinas Perumahan dan Permukiman	3.741.200.000
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.806.250.000
		Dinas Perhubungan	2.750.000.000
		Dinas Sosial	1.700.000.000
		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.500.000.000
		Dinas Tenaga Kerja	1.000.000.000
		Loka Latihan Kerja dan UKM	1.000.000.000
		DP3AKB	2.100.000.000
		Dinas Pariwisata	11.000.000.000

No	Bidang	OPD	Pagu (Rp.)
		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.000.000.000
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	1.550.000.000
		Badan Kesbangpol	500.000.000
		Dinas Pemuda dan Olah Raga	1.500.000.000
		Inspektorat	1.500.000.000
		BAPPEDA	2.100.000.000
		Bagian Kesejahteraan Rakyat (SETDA)	30.079.408.000
		Bagian Arsip dan Perpustakaan Daerah (SETDA)	500.000.000
		Dinas Infokom	750.000.000
		BPKAD	250.000.000
		BRIDA	200.000.000
		Jumlah Block Grant	***70.670.608.000***
3	Dana Tambahan Infrastruktur (DTI)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**14.456.250.000**
		Dinas Perhubungan	8.700.000.000
		Total Infrastruktur (DTI)	9.806.250.000
		Jumlah DTI	***32.662.500.000***
Total Usulan			**160.871.066.000**

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

"Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir perencanaan."

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

RKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 sebagai perencanaan tahunan strategis merumuskan indikator kinerja daerah sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun kedua RPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026. Indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran serta program prioritas.

Tabel 6. 1
Indikator Makro Pembangunan/ Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,3 - 5,6
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,5 - 5,0
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,0 - 8,0
4	Nilai Tukar Petani	Kumulatif	113 - 115
5	Rasio Gini	Nilai	0,379 - 0,382
6	Indeks Modal Manusia	Nilai	0,56
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	38,6
8	Nilai Tukar Nelayan	Kumulatif	104 - 105

(Sumber: Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025)

Dalam konteks pencapaian program maka indikator kinerja masing-masing program dapat dipisahkan antara *lagging indicators* dan *leading indicators. Lagging indicators* adalah tolak ukur kinerja sebagai akibat atau hasil dari serangkaian tindakan lain. Adapun *leading indicators* adalah kinerja yang memicu tercapainya hasil. Suatu indikator di perspektif paling atas adalah hasil *(outcome measures)* bagi indikator kinerja dari perspektif yang ada dibawahnya *(performance drivers).* Adapun ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Biak Numfor, sebagai berikut.

Tabel 6. 2
Penetapan Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator Sasaran	Satuan Indikator	Kinerja Awal Perencanaan Tahun 2022	Target Tahun 2025	Kinerja Akhir Periode RPD (2026)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,85	73,39	73,57
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10.53	10,86	10,97
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,21	14,43	14,43
4	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,5	68,8	68,9
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	69,47	74.86	76,91
6	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,25	90,25	90,61
7	Persentase Penduduk Miskin	Persen	24,45	23.87	23,69
8	Gini Rasio	Indeks	0,374	0,366	0,364
9	Total Fertility Rate	Per 1000 Perempuan	30	20	15
10	Indeks Demokrasi	Indeks	51,35	57,45	60,5
11	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,98	5,04	5,06
12	PDRB Per Kapita	Rp.	59.576.217	63.222.758	64.487.213
13	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	4	6	7
14	Laju Inflasi	Persen	5,68	0,79	0,41
15	Indeks Infrastruktur wilayah	Indeks	2,53	2,62	2,64
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	79,05	79,76	80
17	Indeks Resiko Bencana	Kelas Resiko	Sedang	Rendah	Rendah
18	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	51,94	58,26	61,71

Tabel 6. 3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kab. Biak Numfor

Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD		Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1	Laju Inflasi	Persen	5,68	2,94	1,52	0,79	0,41	0,41
1.2	PDRB Per Kapita	Rupiah	59.576.217	60.767.741	61.983.096	63.222.758	64.487.213	64.487.213
1.3	Gini Rasio	Indeks	0,374	0,371	0,369	0,366	0,364	0,364
1.4	Persentase Penduduk Miskin	Persen	24,45	24,26	24,06	23,87	23,69	23,69
1.5	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,85	73,03	73,21	73,39	73,57	73,57
1.6	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10.53	10,64	10,75	10,86	10,97	10,97
1.7	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,5	68,6	68,7	68,8	68,9	68,9
1.9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	69,47	71,26	73,1	74,98	76,91	76,91
1.10	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan	Persen	6,61	6,58	6,59	6,6	6,61	6,61
1.11	Opini BPK	Disclaimer/ WDP / WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1.12	Skor Pola Pangan Harapan	Persen	69,4	69,4	70,8	72,2	73,6	73,6

Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD		Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.13	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Rupiah	4,05	3,99	3,9	4,43	4,37	4,37
1.14	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Rupiah	0,82	0,84	0,84	0,79	0,88	0,88
1.15	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Rupiah	15,07	14,56	14,21	14,85	15,39	15,39
1.16	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Rupiah	17,77	17,96	18,35	18,52	18,17	18,17
1.17	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Rupiah	3,77	3,73	3,68	4,15	4,16	4,16
1.18	Indeks Demokrasi	Persen	51,35	51,35	54,4	57,45	60,5	60,5
1.19	Indeks Pembangunan Gender	Persen	90,25	90,34	90,43	90,52	90,61	90,61
1.20	Nilai AKIP	Nilai/ Predikat	CC	C	B	B	BB	BB
1.22	Persentase Konsistensi RKPD terhadap RPJMD (RPD)	Persen	60	65	70	75	80	80
ASPEK KESEJAHTERAAN SOSIAL								
1. Pendidikan								
1.1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,21	14,26	14,32	14,43	14,3	14,8
2. Kesehatan								
2.1	Total Fertility Rate (TFR)	Per 1.000 perempuan	30	28	25	20	15	15
3. Pangan								

Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD		Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	69,4	69,4	70,8	72,2	73,6	73,6
4. Ketenagakerjaan								
4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	69,47	71,26	73,1	74,98	76,91	76,91
5. Pemberdayaan								
5.3	Presentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	Persen	68	42	83	75	75	75
6. Seni Budaya, Olahraga dan Pemuda								
6.1	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	50	50	70	90	100	100
6.2	Cakupan pembinaan organisasi kepemudaan	Persen	48	48	61	74	87	87
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
Kemampuan Ekonomi Daerah								
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Persen	100,66	101	101	102	103	103
1.2	Net Ekspor Perdagangan dalam dan Luar Negeri	Rupiah	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9
1.3	Pendapatan Per Kapita penduduk	Rupiah	26,13	26,9	27,24	28,62	30	30

Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD		Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.4	Rasio Gini	Indeks	0,374	0,371	0,369	0,366	0,364	0,364
1.5	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Persen	4,05	3,99	3,9	4,43	4,37	4,37
1.6	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	17,77	17,96	18,35	18,52	18,17	18,17
Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
1. Perhubungan								
1.1	Presentase ketersediaan fasilitas pelabuhan penyeberangan dengan saranga prasarana perhubungan laut	Persen	52	58	64	70	76	76
1.2	Ketersediaan sarana perhubungan udara dalam menunjang peningkatan Status bandara	Trayek	72	85	90	90	90	90
2. Listrik Dan Air Bersih								
2,1	Cakupan ketersediaan air minum	Persen	50	55	60	65	70	70
3. Lingkungan Hidup								
3.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	79,76	82,84	79,29	79,52	79,76	79,76
3.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	95,89	95,23	94,76	95,26	95,31	95,31

Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD		Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
3.3	Indeks Resiko Bencana	Kelas Resiko	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah
3.4	Presentase pemantauan kualitas air	Persen	40	50	60	70	80	80
4. Informasi dan Komunikasi								
4.1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	NA	40	45	50	60	60
Iklim Berinvestasi								
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1	Persentase potensi investasi yang teridentifikasi	Persen	60	70	80	90	100	100
1.2	Jumlah event yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Persen	NA	12	12	12	12	12
ASPEK PELAYANAN UMUM								
1.	**Layanan Urusan Wajib Dasar**							
1.1.	Pendidikan							
1.1.1	Angka Partisipasi kasar PAUD	Persen	21,97	23,04	24,17	25,35	26,59	26,59
1.1.2	Angka Partisipasi kasar SD	Persen	108,44	109,5	111,04	112,6	114,18	114,18
1.1.3	Cakupan replikasi Baca Tulis kelas awal siswa SD	Persen	33,3	33,8	34,3	34,8	35,3	35,3
1.1.4	Angka Partisipasi kasar SMP	Persen	89,24	95,65	97,71	99,81	101,95	101,95

Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD		Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.1.5	Angka Partisipasi kasar SMA/SMK	Persen	107,54	102,05	103,05	104,07	105,09	105,09
1.1.9	Cakupan pemenuhan SPM Pendidikan	Persen	60	70	80	90	100	100
1.1.9	Presentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	37,88	38,11	39,14	40,43	41,22	41,22
1.1.6	Rasio Guru dan Murid SD	Persen	01:21,4	01:21,5	01:21,6	01:21,7	01:21,8	01:21,8
1.1.7	Rasio Guru dan Murid SMP	Persen	01:24,5	01:29,4	01:34,3	01:39,2	01:44,1	01:44,1
1.1.8	Presentase Guru yang memiliki Ijazah S-1	Persen	65,21	66,36	69,77	73,18	76,59	76,59
1.2.	Kesehatan							
1.2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 kelahiran hidup	per 1.000	2,3	3	2	1	1	1
1.2.2	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	per 100.000	170	160	150	140	130	130
1.2.3	Rasio tenaga kesehatan sesuai standar SDMK	Persen	61,9	65	70	85	95	95
1.2.4	Cakupan UCI	Persen	66	75	80	85	90	90
1.2.5	Angka Kejadian Malaria (Kasus Lokal)	Persen	9,95	7,93	3,09	1,21	0,47	0,47
1.2.6	Prevalensi HIV	Persen	0,05	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02
1.2.7	Angka Kesakitan	Persen	87,8	15	14,5	14	13	5,8
1.2.8	Prevalensi Stunting	Persen	5,57	7	6	5	4	4

Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD		Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.2.10	Cakupan posyandu buat lansia	Persen	70	75	80	85	90	90
1.2.11	Persentase sarana/ prasarana kesehatan yang memenuhi standar	Persen	70	75	80	85	90	90
1.2.12	Persentase Pengawasan bahan pangan berbahaya obat dan makanan	Persen	70	75	80	85	90	90
1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1.3.1	Pekerjaan Umum							
1.3.1.2	Presentase jalan yang memiliki drainase dalam kondisi baik	Persen	30	35	40	45	50	50
1.3.1.3	Presentase penambahan jalan dalam kondisi baik	Persen	162,21	187,21	212,21	237,21	262,21	262,21
1.3.1.4	Akses sanitasi yang layak	Persen	80	83	86	89	92	92
1.3.1.5	Cakupan ketersediaan air minum	Persen	50	55	60	65	70	70
1.3.1.8	Cakupan bangunan pengaman pantai dan pelindung ruang publik	Persen	35	35	40	45	50	50
1.3.2	Penataan Ruang							
1.3.2.1	Cakupan Rasio pelayanan pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung yang layak	Persen	55	60	65	70	75	75

Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD		Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.3.2.2	Rasio kepatuhan Pengendalian Ruang	Persen	250	250	325	400	475	475
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
1.4.1	Presentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni dan PSU	Persen	572	597	622	647	672	672
1.4.2	Presentase kawasan kumuh yang ditangani	Persen	10	30	50	85	90	90
1.4.3	Presentase RTLH yang ditangani	Persen	1699	1899	2099	2299	2499	2499
1.4.4	Persentasi kepemilikan tanah negara dan RTH Publik /pemakaman yang tertangani	Persen	57	65	70	75	80	80
1.5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Mayarakat							
1.5.1	Presentase penyelesaian pelanggaran K3	Persen	77	82	87	90	93	93
1.5.2	Persentase pencegahan dan penanggulangan bencana	Persen	55	65	70	75	80	80
1.5.3	Persentase bencana yang tertangani	Persen	65	70	75	80	85	85
1.5.4	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	Persen	50	50	50	50	50	50
1.5.5	Presentase ormas yang terdaftar mendapatkan pembinaan	Persen	50	50	50	50	50	50
1.6.	Sosial							

Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD		Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.6.1	Presentase KAT yang mendapatkan pelayanan sosial	Persen	73	50	75	75	75	75
1.6.2	Presentase pemenuhan kebutuhan dasar PPKS	Persen	50	30	75	75	75	75
1.6.3	Presentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	Persen	68	42	83	75	75	75
1.6.4	Cakupan pemeliharaan TMP	Persen	10	20	20	20	10	10
2.	**Layanan Urusan Wajib Non Dasar**							
2.1.	Tenaga Kerja							
2.1.1	Jumlah lulusan LLK-UKM Tenaga Kerja Terampil Siap Pakai	Orang	472	384	368	368	368	1960
2.1.2	Presentase tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan	Orang	19,11	7,35	8	9,1	10	10
2.1.3	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	Perusahaan	0	0	10	20	30	60
2.2.	Pangan							
2.2.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	69,4	69,4	70,8	72,2	73,6	73,6
2.3.	Lingkungan Hidup							
2.3.1	Presentase pemantauan kualitas air	Persen	40	50	60	70	80	90

Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD		Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
2.3.2	Indeks Kualitas Udara	Persen	94,66	94,71	94,76	95,26	95,31	95,31
2.3.3	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persen	30	30	35	40	45	50
2.3.4	Persentase sampah yang terkelola	Persen	73	72	71	70	70	70
2.4.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
2.4.1	Rasio penduduk Ber KTP	Persen	66,32	73,06	79,79	86,53	93,26	93,26
2.4.2	Cakupan penerbitan KTP elektronik	Persen	90	95	95,1	95,12	95,13	95,13
2.4.3	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	87,5	88	88,05	88,1	88,13	88,13
2.5.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
2.5.1	Indeks Desa Membangun	Persen	0,5719	0,5719	0,5801	0,5885	0,5969	0,5969
2.5.2	Presentase penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung yang tertib	Persen	55	60	65	70	75	75
2.5.3	Presentase kampung yang memiliki kelembagaan adat yang aktif	Persen	65	70	75	80	85	85
2.6.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							

Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD		Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
2.6.1	Total Fertility Rate TFR	Persen						
2.6.3	Presentase peserta KB aktif	Persen	52,22	52,45	52,75	53	53,5	53,5
2.6.4	Presentase Anggota UPPKS yang aktif	Persen	3	4,55	6,75	8,55	10	10
2.7.	Perhubungan							
2.7.1	Cakupan layanan transportasi	Persen	50	55	60	65	70	70
2.7.2	Ketersediaan perlengkapan jalan dan rambu-rambu	Persen	63	68	73	78	83	83
2.7.3	Rasio kendaraan uji dengan kendaraan wajib uji	Persen	73	80	87	94	100	100
2.7.4	Presentase ketersediaan fasilitas pelabuhan penyeberangan dengan saranga prasarana perhubungan laut	Persen	52	58	64	70	76	76
2.7.5	Ketersediaan sarana perhubungan udara dalam menunjang peningkatan Status bandara	Persen	72	85	90	90	90	90
2.8.	Komunikasi dan Informatika							
2.8.1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	60	70	80	90	100	100

Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD		Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
2.8.2	Presentase informasi dan komunikasi publik yang dipelihara serta dikelola.	Persen	63	70	77	84	91	91
2.8.3	Persentase OPD yang terhubung jaringan internet yang disediakan pemda	Persen	70	75	80	85	90	90
2.9.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah							
2.9.1	Presentase akses UMKM ke layanan keuangan	Persen	10	15	20	25	30	30
2.9.2	Persentase pertumbuhan UMKM	Persen	10	15	20	25	30	30
2.9.3	Jumlah pengurus koperasi yang terlatih	Orang	15	30	40	50	60	60
2.9.4	Jumlah koperasi yang mendapatkan stimulan	Unit	10	15	20	25	30	30
2.9.5	Cakupan Usaha Mikro dan Kecil yang mandiri	Persen	1,28	2	2,5	3	3,5	3,5
2.9.6	Persentase koperasi aktif	Persen	71	72	73	74	75	75
2.10.	Penanaman Modal							
2.10.1	Persentase potensi investasi yang teridentifikasi	Persen	60	70	80	90	100	100
2.10.2	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan	Persen	87,14	87,84	88,54	89,24	89,94	90
2.10.3	Cakupan usaha yang dipantau, dibina dan diawasi	Persen	26	42	57	72	87	90

Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD		Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
2.11.	Kepemudaan dan Olah Raga							
2.11.1	Presentase Pemuda Terampil	Persen	48	48	61	74	87	87
2.11.2	Presentase Prasarana Olahraga yang berstandar Nasional dan Internasional	Persen	50	50	70	90	100	100
2.11.3	Cakupan pembinaan organisasi kepemudaan	Persen	48	48	61	74	87	87
2.11.4	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	50	50	70	90	100	100
2.13.	Statistik							
2.13.1	Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam perencanaan	Persen	60	70	80	90	100	100
2.14.	Kebudayaan							
2.14.1	Persentase Benda, Situs, Kawasan yang dilestarikan	Persen	60	70	75	80	85	85
2.14.2	Jumlah sanggar seni budaya asli biak yang aktif	Sanggar	41	41	42	42	43	43
2.14.3	Jumlah cagar budaya yg dilestarikan	Jumlah	85	87	89	91	93	93
2.15.	Kearsipan							
2.15.1	Presentase OPD yang menggunakan arsip digital	Persen	0	62	62	72	82	82
2.16.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							

Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD		Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
2.16.1	Keterwakilan perempuan di DPRD	Persen	28	28	28	32	32	32
2.16.2	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Persen	20	59	76	80	90	90
2.16.3	Rasio kekerasan terhadap anak	Persen	50,45	50,65	50,7	65	75,3	75,3
3.	**Layanan Urusan Pilihan**							
3.1	Pariwisata							
3.1.1	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	2	3	4	4	4	4
3.1.2	Jumlah event yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Jumlah	NA	12	12	12	12	12
3.1.3	Obejek Wisata Unggulan yang Berkembang	Jumlah	2	2	2	3	3	3
3.1.4	Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata	Jumlah	NA	23	23	23	23	23
3.2	Pertanian							
3.2.2	Nilai Tukar Petani (NTP)	Persen	100,66	101	101	102	103	103
3.2.3	Cakupan teknologi pertanian tepat guna yang diterapkan	Persen	77	78	80	85	90	100
3.2.4	Produktifitas hasil ternak besar/kecil/unggas	Persen	2.278,21	2.387,21	2.506,65	2.693,38	2.784,42	2.784,42
3.2.5	Persentase Penyuluh Per kampung	Persen	33,4	35	38,9	42,8	46,6	46,6

Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD		Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
3.2.6	Cakupan penanggulangan dan Pencegahan penyakit ternak	Persen	75	80	85	90	95	95
3,3	Perdagangan							
3.3.1	Net Ekspor Perdagangan dalam dan Luar Negeri	Rupiah	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9
3.3.2	Cakupan pasar rakyat yang fungsional	Persen	37,5	37,5	37,5	39,38	41,35	41,35
3.3.3	Cakupan pengawasan peredaran komoditas perdagangan	Persen	20	25	30	35	40	40
3.3.4	Cakupan pengendalian inflasi	Persen	60	70	80	90	100	100
3,4	Perindustrian							
3.4.1	Cakupan Industri kecil dan Menengah yang terbina	Persen	82,97	87,12	91,476	91,476	91,476	91,476
3.4.2	Kawasan sentra industri rakyat yang berfungsi	Persen	1	1	1	1	1	1
3,5	Kelautan dan Perikanan							
3.5.1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	8,231	9,231	11	12,5	15	15
3.5.2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	94,801	96.301	97.801	99.301	100.801	101
3.5.3	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/ Kapita/ Tahun	50,12	65	68	70	75	75
4.	**Layanan Penunjang Urusan**							

Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD		Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
4.1	Perencanaan Pembangunan							
4.1.1	Presentase konsistensi program RKPD terhadap RPJMD (RPD)	Persen	60	65	70	75	80	80
4.1.2	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persen	60	65	70	75	80	80
4.2	Keuangan							
4.2.1	Opini BPK	Disclaimer/ WDP / WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.2.2	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
4.2.3	Rasio belanja modal terhadap total belanja APBD	Persen	0	12,62	13,57	14,44	15,37	15,37
4.3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan							
4.3.1	Indeks Merit Sistem	Buruk/ Kurang/ Baik/ Sangat Baik	2124	799	500	500	325	100%
4.3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	2894	860 (30%)	860 (30%)	674 (23%)	500 (17%)	100%
4.4	Penelitian dan Pengembangan							
4.4.1	Total riset dan inovasi daerah yang dihasilkan	Jumlah	0	5	10	15	20	20
4.6	Pengawasan							

Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD		Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
4.6.1	Presentase tindak lanjut LHP	Persen	42,05	49,64	57,23	64,82	72,41	72,41
4.7	Administrasi Pemerintahan							
4.7.1	Penyusunan LKIP Tepat Waktu	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
4.7.2	Nilai LPPD	Tinggi/ Sedang/ Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
4.7.3	Jumlah produk hukum daerah yang di tetapkan	Jumlah	5	9	13	17	21	21
4.8.	Sekretariat Dewan							
4.8.1	Jumlah Perda yang dihasilkan	Perda	7	7	7	7	7	28
4.8.2	Jumlah Raperda yang ditetapkan menjadi Perda	Persen	60	65	70	75	80	80

BAB VII
PENUTUP

"Menjelaskan bagaimana RKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan tematik yang selarah terhadap tema nasional maupun Provinsi Papua yaitu Memperkuat Daya Saing Daerah Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Demi Terwujudnya Biak Numfor Yang Mandiri dan Sejahtera."

BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 melandasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, selain itu secara substansial prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 menyelaraskan dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023-2043, berbagai isu strategis dan permasalahan pembangunan pada lingkup lokal, nasional, hingga global.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Biak Numfor dilakukan secara sistematis, terpadu dan terarah serta tanggap terhadap perubahan, yang penyusunannya dilakukan untuk mewujudkan sinergitas perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunn serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya alam dalam pembangunan daerah.

RKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 adalah dokumen operasional dari RPD 2024-2026 dan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan tematik yang selaras terhadap tema nasional maupun Provinsi Papua yaitu **Memperkuat Daya Saing Daerah Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Demi Terwujudnya Biak Numfor Yang Mandiri dan Sejahtera.** Penyusunan dokumen RKPD dengan berdasarkan pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah agar lebih efektif dan optimal dalam mencapai sasaran pembangunan.

Dokumen RKPD digunakan sebagai dasar dalam pengendalian pembangunan jangka menengah dalam RPD dan jangka tahunan (untuk 2025). Dokumen ini juga sebagai dasar bagi seluruh pemangku kepentingan yang berkepentingan dalam memantau pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh Kabupaten Biak Numfor tahun 2025.

Dengan demikian akan terwujud dokumen perencanaan yang konsisten dan saling berkaitan serta mensejahterakan masyarakat. Keberhasilan implementasi pelasaksanaan RKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten

Biak Numfor mengajak seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, mengawal, dan melaksanakan RKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 ini dengan sebaik- baiknya demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Biak Numfor.

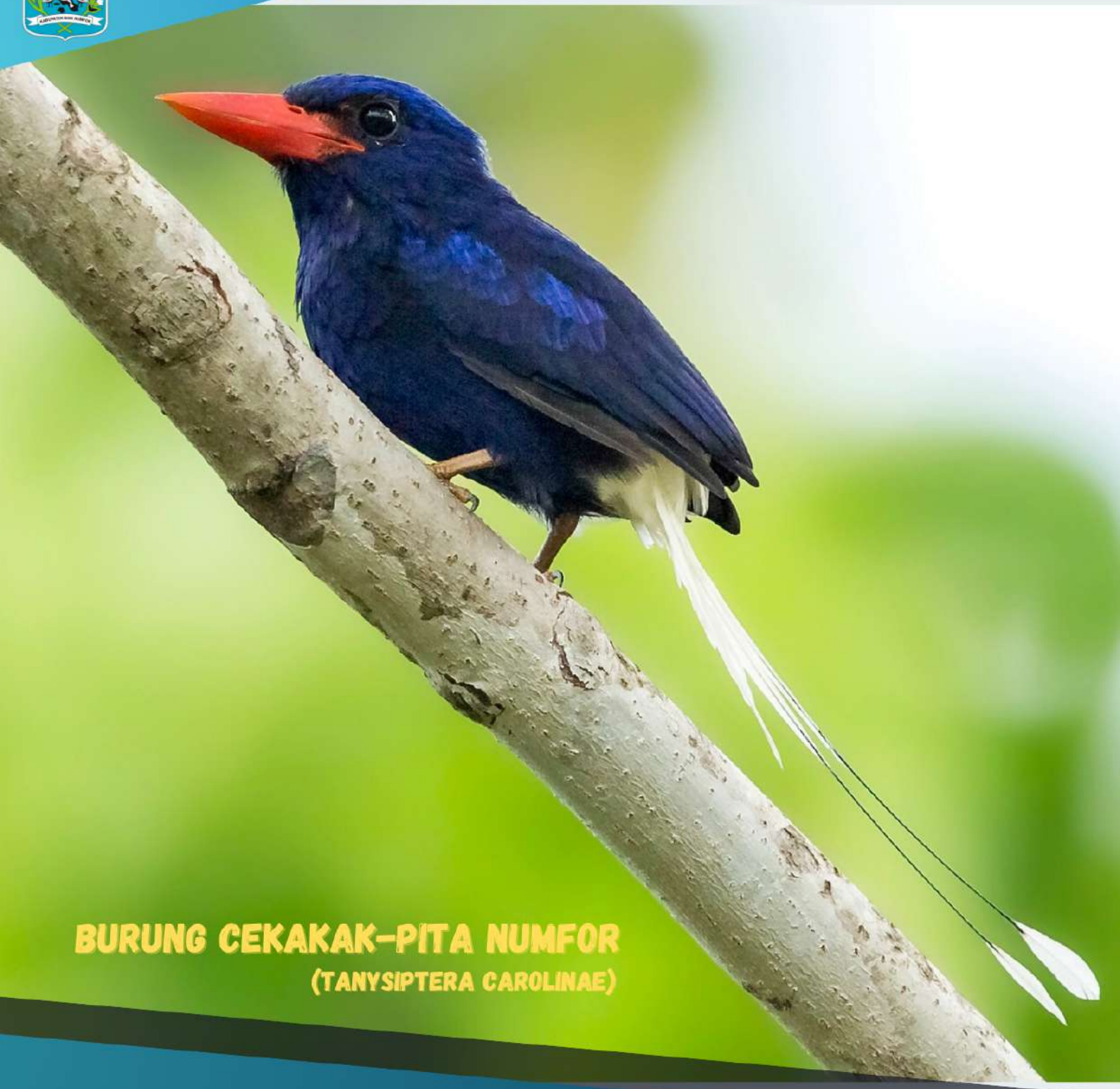

BURUNG CEKAKAK-PITA NUMFOR

(TANYSIPTERA CAROLINAE)

SELAYANG PANDANG BURUNG ENDEMIK BIAK

CEKAKAK-PITA NUMFOR (TANYSIPTERA CAROLINAE) ATAU SERING DISEBUT "BURUNG MAMPISASYO" OLEH MASYARAKAT LOKAL DI BIAK NUMFOR ADALAH SALAH SATU JENIS BURUNG CEKAKAK YANG MASUK DALAM KELUARGA ALCEDINIDAE. JENIS INI MERUPAKAN SATU-SATUNYA CEKAKAK PITA YANG ADA DI PULAU NUMFOR.

BURUNG CEKAKAK-PITA NUMFOR MEMPUNYAI CUKUP EKOR YANG CUKUP PANJANG, BURUNG DEWASA BERUKURAN SEKITAR 34 HINGGA 38 CM (13 HINGGA 15 INCI) SAMPAI DENGAN UJUNG BULU EKORNYA. CIRI-CIRI DARI BURUNG INI ADALAH MEMILIKI BAGIAN ATAS BERWARNA BIRU KEUNGUAN DAN BAGIAN BAWAH BERWARNA SERUPA, DENGAN PUNGGUNG BAWAH, PANTAT, DAERAH PERUT, DAN EKOR BERWARNA PUTIH. IRISNYA BERWARNA COKELAT, PARUHNYA BERWARNA MERAH, DAN TUNGKAI SERTA KAKINYA BERWARNA COKELAT KEHIJAUAN. BURUNG MUDA MEMILIKI BULU UNGU-BIRU KUSAM DENGAN BAGIAN BAWAH BERWARNA MERAH KARAT DAN KREM, PANTAT BERWARNA PUTIH, DAN EKOR BERWARNA KEHITAMAN. BURUNG BETINA SERUPA DENGAN BURUNG JANTAN.

BURUNG CEKAKAK-PITA NUMFOR HANYA DITEMUKAN DI PULAU NUMFOR, SEBUAH PULAU SELUAS 335 KM2 (129 MIL PERSEGI) DI GUGUSAN PULAU BIAK DI LEPAS PANTAI BARAT LAUT PROVINSI PAPUA, INDONESIA. HABITAT KHASNYA ADALAH HUTAN, HUTAN RINGAN, LAHAN PERTANIAN, DAN VEGETASI PESISIR. TAMPAKNYA BURUNG-BURUNG INI BERASAL DARI BEBERAPA BURUNG T. GALATEA PENDIRI YANG TIBA DI PULAU ITU DAN MENJADI TERISOLASI DARI BURUNG-BURUNG DARATAN. MEREKA KEMUDIAN MENGALAMI "REVOLUSI GENETIK". TIDAK ADA FAKTOR BIOTIK TERTENTU YANG TERLIBAT, TETAPI ADA VARIASI YANG CUKUP DI ANTARA BURUNG-BURUNG PENDIRI UNTUK MENDORONG SPESIASI, DAN BERMACAM-MACAM GEN YANG DITERIMA BURUNG-BURUNG ITU KEMUDIAN TIDAK TERGANGGU OLEH MASUKNYA GEN ASING LEBIH LANJUT.

https://bappeda.biakkab.go.id

@bappedabiak22

+6281299165164

bappedabiak

@bappedabiak